

Imamudin Yuliadi

# TEORI EKONOMI MAKRO

Pendekatan Ekonomi Islam



**TEORI EKONOMI MAKRO**  
**Pendekatan Ekonomi Islam**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Imamudin Yuliadi; **TEORI EKONOMI MAKRO Pendekatan Ekonomi Islam**

Yogyakarta : 2016  
184 hal.; 17 X 24 cm  
Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 2016

ISBN : 978-502-7577-80-0

Hak Cipta 2016 pada Penulis

© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit*

Penulis : Imamudin Yuliadi  
Desain Cover : Yusuf Arifin  
Dicetak : Danisa Media / 0852 9009 6000



## TEORI EKONOMI MAKRO Pendekatan Ekonomi Islam



**Imamudin Yuliadi**, Dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY). Penulis meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1990, Gelar Magister Sains (M.Si) diraih dari program pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2001 dan meraih gelar Doktor

dari program pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) tahun 2006 dengan predikat *Cum laude*. Pernah mengikut berbagai kegiatan ilmiah baik sebagai peserta maupun pembicara dalam forum seminar nasional dan internasional. Jabatan struktural yang pernah dilakukan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan FEB UMY, Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi FEB-UMY, Wakil Direktur Program Pascasarjana UMY dan Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi FEB UMY. Penulis juga asesor BAN PT dan reviewer penelitian DP2M Dikti Kemenristek. Penulis sebagai anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Bidang konsentrasi penulis teori ekonomi mikro dan makro, ekonomi Islam, Perekonomian Indonesia dan ekonomi moneter. Buku yang sudah diterbitkan oleh penulis adalah :

1. Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan
2. Ekonomi Moneter
3. Ekonometrika Terapan
4. Ekonomi Islam Filosofi Teori dan Implementasi



LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

ISBN 978-602-7577-80-0



9 786027 577800

# **BAB I**

## **KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM**

### **1.1. Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi Islam**

Ilmu ekonomi menjelaskan tentang bagaimana usaha manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan yang kecenderungannya terus bertambah pada berbagai alternatif penggunaan sumberdaya yang relatif terbatas. Timbul sebuah wacana apakah ilmu ekonomi bergerak dalam dataran „normatif“ atau „positif“ artinya menjelaskan perilaku individu dan masyarakat dalam koridor „apa yang seharusnya,“ atau „apa adanya“ sebagai seorang makhluk hidup yang memiliki hasrat, keinginan, kebutuhan, dsb. Kajian ilmu ekonomi modern yang dikembangkan dari tradisi masyarakat barat menggunakan asumsi rasionalitas dan obyektif apa adanya, sementara ada sebagian masyarakat yang melakukan kritik dan evaluasi terhadap kondisi dan perilaku ekonomi yang menunjukkan gejala-gejala destruktif sehingga muncul beberapa gagasan tentang konstruksi ilmu ekonomi alternatif yang dibangun dengan asumsi, norma dan asumsi yang berbeda meskipun dalam beberapa hal bersifat komplementer karena memang sudah disinggung dalam perkembangan ilmu ekonomi modern. Disamping itu juga ilmu ekonomi modern juga berkembang cukup pesat seiring dengan perkembangan dinamika ekonomi dan tuntutan masyarakat sendiri yang mulai sadar tentang pentingnya memasukkan aspek-aspek lingkungan, kelembagaan, dsb yang mempengaruhi keputusan individu dan masyarakat. Perkembangan terkini tentang ilmu ekonomi publik, ekonomi lingkungan, ekonomi pembangunan, ekonomi internasional, ekonomi sumber daya alam dan energi, dsb menunjukkan bagaimana ilmu kehidupan yang lebih sejahtera di tengah-tengah asumsi keterbatasan (scarcity) sumber daya ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi modern menjadi semakin nyata dengan berkembangnya alat analisis dan model ekonomi dengan pendekatan statistik yang semakin kompliked sehingga memungkinkan melakukan analisis dengan memasukkan berbagai variabel ekonomi dalam model.

Perkembangan ilmu ekonomi Islam menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat seiring dengan aktivitas pendidikan, penelitian dan pertemuan ilmiah yang melibatkan pakar ekonomi Islam baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Persepsi tentang konfigurasi ilmu ekonomi Islam ada perbedaan antara para ahli ekonomi Islam itu sendiri karena menyangkut aspek-aspek yang dimasukkan dalam ekonomi Islam baik dari sisi keilmuan maupun implementasi kebijakan. Dari sisi keilmuan format ekonomi Islam

berkembang selaras dengan prinsip-prinsip metodologi ilmiah yang berjalan dalam bingkai kebenaran objektif suatu ilmu dengan beberapa asumsi-asumsi.

Perkembangan ekonomi Islam menunjukkan kecenderungan terus meningkat seiring dengan perkembangan minat dan animo masyarakat berinteraksi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank Islam, asuransi Islam, pegadaian Islam dan pasar modal syariah. Fenomena ini juga ditunjang dengan berkembangnya dunia pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi dan konsentrasi ekonomi dan perbankan Islam baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).

Implementasi nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sistem yang diterapkan dalam suatu komunitas baik rumah tangga, masyarakat maupun negara. Sistem ekonomi Islam dapat berjalan dalam suatu komunitas yang dikembangkan nilai-nilai Islami baik dari sisi kelembagaannya maupun sistem sosialnya. Sehingga untuk mewujudkan tatanan ekonomi Islam tidak cukup hanya sekedar mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah saja tetapi juga harus menyangkut pengembangan dari aspek manusianya sebagai subyek dan obyek dalam sistem ekonomi tersebut.

## **1.2. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam<sup>1</sup>**

Diskursus ilmu ekonomi Islam dalam beberapa forum ilmiah mengalami perkembangan perspektif dan model pendekatan keilmuannya. Definisi ekonomi Islam dalam khasanah keilmuan ada beberapa pandangan para ahli namun secara substansif ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Jadi dalam definisi ini menekankan perlunya prasyarat adanya masyarakat yang sadar dan menerapkan nilai Islami dalam kehidupannya. Perilaku masyarakat Islami akan mendorong terwujudnya perilaku kehidupan ekonomi yang Islami pula. Jadi dalam hal ini definisi yang lebih lengkap musti mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Implikasinya ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang selalu mempertimbangkan bingkai syariah. Jadi

---

<sup>1</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1976, *Muslim Economic Thinking A Survey of Contemporary Literature*, p. 191, dalam Khursid Ahmad, 1976, *Studies in Islamic Economics*, Jeddah, International Centre for Research in Islamic Economics

definisi ekonomi Islam yang tanpa memasukkan nilai Islam sebagai sistem kehidupan yang integral dan komprehensif secara filosofis mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.<sup>2</sup>

Dinamika perkembangan ilmu dan diskursus ekonomi menghasilkan beberapa pemikiran dan rumusan mengenai definisi ekonomi Islam. Beberapa cendekiawan muslim telah mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. *Hasanuzzaman (1984)* mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “*ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumberdaya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat*”. Definisi ini menekankan bahwa ekonomi Islam mendorong peningkatan efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas dalam kerangka untuk memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah SWT.
2. *Muhammad Abdul Mannan (1986)* mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “*Ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam*”. Definisi ini menjelaskan mengenai fenomena bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari kajian ilmu-ilmu sosial tentang perilaku masyarakat dalam ekonomi ditinjau dari perspektif nilai-nilai Islami.
3. *Khurshid Ahmad (1992)* mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “*Suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam*” , maksudnya adalah merupakan bagian dari upaya menjelaskan permasalahan ekonomi dan bagaimana perilaku manusia dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dari perspektif Islam.
4. *Nejjatullah Siddiqie (1992)* mendefinisikan ekonomi Islam dengan “*Tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada jamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empirik*” artinya bahwa ekonom Islam merupakan pandangan cendekiawan muslim tentang permasalahan ekonomi kontemporer yang dihadapi dan bagaimana solusinya dalam perspektif Islam.

---

<sup>2</sup> Muhammad Umer Chapra, *Ibid*, hal. 99

<sup>3</sup> Lihat Imamudin Yuliadi, 2007, *Ekonomi Islam Filosofi Teori dan Implementasi*, LPPI, Yogyakarta

5. Khan (1994) mendefinisikan ekonomi Islam “Suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumberdaya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi” maksudnya ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk mempelajari pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip kerjasama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Chapra (1996) ekonomi Islam adalah : “Cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis”. Definisi ini menekankan tentang fungsi ilmu ekonomi Islam sebagai studi untuk menjelaskan alokasi dan distribusi dari penggunaan sumber daya ekonomi yang langka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari pandangan para ahli ekonomi tentang ekonomi Islam tersebut mengungkapkan adanya beberapa kesamaan gagasan tentang implementasi nilai-nilai dasar Islam dalam praktek dan perilaku ekonomi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan hidup yang sesungguhnya (falaah). Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang menarik untuk didiskusikan adalah rumusan definisi ekonomi menurut Hasanuzzaman yaitu “Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat (*Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari’ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society*)”.

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah “perolehan” dan “pembagian” dimana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Jadi definisi ekonomi Islam tersebut ada unsur imperatif dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas yaitu dengan mencegah perilaku destruktif seperti monopoli kekayaan yang akan menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.<sup>4</sup> Prinsip ini berdasarkan suatu kenyataan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT dan harus digunakan sesuai dengan aturan dari Allah SWT untuk kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari

---

<sup>4</sup> Hasanuzzaman, 1981, *The Economic Functions of The Early Islamic State*, Karachi, International Islamic Publisher, hal. 52

ketidakadilan dalam rumusan tersebut adalah syariah yang didalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Karena salah satu prinsip dalam penegakkan syariah adalah bahwa otoritas mutlak hanyalah milik Allah sehingga manusia tinggal melaksanakan perintah dan aturan dan menjauhi semua larangannya tersebut. Pesan Allah SWT dalam Al-Qur'an mengandung makna terciptanya kehidupan manusia yang ideal, seimbang, harmonis sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Pengertian "memberikan kepuasan terhadap manusia" dalam definisi di atas merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai yaitu tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat baik moril maupun materiil. Sedangkan pengertian "memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" hal ini diartikan dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah SWT di muka bumi dan sekaligus sebagai khalifah untuk memakmurkan kehidupan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

#### **1.4. Asumsi Dasar Ekonomi Islam**

Asumsi dasar ekonomi Islam berpijak pada tujuan yang akan diwujudkan dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Assunnah yaitu :

1. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan pendapatan pada individu atau sekelompok masyarakat yang menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
2. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) yang mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan bagi setiap individu
3. Kesamaan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan
4. Mendorong terwujudnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja
5. Mendorong masyarakat taat pada nilai-nilai moral dan aturan yang berlaku untuk terwujudnya kehidupan yang tertib dan teratur

Ekonomi Islam memiliki beberapa ciri khas dan nilai-nilai dasar baik dalam dataran konsep maupun operasionalnya yang dibangun atas asumsi dasar ekonomi Islam meliputi : <sup>5</sup>

##### *1. Naluri manusiawi*

Pada analisis ekonomi konvensional diasumsikan bahwa aktivitas ekonomi didorong oleh keinginan atau motivasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka

---

<sup>5</sup>Arif Hassan and Khaliq Ahmad, 2000, *Perception of Justice and Fairness in Allocation of Organizational Resources Examining Cultural Differences*, IIUM Journal, Volume 8, No. 1, p. 3 dan juga Muhammad Nejatullah Siddiqi, Ibid, hal. 191

memaksimalkan kepuasan dan mencapai kesejahteraan ekonomi baik individu maupun masyarakat. Dalam konteks ekonomi makro ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Meskipun dalam realitas seringkali menunjukkan adanya kontradiksi dan tradeoff antara satu tujuan dengan tujuan lain sehingga menimbulkan problem ekonomi antara pertumbuhan dan pemerataan, antara efisiensi dan keadilan, dsb.

Realitas menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang memiliki keinginan dan kebutuhan selalu berusaha bagaimana dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan karena sifatnya saling melengkapi bukan saling mengganti. Islam memandang kaitan antara individu dan masyarakat bahwa kehidupan bermasyarakat ibarat seperti kehidupan dalam “*satu bangunan/tubuh yang satu sama lain saling mendukung dan memperkuat*”, sehingga kehidupan ekonomi harus didorong untuk selalu menumbuhkan iklim kerjasama saling menolong baik dalam skala lokal, regional maupun global.

Secara lahiriah sebagai makhluk hidup manusia hadir sebagai sosok yang selalu berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidupnya melalui berbagai bentuk upaya dan aktivitas sebagai ekspresi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup jasmaniah (*haayatul „udhlowiyah*) maupun kebutuhan naluriah (*ghorizah*). Setiap individu akan terus berusaha meningkatkan kesejahteraan hidupnya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dsb. Pada sisi lain individu juga berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan rohaniah seperti kebutuhan diperhatikan, terbebas dari rasa takut, kecemasan, dsb untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang harmonis. Upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup jasmaniah (*haayatul „udhlowiyah*) maupun kebutuhan naluriah (*ghorizah*) jika tidak dibimbing oleh ajaran agama cenderung akan melahirkan sikap dan perilaku yang menyimpang seperti mencuri, menipu, merampok, memperkosa, menindas, melanggar hak asasi manusia (HAM), membunuh, berzina, dsb. Karena pada sisi lain manusia juga mempunyai dorongan nafsu yang jika tidak dikendalikan oleh nilai-nilai Islam akan cenderung berbuat kerusakan.

Di sinilah pentingnya selalu melakukan pembinaan individu berdasarkan prinsip-prinsip Islam secara kontinyu dan berkesinambungan agar sikap dan perilaku untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmaniah (*haayatul „udhlowiyah*) maupun kebutuhan naluriah (*ghorizah*). Kualitas kepribadian seseorang pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana aktivitas hidup yang dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup jasmaniah (*haayatul „udhlowiyah*) maupun kebutuhan naluriah (*ghorizah*) tersebut. Ada dua aspek yang menentukan kualitas kepribadian seseorang yaitu kualitas berpikir dalam memahami setiap

fenomena sosial dan alam yang terjadi (*„aqliyah*) serta bagaimana aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup tersebut (*nafsiyah*). Islam memandang kualitas seseorang bukan dari bentuk fisik rupa dan badannya melainkan kemampuan cara berpikir dan pola tingkah lakunya yang didasarkan pada *aqidah Islamiyah*.<sup>6</sup>

## 2. Materi<sup>7</sup>

Materi adalah ciptaan Allah SWT yang tunduk dan patuh kepada aturan-Nya, sehingga semua bentuk pemanfaatan dan penggunaannya harus sesuai dengan yang telah digariskan dalam Al-Qur’an dan Assunnah. Realitas menunjukkan bahwa pandangan sekuleristik dan materialistik cenderung mendominasi perilaku masyarakat modern sekarang dimana semua aktivitas ekonomi senantiasa diukur dengan variabel-variabel yang bersifat materialistik. Pandangan hidup yang serba materi tanpa dibimbing dengan nilai Islam akan melahirkan sikap dan perilaku individu dan masyarakat yang serba materialistik sehingga berpotensi memunculkan berbagai dampak kerusakan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan di dunia ini. Tragedi kehidupan dan kerusakan tatanan sosial dan lingkungan seperti pencemaran lingkungan (*pollution*), perdagangan manusia (*trafficking*), perdagangan narkoba, kebakaran hutan, prostitusi, perjudian, manipulasi proyek (*mark up*), korupsi, dsb merupakan potret kehidupan ekonomi yang lahir dari paradigma kehidupan materialistik yang tercerabut dari akar nilai transedental yaitu nilai-nilai Islami.

## 3. Kepemilikan<sup>8</sup>

Materi yang ada di bumi ini adalah milik Allah SWT sehingga kepemilikan yang sesungguhnya hakekatnya adalah milik Allah SWT. Pandangan kapitalisme dan materialisme mengungkapkan bahwa kepemilikan bersifat mutlak milik seseorang. Konsekuensinya mereka bebas dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ekonomi bagi kepentingannya dalam bentuk kegiatan produksi, konsumsi, investasi dan distribusi pada berbagai sektor ekonomi tanpa terikat dengan prinsip nilai-nilai transedental. Prinsip ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu kebebasan dalam mendapatkan dan menggunakan hak milik individu. Hal ini berangkat dari suatu anggapan bahwa barang yang dimiliki adalah mutlak miliknya sebagai hasil dari jerih payahnya bekerja keras membanting

---

<sup>6</sup> Ismail Yusanto, 2000, *Islam Ideologi Refleksi Cendekiawan Muda*, Al-Izzah, Jakarta, hal. 115

<sup>7</sup> Muhammad Nejjatullah Siddiqi, Ibid, p. 243

<sup>8</sup> Dr. Zubair Hasan, 1988, *Distributional Equity in Islam*, dalam Munawar Iqbal, 1988, *Distributive Justice and Need Fulfillment in An Islamic Economy*, Islamabad, International Centre of Islamic Economic, p. 35

tulang memeras otak. Kebebasan dalam memiliki dan menggunakan barang merupakan bagian hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati dan dilindungi oleh undang-undang.

Islam memandang bahwa kepemilikan yang sebenarnya adalah milik Allah SWT. Karena Dialah yang telah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Sehingga manusia dalam mengelola dan menggunakan semua bentuk materi harus selalu dalam bingkai syariah, tidak boleh hanya semata-mata pertimbangan untung-rugi tanpa memperhatikan tuntunan syariat. Syariah Islam memuat perintah dan larangan dalam setiap aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai hamba Allah SWT. Kebebasan individu dalam mengelola dan menggunakan kepemilikan dibatasi oleh aturan syariah, sehingga tidak ada kebebasan tanpa batas tetapi semuanya dibatasi oleh aturan syariah Islam. Implikasi yang ditimbulkan dari sikap hidup seperti ini akan melahirkan perilaku hidup masyarakat yang sadar bahwa semua tindakannya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat baik menyangkut bagaimana mencari kekayaan maupun menggunakannya, sehingga akan berusaha untuk selalu mengikuti aturan-aturan syariah khususnya dalam persoalan penggunaan kepemilikan.

#### 4. *Universalisme*<sup>9</sup>

Kebebasan individu merupakan implikasi dari kebebasan berekspresi pada masyarakat Barat yang menempatkan kebebasan sebagai hal utama dalam hidup. Namun seringkali kebebasan tersebut tidak dirangkai dengan prinsip-prinsip normatif dalam kehidupan itu sendiri yang mengungkapkan tentang perlunya menjaga keseimbangan dalam konteks kehidupan manusia modern. Munculnya paham liberalisme dan individualisme merupakan respon terhadap dominasi teks agama agama yang tidak sejalan dengan temuan empiris, sehingga terjadi kontradiksi antara dogma agama dan ilmu. Paham kapitalisme awal mula munculnya yaitu sejak *Adam Smith* yang menekankan pentingnya kebebasan individu untuk menentukan pilihan terbaiknya. Tiap individu mempunyai kemampuan dalam mengatur dan mengelola secara mandiri pilihan terbaiknya (*self adjustment*). Karena dia punya keyakinan bahwa dari kebebasan individu ini akan mendorong lahirnya inovasi dan kreatifitas yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya paham *merkantiisme* memberikan inspirasi untuk membangun sebuah negara yang kuat melalui kerjasama perdagangan (*kongsi*) antara para saudagar dengan penguasa. Semangat *chauvinistik* melahirkan aktivitas ekonomi untuk memupuk kekayaan negara meskipun dengan melakukan praktek ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan

---

<sup>9</sup> Loc-cit

pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti perbudakaan, penjajahan, penindasan antar golongan dan negara, dsb.

Islam memandang bahwa manusia pada hakekatnya merupakan satu kesatuan kehidupan yang besar karena semua umat manusia berasal dari satu keturunan yaitu nabi Adam as. Allah SWT sebagai pencipta atas alam semesta ini menyediakan semua sarana yang tersedia diperuntukkan bagi kesejahteraan semua umat manusia bukan hanya untuk satu golongan masyarakat atau satu bangsa tertentu. Pandangan ini yang kemudian melahirkan perilaku ekonomi yang ramah dan simpatik karena aktivitas ekonomi senantiasa dibangun dengan prinsip saling tolong menolong dan saling membantu. Islam melarang setiap bentuk aktivitas ekonomi yang sifatnya merusak dan merugikan orang lain seperti transaksi narkoba, prostitusi, perjudian, penipuan, manipulasi proyek, korupsi dll.

### **I.5. Arti dan Hakekat Ekonomi Islam<sup>10</sup>**

Ekonomi Islam adalah syariat Islam dalam aspek ekonomi yang menyangkut cara bagaimana kebutuhan hidup material manusia dapat terpenuhi. Allah SWT telah menciptakan sumber-sumber kehidupan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia agar terwujud kesejahteraan hidup yang baik (masalah). Kehidupan yang masalah dirumuskan oleh Muhammad Syatibi dengan fungsi dan tujuan diturunkannya syariat (maqhashidus Syariah) yang mencakup:

1. Perlindungan terhadap kehidupan (hifdhun Nafs)
2. Perlindungan terhadap kekayaan (hifdhul Maal)
3. Perlindungan terhadap agama dan keimanan (hifdhud Dien)
4. Perlindungan terhadap akal (hifdhul „Aql)
5. Perlindungan terhadap keturunan (hifdhun Nasl)

Jadi syariat Islam diturunkan dalam rangka menjaga kehidupan manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Allah SWT menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan umat manusia dan secara potensial alam telah menyediakan sumber daya alam secara cukup guna dieksploitasi bagi kepentingan kehidupan manusia. Manusia dituntut dapat mengelola sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab dan perhitungan agar dapat manfaat dari semua kekayaan alam di dunia ini. Disamping itu manusia sebagai penghuni planet bumi ini tidak hidup sendiri, tetapi terikat dengan suatu tatanan ekosistem dengan makhluk Tuhan lainnya. Manusia merupakan makhluk monopluralis, makhluk individu sekaligus makhluk sosial dan semangat kerjasama dalam keseimbangan mutlak diwujudkan

---

<sup>10</sup> Imamudin Yuliadi, ibid, h. 8

agar terbina kehidupan yang seimbang, serasi dan harmonis. Islam sebagai ajaran yang bersifat universal memberikan seperangkat aturan dan hukum dalam mengatur kehidupan manusia di dunia agar terwujud suatu kehidupan yang harmonis dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT.

Secara konseptual etika ekonomi Islam dapat dijabarkan atas beberapa butir yaitu:<sup>11</sup>

1. *Semua aktivitas kehidupan diorientasikan untuk ibadah*

Merupakan kewajiban bagi setiap muslim bahwa semua aktivitas hidup adalah merupakan bagian dari rangkaian ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya :

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS Adz-Dzaariyat : 56)

Ayat di atas menegaskan tentang orientasi manusia sebagai hamba Allah SWT bahwa penciptaan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Hidup dalam kerangka ibadah artinya taat, tunduk dan patuh atas dasar cinta kepada Allah SWT dengan mematuhi semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Termasuk dalam hal ini adalah aktivitas ekonomi juga diorientasikan untuk beribadah mencari ridho Allah SWT. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari aktivitas kehidupan seorang muslim yang terikat dengan nilai-nilai Islam.

2. *Bekerja merupakan aktivitas yang mulia*<sup>12</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT untuk mengelola dan memakmurkan kehidupan di dunia ini sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang tersebar pada beberapa surat yang menyebutkan iman dan sekaligus diikuti dengan amal sholeh yang dapat diartikan dengan bekerja (QS Al-,Ashr). Amal sholeh merupakan satu bentuk manifestasi dari nilai-nilai keimanan pada diri seseorang. Termasuk dalam kategori amal sholeh adalah upaya untuk menciptakan lapangan kerja untuk memperoleh manfaat atau guna bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Melalui aktivitas bekerja dapat mendorong peningkatan kualitas kehidupan baik secara individu maupun sosial. Dalam perjalanan hidupnya Rosululloh SAW adalah seorang yang rajin dan giat bekerja baik sebagai seorang pedagang, penggembala, kepala negara, panglima perang, pendidik dan kepala rumah tangga. Semua profesi tersebut dilakukan dengan penuh

---

<sup>11</sup> Abdul Hamid Ahmad Abu Sulayman, 1998, *The Theory of The Economics of Islam The Economics of Tawhid and Brotherhood Philosophy Concept and Suggestions for Policies in A Modern Context*, IIUM Journal, Volume 6, No. 1, p. 79

<sup>12</sup> KH Toto Tasmara, 2002, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta, Gema Insani Press, hal. 73 - 77

kesungguhan dan menghasilkan prestasi yang mengagumkan. Dunia adalah ladang ibadah bagi seorang muslim melalui berbagai aktivitas yang bermanfaat, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk terus berprestasi bagi bekal kehidupan yang baik di akhirat.

3. *Membina nilai-nilai persaudaraan*<sup>13</sup>

Islam mengisyaratkan tentang pentingnya persaudaraan diantara manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa (QS. Al-Hujurat : 13). Dan dari keturunan itulah kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia menjadi bangsa-bangsa yang terdiri dari berbagai ras, etnis, suku, bahasa dan budaya. Persaudaraan sesama manusia merupakan keniscayaan untuk terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang kehidupan.

Aktivitas ekonomi juga dijalankan dengan semangat persaudaraan diantara pelaku-pelaku ekonomi, sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Islam mencela setiap perbuatan yang hanya sekedar mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain seperti mengurangi timbangan, korupsi, menipu, transaksi narkoba, prostitusi, praktek pornografi dan pornoaksi dsb. Sebaliknya Islam mendorong untuk selalu melakukan kegiatan yang mendorong semangat kebersamaan dan persaudaraan. Karena melalui pembinaan persaudaraan akan melahirkan bangunan ekonomi yang kokoh dan bermartabat. Salah satu instrument syariah untuk terbinanya persaudaraan dalam Islam (*ukhuwah Islamiyah*) yaitu perintah untuk menunaikan zakat infak dan shodaqoh (ZIS), sehingga terbina keharmonisan hubungan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. Dan pada sisi lain melalui mekanisme ZIS ada pola yang sistematis untuk memberdayakan ekonomi umat sehingga perekonomian secara makro semakin berkembang.

4. *Menarik mashlahat dan menghindari madharat*<sup>14</sup>

Islam diturunkan kepada manusia untuk membawa pada kehidupan yang diwarnai dengan nilai-nilai kebaikan (*mashlahat*) baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Salah satu prinsip dalam *maqoshidus shariah* adalah terpeliharanya kehidupan (*hifdhun nafs*) sehingga kehidupan manusia bisa berkembang dengan baik. Dan pada sisi lain juga mencegah timbulnya praktek-praktek kehidupan yang

---

<sup>13</sup> Loc-cit

<sup>14</sup> Dr. Zubair Hasan, ibid, p. 57

dapat mencelakakan eksistensi manusia. Kegiatan ekonomi juga diarahkan dalam upaya mencapai kondisi tersebut. Aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi diarahkan pada upaya mencapai kehidupan yang baik dan mencegah dari hal-hal yang dapat mengancam kehidupan manusia.

5. *Hak kepemilikan pada hakekatnya adalah amanah Allah SWT*<sup>15</sup>

Keberadaan Allah SWT dapat dibuktikan dari adanya alam semesta ini. Sebagai pencipta, Allah juga sekaligus sebagai pengatur dan pemilik hakiki atas semua yang ada di alam semesta ini. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai pengelola alam semesta ini dengan dibekali naluri berketurunan, naluri mempertahankan diri, naluri berkuasa dan naluri beragama. Islam mengajarkan kepada manusia bagaimana mengatur dan mengelola alam semesta ini agar dapat membawa pada kemashlahatan kehidupan manusia. Dengan menyadari bahwa harta adalah milik Allah, maka manusia harus mengikuti aturan-aturan dari Allah dalam penggunaan maupun cara memperoleh harta tersebut.

Nilai dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari asas filsafat tawhid yaitu :<sup>16</sup>

1. *Kepemilikan (ownership) dalam ekonomi Islam adalah :*

- a. Hakekat kepemilikan manusia terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan sumberdaya secara produktif, maka padanya akan kehilangan hak kepemilikan atas sumber-sumber tersebut seperti dalam pemilikan lahan atau tanah. Rosullah menyatakan pada suatu hadist berkaitan dengan masalah ini *“Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun”*.
- b. Kepemilikan terbatas pada sepanjang usia hidupnya di dunia, dan bila orang itu meninggal maka hak pemilikan atas suatu barang akan beralih kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[112], (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah : 180)*

---

<sup>15</sup> Muhammad Nejjatullah Siddiqi, Ibid, p. 194

<sup>16</sup> Muhammed Ahmed Sakr, 1992, *Islamic Concept of Ownership and Its Economic Implications*, p. 117 dalam Ausaf Ahmad, et-al, 1992, Lectures on Islamic Economic, Jeddah, Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank

- c. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ekonomi ini dikuasai dan dimiliki oleh negara dan dikembalikan kembali pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat luas. Termasuk dalam kategori pemilikan umum misalnya air minum, hutan, laut, udara, ruang angkasa, jalan, jembatan dsb.
2. *Keseimbangan (equilibrium)* yang secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang yaitu moderation (kesederhanaan), hemat (parsimony) dan menjauhi pemborosan (extravagance). Konsep keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat, antara aspek pertumbuhan dan pemerataan, kepentingan personal dan sosial, antara aspek konsumsi, produksi dan distribusi.<sup>17</sup>
3. *Keadilan (justice)* suatu kosa kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an yang menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Nilai dasar keadilan sangat diutamakan dalam Islam baik yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi maupun politik. Keadilan dalam terminologi Islam mengandung makna :<sup>18</sup>
- a. Kebebasan bersyarat dan dilandasi oleh akhlak Islam. Keadilan yang menyiratkan kebebasan tanpa batas akan menimbulkan kekacauan dalam sendi-sendi kehidupan manusia.
  - b. Keadilan harus dioperasionalkan pada semua fase ekonomi. Keadilan dalam aktifitas produksi mengandung makna pentingnya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi. Keadilan dalam aktifitas konsumsi mengandung makna pentingnya sikap moderation, tidak boros dan hemat. Keadilan dalam aktifitas distribusi mengandung makna pentingnya alokasi sumber-sumber ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan perbedaan potensi yang dimiliki tiap-tiap individu.

## **1.6. Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro**

Inti dari ilmu ekonomi adalah mengakui adanya suatu kenyataan tentang kelangkaan sumber daya dan bagaimana keputusan untuk mengorganisir masyarakat dengan suatu cara untuk memanfaatkan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa yang paling efisien.

---

<sup>17</sup> Muhammad Fahim Khan, 1987, *Theory of Consumer Behavior in Islamic Perspective*, p. 169, dalam Ausaf Ahmad, et-al, Lectures on Islamic Economics, Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, Jeddah

<sup>18</sup> Dr. Zubair Hasan, Ibid, p. 52

Persoalan ekonomi diungkapkan dalam suatu pertanyaan yaitu apa dan berapa jumlah barang yang diproduksi (*what*), bagaimana memproduksinya (*how*) dan untuk siapa barang diproduksi (*for whom*). Pertanyaan *What* yaitu apa dan berapa jumlah barang harus dihasilkan artinya masyarakat harus menentukan apa jenis barang yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Asumsi keterbatasan sumber daya mendorong masyarakat untuk menentukan pilihan misalnya apakah akan meningkatkan sektor pertanian untuk menghasilkan bahan pangan atau mendorong sektor industri untuk menghasilkan produk industri. Bagaimana barang dihasilkan (*how*) artinya masyarakat harus menentukan siapa yang akan menghasilkan barang, dengan penggunaan sumber daya ekonomi apa saja dan bagaimana cara menghasilkannya. Apakah teknik produksinya akan pada modal atau padat karya, apakah proses produksinya akan menggunakan sumber energi listrik yang digerakkan oleh air yaitu pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Dan untuk siapa barang dihasilkan (*for whom*) artinya siapa yang menikmati keuntungan dari aktivitas produksi apakah tenaga kerja, pemilik modal atau pengusaha. Bagaimana distribusi pendapatannya ? Apakah sudah terdistribusi merata di tengah masyarakat atau belum ?

Prinsip Islam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya adalah bagaimana sumber daya sebagai karunia Allah SWT dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip dasar dari tujuan syariah Islam (maqoshidus syariah) yaitu :

1. Perlindungan atas kepercayaan (*hifdhun Dien*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kebenaran agama dari sumber otentiknya yaitu Al-Qur'an dan Assunnah sebagai jalan kehidupan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.
2. Perlindungan jiwa (*hifdhun nafs*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga agar ada perlindungan atas hak hidup dan kehidupan manusia. Melindungi kehormatan manusia dan menjaga dari perilaku yang dapat mengancam jiwa manusia.
3. Perlindungan akal (*hifdhul aql*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kesehatan akal dan penggunaan akal secara benar untuk kemaslahatan umat
4. Perlindungan harta (*hifdhul maal*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga hak milik atas harta dan bagaimana agar harta dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia dan mencegah dari tindakan penyalahgunaan harta yang dapat merugikan orang lain.

5. Perlindungan nasab (*hifdhun nasab*) maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kebersihan dan kejelasan atas garis nasab (keturunan) seseorang sebagai dasar dalam menentukan perwalian dan masalah waris.

#### I.7. Metodologi Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam

Pembahasan mengenai fenomena ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek dan dimensi. Fenomena perekonomian merupakan aktivitas yang kompleks dan multidimensi karena melibatkan perilaku manusia dengan beragam latar belakang sosial, budaya, karakter, sifat, kondisi alam, politik, keyakinan, dsb. Aktivitas ekonomi pada dasarnya merupakan ajang pertemuan pelaku-pelaku ekonomi yang melahirkan interaksi antar berbagai kepentingan individu dan sosial yang masing-masing bergerak didorong oleh motif ekonomi tertentu.

Ahli ekonomi dengan menggunakan pendekatan ilmiah akan memahami bagaimana kehidupan perekonomian berjalan. Pendekatan ilmiah yang digunakan juga mencakup observasi terhadap fakta, klasifikasi, interpretasi dan analisis data. Dengan bantuan alat analisis kuantitatif seperti statistik, matematika dan ekonometrika memungkinkan ahli ekonomi dapat melakukan analisis atas suatu masalah ekonomi. Dengan bantuan ekonometrika para ahli ekonomi dapat menyederhanakan masalah sehingga dapat mengetahui sifat hubungan data yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atas suatu fenomena ekonomi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian ahli ekonomi juga harus hati-hati dalam melakukan penalaran atas fenomena ekonomi yang kompleks. Suatu fenomena ekonomi muncul karena adanya hubungan yang kompleks antar variabel yang berbeda sehingga harus hati-hati dalam memahami dan mengambil kesimpulan. Perlu pencermatan dalam melihat masalah ekonomi mana yang merupakan sebab dan mana yang akibat, apa sesungguhnya masalah yang terjadi di balik suatu kejadian ekonomi dan bagaimana implikasi suatu kebijakan memberikan dampak terhadap perekonomian lainnya. Ada beberapa kesalahan berpikir yang perlu dicermati para ahli ekonomi dalam melakukan penalaran ekonomi yaitu :

1. Kesalahan pola pikir post hoc yaitu suatu kesalahan yang mengasumsikan bahwa karena suatu kejadian terjadi sebelum kejadian yang lain, maka kejadian yang pertama merupakan penyebab dari kejadian yang kedua. Kesalahan ini berkaitan dengan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan dalam metode berpikir. Contoh dari kesalahan berpikir ini misalnya berkaitan dengan kejadian masa Depresi Besar (*great depressions*) tahun 1939 menjelang perang dunia II. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu mendorong dunia usaha agar dapat meningkatkan aktivitas ekonominya

dan biasanya diawali dengan kenaikan tingkat upah dan harga barang, sehingga perlu dirumuskan kebijakan meningkatkan upah dan kebijakan moneter yang longgar. Namun yang terjadi justru sebaliknya bahwa perekonomian semakin tertekan karena banyak dunia usaha yang mengalami kesulitan dalam membayar upah bagi buruhnya. Kebijakan yang tepat seharusnya adalah memberikan stimulus ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui proyek-proyek ekonomi yang dibiayai oleh pemerintah.

2. Kesalahan dalam mengasumsikan bahwa kegagalan untuk menganggap hal lain konstan, artinya bahwa ketidakmampuan dalam melihat hal lain sebagai sesuatu yang konstan pada saat melakukan penalaran. Sebagai contoh misalnya penurunan pajak kendaraan meningkatkan jumlah penerimaan asli daerah (PAD) dari retribusi pajak kendaraan. Kesimpulan ini dapat menyesatkan karena tidak mempertimbangkan peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambah jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.
3. Kesalahan komposisi (*falacy of the composition*) yaitu suatu kesalahan dimana diasumsikan bahwa apa yang berlaku untuk sebagian maka juga berlaku untuk semua. Hal ini dapat dipahami dengan mencermati fenomena di sektor pertanian misalnya, jika produksi pertanian meningkat maka pendapatan petani akan meningkat dan kesejahteraan petani juga meningkat. Namun dalam kenyataan tidak berlaku seperti itu, yaitu manakala produksi hasil pertanian semua petani meningkat berakibat terjadi surplus produksi dan berakibat harga produk di pasar menurun yang mengakibatkan pendapatan dan kesejahteraan petani menurun.

### **1.7. Sistem Ekonomi Islam<sup>19</sup>**

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi dsb. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlaq dan muamalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut :<sup>20</sup>

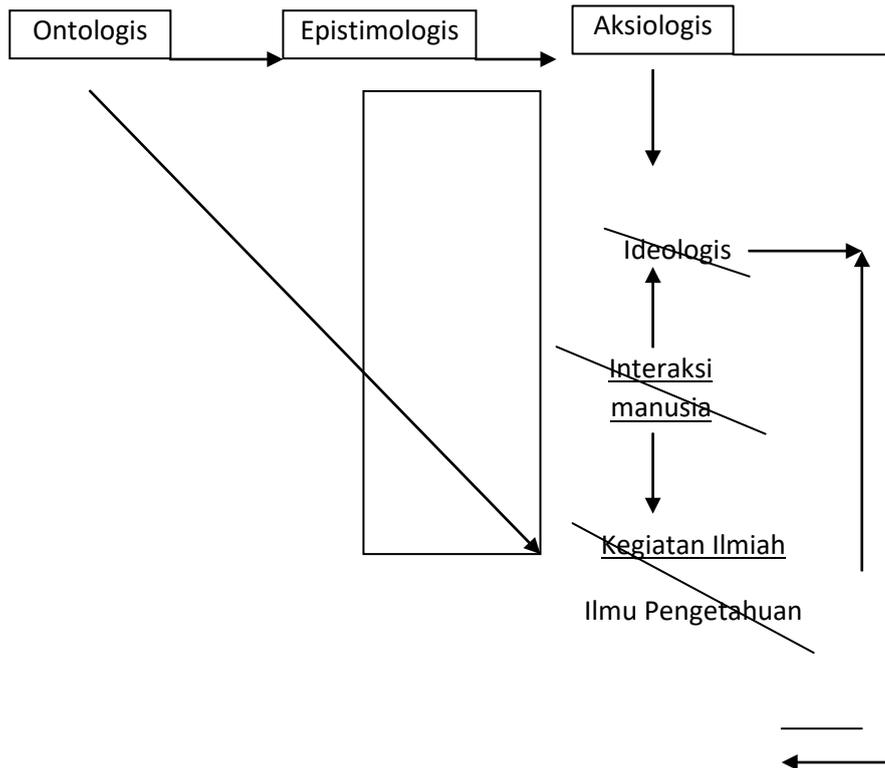
---

<sup>19</sup> Sultan Abu Ali, Ibid, p. 140 dan juga Muhammad Nejjatullah Siddiqi, Ibid, p. 16

<sup>20</sup> Masudul Alam Choudhury, Ibid, p. 14 dan juga lihat Muhammad Umer Chapra, Ibid, hal. 199

- Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekecauan dalam masyarakat.
- Agama Islam mengakui hak milik Individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
- Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaedah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.
- Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi tapi mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi ini mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Disamping itu dalam sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.
- Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syariat.
- Islam melarang praktek penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktek penimbunan Islam memberikan sanksi yang keras kepada para pelakunya.
- Islam tidak mentolerir sedikitpun terhadap setiap praktek yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ecstasy, pornografi, night club, discotique dsb.

Proses perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks masyarakat konvensional dapat dicermati pada skema berikut :



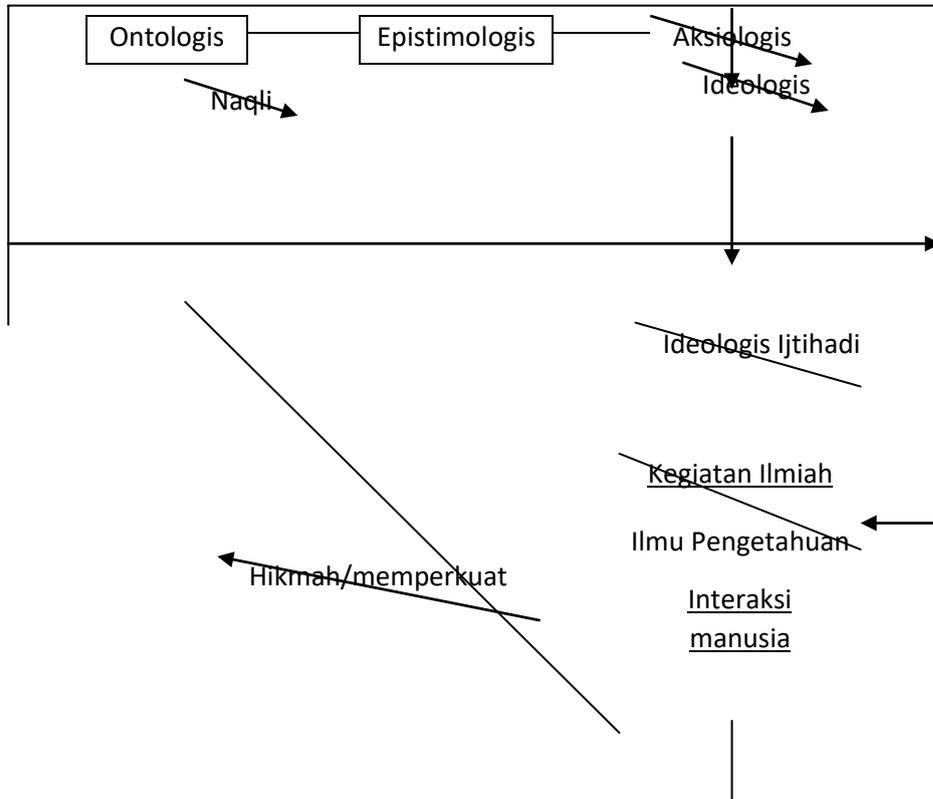
Gambar 3.1

Proses Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Masyarakat Sekuler

Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat sekuler semata-mata hanya mengandalkan kemampuan olah pikir (*rasio*) untuk mengamati dan meneliti fenomena alam dengan mengesampingkan informasi dari wahyu sementara kebenaran ilmiah adalah bersifat spekulatif dan bebas nilai (*free value*). Paradigma perkembangan ilmu pengetahuan sekuler melahirkan masyarakat ilmiah yang jauh dari nilai-nilai agama dan mengabaikan norma-norma agama. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks masyarakat Islam senantiasa berpijak pada kaidah-kaidah agama. Nilai Islam merupakan sumber informasi dan panduan (*guidence*) dalam proses perkembangan ilmu sehingga aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis selalu dalam koridor Islam sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.2.

Proses Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Masyarakat Islam



Gambar di atas menjelaskan perbedaan yang fundamental dan filosofis antara perkembangan keilmuan dalam perspektif Islam dan sekuler. Dalam pandangan Islam bahwa wahyu (*dalil naqli*) adalah sumber utama dari semua informasi yang ada di dalam kehidupan sosial dan alam semesta ini. Sehingga wacana keilmuan baik dari aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis harus dalam koridor wahyu yaitu Al-Qur'an dan Assunnah sehingga produk pemikiran yang dihasilkan tidak akan menyimpang dari nilai-nilai Islam, meskipun hasil kajian empirik masih memberikan peluang terjadinya perbedaan karena

memang Islam memberikan tempat yang proporsional terhadap kemampuan ijtihadi seseorang tetapi tetap dalam koridor kerangka pemikiran yang dibangun dari landasan Islam.

### ***1.8. Batas Kemungkinan-kemungkinan Produksi (Production Possibilities Frontier)***

Permasalahan yang dihadapi setiap perekonomian adalah keterbatasan sumber daya baik tenaga kerja, modal, lahan, peralatan, energi. Setiap perekonomian selalu dihadapkan pada pilihan diantara banyak pilihan lainnya yang bersifat *tradeoff* yaitu manakala perekonomian akan memproduksi suatu jenis barang maka harus mengorbankan jenis barang yang lain. Ketika suatu perekonomian harus memutuskan jenis barang apa yang akan diproduksi dan bagaimana metode atau memproduksinya, maka sesungguhnya perekonomian dihadapkan pada persoalan bagaimana alokasi sumber daya ekonomi terbaik yang harus dipilih diantara banyak pilihan alternatif produksi lainnya. Perekonomian harus melakukan pilihan dalam penggunaan sumber daya untuk menjawab pertanyaan apa dan berapa jumlahnya (*what*), bagaimana memproduksinya (*how*) dan untuk siapa produk dihasilkan (*for whom*).

Untuk menjawab pertanyaan ekonomi di atas dan juga dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka individu dan masyarakat dalam suatu perekonomian harus melakukan pilihan atas input dan output. Input atau faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu tenaga kerja, modal dan tanah/lahan dimana setiap aktifitas ekonomi pasti menggunakan ketiga macam input tersebut.

1. Tanah atau secara umum disebut sumber daya alam (natural resources) dalam bentuk tanah untuk bercocok tanam, untuk mendirikan bangunan, jalan, infrastruktur. Juga diartikan dengan kekayaan alam lainnya seperti kekayaan laut, pertambangan, kesuburan tanah, udara yang bersih, lingkungan alam yang bersih, sinar matahari yang memancar untuk menumbuhkan tanaman.
2. Tenaga kerja diartikan dengan waktu yang digunakan untuk berproduksi yaitu bekerja di sektor pertanian, industri, jasa, pertambangan. Input tenaga kerja juga mencakup aspek fisik jasmani, mental, motivasi, cita-cita, keuletan, kecerdasan, ketelitian, kesungguhan yang berpengaruh terhadap produktifitas kerja.
3. Modal atau kapital yang diartikan dengan pembentukan barang tahan lama (durable goods) dengan tujuan untuk menghasilkan barang lain. Barang modal misalnya mesin, perkakas kantor, mobil, truk trailer, traktor, alat potong besi, gunting digunakan untuk meningkatkan produktifitas proses produksi.

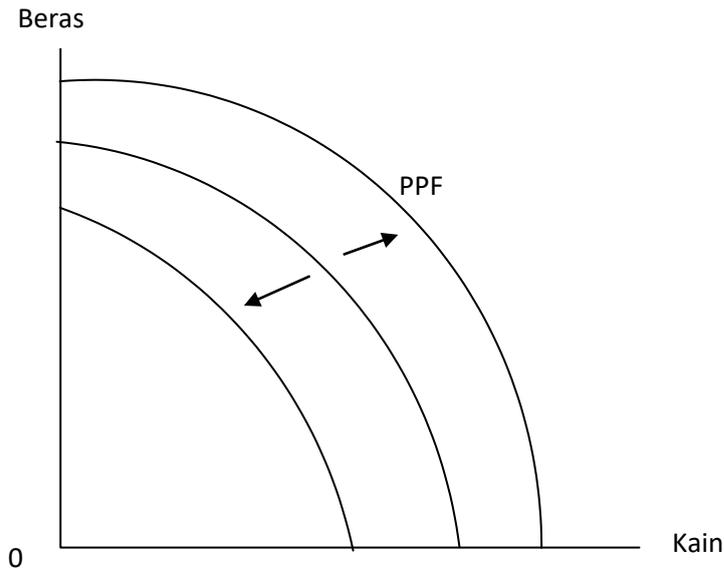
Pemanfaatan input/faktor produksi untuk menghasilkan output, sehingga individu dan masyarakat dalam suatu perekonomian dihadapkan pada pertanyaan apa dan berapa jumlah output yang harus dihasilkan (*what*), bagaimana menghasilkannya (*how*) dan untuk siapa barang dihasilkan (*for whom*). Perekonomian tidak bisa menghasilkan semua jenis barang yang diinginkan karena dibatasi dengan keterbatasan sumber daya. Penjelasan mengenai bagaimana keputusan suatu perekonomian diasumsikan bahwa jenis barang hanya ada 2 macam misalnya beras dan kain serta penggunaan sumber daya dilakukan dengan metode dan teknologi yang terbaik. Tabel 1.1 berikut mengungkapkan mengenai bagaimana pilihan alternatif produksi antara beras dan kain dari suatu perekonomian negara A.

Tabel 1.1.

Alternatif Kemungkinan Produksi

<i>Kemungkinan</i>	<i>Beras (ton)</i>	<i>Kain (ribu m<sup>2</sup>)</i>
A	0	14
B	1	12
C	2	9
D	3	5
E	4	3
F	5	0

Tabel 1.1 tersebut menjelaskan beberapa kemungkinan kombinasi produksi beras dan kain yang dapat dihasilkan suatu perekonomian. Tabel tersebut juga mengungkapkan bahwa perubahan dari satu alternatif produksi ke alternatif produksi lainnya membawa implikasi yaitu manakala produksi beras meningkat harus diimbangi dengan pengurangan jumlah produksi kain. Jika semua sumber daya digunakan untuk menghasilkan beras, maka jumlah maksimal beras adalah sebanyak 5 ton, sedangkan jika semua sumber daya digunakan untuk menghasilkan kain, maka jumlah produksi kain sebanyak 14.000 m<sup>2</sup>. Gambaran lebih jelas mengenai kondisi keterbatasan sumber daya untuk menghasilkan dua jenis barang tersebut dapat dilihat pada kurva kemungkinan produksi berikut :



Kurva kemungkinan produksi menunjukkan batas kemungkinan produksi (*production possibilities frontiers = PPF*) juga sekaligus menggambarkan pemanfaatan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan barang dan jasa secara optimal. Bentuk kurva kemungkinan produksi yang cembung dan berlereng negatif menggambarkan biaya oportunitas yang terus meningkat artinya jika produksi kain ditingkatkan secara konstan maka produksi beras akan berkurang dengan jumlah pengurangan yang semakin besar. Jika produksi terletak di sepanjang kurva kemungkinan produksi menunjukkan bahwa proses produksi dapat menghasilkan output secara efisien artinya kegiatan ekonomi dapat memanfaatkan kapasitas produksi secara optimal. Dan sebaliknya jika kegiatan ekonomi terjadi di dalam PPF menunjukkan adanya inefisiensi dalam proses produksi artinya kegiatan ekonomi berjalan dengan tidak memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.

Pergeseran ke kanan atas menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi positif karena adanya peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian baik karena perkembangan teknologi, penambahan jumlah modal, peningkatan sumber daya manusia yang terdidik, dsb. Dan sebaliknya akan bergeser ke kiri bawah menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif yaitu manakala terjadi penurunan kapasitas produksi barang dan jasa suatu perekonomian yang disebabkan oleh bencana alam, perang, penyakit, konflik politik, dsb, sehingga produksi barang dan jasa semakin berkurang.

## **BAB II**

### **MASALAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI**

#### **2.1. Definisi Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro**

Ekonomi Makro didefinisikan dengan cabang dari ilmu ekonomi yang menjelaskan mengenai perekonomian secara keseluruhan (agregate). Jadi topik kajian dalam ekonomi makro menyangkut perilaku negara, masyarakat atau sekelompok masyarakat, sedangkan variabel yang dibahas meliputi pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, defisit neraca pembayaran, dsb. Sedangkan ekonomi mikro didefinisikan dengan cabang dari ilmu ekonomi yang mengkaji mengenai perilaku ekonomi individual. Topik kajiannya menyangkut perilaku agen ekonomi kecil yaitu konsumen dan produsen, sehingga materi yang dipelajari menyangkut teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya, keseimbangan pasar, organisasi perusahaan dan struktur pasar. Secara definitif ada yang mengungkapkan bahwa ekonomi makro adalah teori pendapatan nasional sedangkan ekonomi mikro adalah teori harga.<sup>21</sup> Secara teoritis dan aplikatif ada kaitan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kebijakan makro ekonomi seperti pengurangan subsidi BBM yang berakibat kenaikan harga BBM berakibat kenaikan harga barang-barang sehingga permintaan barang akan berkurang. Topik pertama dibahas pada ekonomi makro dan yang kedua dibahas pada ekonomi mikro. Demikian juga penambahan jumlah penduduk akan mendorong pada peningkatan permintaan beras secara keseluruhan artinya bahwa isu mikro ekonomi akan berpengaruh terhadap makro ekonomik.

#### **2.2. Masalah Ekonomi Makro**

Setiap negara pasti menghadapi permasalahan ekonomi apalagi pada negara berkembang yang dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang menyangkut persoalan kemiskinan, pengangguran, inflasi, fluktuasi nilai tukar, ketimpangan pendapatan, dsb. Pokok permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara karena persoalan keterbatasan sumber daya ekonomi (*scarcity*) dan untuk mewujudkan tujuan ekonomi yaitu masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan makmur. Interaksi antara permasalahan ekonomi yang dihadapi dan tujuan pembangunan yang diharapkan akan menentukan rumusan kebijakan ekonomi. Sehingga kebijakan ekonomi suatu negara tidak sama dengan negara lain karena akar

---

<sup>21</sup> Mankiw, Gregory, 2002, *Principles of Economics*, Printice-Hall, New York

permasalahan ekonomi tidak sama meskipun tujuannya sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Permasalahan ekonomi yang dihadapi hampir setiap negara berkembang adalah kemiskinan. Fenomena ekonomi makro yang pernah dihadapi setiap negara adalah resesi ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi negatif disamping tentunya pertumbuhan ekonomi positif. Resesi ekonomi yang berkepanjangan dan dengan intensitas yang dalam disebut dengan depresi ekonomi seperti yang pernah terjadi pada tahun 1939 menjelang perang dunia II. Dalam konteks ekonomi global sekarang dimana interaksi ekonomi antar negara cukup tinggi, maka ancaman resesi ekonomi maupun depresi ekonomi selalu menghantui negara-negara di dunia. Ancaman resesi ekonomi bisa ditimbulkan sebagai akibat dari krisis energi yaitu naiknya harga minyak dunia atau penurunan dari sisi permintaan agregat karena guncangan dari pasar uang akibat krisis keuangan perusahaan besar atau negara dalam menutup hutang-hutangnya.

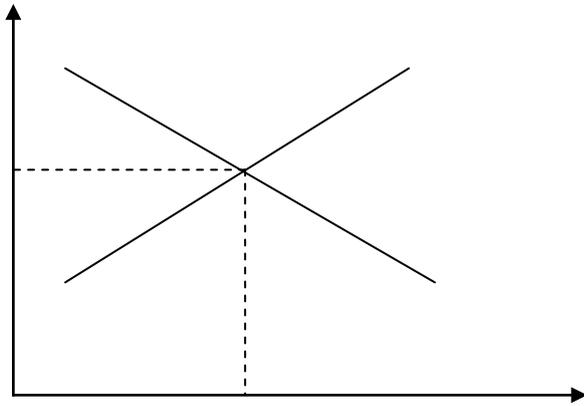
### **2.3. Model Ekonomi**

Ekonomi adalah suatu fenomena sosial yang melibatkan banyak faktor sehingga dalam hal untuk menjelaskan bekerjanya variabel-variabel ekonomi terhadap fenomena ekonomi digunakan model ekonomi. Secara definitif model ekonomi adalah suatu penyederhanaan dari realitas ekonomi yang nyata dan kompleks. Para ahli ekonomi dalam menjelaskan fenomena ekonomi sering kali menggunakan model ekonomi untuk dapat mengungkapkan suatu fenomena dengan mudah sehingga dapat dijelaskan inti masalahnya dan dapat dirumuskan solusinya. Model ekonomi yang selalu digunakan para ahli ekonomi adalah model permintaan dan penawaran (*the model of demand and supply*) yang menunjukkan interaksi antara konsumen (*buyers*) dan produsen (*sellers*). Dalam suatu model ekonomi dimasukkan variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen (*exogenous variable*) adalah suatu variabel yang nilainya bersifat *given* dan ditentukan di luar model. Sedangkan variabel endogen (*endogenous variable*) adalah suatu variabel yang dijelaskan oleh model dan ditentukan dalam model.

Model permintaan dan penawaran sering digunakan dalam menjelaskan fenomena ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran akan menentukan keseimbangan pasar (*market equilibrium*) yaitu harga keseimbangan (*price equilibrium*) dan kuantitas keseimbangan (*quantity equilibrium*). Model permintaan dan penawaran dapat menjelaskan fenomena ekonomi makro seperti fluktuasi harga beras di pasar tradisional melalui bekerjanya mekanisme pasar baik karena naiknya permintaan beras maupun penurunan penawaran beras. Demikian juga fluktuasi nilai tukar

rupiah terhadap dollar AS (*kurs rupiah*) terjadi karena bekerjanya mekanisme pasar uang baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Gambar berikut menjelaskan mengenai model permintaan dan penawaran serta penentuan keseimbangan pasar (*market equilibrium*) :



Dalam model ekonomi tersebut dapat menjelaskan suatu fenomena yang abstrak dan kompleks menjadi suatu tampilan yang mudah dan sederhana sehingga dapat mengungkapkan suatu masalah dan bagaimana solusinya.

#### **2.4. Model Ekonomi Islam**

Model ekonomi Islam dalam beberapa hal sama dengan yang diungkapkan dalam ekonomi modern baik makro maupun mikro seperti pada model permintaan dan penawaran. Namun dalam beberapa hal ada keunikan dari model ekonomi Islam yang dibangun dari paradigma Islam sebagai suatu sistem kehidupan (*way of life*). Dalam Islam diungkapkan bahwa manusia tidak sekedar sebagai makhluk yang mempunyai kecenderungan berperilaku ekonomi (*homo economicus*) tetapi lebih dari pada itu bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai tugas dan kewajiban beribadah kepada-Nya dengan mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya untuk mencapai kehidupan *maslahah* yang diridhoi-Nya. Jadi dalam model ekonomi Islam manusia merupakan makhluk yang kecenderungan perilaku ekonominya terikat oleh aturan syariat Islam (*homo Islamicus*) yang tidak sekedar memenuhi hasrat material ekonomi semata tetapi merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan kepada syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT.

Implikasi dari *homo Islamicus* dalam perilaku dan kebijakan ekonomi mikro maupun makro adalah selalu terikat dengan syariat Islam. Perilaku ekonomi Islami dalam konteks ekonomi makro dapat dirumuskan dalam suatu identitas moneter (money equation) yaitu :

$$MV = PY$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar (*money supply*)

V = Kecepatan peredaran uang (*velocity of money*)

P = Harga (*price*)

Y = Output

Identitas tersebut mengungkapkan bahwa sisi sebelah kiri yang menunjukkan nilai aktivitas pada sektor moneter sama dengan sisi sebelah kanan yang menunjukkan nilai aktivitas pada sektor riil. Pada kesamaan tersebut juga digambarkan bahwa pergerakan uang baik yang ditentukan oleh perubahan jumlah uang beredar maupun meningkatnya jumlah transaksi akan mendorong kegiatan ekonomi riil. Kesamaan tersebut selaras dengan prinsip ekonomi Islam bahwa uang merupakan alat ekonomi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi riil, sehingga harus dicegah perilaku ekonomi yang dapat menghalangi fungsi dan peran uang untuk menggerakkan aktivitas ekonomi riil seperti berjudi, menimbun uang (*hoarding*), berspekulasi pada pasar uang, dsb. Tujuan dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah bagaimana kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan tersedianya produksi barang dan jasa, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

## **2.5. Kebijakan Makroekonomi Islam**

Kebijakan makroekonomi Islam selaras dengan rumusan dalam *Maqashidus Syariah* yaitu tujuan dari diturunkan syariat Islam yaitu :

6. Perlindungan terhadap kehidupan (*hifdhun Nafs*)
7. Perlindungan terhadap kekayaan (*hifdhul Maal*)
8. Perlindungan terhadap agama dan keimanan (*hifdhud Dien*)
9. Perlindungan terhadap akal (*hifdhul „Aql*)
10. Perlindungan terhadap keturunan (*hifdhun Nasl*)

Tujuan dari kebijakan makroekonomi dalam Islam yaitu terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang penuh barokah dan ampunan dari Allah SWT karena kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan syariat-Nya. Sehingga kebijakan ekonomi makro dalam Islam adalah mendorong aktivitas ekonomi sehingga dapat terwujud masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dalam lindungan dan karunia dari Allah SWT yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dalam bentuk sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan secara memadai serta terpenuhinya kebutuhan rohani dalam bentuk rasa aman, rasa bahagia, perlakuan yang adil, dsb. Sehingga dalam hal ini kebijakan makroekonomi Islam

yaitu mendorong kegiatan ekonomi baik pada sektor moneter maupun sektor riil untuk berjalan sesuai dengan syariat Allah SWT dan menghindarkan perilaku dan aktivitas ekonomi yang menyimpang dari syariat Islam.

Perilaku ekonomi yang menyimpang dari syariat Islam dalam bidang moneter misalnya praktek riba, spekulasi di pasar uang, manipulasi pasar modal dan berbagai praktek *moral hazard* yang terjadi di pasar uang yang dapat menimbulkan kerusakan pada sendi-sendi perekonomian. Munculnya berbagai krisis ekonomi selama ini lebih banyak sumbernya pada perilaku negatif di pasar uang dan pasar modal sehingga menimbulkan kepanikan masal yang akhirnya berdampak pada krisis keuangan yang sistemik. Kebijakan makroekonomi Islam dalam pasar uang dan pasar modal yaitu mencegah timbulnya perilaku negatif dalam pasar uang sehingga benar-benar uang digunakan sebagaimana mestinya sebagai alat transaksi untuk mendorong kegiatan ekonomi sektor riil.

Sedangkan perilaku negatif dalam pasar barang (sektor riil) yaitu transaksi barang haram dan subhat, praktek penimbunan barang, mengurangi timbangan, penipuan dalam transaksi jual-beli, monopoli perdagangan, perdagangan manusia (*human trafficking*), pembalakan liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), dsb. Kebijakan makroekonomi Islam dalam pasar barang (sektor riil) yaitu mendorong kegiatan ekonomi riil secara optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **2.5. Indikator Makroekonomi**

Indikator utama dalam ekonomi makro adalah pendapatan nasional yang kemudian diturunkan dalam menentukan indikator makroekonomi lainnya seperti inflasi dan pengangguran. Apa itu pendapatan nasional ? Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi yang berkontribusi dalam perekonomian. Salah satu konsep yang penting dalam pengukuran pendapatan nasional adalah produk domestik bruto (*gross domestic bruto*) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian. Produk domestik bruto (PDB) merupakan bagian dari pendapatan nasional dan perhitungan produk nasional untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi positif (ekspansi) atau pertumbuhan ekonomi negatif (kontraksi). Produk domestik bruto (PDB) juga menjadi dasar dalam menentukan apakah perekonomian menghadapi masalah inflasi atau resesi dan bagaimana merumuskan solusinya.

Produk domestik bruto (PDB) merupakan konsep pengukuran pendapatan nasional dan produk nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga

(C), pengeluaran investasi perusahaan (I), belanja pemerintah atas barang dan jasa (G), dan ekspor neto yaitu (X-M). Produk domestik bruto (PDB) dapat diformulasikan dalam suatu kesamaan sebagai berikut :

$$PDB = C + I + G + (X - M)$$

Secara umum produk domestik bruto (PDB) untuk mengukur performa perekonomian secara makro. Perbandingan kinerja ekonomi antara satu negara dengan negara lain dapat dilakukan secara mudah dengan membandingkan PDB antar negara. Ekonomi makro menjelaskan perekonomian secara keseluruhan (*aggregate*) yang fokus pada pembahasan tentang pendapatan nasional (GDP/GNP), inflasi dan pengangguran. Pendapatan nasional (GDP/GNP) menunjukkan nilai pasar dari keseluruhan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu.

Konsep nilai pasar (*market value*) mengungkapkan keinginan masyarakat untuk membeli sekelompok jenis barang yang berbeda dengan harga pasar (*market prices*) yang berbeda. Jadi harga pasar (*market prices*) mencerminkan keinginan masyarakat untuk membayar pada berbagai jenis barang yang berbeda dan sekaligus juga menunjukkan nilai suatu barang.

Pengertian keseluruhan jenis barang mengandung arti semua jenis barang legal yang masuk dan ditransaksikan dalam pasar. Sedangkan barang-barang illegal seperti barang selundupan, narkoba, dsb tidak dihitung dalam pendapatan nasional (GDP/GNP). Demikian juga halnya dengan produksi dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu rumah tangga misalnya tanaman buah di halaman rumah, jasa ibu rumah tangga, sayuran di kebun juga tidak dihitung dalam pendapatan nasional (GDP/GNP). Demikian juga dalam perhitungan transaksi jasa, misalnya jasa seorang dokter terhadap seorang pasien dihitung sebagai pendapatan nasional (GDP/GNP). Namun jika kemudian dokter tersebut menikah dengan pasiennya tersebut dan maka jasa pengobatan tidak masuk dalam kalkulasi pendapatan nasional (GDP/GNP).

Pengertian barang yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional (GDP/GNP) adalah sesuatu yang tampak secara fisik (*tangible goods*) seperti baju, sepatu, mobil, kursi, pena, dsb. Barang yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional (GDP/GNP) adalah barang yang diproduksi sekarang (*currently produced*) bukan barang yang sudah diproduksi sebelumnya (*in the past*).

Sedangkan jasa adalah sesuatu yang tidak tampak secara fisik (*intangible services*) seperti jasa tukang cukur rambut, cleaning service, pemeriksaan kesehatan oleh dokter, jasa konsultan, dsb. Jika seseorang membeli kaset atau CD (*compact disc*) berisi bacaan Al-

Qur'an, maka dimasukkan dalam transaksi pembelian barang dalam pendapatan nasional (GDP/GNP). Namun jika membeli tiket masuk dalam lomba MTQ dengan pembaca yang sama, maka dimasukkan dalam transaksi jasa dalam pendapatan nasional (GDP/GNP).

Indikator makroekonomi berikutnya adalah inflasi yang dihitung dengan indeks harga konsumen (*consumer price index = CPI*) yaitu suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus. Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka (indeks) menunjukkan tingkat harga pada sekelompok komoditi yang dikonsumsi masyarakat. Kenaikan tingkat harga akan mempengaruhi tingkat pendapatan riil masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Perhitungan inflasi dari indeks harga konsumen dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}}$$

Inflasi akan mempengaruhi pendapatan nasional dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga (*demand pull inflation*) dan sektor luar negeri yaitu ekspor dan impor. Demikian juga inflasi akan meningkatkan biaya produksi barang (*cost push inflation*) misalnya kenaikan inflasi yang disebabkan harga minyak bumi (BBM) sehingga produksi barang semakin berkurang. Namun sebaliknya pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional juga akan mempengaruhi inflasi karena dengan semakin banyaknya produksi barang dan jasa akan menstabilkan harga barang (inflasi) di masyarakat. Tabel berikut menjelaskan indikator makroekonomi perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun :

Tabel 1  
*Indikator Makroekonomi Perekonomian Indonesia*  
(%, year to year)

<i>Indikator Ekonomi</i>	<i>Tahun</i>				
	2009	2010	2011	2012	2013
Produk Domestik Bruto	4,6	6,2	6,5	6,2	5,8
- Konsumsi RT	4,9	4,7	4,7	5,3	5,3
- Konsumsi Pemerintah	15,7	0,3	3,2	1,2	4,9
- PMTB	3,3	8,5	8,8	9,8	4,7
- Ekspor	-9,7	15,3	13,6	2,0	5,3
- Impor	-15	17,3	13,3	6,6	1,2
Inflasi	2,8	7,0	3,8	4,3	8,4
- Inti	4,3	4,3	4,3	4,4	5,0
- Diatur Pemerintah	-3,3	5,4	2,8	2,7	16,7

- Bergejolak	3,9	17,7	3,4	5,7	11,8
--------------	-----	------	-----	-----	------

Sumber : *Bank Indonesia, 2014*

Tabel di atas mengungkapkan perkembangan makroekonomi dimana pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013 sebesar 5,8 % dimana sebelumnya sebesar 6,2 % pada tahun 2012. Demikian juga komponen pendapatan nasional juga mengalami pertumbuhan relatif konstan kecuali ekspor yang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik dan luar negeri. Indikator inflasi relatif terjaga karena pemerintah concern untuk menjaga stabilitas nilai mata uang meskipun akhir-akhir ini mengalami kenaikan akibat dari naiknya harga BBM sebagai imbas dari krisis luar negeri yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia.

Indikator makroekonomi yang juga menjadi fokus dalam pembahasan dalam ekonomi makro adalah pengangguran (*unemployment*) yang ditandai dengan ketidakmampuan angkatan kerja terserap dalam dunia kerja. Angkatan kerja mengungkapkan jumlah total orang yang mencari pekerjaan baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Tingkat pengangguran (*unemployment rate*) adalah besarnya prosentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Besarnya tingkat pengangguran menunjukkan rendahnya kualitas SDM suatu negara dan rendahnya kemampuan tenaga kerja masuk dalam dunia kerja. Tingginya tingkat pengangguran juga mencerminkan inefisiensi dalam perekonomian karena potensi SDM baik yang terdidik maupun tidak terdidik yang tidak bisa berkontribusi dalam perekonomian.

Indikator untuk mengetahui kaitan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi dirumuskan dalam hukum Okun (*Okun's Law*) dimana ada hubungan negatif antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Teori ini dirumuskan oleh Arthur Okun berdasarkan hasil penelitian atas data perekonomian dengan formula sebagai berikut :

$$\Delta \% \text{ Real GDP} = 3 \% - 2 \times \Delta \% \text{ Tingkat Pengangguran}$$

Misal tingkat pengangguran meningkat dari 7 % menjadi 10 %, maka dapat dihitung besarnya prosentase perubahan GDP riil sebesar :

$$\begin{aligned} \Delta \% \text{ Real GDP} &= 3 \% - 2 \times \Delta \% (10 - 7) \\ &= 3 \% - 2 \times 3 \% \\ &= 3 \% - 6 \% \\ &= - 3 \% \end{aligned}$$

Jadi dampak dari peningkatan pengangguran dari 7 % menjadi 10 % akan menurunkan pertumbuhan ekonomi menjadi 3 %.

## 2.6. Konsep Pendapatan Nasional

Konsep pendapatan nasional sebagai indikator makroekonomi secara teoritis dirumuskan dalam GDP (*gross domestic product*) dan GNP (*gross national product*). Konsep pendapatan nasional dengan GDP mengungkapkan besarnya kontribusi pelaku ekonomi yang tinggal di wilayah suatu negara. Jadi perhitungan GDP basisnya adalah wilayah (*region*) suatu negara, meskipun pelaku ekonomi berkewarganegaraan suatu negara tetapi tidak dihitung dalam GDP kalau tinggal di luar wilayah negara tersebut. Sedangkan GNP basis berhitungannya adalah kewarganegaraan (*nationality*) jadi meskipun tinggal dimanapun tetapi kontribusi ekonominya dihitung dalam pendapatan nasional suatu negara karena berkewarganegaraan suatu negara.

Perhitungan pendapatan nasional dalam pengertian GDP (*gross domestic product*) hanya memasukkan transaksi di wilayah geografis suatu negara dengan mengabaikan kewarganegaraan pelakunya. Misal ada warga negara Indonesia yang bekerja sebagai teknisi di perusahaan NASA di USA, maka dimasukkan dalam perhitungan GDP negara USA karena kegiatannya ada di USA. Demikian juga tenaga ahli dari Jerman yang bekerja dalam proyek pembangunan Jembatan Suramadu, maka dimasukkan dalam perhitungan GDP Indonesia. Berbeda halnya jika perhitungan pendapatan nasional menggunakan konsep GNP (*gross national products*) dimana basis perhitungannya adalah kewarganegaraan (*nationality*) dari pelaku ekonominya.

Ada dua cara dalam memahami konsep pendapatan nasional (GDP/GNP) yaitu dari sisi pendapatan (*income*) dan sisi pengeluaran (*expenditure*) dimana nilai pendapatan selalu sama dengan pengeluaran. Kesamaan nilai pendapatan dengan pengeluaran dalam konsep pendapatan nasional karena konsep pendapatan nasional menjelaskan aliran uang (*flow of money*) dalam suatu perekonomian. Pendapatan nasional merupakan penjumlahan total nilai produksi barang dan jasa suatu perekonomian dalam satu periode tertentu. Jadi dalam perhitungan pendapatan nasional yang dihitung adalah nilai total (*total value*) barang dan jasa dimana perhitungan nilai (*value*) suatu barang adalah perkalian antara jumlah barang dengan harga barang.

$$\text{Nilai X} = Q_x \times P_x$$

Sehingga nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan serta tingkat harga barang tersebut. Perubahan nilai suatu barang bisa disebabkan karena perubahan jumlah barang atau perubahan harga barang dan mungkin perubahan dua faktor tersebut. Dari konsep tersebut dapat dirumuskan konsep pendapatan nasional riil (*real national income*) atau juga disebut dengan pendapatan nasional dengan harga yang berlaku. Pada konsep ini perubahan pendapatan nasional disebabkan oleh perubahan jumlah barang tersebut karena harga dianggap konstan. Sedangkan pendapatan nasional yang memperhitungkan kemungkinan perubahan harga disebut dengan pendapatan nasional nominal (*nominal national income*) atau pendapatan nasional dengan harga yang berlaku. Pendapatan nasional riil menghitung nilai output yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu dengan harga tetap. Sedangkan pendapatan nasional nominal menghitung nilai uang sekarang dari output yang dihasilkan suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu. Konsep pendapatan nasional riil (GDP riil) dan pendapatan nasional nominal (GDP nominal) kemudian diturunkan konsep GDP deflator dengan rumus sebagai berikut :

$$GDP_{deflator} = \frac{GDP_{nominal}}{GDP_{riil}}$$

Konsep GDP Deflator juga disebut dengan *deflator harga implisit dari GDP* mengukur harga relatif suatu barang terhadap harga barang pada tahun dasar (*base year*). Nilai GNP atau GDP merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang populer untuk mengukur kinerja ekonomi (*economic performance*) suatu Negara.

Perhitungan GDP dan GNP menyangkut perhitungan nilai barang-barang akhir (*final goods*) dan/atau nilai tambah (*value added*) dari produksi barang. Sedangkan produksi barang-barang antara atau setengah jadi (*intermediate goods*) tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan GDP/GNP untuk menghindari perhitungan ganda (*double counting*). Barang akhir adalah barang-barang yang tidak mengalami proses produksi lebih lanjut dan tidak untuk dijual lagi (*not intended for resale*). Misal ada sebuah perusahaan percetakan menggunakan bahan kertas untuk mencetak buku dan barang cetakan lainnya seperti kartu nama, amplop, map, dsb, maka dalam kasus ini kertas merupakan barang antara (*intermediate goods*) dan tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional (GDP/GNP). Sedangkan barang-barang cetakan merupakan barang akhir (*final goods*) yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional (GDP/GNP). Kecuali dalam kasus misalnya barang antara diproduksi dan dimasukkan dalam gudang persediaan untuk digunakan atau dijual

kemudian, maka dalam hal ini barang antara (*intermediate goods*) tersebut diperlakukan sebagai „*barang final*“ yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional (GDP/GNP). Jadi barang akhir adalah barang yang dibeli dan siap dikonsumsi oleh konsumen akhir. Dalam perhitungan PDB hanya memasukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan melalui pasar (*market transactions*) dan yang merupakan hasil produksi pada tahun berjalan (*current year*) yaitu tahun pada saat dilakukan perhitungan. Barang dan jasa yang ditransaksikan melalui pasar gelap (*black market*) atau penyelundupan tidak dihitung dalam perhitungan pendapatan nasional.

## **2.7. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional**

Nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian dalam periode tertentu dapat dihitung dengan metode perhitungan tertentu sehingga mendapatkan hasil yang standar dan dapat dianalisis dengan baik. Metode perhitungan pendapatan nasional meliputi tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Dengan pendekatan produksi pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan produksi barang-barang dan jasa selama periode tertentu. Dalam konteks perekonomian Indonesia perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan membagi perekonomian Indonesia menjadi 11 sektor ekonomi dan masing-masing sektor dibagi menjadi beberapa sub sektor yaitu :

1. Sektor Pertanian
  - a. Tanaman Bahan Makanan
  - b. Tanaman Perdagangan Rakyat
  - c. Tanaman Perkebunan Besar
  - d. Peternakan dan Hasil-hasilnya
  - e. Kehutanan dan Perburuan
  - f. Perikanan Darat dan Laut
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri
  - a. Industri Perusahaan Besar
  - b. Industri Perusahaan Sedang
  - c. Industri Perusahaan Kecil
4. Sektor Konstruksi
5. Sektor Listrik dan Gas
6. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

- a. Pengangkutan Udara
  - b. Pengangkutan Kereta Api
  - c. Pengangkutan Bus
  - d. Pengangkutan Truk
  - e. Pengangkutan Becak
  - f. Pelayaran
  - g. Perhubungan
  - h. Pengangkutan Lainnya
7. Sektor Perdagangan
- a. Perdagangan Besar
  - b. Perdagangan Eceran
8. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
- a. Bank
  - b. Koperasi Kredit
  - c. Asuransi
  - d. Lembaga Keuangan Lainnya
9. Sektor Sewa Rumah
10. Sektor Pemerintahan
- a. Pemerintahan Pusat
  - b. Pemerintahan Propinsi
  - c. Pemerintahan Kabupaten
11. Sektor Jasa-jasa
- a. Jasa-jasa Perorangan
  - b. Jasa-jasa Sosial
  - c. Jasa-jasa Hiburan

Total nilai produksi yang dihasilkan semua sektor/subsektor produksi tersebut akan menghasilkan GNP/GDP. Kontribusi sektor/subsektor produksi terhadap GDP/GNP akan menentukan karakteristik perekonomian suatu negara apakah mengandalkan sektor primer, sekunder atau tersier. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi juga dapat menentukan suatu negara termasuk negara agraris atau industri. Seperti halnya Indonesia dengan kontribusi paling besar dari sektor primer terutama sektor pertanian meskipun laju pertumbuhannya relatif semakin kecil dari tahun ke tahun. Tabel berikut menjelaskan besarnya pendapatan nasional Indonesia dengan metode produksi :

Perhitungan pendapatan nasional juga dapat diperoleh dengan pendekatan pendapatan (*income approach*) yaitu dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi. Dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan input atau faktor produksi dan masing-masing mendapatkan imbalan yaitu pendapatan gaji atau upah tenaga kerja, pendapatan sewa tanah, pendapatan bunga atau bagi hasil, keuntungan (*profit*) perusahaan. Meskipun secara teoritis nilai pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan sama dengan pendekatan lainnya namun secara praktis angkanya sulit untuk didapatkan dengan tingkat ketelitian yang baik. Hal ini lebih disebabkan oleh kurang akuratnya data yang diperoleh melalui hasil sensus atau survei ekonomi. Tabel berikut menjelaskan mengenai pendapatan nasional Indonesia dengan pendekatan pendapatan :

Perhitungan pendapatan nasional dapat diperoleh dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) yaitu dengan menghitung pengeluaran atau belanja oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode tertentu. Pendapatan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat akan dibelanjakan pada berbagai jenis barang dan jasa atau ditabung. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran akan mendapatkan hasil yang sama dengan pendekatan pendapatan. Secara teoritis ketiga metode perhitungan pendapatan nasional tersebut akan menghasilkan nilai yang sama karena ada dalam satu diagram aliran melingkar (*circular flow of diagram*) perekonomian.

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ini dibagi menjadi beberapa komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), ekspor dan impor. Rumusan pendapatan nasional secara lengkap dengan pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Dimana :

Y = Pendapatan nasional (GDP/GNP)

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga

I = Pengeluaran investasi perusahaan

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Ada beberapa aktivitas dan transaksi yang tidak dihitung dalam pendapatan nasional meskipun secara riil memberikan kontribusi terhadap produksi dalam nilai yang tidak kecil

sekalipun kalau dihitung secara total dalam setahun. Kondisi ini juga tidak terlepas dengan kultur dan aktivitas ekonomi masyarakat. Diantara transaksi yang tidak dihitung dalam pendapatan nasional adalah pembayaran transfer (*transfer payment*) yaitu perpindahan sejumlah uang dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya tanpa diikuti aktivitas produksi seperti pembayaran pensiun, subsidi sosial untuk bencana alam, bunga atas bunga pinjaman negara, hibah, hadiah, warisan, sumbangan untuk pernikahan, ulang tahun dan kematian, dsb. Demikian juga naik atau turunnya nilai barang-barang modal (*capital goods*) yang ditimbulkan oleh pengaruh inflasi dan deflasi yang disebut dengan *capital gains and losses*. Transaksi-transaksi yang bersifat illegal yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional seperti pembalakan hutan (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan, transaksi narkoba, praktek pelacuran dsb. Tidak dicantumkan dalam perhitungan pendapatan nasional juga karena alasan teknis seperti jasa ibu rumah tangga dari pagi sampai malam menyiapkan segala kebutuhan anak dan suami, ibu yang menyusui anak yang masih balita, orang tua yang mengantar anak ke sekolah, orang tua yang menjaga keselamatan anak-anaknya yang masih kecil, kegiatan berkebun di halaman rumah dan aktivitas kecil keseharian lainnya yang dikerjakan sendiri untuk kepentingan sendiri. Tabel berikut menjelaskan besarnya GDP Indonesia dalam beberapa kurun waktu :

Tabel 5.1.

GDP Triwulanan dalam Harga Konstan 2009 Menurut Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	2014				Total PDB 2014	2015
	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV		I
Konsumsi RT	76885,3	236999,9	239728,5	245711	956178,3	246936,8
Konsumsi Pem	8462,4	28901	30758,4	35365,9	121404,1	29503,1
Investasi Dom.	24090,1	74582,5	78016,5	78194,7	305823,3	80579,9
Ekspor	29040,9	153835,8	149998,2	149560,5	604619,2	152591,6
Impor	24573,3	104864,6	109628,5	113444	435185,2	116019,8
PDB	110259,4	392607,2	402661,9	390168,1	1572159,3	406089,7

SUMBER : BPS, *Indikator Ekonomi*

## 2.8. Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan indikator perekonomian makro yang sekaligus juga dapat mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional sebagai salah

indikator makro ekonomi yang paling mudah untuk mengetahui perkembangan dan struktur perekonomian. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari perhitungan pendapatan nasional yaitu :

1. *Mengetahui dan menelaah struktur dan susunan perekonomian.*

Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara termasuk dalam kriteria negara industri, negara pertanian atau negara yang ditopang oleh sektor jasa dan berapa besar kontribusi sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor industri, dan sektor-sektor lainnya terhadap nilai pendapatan nasional. Dengan pengukuran pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, maka dapat diketahui karakter perekonomian Melalui perhitungan pendapatan nasional juga dapat diamati arah perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara, berapa besarnya laju pertumbuhan ekonomi, seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, apakah arah perkembangan ekonomi sudah sesuai dengan yang ditentukan.

2. *Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu*

Dengan mengamati perkembangan dan perubahan pendapatan nasional dari tahun ke tahun akan dapat diketahui apakah perekonomian mengalami kemajuan atau justru sebaliknya, ada peningkatan kesejahteraan penduduk atau sebaliknya, terjadi perubahan struktur perekonomian atau tidak. Dari hasil analisis perhitungan pendapatan nasional tersebut menjadi titik tolak untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan dan melakukan revisi kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa perubahan yang terjadi.

3. *Membandingkan perekonomian antar daerah*

Perhitungan pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk membandingkan struktur, arah dan perkembangan ekonomi antar kabupaten, antar provinsi, antar kawasan dan bahkan antar negara di dunia. Sehingga dapat diketahui mana kabupaten, provinsi dan kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif atau negatif. Dari perhitungan pendapatan nasional tersebut juga dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui posisi negara Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan Dunia apakah termasuk dalam kelompok negara-negara berkembang atau negara maju, negara miskin atau negara kaya. Namun untuk menetapkan pendapatan nasional sebagai indikator makro ekonomi untuk membandingkan perekonomian antar daerah memiliki banyak masalah diantaranya (1) Tingkat harga dan nilai uang yang tidak sama antar daerah, uang Rp. 100 ribu di

Lombok memiliki nilai cukup besar namun tidak demikian halnya di Jakarta apalagi jika digunakan di negara-negara Eropa dan AS yang nilai mata uangnya lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah (2) Peranan yang tidak sama suatu barang di suatu daerah dengan daerah lainnya, komoditi beras memegang peranan vital bagi masyarakat yang makanan pokoknya nasi seperti di sebagian besar wilayah Indonesia Barat namun tidak demikian halnya di wilayah Papua yang makanan pokoknya sagu dan umbi, TV, Handphone, laptop merupakan barang mewah bagi sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang namun merupakan barang biasa bagi masyarakat di negara-negara industri maju (3) Penggunaan uang yang berbeda ada yang ditetapkan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar uang namun ada juga yang nilainya ditetapkan oleh pemerintah sehingga memberi implikasi ekonomi yang luas terhadap kegiatan-kegiatan di sektor-sektor riil.

#### 4. Merumuskan kebijakan pemerintah

Perhitungan pendapatan nasional juga dapat menjadi alat dan indikator untuk merumuskan kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor-sektor ekonomi. Dengan mengetahui proporsi masing-masing sektor dalam GNP, maka lebih memudahkan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas sektor-sektor ekonomi unggulan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor lainnya. Pengalaman pembangunan melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) memberikan arahan yang lebih jelas dalam menentukan target dan kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah baik menyangkut prioritas pemberian kredit, insentif pajak, pemberian subsidi sektor-sektor ekonomi tertentu. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan data dan perhitungan pendapatan nasional sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi pemerintah yaitu (1) Berkaitan dengan asumsi kesatuan dan keseragaman dalam perhitungan pendapatan nasional padahal dalam kenyataan di lapangan menunjukkan banyak variabilitas baik dalam pengertian kesatuan pasar, harga barang, dan juga berkaitan dengan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah untuk menggerakkan potensi ekonomi di seluruh tanah air. Indonesia yang tersebar dalam wilayah yang luas memungkinkan terjadinya variasi harga yang sangat tinggi sedangkan pergerakan modal dan perpindahan tenaga kerja relative sedikit. (2) Tingginya peranan sector pertanian dengan karakteristik produksinya yang kurang elastis dibandingkan dengan output hasil industri. Kemampuan produksi petani kurang fleksibel dalam menangkap perubahan permintaan. Sehingga posisi tawar (*bargaining position*) petani selalu kalah dalam menentukan harga produk pertanian, petani selalu menerima baik penurunan maupun kenaikan harga yang ditentukan oleh pasar. (3) Sebagian masyarakat

petani memanfaatkan hasil pertanian untuk kebutuhan sendiri sementara sisanya dijual di pasar sehingga tidak berkaitan dengan pasar. Sehingga nilai GNP tidak secara riil mencerminkan nilai total produksi nasional. (4) Dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah sehingga kemampuan menabung juga rendah dan akibatnya nilai modal menjadi lebih mahal dibandingkan tenaga kerja yang jumlahnya melimpah. Lemahnya kualitas SDM mengakibatkan kurang berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan. Perekonomian Indonesia menjadi sangat rentan dengan setiap perubahan yang terjadi pada perekonomian

Berikut menjelaskan bagaimana perhitungan

Sedirumuskan sebagai berikut :<sup>22</sup>

$$Y = C + I + G + X - M \dots\dots\dots u \dots\dots\dots (2.29)$$

Dimana :

Y : Pendapatan nasional

C : Pengeluaran konsumsiah

I : Pengeluaran investasi

G : Pengeluaran pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

Kemudian perlu dirumuskan persamaan pendapatan disposibel ( $Y_d$ ) yang nilainya diperoleh dari pengurangan pendapatan nasional ( $Y$ ) dengan pajak ( $T_x$ ) dan ditambah dengan pembayaran transfer ( $Tr$ ) dan dapat dirumuskan sebagai berikut <sup>23</sup>:

$$Y_d = Y - T_x + Tr \dots\dots\dots (2.30)$$

Sedangkan pendapatan disposibel dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi ( $C$ ) dan sisanya untuk tabungan ( $S$ ) sehingga dapat dirumukan sebagai berikut<sup>24</sup> :

$$Y_d = C + S \dots\dots\dots (2.31)$$

<sup>22</sup> Dornbusch, Fischer and Startz, 1998, *Macroeconomics*, 7<sup>th</sup>, McGraw-Hill Book Company Inc., p. 189

<sup>23</sup> Warren L Smith, "A Graphical Exposition of The Complete Keynesian System", dalam *Current Issues in Monetary Theory and Policy*, AHM Publishing Corp., 1976, hal. 4

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 190

Dengan menggabungkan antara persamaan (2.30) dengan (2.31) dapat diperoleh suatu formulasi sebagai berikut<sup>25</sup> :

$$C + S = Y_d = Y - T_x + T_r \dots\dots\dots (2.32)$$

Atau

$$C = Y_d - S = Y - T_x + T_r - S \dots\dots\dots (2.33)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.33) ke dalam persamaan (2.29) akan diperoleh formulasi sebagai berikut<sup>26</sup> :

$$Y = Y - T_x + T_r - S + I + G + X - M \dots\dots\dots (2.34)$$

Atau

$$S - I = (G - T_x + T_r) + X - M \dots\dots\dots (2.35)$$

Persamaan (2.35) menjelaskan bahwa kelebihan tabungan atas investasi ( $S - I$ ) pada sektor swasta (*private sector*) nilainya sama dengan defisit anggaran pemerintah (*government budget deficit*) ditambah dengan surplus neraca perdagangan (*balance of trade*).

Dari rumusan persamaan-persamaan di atas dapat dibangun suatu formulasi model makroekonomi yang merupakan identitas dasar makroekonomi (*basic macroeconomic identity*) yang dirumuskan sebagai berikut<sup>27</sup> :

$$C + I + G + X - M = Y = Y_d - T_r + T_x = C + S - T_r + T_x \dots\dots\dots (2.36)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa besarnya permintaan output yang nilainya sama dengan besarnya output yang ditawarkan yaitu GDP. Pengeluaran domestik yang merupakan bagian dari permintaan agregat dari dalam negeri ( $C + I + G$ ) disebut juga dengan penyerapan domestik (*domestic absorption*) dan diberi simbol A sedangkan  $X - M$  merupakan neraca perdagangan (*balance of trade*). Sehingga formulasi permintaan agregat pada persamaan (2.29) dapat dituliskan juga dengan struktur sebagai berikut<sup>28</sup> :

$$Y = A + X - M \dots\dots\dots (2.37)$$

---

<sup>25</sup> Brian Snowdon, Howard Vane and Peter Wynarczyk, *A Modern Guide to Macroeconomics An Introduction to Competing Schools of Thought*, Edward Elgar Publishing Ltd, Cambridge, 1995, hal. 288

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 193

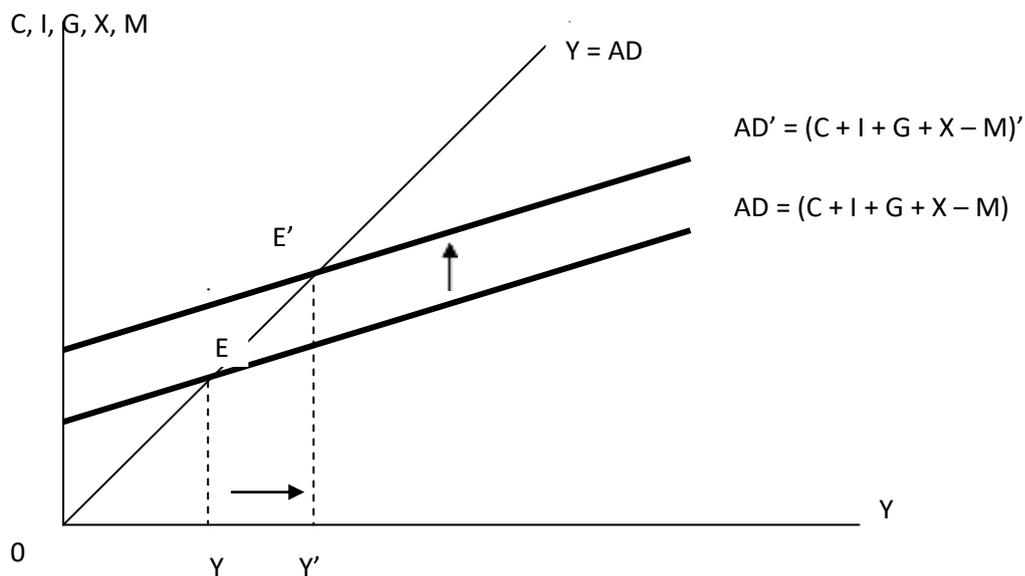
<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 195

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 196

atau

$$Y - A = X - M \dots\dots\dots (2.38)$$

Dari ekspresi persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa neraca pembayaran nilainya akan sama dengan besarnya pendapatan nasional dikurangi dengan besarnya penyerapan domestik. Jika saldo perdagangan positif, maka pertumbuhan ekonomi akan positif dengan asumsi absorpsi domestik tetap. Perubahan pada komponen absorpsi domestik dan neraca perdagangan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi akan menentukan perubahan arah dan besaran makroekonomi baik yang berorientasi ke dalam (*inward looking*) maupun ke luar (*outward looking*). Gambaran perubahan komponen makroekonomi dan pengaruhnya pada perekonomian dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.5.  
Model Keynesian dan Keseimbangan Makroekonomi  
(Dornbusch, Fischer dan Startz, 1998 : 196)

Analisis mengenai perubahan pada pasar modal terhadap penentuan keseimbangan nilai tukar pada perekonomian terbuka telah banyak dikaji oleh beberapa ahli. Pada

perekonomian di mana jumlah uang beredar ditentukan oleh pemerintah, maka permintaan uang dirumuskan dalam suatu fungsi likuiditas preferensi sebagai berikut :<sup>29</sup>

$$\frac{M^d}{P} = L(r, y) = \frac{M^s}{P}, \dots\dots\dots(2.39)$$

dimana :

$M^d$  = Permintaan uang

$M^s$  = Jumlah uang beredar

$P$  = Deflator harga domestik

$r$  = Tingkat bunga nominal domestik

$y$  = Pendapatan riil domestik

---

<sup>29</sup> Pentti JK Kouri, 1975, *Monetary Policy, The Balance of Payments and The Exchange Rate* dalam David Bigman and Teizo Taya, 1984, *Floating Exchange Rates and The State of World Trade and Payments*, Ballinger Publishing Company, hal. 130

## BAB II

### PERANAN PASAR DAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

#### 2.1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi Makro

Kelahiran ilmu ekonomi makro tidak lepas dari perkembangan situasi dan kondisi ekonomi dunia pada tahun 1930-an yang dilanda stagflasi yaitu kombinasi antara stagnasi dan inflasi dimana perekonomian mengalami kemunduran pertumbuhan ekonomi, banyak pengangguran dan sekaligus ancaman inflasi yang tinggi. Ilmu ekonomi makro modern dipopulerkan oleh John Maynard Keynes setelah mencermati berjalannya mekanisme ekonomi dan merumuskan perlunya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi ancaman pengangguran dan kenaikan harga-harga.

Ada beberapa pertanyaan pokok yang menonjol dalam tema ekonomi makro yaitu *pertama*, mengapa output dan lapangan kerja kadang-kadang mengalami penurunan serta bagaimana mengatasi pengangguran. Perkembangan siklus bisnis (*business cycle*) seringkali menunjukkan pola ekspansi dan kontraksi secara periodik serta menyisakan persoalan klasik ekonomi yaitu munculnya persoalan pengangguran dengan intensitas yang semakin besar. *Kedua*, Apa sumber utama penyebab inflasi serta bagaimana mengatasinya. Harga menjadi indikator utama dalam perekonomian yang menyiratkan perkembangan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam beberapa alternatif. Kebijakan pemerintah di bidang moneter menjadi unsur utama terjadinya inflasi di samping faktor-faktor riil lainnya seperti kurangnya pasokan barang karena gagal panen, terganggunya distribusi barang atau penimbunan barang oleh sebagian oknum masyarakat. *Ketiga*, Bagaimana perekonomian suatu negara dapat selalu mengalami pertumbuhan positif. Fokus utama dari kajian ekonomi makro adalah mengenai perubahan variabel ekonomi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kekayaan alam sebagai factor endowment menjadi kekuatan utama di negara-negara berkembang untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di negara maju mengandalkan pada perkembangan teknologi dan inovasi yang padat modal. Ilmu ekonomi makro modern memberikan rekomendasi melalui kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan pengendalian harga dan nilai tukar serta insentif kepada para pelaku usaha.

#### 2.2. Indikator Keberhasilan Ekonomi

Secara umum perilaku dan kebijakan ekonomi diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengambilan keputusan terbaik di antara berbagai alternatif.

Ilmu ekonomi makro juga menjelaskan mengenai bagaimana menentukan indikator keberhasilan ekonomi serta menetapkan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut. Tujuan dari ekonomi makro adalah :

1. Bagaimana tingkat output yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
2. Pengangguran yang rendah dan penciptaan lapangan kerja yang tinggi
3. Tingkat harga yang rendah dan terkendali

Salah satu tujuan pokok dari kebijakan ekonomi makro adalah mencapai tingkat output total yang tinggi dengan disertai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan. Nilai output total yang tinggi pada suatu perekonomian menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indikator untuk mengukur nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu periode adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin besar nilai PDB menunjukkan bahwa negara itu semakin besar dalam menghasilkan nilai produksi barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Ada dua makna PDB yang mempunyai arti berbeda yaitu PDB riil yang diukur dengan harga konstan dan PDB nominal yang diukur dengan harga berlaku.

Pengangguran yang rendah merupakan indikator makro ekonomi yang penting dari suatu perekonomian yang menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Setiap individu menginginkan dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dan mendapatkan upah yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran yang rendah juga menunjukkan pemerataan pendapatan dalam suatu perekonomian, karena implikasi dari pengangguran yang rendah artinya semakin banyak orang yang bekerja dan mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Secara teoritis dan empiris ada korelasi antara besarnya output total dengan angka pengangguran yang cenderung mengikuti siklus bisnis. Dalam kondisi perekonomian dimana output menurun maka permintaan tenaga kerja akan berkurang sehingga pengangguran naik dan sebaliknya jika output total naik maka permintaan tenaga kerja juga meningkat sehingga pengangguran akan berkurang.

Indikator makro ekonomi lainnya adalah stabilitas tingkat harga (inflasi) yang seringkali diukur dengan besarnya Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu mengukur biaya rata-rata dari sekeranjang barang-barang yang dibeli oleh masyarakat. Tingkat inflasi menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu dalam suatu perekonomian yang diukur dengan perubahan IHK. Deflasi terjadi manakala harga-harga menurun sehingga seringkali disebut dengan inflasi negatif. Stabilitas harga merupakan kondisi perekonomian yang

diidamkan setiap pelaku ekonomi untuk dapat memastikan bahwa sistem pasar dapat berjalan secara normal membawa pada mekanisme pasar dalam alokasi sumber daya secara efisien.

### **2.3. Instrumen Kebijakan Makroekonomi**

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas ekonomi memiliki seperangkat instrumen kebijakan ekonomi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan adalah variabel ekonomi di bawah kendali pemerintah yang dapat mempengaruhi satu atau lebih tujuan makro ekonomi. Dengan merubah instrumen kebijakan ekonomi tersebut dapat, maka dapat mempengaruhi arah perubahan perekonomian sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan.

Kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan instrumen moneter seperti tingkat bunga dan jumlah uang beredar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang (kurs). Dalam kondisi perekonomian yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, maka perlu diterapkan kebijakan moneter ekspansif misalnya dengan penurunan tingkat bunga untuk mendorong investasi sehingga perekonomian mengalami kenaikan. Sebaliknya kebijakan „uang ketat“ (*tight money policy*) diterapkan manakala perekonomian kondisi memanas sehingga berpotensi memicu inflasi, sehingga perlu diterapkan kebijakan peningkatan tingkat suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar (JUB) serta investasi sehingga perekonomian kembali terkendali.

Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penentuan dari sisi penerimaan (*taxing*) dan sisi pengeluaran (*spending*) pada anggaran belanja negara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Bagian penting dari kebijakan fiskal adalah perpajakan (*tax*) karena pajak merupakan komponen utama yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berkonsumsi dan juga mempengaruhi dari aspek penerimaan negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Untuk memulihkan perekonomian yang mengalami kelesuan (*stagnasi*) pemerintah bisa menggunakan instrumen kebijakan fiskal ekspansif misalnya dengan menurunkan pajak atau meningkat belanja rutin pemerintah sehingga perekonomian akan bergerak dan mengatasi masalah pengangguran. Demikian juga sebaliknya jika perekonomian mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat (*overheated*), maka pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal kontraktif yaitu dengan meningkatkan tarif pajak atau mengurangi belanja negara sehingga perekonomian dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi.

### **2.4. Konsep-Konsep Dasar Makroekonomi**

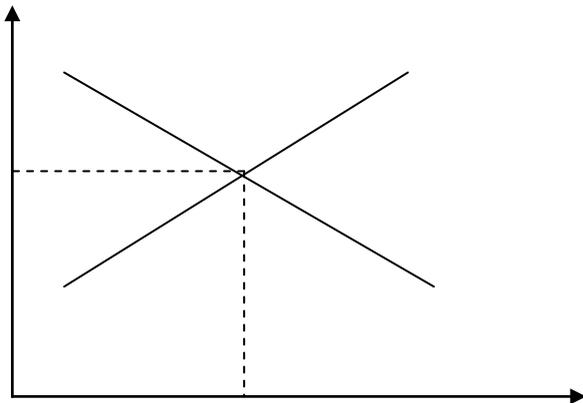
Gagasan tentang ilmu ekonomi diungkapkan oleh Adam Smith sejak tahun 1667 melalui bukunya "*The Wealth of Nations*" yang mengungkapkan fenomena „*invisible hand*” dalam menggerakkan aktivitas ekonomi individu dan masyarakat. Sedangkan konsep-konsep dasar ekonomi makro dirumuskan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930-an seiring dengan usahanya dalam memahami realitas ekonomi yang menghasilkan depresi besar menjelang perang dunia II. Rumusan makroekonomi Keynesian merupakan respon untuk menghindari perekonomian dari jebakan depresi sebagai akibat dari perekonomian yang kehilangan kemampuan dalam mewujudkan keseimbangan dalam pengerjaan penuh (*full employment*). Ada beberapa pertanyaan mendasar yang selalu menjadi perbincangan ahli ekonomi yaitu :

1. *Mengapa output dan lapangan kerja mengalami fluktuasi dan bagaimana mengatasi pengangguran ?* Hampir setiap perekonomian mengalami siklus ekonomi yang menghasilkan kondisi perekonomian yang kadang meningkat dan kadang mengalami resesi bahkan depresi. Ilmu ekonomi menjelaskan sumber-sumber terjadinya pengangguran dan merumuskan usaha untuk mengatasi pengangguran melalui kebijakan peningkatan permintaan agregat misalnya menambah jumlah anggaran belanja pemerintah atau mengurangi pajak.
2. *Mengapa terjadi inflasi dan apa sumber utama terjadinya inflasi ?* Perkembangan harga mengisyaratkan adanya dinamika dalam perekonomian melalui kekuatan permintaan dan penawaran di pasar atas suatu jenis barang dan jasa. Kenaikan harga atau inflasi menimbulkan permasalahan bagi sebagian besar masyarakat terutama konsumen karena pendapatannya kehilangan nilai untuk mendapatkan barang di pasar. Ilmu ekonomi makro merumuskan strategi yang tepat untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal serta stabilitas nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing.
3. *Bagaimana peranan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan pemerataan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.* Peningkatan output dapat dilakukan melalui strategi mendorong produktifitas faktor-faktor produksi. Produksi nasional juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan perdagangan sesuai dengan keunggulan yang dimiliki suatu negara. Peningkatan produksi nasional juga mensyaratkan kondisi perekonomian yang stabil, aman, pemerintahan yang kredibel dan kebijakan yang memberikan insentif bagi para pelaku ekonomi.

## **2.5. Peranan Pasar dalam Perekonomian**

Pasar dalam ilmu ekonomi berbeda pengertiannya dengan pasar dalam pengertian masyarakat sehari-hari yang diidentikkan dengan suatu lokasi tertentu dimana terjadi

transaksi ekonomi berbagai jenis barang dan jasa. Dalam pengertian ilmu ekonomi „pasar“ (*market*) diartikan dengan suatu interaksi antara kekuatan permintaan dari konsumen dengan penawaran dari produsen yang akan menentukan keseimbangan pasar baik harga keseimbangan maupun kuantitas keseimbangan. Ide dasar dari peranan pasar dalam perekonomian adalah doktrin *laissez-faire* artinya „biarkan kami sendirian“ dalam konteks mengambil keputusan yang terbaik menurut kami dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Jadi pasar (*market*) adalah sebuah mekanisme dimana terjadi interaksi antara konsumen dan produsen untuk menentukan harga dan kuantitas keseimbangan serta melakukan pertukaran barang dan jasa. Dalam pandangan kaum klasik bahwa yang tahu persis tentang permasalahan ekonomi adalah individu-individu dalam pasar baik konsumen maupun konsumen sehingga manakala perekonomian diselesaikan melalui mekanisme pasar, maka pasar dengan kekuatan permintaan dan penawaran akan dapat menyelesaikan dengan cara yang paling efisien. Dan sebaliknya manakala ada campur tangan dari pemerintah justru akan menyebabkan distorsi ekonomi. Gambar berikut menjelaskan bagaimana pasar menentukan titik keseimbangan (*equilibrium*) pasar :



Dalam sistem pasar semua jenis barang dan jasa ada harganya yang menunjukkan besarnya nilai suatu barang dan jasa. Besarnya harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang nilai bisa berubah-ubah tergantung perubahan situasi di pasar. Jika Harga barang naik mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan sebaliknya konsumen akan mengurangi pembelian barang. Keseimbangan pasar menunjukkan interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu barang, jadi menggambarkan keseimbangan diantara semua pembeli dan penjual yang berbeda di pasar.

Bagaimana pasar memecahkan masalah ekonomi ? Melalui kekuatan pasar untuk mencapai titik keseimbangan, maka sekaligus dapat menyelesaikan masalah ekonomi what, how dan for whom. Sebagaimana terlihat pada bagan berikut :

Melalui mekanisme tangan tak kelihatan (*invisible hand*) sebagaimana diungkapkan Adam Smith melalui bukunya *The Wealth of Nations* dimana dia mengungkapkan bahwa adanya harmoni antara tuntutan swasta dan perusahaan untuk mengejar keuntungan dan manfaat dalam pertukaran. Dengan mengejar keuntungan sendiri seringkali dengan sendirinya juga akan memberikan keuntungan untuk bersama karena hal itu pada akhirnya juga akan menguntungkan semua termasuk dirinya sendiri. Adam Smith mengungkapkan dalam suatu sistem pasar kompetitif pasar akan berusaha dengan sebaik mungkin melakukan alokasi sumber daya yang tersedia secara efisien. Dalam sistem pasar yang kompetitif akan mendorong terjadinya perdagangan dan spesialisasi sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Dengan spesialisasi tiap individu dan negara akan fokus pada sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, sehingga akan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Spesialisasi juga akan mendorong terwujudnya pembagian kerja (*division of labor*) baik dalam skala individu maupun negara sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Peran pasar juga terkait dengan aspek pertukaran di antara pelaku ekonomi. Dalam perekonomian tradisional ditandai dengan kegiatan barter yaitu pertukaran barang dengan barang secara langsung. Pertukaran barter mensyaratkan adanya kesamaan antara aspek barang, waktu, tempat dan keinginan para pelakunya (*double coincidence of want*). Jika tidak terpenuhi salah satunya maka barter tidak dapat terwujud sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan melalui cara barter. Dari pengalaman barter inilah kemudian mulai dipikirkan perlunya alat transaksi yang dapat memudahkan pertukaran antara satu individu dengan individu lainnya. Alat pertukaran itu adalah uang yang harus memiliki ciri-ciri tertentu agar dapat diterima secara luas sebagai alat tukar.

Peranan uang dalam perekonomian pasar ibarat seperti pelumas dalam mesin industri yang akan memperlancar arus produksi, konsumsi, distribusi dan transaksi di antara individu dalam suatu perekonomian. Untuk itu disini perlu diperhatikan stabilitas nilai uang agar dapat berfungsi secara optimal dalam perekonomian. Perubahan nilai mata uang ditandai dengan naik turunnya harga barang dan jasa di masyarakat serta perubahan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain (*kurs*). Fluktuasi nilai mata uang secara internal yaitu inflasi pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja ekonomi secara makro seperti

konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. Demikian juga fluktuasi nilai mata uang secara eksternal yaitu kurs akan berdampak pada kinerja ekspor, impor, hutang luar negeri, investasi asing, dan posisi neraca pembayaran. Jadi dalam ekonomi pasar peranan uang, modal, spesialisasi dan perdagangan merupakan bagian pokok dari kegiatan ekonomi yang berpengaruh luas dalam suatu perekonomian. Karena dengan spesialisasi akan menciptakan efisiensi dan mendorong produksi serta perdagangan. Dan dengan penggunaan uang akan memperlancar arus perdagangan antar individu dan negara melalui peranan lembaga keuangan dan perbankan sebagai lembaga mediator antara penabung dan investor.

## **2.6. Peran Pemerintah dalam Perekonomian**

Dalam sistem ekonomi pasar memang dapat mewujudkan efisiensi ekonomi dan produktifitas usaha. Namun hal itu baru dapat terwujud manakala terpenuhi asumsi bahwa dalam perekonomian secara sukarela di dalamnya terjadi pertukaran semua barang dan jasa dengan uang pada harga pasar. Dengan kondisi tersebut niscaya akan tercapai maksimisasi manfaat dari penggunaan sumber daya yang ada. Namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada suatu perekonomian yang dapat berjalan secara ideal . Namun sebaliknya selalu dijumpai ada kekurangan dalam penggunaan sumber daya ekonomi sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi seperti polusi (eksternalitas negatif), pengangguran, inflasi, ketidakmerataan pendapatan, dsb.

Untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pasar tersebut maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Secara politis memang dibentuknya negara adalah untuk menyelenggarakan fungsinya untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat, sehingga peran pemerintah dalam perekonomian adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, memajukan keadilan ekonomi, dan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam perekonomian untuk menutup kenyataan bahwa dalam kenyataan pasar gagal (*market failure*) untuk menyelesaikan beberapa persoalan ekonomi yaitu :

### *1. Eksternalitas (externality)*

Dalam transaksi ekonomi di pasar yang melibatkan agen-agen ekonomi yang didorong oleh motif ekonomi tanpa disadari menimbulkan pembebanan biaya atau manfaat yang tidak semestinya. Misalnya keputusan perusahaan untuk membuat lampu penerangan sepanjang jalan menuju pabrik dan di sekeliling perusahaan memberikan manfaat lebih baik kepada lingkungan perusahaan maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Namun sebaliknya suara

bising, debu, kemacetan, lingkungan yang kotor, peningkatan angka kriminalitas yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan juga sangat dirasakan oleh masyarakat dimana perusahaan tidak memberikan kompensasi yang memadai kepada masyarakat sama halnya dengan masyarakat tidak memberikan kompensasi kepada perusahaan atas jasa penerangan jalan yang mereka rasakan.

Eksternalitas adalah pengaruh sampingan yang terjadi manakala perusahaan atau individu membebankan biaya atau manfaat atas pihak lain di luar tempat terjadinya transaksi di pasar. Ada dua macam eksternalitas yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Pemerintah lebih concern dalam memperhatikan persoalan yang menyangkut eksternalitas negatif seperti polusi yang terus meningkat, masalah kemacetan, kerusakan lingkungan karena penambangan, kebakaran hutan, dsb. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai regulator membuat peraturan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari setiap aktivitas ekonomi. Intervensi pemerintah dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi kepada perusahaan atau pihak yang menimbulkan pencemaran atau pemberian santunan kepada pihak yang dirugikan. Langkah preventif dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan atau perundang-undangan yang harus ditaati oleh semua pihak dengan pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

## *2. Persaingan Tidak Sempurna*

Dalam pasar persaingan sempurna diasumsikan informasi pasar dan mobilitas sumber daya berjalan dengan sempurna. Dalam kenyataan ada distorsi pasar disebabkan monopoli oleh satu perusahaan atas suatu barang atau faktor produksi sehingga perusahaan tersebut dapat mengendalikan harga di pasar. Akibat dari persaingan tidak sempurna menyebabkan kenaikan harga di atas biaya dan berakibat permintaan konsumen akan menurun serta produksi barang pada akhirnya juga menurun. Dalam hal ini pemerintah berwenang mengatur agar supaya praktek monopoli jangan sampai merugikan masyarakat dalam bentuk pengaturan harga, persetujuan pembagian pasar dan undang-undang anti monopoli.

## *3. Barang-barang Publik (Public goods)*

Barang publik dalam suatu perekonomian merupakan fenomena eksternalitas positif dimana biaya untuk perluasan jasa bagi setiap tambahan orang adalah nol dan tidak mungkin melarang orang atau individu untuk ikut menikmatinya. Contoh barang publik misalnya jalan raya, keamanan nasional, lampu penerang jalan, trotoar, jembatan, taman kota, dsb. Dalam hal penyediaan barang publik maka peranan pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian karena mekanisme pasar gagal dalam menyelesaikan permasalahan barang publik ini. Dalam kaitannya dengan penyelesaian permasalahan eksternalitas negatif dan

positif, maka peranan pemerintah menjadi suatu keniscayaan. Untuk menopang fungsi dan tugasnya sebagai regulator, organisator dan mediator dalam perekonomian, maka campur tangan pemerintah juga melibatkan wewenang pemerintah dalam menarik pajak untuk membiayai operasinya. Jadi kegagalan pasar (*market failure*) yang menimbulkan monopoli dan eksternalitas menjadi alasan perlunya campur tangan negara dalam mengatasi masalah ekonomi tersebut untuk mewujudkan keadilan ekonomi.

#### 4. Keadilan ekonomi

Mekanisme pasar tidak selalu dapat mewujudkan keadilan ekonomi meskipun mekanisme pasar telah berjalan secara efisien dalam alokasi sumber daya. Efisiensi pasar justru seringkali menimbulkan permasalahan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di tengah masyarakat. Sebuah tantangan dalam perekonomian yaitu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi sumber daya ekonomi secara efisien dan sekaligus mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah dalam mewujudkan keadilan ekonomi karena seringkali mekanisme pasar gagal dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Bentuk campur tangan pemerintah yaitu pengenaan pajak progresif kepada individu atau perusahaan yang memperoleh keistimewaan dalam transaksi ekonomi. Pendapatan pemerintah dari hasil pengumpulan pajak kemudian digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama termasuk pemberian subsidi bagi kelompok marginal dalam masyarakat.

## **BAB III**

### **ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL**

#### **3.1. Penentuan Pendapatan Nasional**

Pendapatan nasional adalah nilai total produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu perekonomian selama periode tertentu yang dihasilkan dari sebuah proses interaksi antar berbagai komponen pelaku ekonomi. Dalam analisis pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor diasumsikan hanya ada pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan yang masing-masing bergerak didorong oleh *self interest* yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan mencapai kepuasan maksimum bagi konsumen dan mendapatkan keuntungan maksimum bagi produsen. Dorongan self interest tersebut melandasi bekerjanya mekanisme „tangan tak kentara“ (*invisible hand*) dalam menggerakkan aktivitas ekonomi secara natural. Konsekuensi dari prinsip dasar ekonomi tersebut adalah terbentuknya persaingan antar pelaku ekonomi serta munculnya fenomena fleksibilitas harga barang dan upah pekerja. Prinsip dasar ekonomi inilah yang melandasi model pemikiran ekonomi klasik yang dicetuskan oleh Adam Smith pada tahun 1667 dalam bukunya „*In Inquiry into Nature Causes of The Wealth of Nations*“. Buku *The Wealth of Nations* menegaskan tentang bekerjanya „*invisible hand*“ melalui mekanisme sistem pasar yaitu interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang akan menentukan keseimbangan pasar. Melalui bekerjanya mekanisme pasar tersebut akan tercapai kondisi ekonomi yang ideal yaitu perekonomian mencapai keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) dalam pengerjaan penuh (*full employment*). Aspek utama dari mekanisme pasar model ekonomi klasik adalah bertumpu pada „*market clearing*“ karena tiap pelaku ekonomi mengambil keputusan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Bagaimana dengan peranan pemerintah ? Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang mengawasi atas bekerjanya mekanisme pasar agar dapat berjalan secara *fair* dan tidak terjadi gangguan dalam perekonomian (*economics distortion*). Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian justru akan menimbulkan permasalahan dan perekonomian tidak dapat mencapai kondisi keseimbangan dalam pengerjaan penuh (*full employment*). Kondisi ini disebabkan pemerintah tidak bisa memahami orientasi dan preferensi yang terbaik dari tiap pelaku ekonomi di pasar. Keterlibatan pemerintah baru diperlukan dalam kondisi ekonomi yang mengalami stagnasi dimana pasar tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonominya.

Penentuan besarnya nilai produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian yaitu GDP/GNP ditentukan oleh besarnya jumlah input (faktor produksi) yang dimiliki suatu perekonomian dan kemampuan input dalam menghasilkan output (fungsi produksi). Faktor produksi adalah jumlah input yang digunakan suatu perekonomian secara penuh untuk menghasilkan output dengan tingkat penggunaan yang terbaik. Ada dua macam faktor produksi utama yaitu tenaga kerja ( $L = \text{labour}$ ) dan modal ( $K = \text{kapital}$ ) yang diasumsikan digunakan secara penuh artinya tidak ada yang menganggur atau terbuang (*wasted*).

### 2.3. Faktor Produksi dan Fungsi Produksi

Fungsi produksi menggambarkan transformasi dari input menjadi output dan menunjukkan besarnya output yang dapat dihasilkan dari penggunaan input  $K$  dan  $L$  dengan menggunakan teknologi tertentu. Diasumsikan bahwa fungsi produksi adalah dengan skala hasil yang konstan (constant return to scale) artinya pertambahan jumlah output sama dengan pertambahan jumlah input yang digunakan dalam proses produksi. Fungsi produksi dapat dirumuskan dalam suatu fungsi berikut :

$$Q = f(K, L)$$

Dimana :

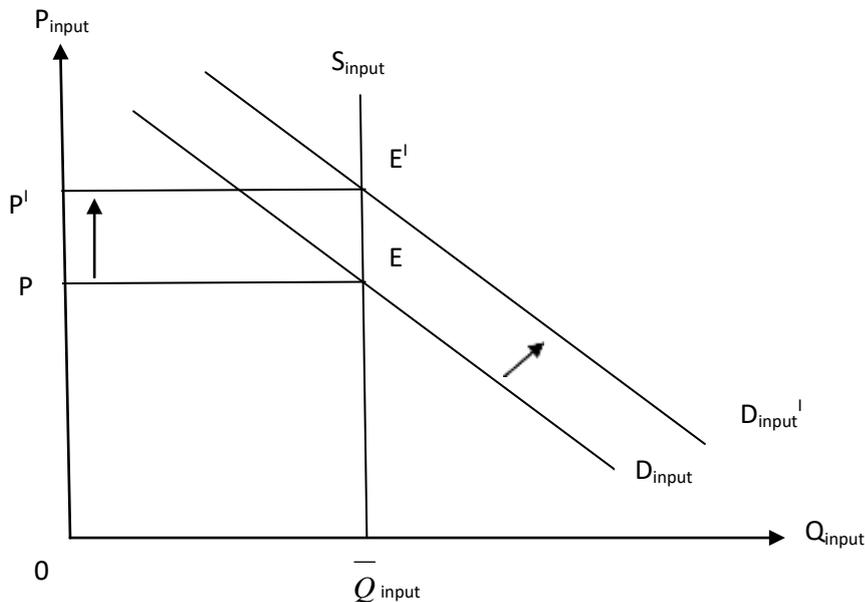
$Q = \text{Output}$

$K = \text{Input Kapital}$

$L = \text{Input Labour}$

Fungsi produksi tersebut juga mengungkapkan bahwa penggunaan input  $K$  dan  $L$  secara bersama akan menghasilkan besarnya output total suatu perekonomian yaitu GNP atau GDP. Diasumsikan bahwa jumlah input  $K$  dan  $L$  adalah tertentu sehingga jumlah output yang dihasilkan juga bersifat tetap (*fixed*). Jadi jumlah faktor produksi dan fungsi produksi secara bersama akan menentukan besarnya output total dan sekaligus juga sama dengan besarnya pendapatan nasional total (*total national income*). Distribusi pendapatan nasional terhadap tenaga kerja dan pemilik modal ditentukan oleh besarnya harga masing-masing input tersebut. Harga faktor produksi adalah besarnya uang yang dibayarkan untuk mendapatkan faktor produksi. Harga faktor produksi tenaga kerja adalah pendapatan upah tenaga kerja (*wages*), sedangkan harga faktor produksi kapital adalah sewa (*rent*). Diasumsikan bahwa jumlah  $K$  dan  $L$  adalah tetap, maka kurva penawaran faktor produksi adalah vertikal artinya dengan jumlah input  $K$  dan  $L$  dalam jangka panjang bersifat tetap dan dalam pengerjaan penuh (*full employment*). Harga yang dibayarkan kepada pemilik faktor produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran faktor produksi. Karena kurva penawaran faktor produksi vertikal, sehingga keseimbangan pasar harga faktor produksi ditentukan oleh tinggi

rendahnya permintaan faktor produksi. Keseimbangan pasar faktor produksi digambarkan dalam kurva berikut ini :



Kurva di atas menjelaskan bahwa kurva penawaran input ( $S_{input}$ ) bersifat vertikal artinya bahwa jumlah input K/L adalah tetap dalam jangka panjang, sehingga harga input ( $P_{input}$ ) ditentukan oleh permintaan input ( $D_{input}$ ). Jika permintaan input naik menjadi ( $D_{input}^I$ ), maka keseimbangan pasar input bergeser dari titik E ke titik  $E^I$  sehingga harga input meningkat dari P ke  $P^E$ . Jadi besarnya distribusi output nasional atau pendapatan nasional kepada tenaga kerja dan pemilik modal ditentukan oleh harga masing-masing input melalui interaksi antara permintaan input ( $D_{input}$ ) dan penawaran input ( $S_{input}$ ). Harga input tenaga kerja adalah upah (wages) dan harga input modal adalah sewa (rent). Sedangkan harga output barang dan jasa (P) ditentukan oleh permintaan barang dan jasa ( $D_{output}$ ) dan penawaran barang dan jasa ( $S_{output}$ ).

Tujuan dari kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan (profit) yaitu pendapatan (revenue) setelah dikurangi dengan biaya total (total cost). Pendapatan diperoleh dari hasil perkalian antara harga barang dan jasa dengan output ( $P \times Q$ ), sedangkan biaya total diperoleh dari penjumlahan biaya modal ( $W \times L$ ) dan biaya tenaga kerja ( $r \times L$ ). Persamaan profit ( $\pi$ ) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Profit } (\pi) = P \times Q - w \times L + r \times K$$

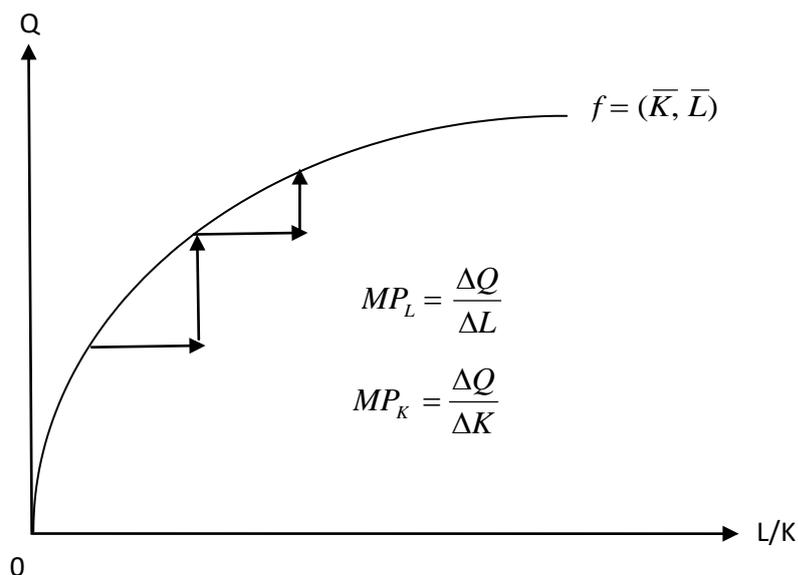
Karena  $Q = f(K,L)$  maka persamaan di atas dapat dirumuskan kembali menjadi :

$$\text{Profit } (\pi) = P \times f(K,L) - w \times L + r \times K$$

Dari persamaan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa besarnya profit ditentukan oleh besarnya harga barang (P), upah (W), sewa (R), tenaga kerja (L) dan modal (K). Jadi besarnya profit dipengaruhi oleh kondisi pada pasar barang dan jasa, pasar input tenaga kerja (L) dan pasar input modal (K). Perusahaan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum, sehingga perusahaan akan memanfaatkan tenaga kerja dan modal pada jumlah yang dapat memaksimalkan keuntungan.

#### 2.4. Produksi Marginal Input Tenaga Kerja dan Modal

Input tenaga kerja (Labour) berkontribusi dalam perekonomian melalui aspek fisik dan non fisik (*soft skills*) yang akan mempengaruhi produktifitas kerja yaitu fisik tenaga, pengetahuan, pengalaman, kemampuan analisa, daya kreasi, komunikasi, manajerial skills, dsb. Besarnya tambahan output dari setiap pertambahan input tenaga kerja (L) per satu satuan disebut dengan produksi marginal tenaga kerja (*marginal product of labour = MP<sub>L</sub>*). Besarnya MP<sub>L</sub> menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan seiring dengan pertambahan jumlah tenaga kerja secara konstan dikenal dengan penurunan produksi marginal tenaga kerja (*diminishing marginal product of labour*) dengan asumsi jumlah kapital tetap. Fenomena ini digambarkan dengan kurva marginal produk tenaga kerja yang bentuknya semakin mendatar (*flat*) seiring dengan pertambahan input tenaga kerja sebagaimana dalam gambar berikut :



Kurva di atas mengungkapkan bahwa pertambahan input L secara konstan akan menyebabkan pertambahan output Q semakin lama semakin kecil, sehingga kurva output semakin landai dengan asumsi jumlah input K tetap. Fenomena yang sama juga terjadi pada input K, bahwa pertambahan input K secara konstan akan meningkatkan pertambahan output (Q) dengan pertambahan yang semakin menurun (*diminishing marginal product of capital*) dengan asumsi jumlah tenaga kerja tetap.

#### 2.4. Permintaan Input Tenaga Kerja dan Modal

Pertambahan profit dipengaruhi oleh besarnya pertambahan pendapatan dan pertambahan biaya. Sedangkan pertambahan jumlah tenaga kerja L akan menyebabkan pertambahan pendapatan dan juga pertambahan biaya total. Besarnya tambahan pendapatan ditentukan oleh marginal produk tenaga kerja ( $MP_L$ ) dan besarnya harga barang. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\Delta \text{ Profit} = \Delta \text{ Pendapatan} - \Delta \text{ Biaya}$$

Sedangkan :

$$\Delta \text{ Pendapatan} = P \times MP_L$$

$$\Delta \text{ Biaya} = W$$

Sehingga :

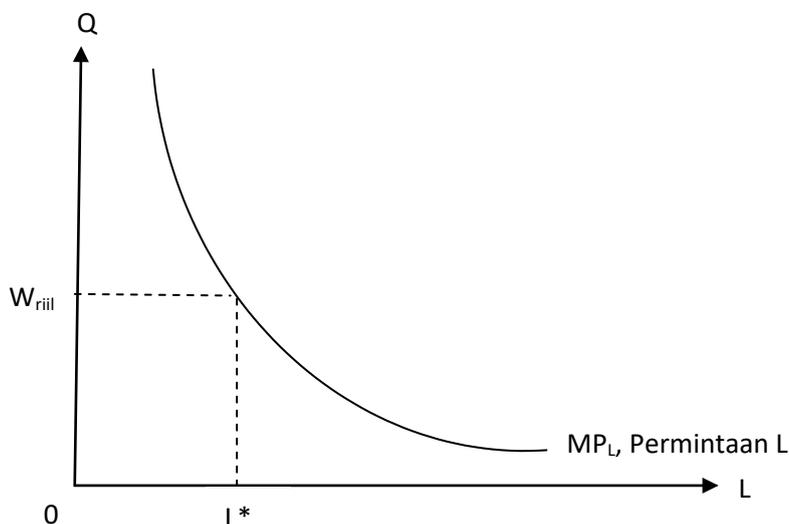
$$\text{Profit} = P \times MP_L - W$$

Dari rumusan tersebut dapat dikembangkan bahwa permintaan tenaga kerja (demand of labour) ditentukan oleh  $P \times MP_L = W$

Atau

$$MP_L = \frac{W}{P}, \text{ menunjukkan besarnya upah riil}$$

Penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam kurva di bawah ini :



Kurva di atas mengungkapkan tentang permintaan tenaga kerja bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi, maka marginal produk tenaga kerja semakin menurun demikian juga upah riil ( $W_{riil}$ ) semakin berkurang. Penjelasan yang sama pada permintaan kapital yaitu :

$$\Delta \text{ Profit} = \Delta \text{ Pendapatan} - \Delta \text{ Biaya}$$

Sedangkan :

$$\Delta \text{ Pendapatan} = P \times MP_K$$

$$\Delta \text{ Biaya} = \text{Rent (R)}$$

Sehingga :

$$\text{Profit} = P \times MP_K - R$$

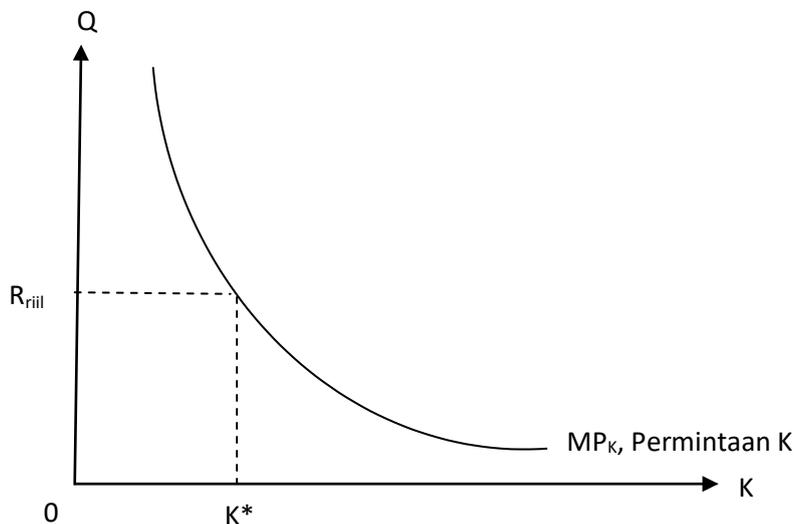
Dari rumusan tersebut dapat dikembangkan bahwa permintaan kapital (*demand of capital*) ditentukan oleh  $P \times MP_K = R$

Sehingga didapatkan :

$$MP_K = \frac{R}{P}, \text{ menunjukkan besarnya sewa kapital riil ( } R_{riil} = \text{real rental price of}$$

*capital*).

Penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam kurva di bawah ini :



Kurva marginal produk input modal ( $MP_K$ ) slopenya menurun mengungkapkan tentang permintaan modal (*demand of capital*) bahwa semakin besar jumlah modal, maka marginal produk dari input modal ( $MP_K$ ) akan semakin menurun (*diminishing marginal product of capital*). Kesimpulan atas penjelasan tentang permintaan input modal dan tenaga kerja mengungkapkan bahwa permintaan atas masing-masing faktor produksi tersebut terjadi

kondisi dimana marginal produk tiap faktor produksi sama dengan harga riil faktor produksi tersebut.

## 2.5. Distribusi Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional didistribusikan kepada seluruh pelaku ekonomi yang berkontribusi dalam pembentukan produk nasional yaitu upah (wages) kepada tenaga kerja, sewa (rent) kepada pemilik modal dan keuntungan ekonomi (economic profit) kepada perusahaan (firm). Kontribusi tenaga kerja dirumuskan dalam  $MP_L \times L$ , kontribusi pemilik modal dirumuskan dengan  $MP_K \times K$ , sehingga pendapatan nasional/produk nasional (Y) dapat dirumuskan dalam suatu kesamaan sebagai berikut :

$$Y = (MP_L \times L) + (MP_K \times K) + Ec. \Pi$$

Dimana :

Y = Pendapatan nasional/Produk Nasional

$MP_L$  = Marginal produk dari tenaga kerja

$MP_K$  = Marginal produk dari modal

L = Tenaga kerja

K = Kapital

Sehingga dapat dirumuskan menjadi :

$$Ec. \Pi = Y - (MP_L \times L) - (MP_K \times K)$$

Keuntungan ekonomi adalah bagian keuntungan yang diterima perusahaan setelah dibayarkan upah untuk tenaga kerja dan dibayarkan sewa kepada pemilik modal, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Ec. \Pi = Y - W - R$$

Rumusan tersebut juga mengungkapkan bahwa produktifitas tenaga kerja dan kapital menentukan besarnya output total yang dihasilkan dan juga besarnya keuntungan ekonomi. Sedangkan produktifitas tenaga kerja ditentukan oleh kualitas dan kuantitas tenaga kerja dan juga kemampuan tenaga kerja dalam melakukan transformasi untuk menghasilkan output melalui fungsi produksinya. Demikian juga halnya produktifitas kapital ditentukan oleh kualitas dan kuantitas kapital yang ada dan kemampuan pemilik modal dalam melakukan transformasi untuk menghasilkan output melalui fungsi produksinya.

## 2.6. Teorema Euler (*Euler's Theorem*)

*Teorema Euler* menjelaskan bahwa jika tiap faktor produksi dibayar sebesar marginal produknya, maka penjumlahan marginal produk atas semua inputnya sebesar nilai output total yang dihasilkan dengan asumsi skala ekonomi adalah tetap (*constant return to scale*).

Implikasinya adalah jika skala ekonominya tetap, maka ekonomi profit adalah nol sebagaimana dirumuskan dalam fungsi berikut :

$$f(K, L) = (MP_L \times L) - (MP_K \times K)$$

Jadi *Teorema Euler* mengungkapkan bahwa profit ekonomi sama dengan nol terjadi dalam kondisi skala ekonomi tetap (*constan return to scale*) dengan struktur pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) serta tercapainya keuntungan maksimum (*profit maximition*).

## 2.7. Penentuan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional atau produk nasional dalam perekonomian secara keseluruhan (GDP/GNP) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + X - M \dots\dots\dots (2.29)$$

Dimana :

Y : Pendapatan nasional/produk nasional (GDP/GNP)

C : Pengeluaran konsumsi rumah tangga

I : Pengeluaran investasi perusahaan

G : Pengeluaran pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

Komponen pengeluaran konsumsi (C) merupakan bagian paling besar dalam struktur pendapatan nasional (GDP/GNP). Ada fungsi yang bersifat resiprokal antara konsumsi (C) dengan pendapatan nasional (Y), dimana besarnya konsumsi dipengaruhi pendapatan nasional dan sebaliknya pendapatan nasional (Y) juga ditentukan oleh besarnya konsumsi masyarakat (C). Dalam hal ini fungsi konsumsi tidak dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional tetapi dipengaruhi pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) yaitu pendapatan nasional setelah dikurangi dengan pajak (tax) dan dirumuskan dengan persamaan fungsional sebagai berikut :

$$C = f(Y_d)$$

$$Y_d = Y - Tx$$

Dimana :

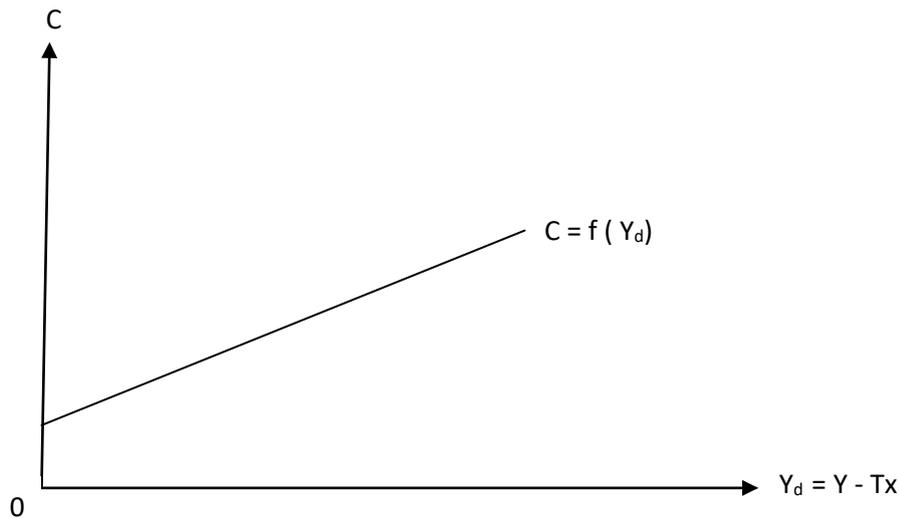
C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga

$Y_d$  = Pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*)

Y = Pendapatan nasional

Tx = Pajak (*tax*)

Gambaran konsumsi rumah tangga dijelaskan dalam kurva konsumsi sebagai berikut :



Kurva konsumsi (C) di atas menggambarkan bahwa semakin tinggi pendapatan disposable, maka pengeluaran konsumsi akan semakin meningkat. Besarnya tambahan pengeluaran konsumsi (C) pada setiap pertambahan pendapatan disposable per satu satuan disebut dengan *marginal propensity to consume (MPC)* yang nilainya  $\frac{\Delta C}{\Delta Y_d}$  menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi (C) jika terdapat perubahan pendapatan disposable (Y<sub>d</sub>). Nilai MPC mencerminkan kondisi dan karakter masyarakat tertentu, jika misalnya pada masyarakat yang belanja kebutuhan pokok dengan MPC = 0,95 artinya pendapatan lebih yang diterima setelah dikenakan pajak maka 95 % digunakan untuk belanja kebutuhan pokok.

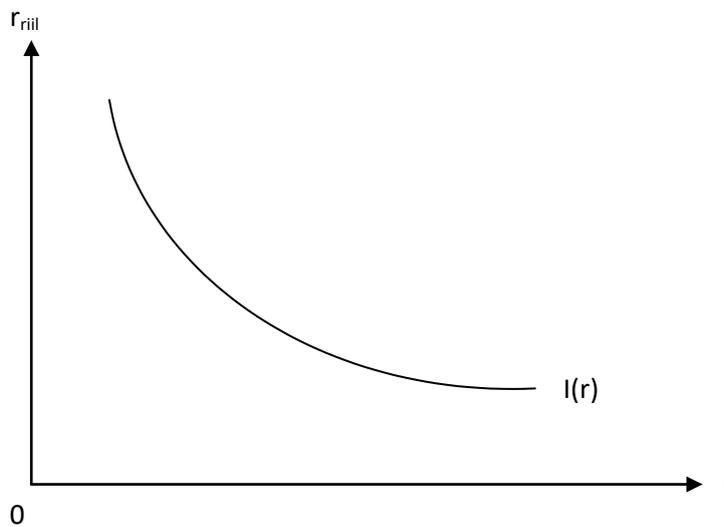
## 2.7. Fungsi Investasi

Investasi merupakan komponen penting dalam perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dengan investasi akan menyebabkan kapasitas produksi akan meningkat karena ada alokasi dana untuk pembelian barang-barang modal (capital forming), penggantian barang yang rusak karena penyusutan (depreciation), dan dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R &

D) untuk pengembangan teknologi. Ada perbedaan pandangan mengenai faktor yang mempengaruhi investasi apakah dipengaruhi tingkat bunga nominal ataukah tingkat bunga riil. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang dilaporkan secara resmi dan menentukan besarnya biaya modal yang dibayar investor dari meminjam uang. Sedangkan tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal dengan memasukkan besarnya tingkat inflasi.

Fungsi investasi menjelaskan hubungan antara besarnya jumlah investasi dengan tingkat bunga riil dimana sifat hubungannya adalah negatif yaitu jika tingkat bunga riil turun, maka tingkat investasi akan meningkat dan sebaliknya. Sifat hubungan negatif antara tingkat

bunga riil dengan jumlah investasi dijelaskan dalam kurva investasi dengan lereng negatif sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Dalam kenyataan ekonomi di lapangan menunjukkan bahwa investasi tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi seperti situasi sosial dan politik, kebijakan pemerintah, perilaku masyarakat, dsb.

## 2.8. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah ( $G$ ) merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal yaitu penentuan besarnya pajak dan subsidi. Penerimaan pajak ( $T_x$ ) digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah ( $G$ ), jika  $G = T_x$  dikatakan pemerintah menerapkan kebijakan anggaran berimbang (*balanced budget*). Sedangkan jika  $G > T_x$  dikatakan pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit (*deficit budget*), tetapi jika  $G < T_x$  dikatakan pemerintah menerapkan kebijakan anggaran surplus (*surplus budget*).

Peranan pemerintah dalam perekonomian merupakan kontribusi penting dari pemikiran ekonomi *John Maynard Keynes* dalam mensikapi kondisi perekonomian yang terjebak dalam krisis ekonom stagflasi menjelang perang dunia II. Pemikiran ekonomi dilandasi oleh kenyataan bahwa perekonomian tidak kunjung mampu menyelesaikan permasalahan ekonominya sendiri sebagaimana yang dikembangkan oleh pemikiran ekonomi klasik bahwa perekonomian mampu mengatur perekonomian sendiri (*self management*) melalui mekanisme pasar. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan suatu persamaan pendapatan nasional sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = f(Y_d)$$

$$I = I(r)$$

$$G = \bar{G}$$

$$T_x = \bar{T}_x$$

Kesamaan di atas menjelaskan bahwa komponen pengeluaran konsumsi (C) ditentukan oleh pendapatan disposable ( $Y_d$ ). Sedangkan pengeluaran investasi (I) dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga riil (r). Sementara untuk pengeluaran pemerintah (G) dan pajak ( $T_x$ ) merupakan variabel eksogen ditetapkan pemerintah melalui kebijakan fiskal yang bersifat *given*.

## 2.9. Fungsi Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat

Keimbangan ekonomi ditentukan melalui interaksi permintaan agregat dan penawaran agregat barang dan jasa. Fungsi penawaran barang dan jasa ditentukan oleh besarnya ketersediaan faktor produksi dan fungsi produksi. Dalam pemikiran ekonomi klasik diasumsikan bahwa jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan perekonomian dalam jangka panjang bersifat tetap karena perekonomian selalu dalam keadaan keseimbangan (*equilibrium*) dan pengerjaan penuh (*full employment*). Fungsi penawaran agregat barang dan jasa dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = f = (\bar{K}, \bar{L})$$

$$Y = \bar{Y}$$

Sedangkan permintaan agregat barang dan jasa dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C(Y_d) + I(r) + G$$

Dengan memasukkan informasi ekonomi dari kesamaan sebelumnya, maka untuk mencapai keseimbangan ekonomi dimana permintaan agregat sama dengan penawaran agregat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\bar{Y} = C(\bar{Y}, \bar{T}_x) + I(r) + \bar{G}$$

Tanda *bar* di atas menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan variabel eksogen yang ditetapkan diluar model. Kesamaan tersebut menjelaskan bahwa keseimbangan ekonomi makro tercapai pada saat penawaran agregat sama dengan permintaan agregat yaitu pada jumlah pendapatan nasional yang nilainya ditentukan oleh penjumlahan dari pengeluaran konsumsi (C), pengeluaran investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G).

Kesamaan  $\bar{Y} = C(\bar{Y}, \bar{T}_x) + I(r) + \bar{G}$  menjelaskan bahwa variabel tingkat bunga riil (r) merupakan variabel endogen yang nilainya ditentukan dalam model maknanya bahwa

perubahan tingkat bunga riil ( $r$ ) akan menentukan tingkat output total melalui pengaruhnya terhadap investasi ( $I$ ). Jika tingkat bunga riil ( $r$ ) turun berdampak pada peningkatan investasi ( $I$ ) sehingga akan meningkatkan output total. Demikian juga sebaliknya jika tingkat bunga riil ( $r$ ) meningkat akan menyebabkan penurunan tingkat investasi ( $I$ ) sehingga output total akan menurun juga. Kesimpulannya bahwa keseimbangan tingkat bunga riil ( $r$ ) tercapai pada saat keseimbangan makroekonomi terpenuhi yaitu permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Keseimbangan tingkat bunga riil merupakan fenomena ekonomi yang terjadi di pasar uang dimana terjadi kesamaan antara permintaan uang (*money demand*) dan penawaran uang (*money supply*).

## 2.10. Permintaan dan Penawaran Modal

Modal merupakan dana yang digunakan bagi pembiayaan kegiatan ekonomi. Penjelasan mengenai peranan modal dirumuskan melalui kesamaan pendapatan nasional sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$I = Y - C - G$$

Komponen  $Y - C - G$  merupakan tabungan nasional (*national saving*) atau tabungan (*saving*) yaitu pendapatan nasional setelah dikurangi dengan kebutuhan untuk memenuhi pengeluaran konsumsi ( $C$ ) dan pengeluaran pemerintah ( $G$ ). Jadi kesamaan identitas pendapatan nasional di atas dapat dirumuskan menjadi :

$$I = S$$

Dengan manipulasi matematika kesamaan identitas tersebut dapat ditulis kembali menjadi :

$$(Y - C - T_x) - (T_x - G) = I$$

Dimana komponen  $(Y - T_x - C)$  merupakan pendapatan disposibel ( $Y_d$ ) dikurangi konsumsi ( $C$ ) dan disebut dengan tabungan swasta (*private saving*). Sedangkan komponen  $(T_x - G)$  mengungkapkan besarnya pendapatan pajak pemerintah ( $T_x$ ) dikurangi pengeluaran pemerintah ( $G$ ) dan merupakan besarnya tabungan pemerintah (*public saving*).

## 2.11. Keseimbangan Pasar Uang dan Keseimbangan Makroekonomi

Pengaruh investasi dalam perekonomian melalui dinamika tingkat bunga riil yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dapat dijelaskan melalui formulasi sebagai berikut :

$$\bar{Y} = C(\bar{Y}, \bar{T}_x) + I(r) + \bar{G}$$

Sehingga didapatkan :

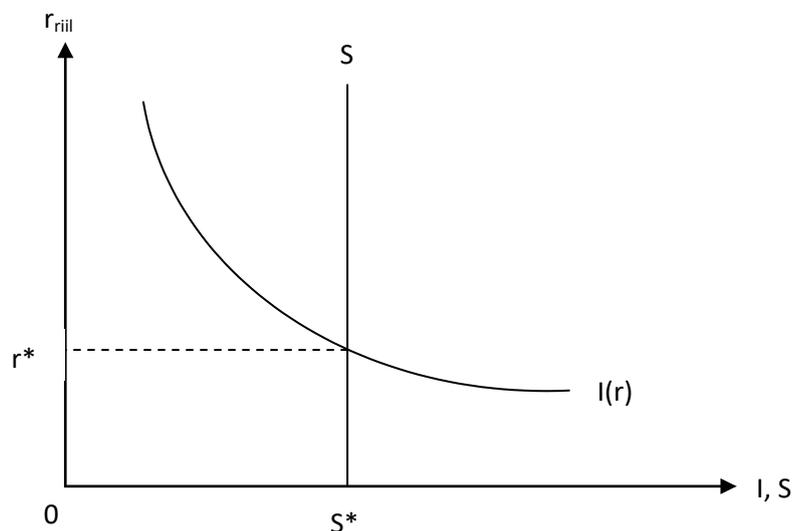
$$I(r) = \bar{Y} - C(\bar{Y}, \bar{T}_x) - \bar{G}$$

Dimana :  $\bar{Y} - C(\bar{Y}, \bar{T}_x) - \bar{G}$  menunjukkan besarnya total tabungan (total saving) yaitu pendapatan nasional setelah dikurangi dengan untuk pengeluaran konsumsi (C) yang merupakan tabungan masyarakat (private saving) dan pengeluaran pendapatan nasional setelah dikurangi dengan pengeluaran pemerintah (G) yang merupakan tabungan pemerintah (public saving). Kesamaan di atas dapat diformulasikan menjadi :

$$I(r) = \bar{Y} - C(\bar{Y}, \bar{T}_x) - \bar{G}$$

$$I(r) = \bar{S}$$

Artinya perekonomian mengalami kondisi keseimbangan (equilibrium) manakala besarnya investasi (I) sama dengan tabungan (S). Penjelasan lebih lanjut dapat dicermati pada gambar kurva berikut :



Kurva penawaran dana pinjaman (*loanable funds*) bentuknya vertikal sekaligus merupakan tabungan masyarakat (*saving*) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perekonomian dalam keadaan *full employment* dan jumlah dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*) atau besarnya saving (S) tetap berdasarkan penurunan formulasi di atas. Sedangkan permintaan dana pinjaman (*loanable funds*) berlereng negatif sekaligus mengungkapkan investasi (I) artinya besarnya permintaan dana oleh masyarakat untuk investasi dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga riil, jika tingkat bunga riil naik permintaan dana untuk investasi menurun dan sebaliknya.

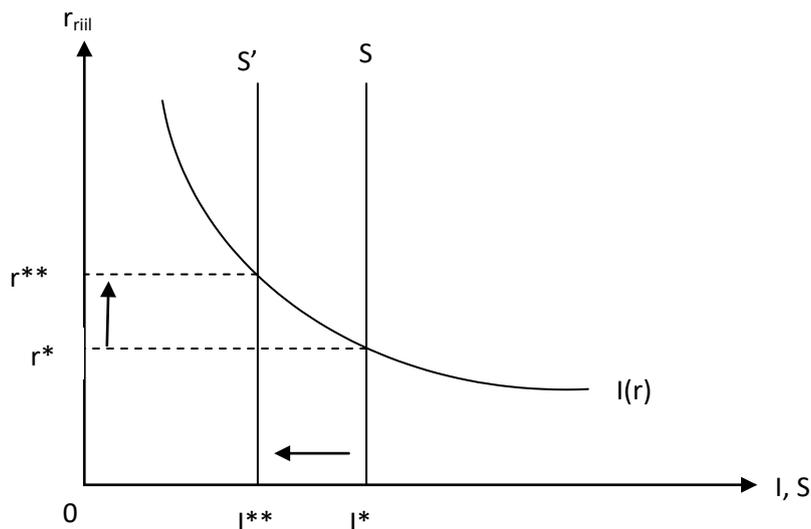
Keseimbangan terjadi pada saat perpotongan antara kurva penawaran dana pinjaman yaitu besarnya tabungan dengan kurva permintaan dana pinjaman untuk investasi. Titik keseimbangan tersebut menentukan besarnya tingkat bunga riil keseimbangan. Jadi tingkat bunga riil keseimbangan ditentukan oleh perubahan dari sisi permintaan dana masyarakat

untuk investasi. Jika permintaan dana untuk investasi naik maka tingkat bunga riil keseimbangan akan naik dan sebaliknya jika permintaan dana untuk investasi turun tingkat bunga riil juga turun sebagaimana terlihat dalam gambar kurva di atas.

### 2.11. *Crowding Out* dan Efek Kebijakan Fiskal

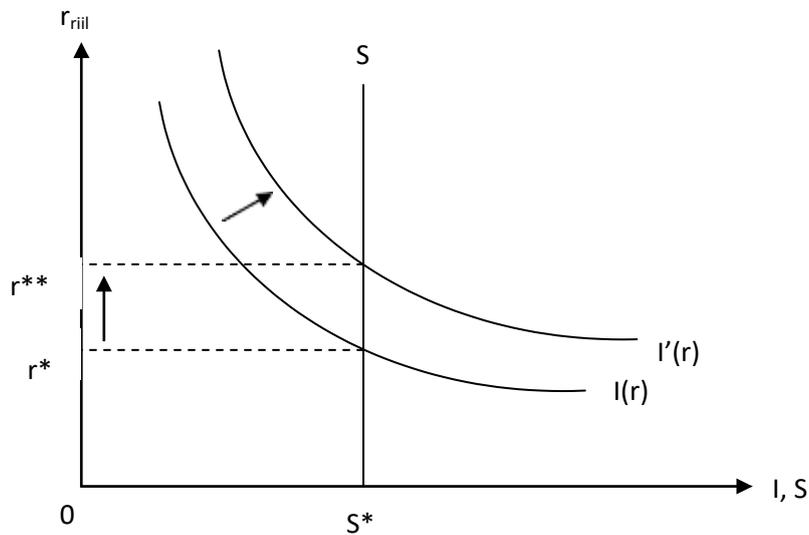
Jika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal defisit yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah ( $G$ ), maka akan berpengaruh terhadap perekonomian secara makro. Peningkatan pengeluaran pemerintah ( $G$ ) berdampak pada peningkatan agregat demand ( $AD$ ) dan karena total output jumlahnya tetap, maka peningkatan pengeluaran pemerintah ( $G$ ) akan berdampak pada penurunan komponen perekonomian lain yaitu investasi ( $I$ ) serta peningkatan tingkat bunga riil. Fenomena peningkatan pengeluaran pemerintah ( $G$ ) yang berdampak pada penurunan investasi ( $I$ ) dan peningkatan tingkat bunga riil disebut dengan *crowding out*.

Penjelasan yang hampir sama jika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal defisit melalui penurunan pajak ( $T_x$ ) yang berdampak pada peningkatan pendapatan disposable ( $Y_d$ ) sehingga konsumsi ( $C$ ) juga meningkat sebesar  $MPC \times \Delta T_x$ . Peningkatan MPC menyebabkan semakin besar pengaruh pajak ( $T_x$ ) terhadap perubahan konsumsi ( $C$ ), sehingga konsumsi ( $C$ ) meningkat dan saving ( $S$ ) turun karena  $S = Y - C$ . Agar tetap tercapai keseimbangan yaitu  $S = I$ , maka penurunan saving ( $S$ ) mendorong penurunan investasi ( $I$ ) dan meningkatkan tingkat bunga riil. Jadi kebijakan penurunan pajak ( $T_x$ ) berdampak pada penurunan investasi ( $I$ ) dan fenomena ini disebut juga dengan *crowding out*. Gambar kurva berikut menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal dapat menimbulkan *crowding out* :

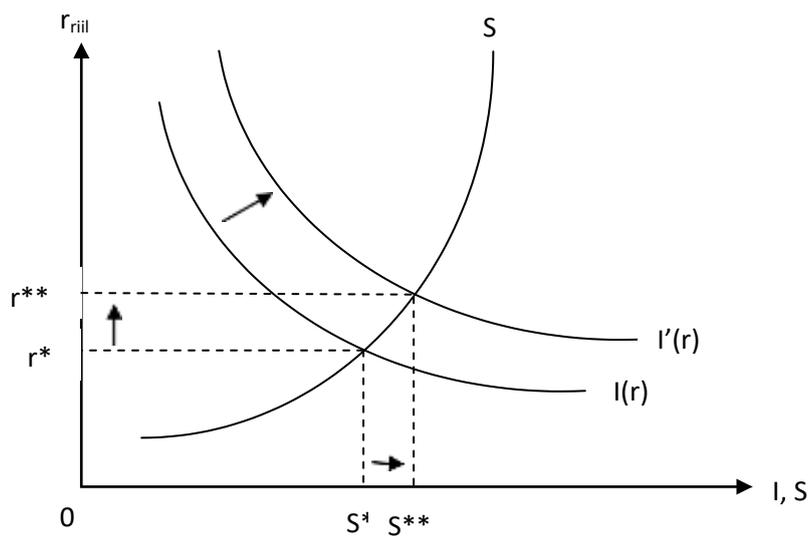


Kurva di atas menjelaskan fenomena *crowding out* dari kebijakan penurunan pajak ( $T_x$ ) yang menyebabkan kenaikan konsumsi ( $C$ ) dan menurunkan tabungan ( $S$ ) karena  $S = Y - C$ . Pergeseran ke kiri kurva tabungan ( $S$ ) menyebabkan peningkatan tingkat bunga riil dari  $r^*$  ke

$r^{**}$  sehingga investasi turun dari  $I^*$  ke  $I^{**}$ . Sedangkan gambar kurva berikut menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan jika terjadi perubahan dari permintaan investasi (I) masyarakat :



Kurva di atas mengungkapkan bahwa peningkatan permintaan investasi masyarakat (I) sementara penawaran dana melalui tabungan (S) tetap hanya akan meningkatkan tingkat bunga riil dari  $r^*$  ke  $r^{**}$  sehingga pada akhirnya jumlah investasi tetap tidak berubah. Kondisi berbeda jika kurva tabungan (S) berlereng positif sebagaimana terlihat pada gambar kurva berikut :



Kurva di atas menjelaskan mengenai peningkatan permintaan investasi (I) akan mendorong peningkatan tingkat bunga riil sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menabung (S) dan pada akhirnya akan meningkatkan investasi (I).

## **2.12. Analisis Pendapatan Nasional pada Perekonomian Sederhana**

Dikatakan sebagai perekonomian sederhana karena hanya memasukkan 2 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumen (*households*) dan rumah tangga produsen (*firms*). Rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi melakukan aktifitas ekonomi berkonsumsi dari pendapatan berupa upah, sewa dan keuntungan yang diperoleh hasil penjualan faktor produksi tenaga kerja, tanah dan modal kepada rumah tangga perusahaan (*firms*). Sedangkan rumah tangga perusahaan (*firms*) mengolah dan memproduksi faktor produksi dari rumah tangga konsumen dalam bentuk tenaga kerja, tanah dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen dijual kepada rumah tangga konsumen. Dan dari hasil keuntungan penjualan barang dan jasa tersebut digunakan untuk membeli faktor produksi tenaga kerja, tanah dan modal kepada rumah tangga konsumen. Demikian alur faktor produksi (input) dan output berjalan mengikuti kegiatan produksi dalam suatu siklus yang saling mempengaruhi.

Alur input (faktor produksi) berjalan dalam suatu mekanisme pasar input akan menentukan harga faktor produksi melalui kekuatan permintaan dan penawaran masing-masing faktor produksi. Mekanisme pasar tenaga kerja akan menentukan harga tenaga kerja yaitu upah melalui interaksi permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Mekanisme pasar tanah akan menentukan harga tanah yaitu sewa melalui interaksi permintaan tanah dan penawaran tanah. Mekanisme pasar modal akan menentukan harga modal yaitu imbal hasil modal (return) melalui interaksi permintaan modal dan penawaran modal.

Jadi dari penjelasan tentang alur input dan output tersebut dapat diketahui bahwa besarnya pendapatan faktor produksi akan sama dengan besarnya nilai produksi yang dihasilkan dan sama besarnya dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sehingga pengukuran pendapatan nasional atau produksi nasional dapat dilakukan melalui pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*).

besar tingkat upah ( $W$ ), sehingga dapat dijelaskan :

g

bagi hasil (profit and loss sharing = PLS) dalam ekonomi Islam atau bunga (.  
Pendapatan nasional

terbaik (dalam mengarahkan kegiatan ekonomi sesuai dengan dan Pengeluaran rumah tangga konsumen adalah untuk konsumsi ( $C$ ) yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Sedangkan pengeluaran rumah tangga perusahaan adalah untuk investasi ( $I$ ) yang diasumsikan bersifat *given*. Aliran melingkar pada perekonomian 2 (dua) sektor dapat diilustrasikan di bawah ini :

## **BAB III**

### **ANALISIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN AGREGAT**

#### **3.1. Konsep Permintaan dan Penawaran Agregat**

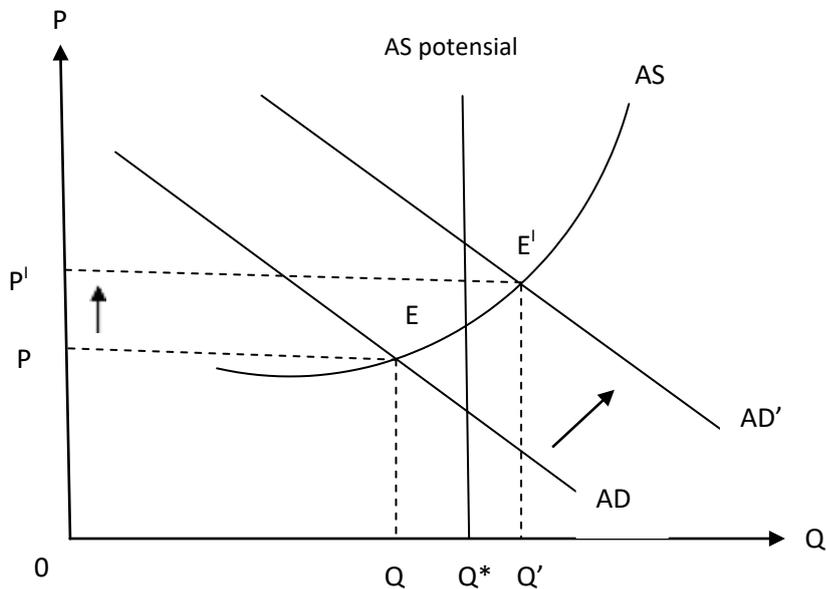
Analisis kinerja makroekonomi suatu perekonomian dapat dicermati melalui analisis permintaan dan penawaran. Permintaan agregate adalah jumlah total yang bersedia dibelanjakan oleh sektor-sektor yang berbeda dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Permintaan agregat sering ditulis AD (*aggregate demand*) adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga dan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat harga maka semakin kecil belanja barang oleh pelaku-pelaku ekonomi dan sebaliknya jika harga semakin rendah, maka belanja barang dan jasa yang dilakukan pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian akan semakin meningkat.

Sedang penawaran agregat (*aggregate supply*) sering ditulis AS menunjukkan pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat adalah tingkat harga, kapasitas produksi suatu perekonomian dan biaya produksi. Semakin tinggi harga akan mendorong peningkatan jumlah total penawaran barang dan sebaliknya sebagaimana dalam konsep ekonomi mikro pada perilaku produsen dalam penawaran barang. Faktor yang juga mempengaruhi penawaran adalah kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditentukan oleh besarnya investasi riil. Semakin besar nilai investasi riil maka akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah total nilai penawaran barang dan jasa. Penawaran agregat juga dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi jika biaya produksi naik yang disebabkan oleh kenaikan upah pekerja, kenaikan BBM yang berimbas pada kenaikan biaya produksi dan biaya transportasi maka akan menyebabkan produksi barang menurun.

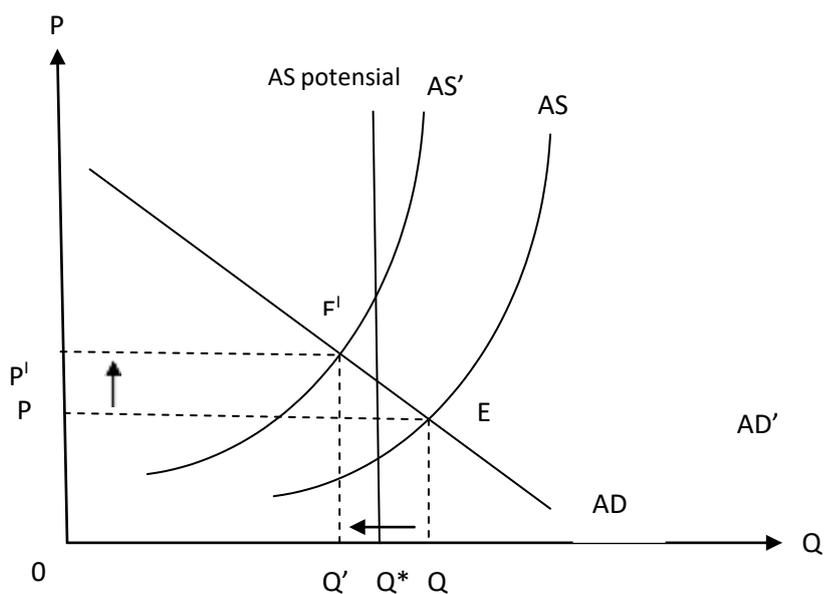
#### **3.2. Analisis AD-AS**

Keseimbangan pasar terjadi pada perpotongan antara penawaran agregat (AS) dengan permintaan agregat (AD) yang menentukan besarnya jumlah output total dan harga keseimbangan di pasar. Keseimbangan ekonomi makro merupakan gabungan dari semua harga dan jumlah barang dimana semua penjual dan pembeli merasa puas dengan transaksi

tersebut. Pergeseran dari kurva AD atau AS akan merubah titik keseimbangan pasar dan pada akhirnya akan merubah harga dan output total keseimbangan. Kurva AS dan AD berikut menjelaskan bagaimana keseimbangan pasar terjadi :

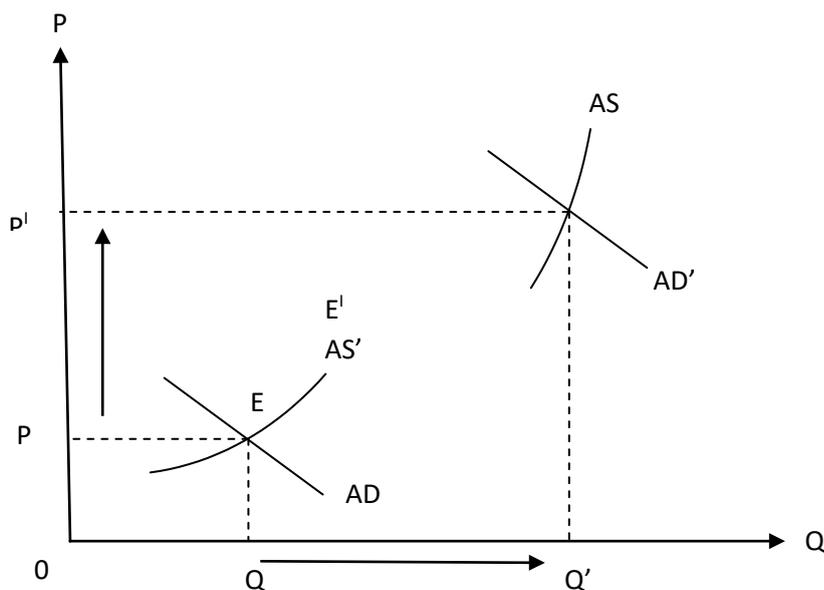


Gambar di atas menjelaskan bahwa pergeseran AD ke  $AD'$  akan meningkatkan produksi total dari  $Q$  ke  $Q'$  dan juga meningkatkan harga dari  $P$  ke  $P'$ . Pergeseran AD bisa terjadi misalnya karena peningkatan belanja pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dari  $Q$  ke  $Q'$  jauh lebih besar dibandingkan dengan output potensial yaitu  $Q^*$  namun demikian juga mendorong kenaikan harga lebih tinggi ke  $P'$  sehingga menimbulkan inflasi.



Gambar kurva di atas menjelaskan mengenai kontraksi ekonomi yang disebabkan misalnya karena penurunan kinerja ekonomi global karena krisis ekonomi akibat kenaikan bahan baku. Pergeseran kurva AS ke AS'' juga menggambarkan situasi sulit tahun 1973 yang menimbulkan guncangan penawaran (*supply shock*) yang ditandai oleh kegagalan produksi pangan, spekulasi pada pasar komoditas dunia, anomali di pasar valas dan eksekusi perang Timur Tengah. Penurunan produksi sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia memukul sektor industri di negara besar sehingga menurunkan permintaan impor produk primer dari negara berkembang. Kondisi ini kemudian memicu timbulnya inflasi yang dibarengi dengan stagnasi ekonomi sehingga dikenal dengan *stagflasi* yaitu kondisi perekonomian yang mengalami penurunan output dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi.

Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan situasi yang ditandai dengan pengembangan di bidang IPTEK berdampak pada peningkatan produktifitas dan efisiensi ekonomi yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Gambaran mengenai masa pertumbuhan dapat dicermati pada kurva berikut :



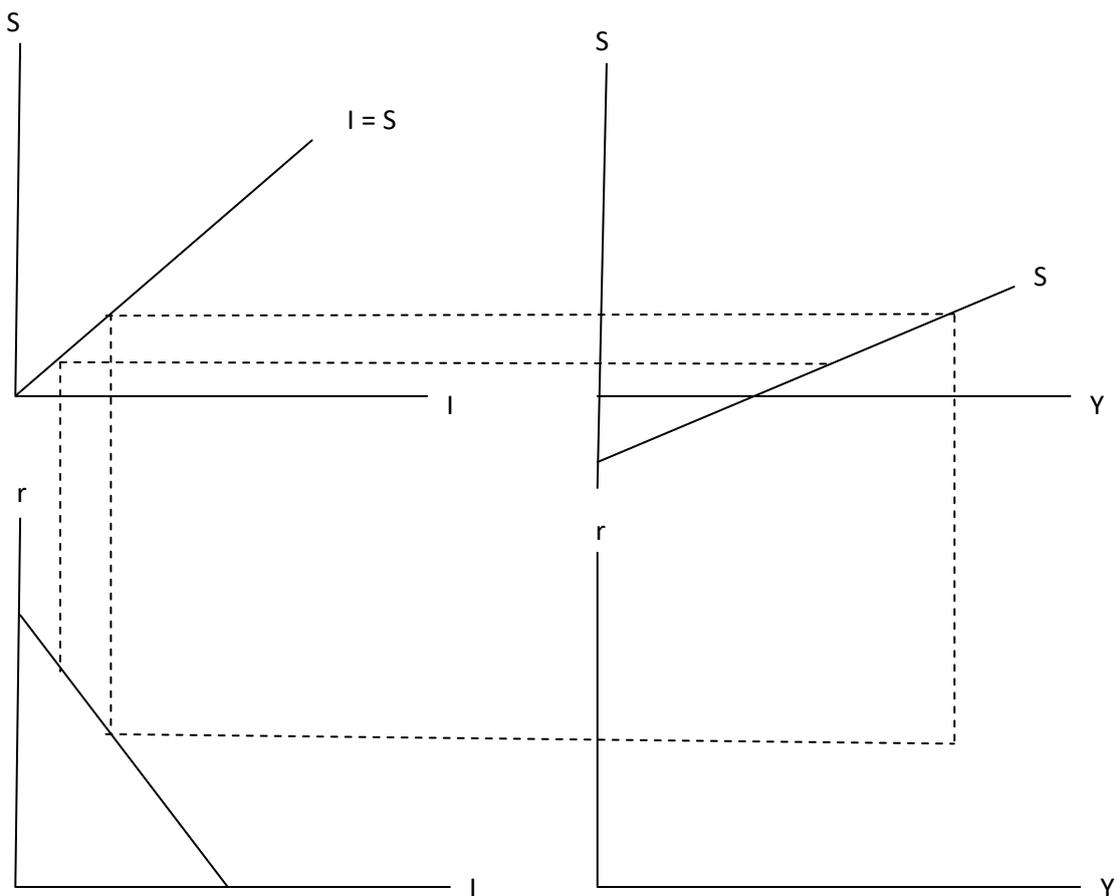
Masa pertumbuhan ekonomi pada abad ke-20 ditandai dengan peningkatan dari sisi AS dan juga dari sisi AD. Peningkatan kapasitas produksi disebabkan karena peningkatan dari sisi kualitas dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan modal, pengembangan teknologi dan inovasi serta peningkatan aspek manajerial sehingga mendorong efisiensi produksi, sehingga dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan dari sisi AS. Kemudian pada aspek lain jumlah penduduk semakin banyak, anggaran belanja pemerintah terus bertambah, pengeluaran investasi perusahaan mengalami peningkatan, sehingga mendorong dari sisi permintaan agregat (AD).

Peran pemerintah dalam konteks analisis AD-AS adalah bagaimana mengendalikan perekonomian baik dari sisi AD maupun AS. Intervensi pemerintah dari sisi AD misalnya pada saat perekonomian mengalami stagnasi, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif melalui peningkatan jumlah uang beredar (JUB) atau dengan menambah belanja pemerintah pada sektor-sektor ekonomi sehingga perekonomian akan terdorong naik. Kebijakan ekonomi ini dilakukan dalam situasi ekonomi yang mengalami banyak pengangguran. Sedangkan intervensi pemerintah dari sisi AS misalnya dengan pemberian insentif bagi para pelaku bisnis dalam bentuk subsidi pupuk bagi petani, subsidi ekspor, kredit murah bagi pengusaha, pembebasan pajak ekspor, dsb sehingga mendorong peningkatan kapasitas produksi para pengusaha.

### **3.3. Penurunan Kurva Agregate Demand (AD)**

Kurva agregate demand (AD) diturunkan dari kurva IS-LM yang menunjukkan keseimbangan ekonomi di pasar barang dan pasar uang. IS (Investment-Saving) adalah kurva yang menunjukkan berbagai alternatif kombinasi tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga yang menunjukkan keseimbangan pada pasar barang. Sedangkan LM adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga yang menunjukkan keseimbangan pada pasar uang.

Penurunan kurva IS ditentukan oleh besarnya aktivitas pada sektor riil yaitu besarnya investasi oleh perusahaan dan besarnya tabungan oleh rumah tangga konsumen. Investasi perusahaan ditentukan oleh besarnya tingkat bunga ( $r$ ) yang merupakan ongkos/harga berinvestasi, semakin tinggi tingkat bunga maka semakin rendah tingkat investasi dan sebaliknya. Sedangkan besarnya tabungan masyarakat ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi tingkat tabungan dan sebaliknya dengan asumsi tingkat konsumsinya tetap karena tabungan adalah sisa dari pendapatan nasional yang sudah dikurangi dengan konsumsi. Mekanisme penurunan kurva IS dijelaskan dalam kurva di bawah berikut :



### 3.3. Analisis Pendapatan Nasional Pada Perekonomian Dua Sektor

Perekonomian dua sektor artinya perekonomian yang terdiri dari dua pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi dalam perekonomian yang sifatnya saling membutuhkan. Rumah tangga konsumen (*household*) adalah pelaku ekonomi yang aktifitasnya membeli dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan rumah tangga produsen (*firms*) adalah pelaku ekonomi yang aktifitasnya memproduksi dan menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Persamaan pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor di rumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

Y = Pendapatan nasional (GDP/GNP)

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen

I = Pengeluaran investasi rumah tangga perusahaann

Investasi (I) adalah pengeluaran dari rumah tangga perusahaan merupakan suntikan (*injection*) dana dalam perekonomian, sehingga akan meningkatkan jumlah pendapatan nasional. Peningkatan investasi akan mendorong kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi lain pendapatan nasional terdiri dari dua komponen yaitu digunakan untuk konsumsi dan selebihnya ditabung (*saving*), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + S \dots\dots\dots (3.2)$$

sehingga

$$S = Y - C$$

Dimana :

Y = Pendapatan nasional

C = Pengeluaran untuk konsumsi

S = Bagian pendapatan yang ditabung

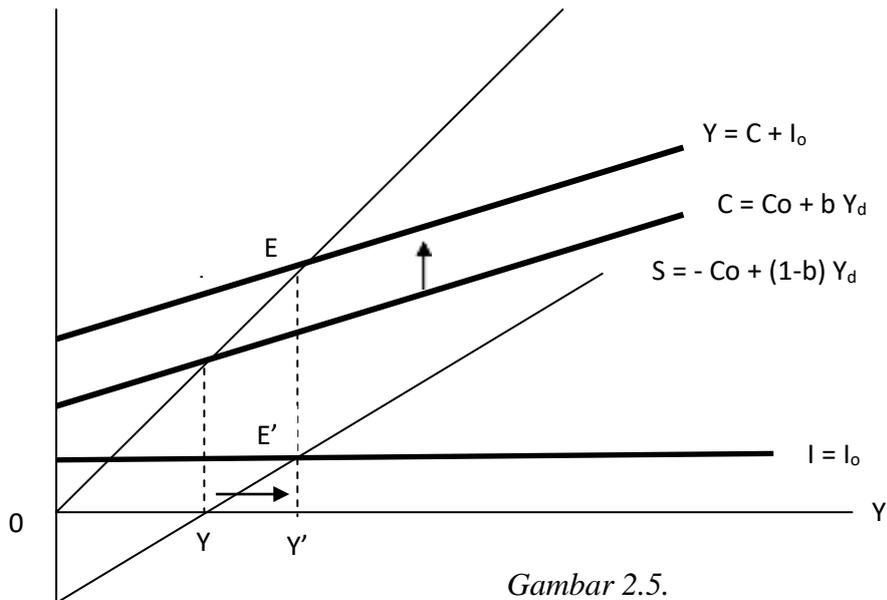
Besarnya tabungan ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan dirumuskan dengan persamaan fungsional sebagai berikut :

$$S = f(Y)$$

Semakin besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, maka semakin kecil yang bisa ditabung (*saving*) dan sebaliknya. Jadi agar masyarakat dapat menabung, maka besarnya penndapatan harus lebih besar dari pada konsumsi (  $Y > C$ ). Apabila pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran konsumsi, maka masyarakat akan berhutang (*dissaving*) untuk menutup pengeluaran konsumsinya. Tabungan (*saving*) adalah aliran dana yang keluar dari perekonomian sehingga merupakan kebocoran (*leakage*). Semakin besar jumlah tabungan (*saving*) berarti semakin sedikit jumlah pendapatan untuk konsumsi sehingga berakibat pendapatan nasional akan semakin berkurang. Dengan menggunakan pendekatan kurva dapat dicermati bagaimana keseimbangan pendapatan nasional terjadi pada perekonomian dua sektor :

C, I

$$Y = C + S$$



Gambar 2.5.  
Model Keynesian dan Keseimbangan Makroekonomi  
(Dornbusch, Fischer dan Startz, 1998 : 196)

Kurva di atas mengungkapkan bahwa keseimbangan pendapatan nasional tercapai pada saat  $Y = C + I$  atau  $S = I$ , hal ini dapat dibuktikan dengan cara persamaan (3.1) dan (3.2) kita samakan, maka akan diperoleh kesamaan sebagai berikut :

$$C + I = C + S$$

$$I = S$$

Atau rumusan pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor dapat dirumuskan sebagai berikut

$$Y = C + I$$

$$Y - C = I$$

$$S = I$$

Rumusan di atas artinya bahwa pendapatan nasional keseimbangan akan tercapai manakala tabungan (*saving*) yang keluar dari perekonomian sehingga merupakan kebocoran (*leakage*) nilainya sama dengan investasi (*investment*) yaitu pengeluaran dari rumah tangga perusahaan yang merupakan suntikan (*injection*) dana dalam perekonomian. Rumusan itu juga yang dipakai dalam dunia perbankan bahwa manajemen portfolio keuangan perbankan akan berjalan sehat manakala besarnya tabungan nasabah harus diimbangi dengan kreatifitas manajemen perbankan dalam menyalurkan dana perbankan dalam bentuk pembiayaan investasi sektor riil.

Sedirumuskan sebagai berikut :<sup>30</sup>b

$$Y = C + I + G + X - M \dots\dots\dots (2.29)$$

Dimana :

Y : Pendapatan nasional

C : Pengeluaran konsumsiah

I : Pengeluaran investasi

G : Pengeluaran pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

Kemudian perlu dirumuskan persamaan pendapatan disposibel ( $Y_d$ ) yang nilainya diperoleh dari pengurangan pendapatan nasional ( $Y$ ) dengan pajak ( $T_x$ ) dan ditambah dengan pembayaran transfer ( $Tr$ ) dan dapat dirumuskan sebagai berikut <sup>31</sup>:

$$Y_d = Y - T_x + Tr \dots\dots\dots (2.30)$$

Sedangkan pendapatan disposibel dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi ( $C$ ) dan sisanya untuk tabungan ( $S$ ) sehingga dapat dirumukan sebagai berikut<sup>32</sup> :

$$Y_d = C + S \dots\dots\dots (2.31)$$

Dengan menggabungkan antara persamaan (2.30) dengan (2.31) dapat diperoleh suatu formulasi sebagai berikut<sup>33</sup> :

$$C + S = Y_d = Y - T_x + Tr \dots\dots\dots (2.32)$$

Atau

$$C = Y_d - S = Y - T_x + Tr - S \dots\dots\dots (2.33)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.33) ke dalam persamaan (2.29) akan diperoleh formulasi sebagai berikut<sup>34</sup> :

$$Y = Y - T_x + Tr - S + I + G + X - M \dots\dots\dots (2.34)$$

Atau

$$S - I = (G - T_x + Tr) + X - M \dots\dots\dots (2.35)$$

---

<sup>30</sup> Dornbusch, Fischer and Startz, 1998, *Macroeconomics*, 7<sup>th</sup>, McGraw-Hill Book Company Inc., p. 189

<sup>31</sup> Warren L Smith, "A Graphical Exposition of The Complete Keynesian System", dalam *Current Issues in Monetary Theory and Policy*, AHM Publishing Corp., 1976, hal. 4

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 190

<sup>33</sup> Brian Snowdon, Howard Vane and Peter Wynarczyk, *A Modern Guide to Macroeconomics An Introduction to Competing Schools of Thought*, Edward Elgar Publishing Ltd, Cambridge, 1995, hal. 288

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 193

Persamaan (2.35) menjelaskan bahwa kelebihan tabungan atas investasi ( $S - I$ ) pada sektor swasta (*private sector*) nilainya sama dengan defisit anggaran pemerintah (*government budget deficit*) ditambah dengan surplus neraca perdagangan (*balance of trade*).

Dari rumusan persamaan-persamaan di atas dapat dibangun suatu formulasi model makroekonomi yang merupakan identitas dasar makroekonomi (*basic macroeconomic identity*) yang dirumuskan sebagai berikut<sup>35</sup> :

$$C + I + G + X - M = Y = Y_d - Tr + Tx = C + S - Tr + Tx \dots\dots\dots (2.36)$$

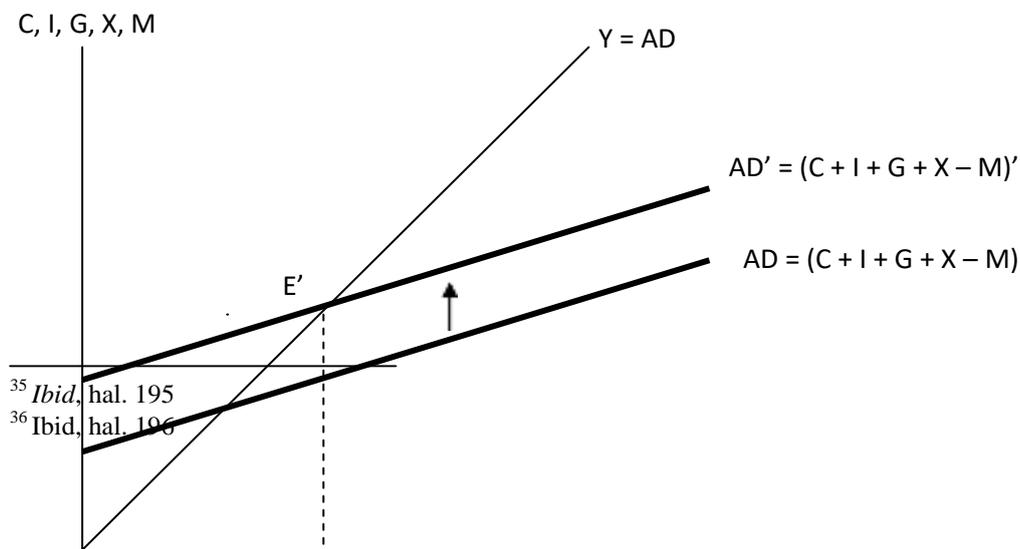
Persamaan di atas menunjukkan bahwa besarnya permintaan output yang nilainya sama dengan besarnya output yang ditawarkan yaitu GDP. Pengeluaran domestik yang merupakan bagian dari permintaan agregat dari dalam negeri ( $C + I + G$ ) disebut juga dengan penyerapan domestik (*domestic absorbtion*) dan diberi simbol A sedangkan  $X - M$  merupakan neraca perdagangan (*balance of trade*). Sehingga formulasi permintaan agregat pada persamaan (2.29) dapat dituliskan juga dengan struktur sebagai berikut<sup>36</sup> :

$$Y = A + X - M \dots\dots\dots (2.37)$$

atau

$$Y - A = X - M \dots\dots\dots (2.38)$$

Dari ekspresi persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa neraca pembayaran nilainya akan sama dengan besarnya pendapatan nasional dikurangi dengan besarnya penyerapan domestik. Jika saldo perdagangan positif, maka pertumbuhan ekonomi akan positif dengan asumsi absorpsi domestik tetap. Perubahan pada komponen absorpsi domestik dan neraca perdagangan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi akan menentukan perubahan arah dan besaran makroekonomi baik yang berorientasi ke dalam (*inward looking*) maupun ke luar (*outward looking*). Gambaran perubahan komponen makroekonomi dan pengaruhnya pada perekonomian dapat dilihat pada gambar berikut :





*Gambar 2.5.*  
 Model Keynesian dan Keseimbangan Makroekonomi  
 (Dornbusch, Fischer dan Startz, 1998 : 196)

Analisis mengenai perubahan pada pasar modal terhadap penentuan keseimbangan nilai tukar pada perekonomian terbuka telah banyak dikaji oleh beberapa ahli. Pada perekonomian di mana jumlah uang beredar ditentukan oleh pemerintah, maka permintaan uang dirumuskan dalam suatu fungsi likuiditas preferensi sebagai berikut :<sup>37</sup>

$$\frac{M^d}{P} = L(r, y) = \frac{M^s}{P}, \dots\dots\dots(2.39)$$

dimana :

$M^d$  = Permintaan uang

$M^s$  = Jumlah uang beredar

$P$  = Deflator harga domestik

$r$  = Tingkat bunga nominal domestik

$y$  = Pendapatan riil domestik

---

<sup>37</sup> Pentti JK Kouri, 1975, *Monetary Policy, The Balance of Payments and The Exchange Rate* dalam David Bigman and Teizo Taya, 1984, *Floating Exchange Rates and The State of World Trade and Payments*, Ballinger Publishing Company, hal. 130

## **BAB III**

### **ANALISIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN AGREGAT**

#### **3.1. Konsep Permintaan dan Penawaran Agregat**

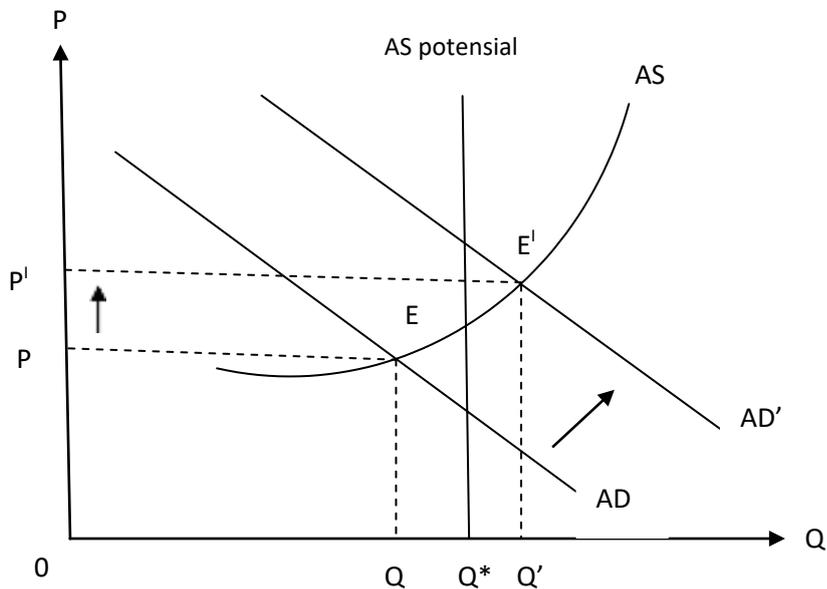
Analisis kinerja makroekonomi suatu perekonomian dapat dicermati melalui analisis permintaan dan penawaran. Permintaan agregate adalah jumlah total yang bersedia dibelanjakan oleh sektor-sektor yang berbeda dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Permintaan agregat sering ditulis AD (*aggregate demand*) adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga dan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat harga maka semakin kecil belanja barang oleh pelaku-pelaku ekonomi dan sebaliknya jika harga semakin rendah, maka belanja barang dan jasa yang dilakukan pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian akan semakin meningkat.

Sedang penawaran agregat (*aggregate supply*) sering ditulis AS menunjukkan pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat adalah tingkat harga, kapasitas produksi suatu perekonomian dan biaya produksi. Semakin tinggi harga akan mendorong peningkatan jumlah total penawaran barang dan sebaliknya sebagaimana dalam konsep ekonomi mikro pada perilaku produsen dalam penawaran barang. Faktor yang juga mempengaruhi penawaran adalah kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditentukan oleh besarnya investasi riil. Semakin besar nilai investasi riil maka akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah total nilai penawaran barang dan jasa. Penawaran agregat juga dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi jika biaya produksi naik yang disebabkan oleh kenaikan upah pekerja, kenaikan BBM yang berimbas pada kenaikan biaya produksi dan biaya transportasi maka akan menyebabkan produksi barang menurun.

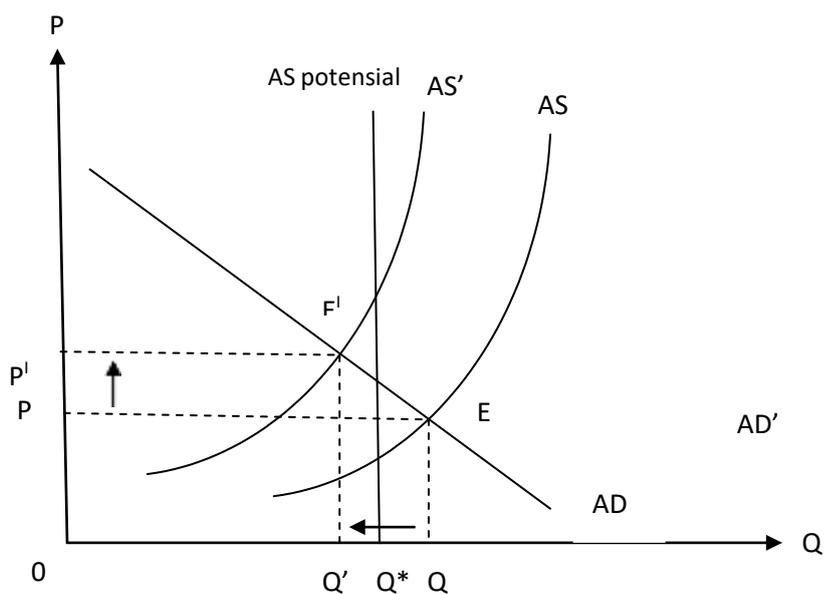
#### **3.2. Analisis AD-AS**

Keseimbangan pasar terjadi pada perpotongan antara penawaran agregat (AS) dengan permintaan agregat (AD) yang menentukan besarnya jumlah output total dan harga keseimbangan di pasar. Keseimbangan ekonomi makro merupakan gabungan dari semua harga dan jumlah barang dimana semua penjual dan pembeli merasa puas dengan transaksi

tersebut. Pergeseran dari kurva AD atau AS akan merubah titik keseimbangan pasar dan pada akhirnya akan merubah harga dan output total keseimbangan. Kurva AS dan AD berikut menjelaskan bagaimana keseimbangan pasar terjadi :

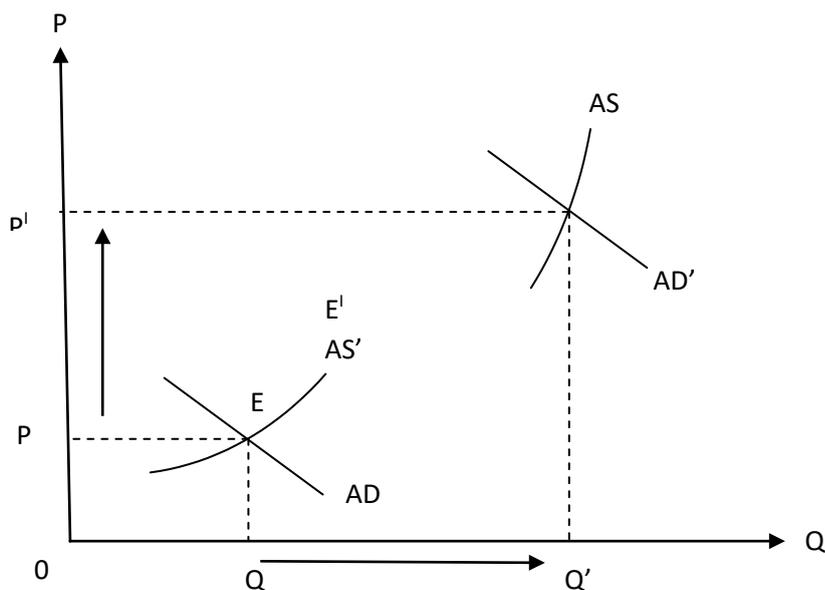


Gambar di atas menjelaskan bahwa pergeseran AD ke AD'' akan meningkatkan produksi total dari Q ke Q'' dan juga meningkatkan harga dari P ke P''. Pergeseran AD bisa terjadi misalnya karena peningkatan belanja pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dari Q ke Q'' jauh lebih besar dibandingkan dengan output potensial yaitu  $Q^*$  namun demikian juga mendorong kenaikan harga lebih tinggi ke P'' sehingga menimbulkan inflasi.



Gambar kurva di atas menjelaskan mengenai kontraksi ekonomi yang disebabkan misalnya karena penurunan kinerja ekonomi global karena krisis ekonomi akibat kenaikan bahan baku. Pergeseran kurva AS ke AS'' juga menggambarkan situasi sulit tahun 1973 yang menimbulkan guncangan penawaran (*supply shock*) yang ditandai oleh kegagalan produksi pangan, spekulasi pada pasar komoditas dunia, anomali di pasar valas dan eksekusi perang Timur Tengah. Penurunan produksi sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia memukul sektor industri di negara besar sehingga menurunkan permintaan impor produk primer dari negara berkembang. Kondisi ini kemudian memicu timbulnya inflasi yang dibarengi dengan stagnasi ekonomi sehingga dikenal dengan *stagflasi* yaitu kondisi perekonomian yang mengalami penurunan output dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi.

Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan situasi yang ditandai dengan pengembangan di bidang IPTEK berdampak pada peningkatan produktifitas dan efisiensi ekonomi yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Gambaran mengenai masa pertumbuhan dapat dicermati pada kurva berikut :



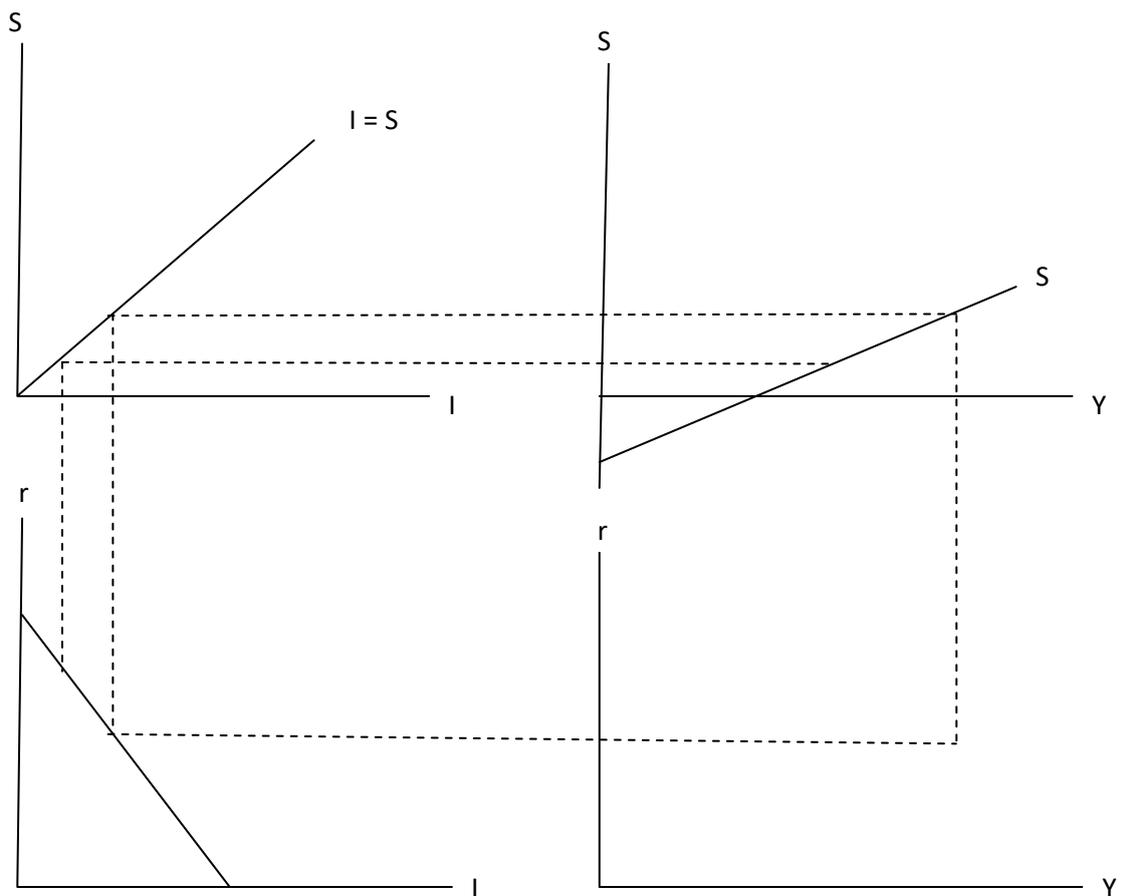
Masa pertumbuhan ekonomi pada abad ke-20 ditandai dengan peningkatan dari sisi AS dan juga dari sisi AD. Peningkatan kapasitas produksi disebabkan karena peningkatan dari sisi kualitas dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan modal, pengembangan teknologi dan inovasi serta peningkatan aspek manajerial sehingga mendorong efisiensi produksi, sehingga dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan dari sisi AS. Kemudian pada aspek lain jumlah penduduk semakin banyak, anggaran belanja pemerintah terus bertambah, pengeluaran investasi perusahaan mengalami peningkatan, sehingga mendorong dari sisi permintaan agregat (AD).

Peran pemerintah dalam konteks analisis AD-AS adalah bagaimana mengendalikan perekonomian baik dari sisi AD maupun AS. Intervensi pemerintah dari sisi AD misalnya pada saat perekonomian mengalami stagnasi, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif melalui peningkatan jumlah uang beredar (JUB) atau dengan menambah belanja pemerintah pada sektor-sektor ekonomi sehingga perekonomian akan terdorong naik. Kebijakan ekonomi ini dilakukan dalam situasi ekonomi yang mengalami banyak pengangguran. Sedangkan intervensi pemerintah dari sisi AS misalnya dengan pemberian insentif bagi para pelaku bisnis dalam bentuk subsidi pupuk bagi petani, subsidi ekspor, kredit murah bagi pengusaha, pembebasan pajak ekspor, dsb sehingga mendorong peningkatan kapasitas produksi para pengusaha.

### **3.3. Penurunan Kurva Agregate Demand (AD)**

Kurva agregate demand (AD) diturunkan dari kurva IS-LM yang menunjukkan keseimbangan ekonomi di pasar barang dan pasar uang. IS (Investment-Saving) adalah kurva yang menunjukkan berbagai alternatif kombinasi tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga yang menunjukkan keseimbangan pada pasar barang. Sedangkan LM adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga yang menunjukkan keseimbangan pada pasar uang.

Penurunan kurva IS ditentukan oleh besarnya aktivitas pada sektor riil yaitu besarnya investasi oleh perusahaan dan besarnya tabungan oleh rumah tangga konsumen. Investasi perusahaan ditentukan oleh besarnya tingkat bunga ( $r$ ) yang merupakan ongkos/harga berinvestasi, semakin tinggi tingkat bunga maka semakin rendah tingkat investasi dan sebaliknya. Sedangkan besarnya tabungan masyarakat ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi tingkat tabungan dan sebaliknya dengan asumsi tingkat konsumsinya tetap karena tabungan adalah sisa dari pendapatan nasional yang sudah dikurangi dengan konsumsi. Mekanisme penurunan kurva IS dijelaskan dalam kurva di bawah berikut :



### 3.3. Analisis Pendapatan Nasional Pada Perekonomian Dua Sektor

Perekonomian dua sektor artinya perekonomian yang terdiri dari dua pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi dalam perekonomian yang sifatnya saling membutuhkan. Rumah tangga konsumen (*household*) adalah pelaku ekonomi yang aktifitasnya membeli dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan rumah tangga produsen (*firms*) adalah pelaku ekonomi yang aktifitasnya memproduksi dan menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Persamaan pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor di rumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

Y = Pendapatan nasional (GDP/GNP)

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen

I = Pengeluaran investasi rumah tangga perusahaann

Investasi (I) adalah pengeluaran dari rumah tangga perusahaan merupakan suntikan (*injection*) dana dalam perekonomian, sehingga akan meningkatkan jumlah pendapatan nasional. Peningkatan investasi akan mendorong kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi lain pendapatan nasional terdiri dari dua komponen yaitu digunakan untuk konsumsi dan selebihnya ditabung (*saving*), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + S \dots\dots\dots (3.2)$$

sehingga

$$S = Y - C$$

Dimana :

Y = Pendapatan nasional

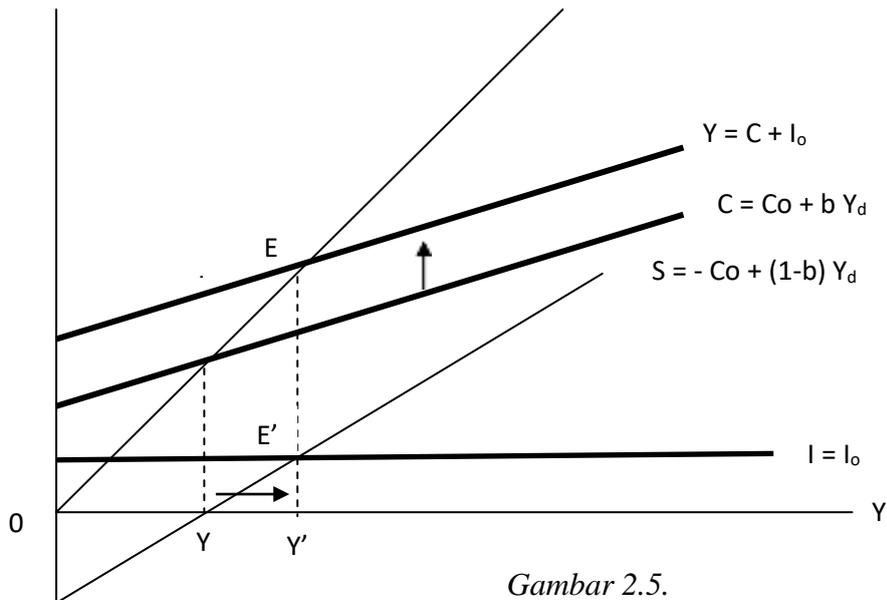
C = Pengeluaran untuk konsumsi

S = Bagian pendapatan yang ditabung

Besarnya tabungan ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan dirumuskan dengan persamaan fungsional sebagai berikut :

$$S = f(Y)$$

Semakin besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, maka semakin kecil yang bisa ditabung (*saving*) dan sebaliknya. Jadi agar masyarakat dapat menabung, maka besarnya penndapatan harus lebih besar dari pada konsumsi (  $Y > C$ ). Apabila pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran konsumsi, maka masyarakat akan berhutang (*dissaving*) untuk menutup pengeluaran konsumsinya. Tabungan (*saving*) adalah aliran dana yang keluar dari perekonomian sehingga merupakan kebocoran (*leakage*). Semakin besar jumlah tabungan (*saving*) berarti semakin sedikit jumlah pendapatan untuk konsumsi sehingga berakibat pendapatan nasional akan semakin berkurang. Dengan menggunakan pendekatan kurva dapat dicermati bagaimana keseimbangan pendapatan nasional terjadi pada perekonomian dua sektor :



Gambar 2.5.  
Model Keynesian dan Keseimbangan Makroekonomi  
(Dornbusch, Fischer dan Startz, 1998 : 196)

Kurva di atas mengungkapkan bahwa keseimbangan pendapatan nasional tercapai pada saat  $Y = C + I$  atau  $S = I$ , hal ini dapat dibuktikan dengan cara persamaan (3.1) dan (3.2) kita samakan, maka akan diperoleh kesamaan sebagai berikut :

$$C + I = C + S$$

$$I = S$$

Atau rumusan pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor dapat dirumuskan sebagai berikut

$$Y = C + I$$

$$Y - C = I$$

$$S = I$$

Rumusan di atas artinya bahwa pendapatan nasional keseimbangan akan tercapai manakala tabungan (*saving*) yang keluar dari perekonomian sehingga merupakan kebocoran (*leakage*) nilainya sama dengan investasi (*investment*) yaitu pengeluaran dari rumah tangga perusahaan yang merupakan suntikan (*injection*) dana dalam perekonomian. Rumusan itu juga yang dipakai dalam dunia perbankan bahwa manajemen portfolio keuangan perbankan akan berjalan sehat manakala besarnya tabungan nasabah harus diimbangi dengan kreatifitas manajemen perbankan dalam menyalurkan dana perbankan dalam bentuk pembiayaan investasi sektor riil.

Sedirumuskan sebagai berikut :<sup>38b</sup>

$$Y = C + I + G + X - M \dots\dots\dots (2.29)$$

Dimana :

Y : Pendapatan nasional

C : Pengeluaran konsumsiah

I : Pengeluaran investasi

G : Pengeluaran pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

Kemudian perlu dirumuskan persamaan pendapatan disposibel ( $Y_d$ ) yang nilainya diperoleh dari pengurangan pendapatan nasional ( $Y$ ) dengan pajak ( $T_x$ ) dan ditambah dengan pembayaran transfer ( $Tr$ ) dan dapat dirumuskan sebagai berikut <sup>39</sup>:

$$Y_d = Y - T_x + Tr \dots\dots\dots (2.30)$$

Sedangkan pendapatan disposibel dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi ( $C$ ) dan sisanya untuk tabungan ( $S$ ) sehingga dapat dirumukan sebagai berikut<sup>40</sup> :

$$Y_d = C + S \dots\dots\dots (2.31)$$

Dengan menggabungkan antara persamaan (2.30) dengan (2.31) dapat diperoleh suatu formulasi sebagai berikut<sup>41</sup> :

$$C + S = Y_d = Y - T_x + Tr \dots\dots\dots (2.32)$$

Atau

$$C = Y_d - S = Y - T_x + Tr - S \dots\dots\dots (2.33)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.33) ke dalam persamaan (2.29) akan diperoleh formulasi sebagai berikut<sup>42</sup> :

$$Y = Y - T_x + Tr - S + I + G + X - M \dots\dots\dots (2.34)$$

Atau

$$S - I = (G - T_x + Tr) + X - M \dots\dots\dots (2.35)$$

<sup>38</sup> Dornbusch, Fischer and Startz, 1998, *Macroeconomics*, 7<sup>th</sup>, McGraw-Hill Book Company Inc., p. 189

<sup>39</sup> Warren L Smith, "A Graphical Exposition of The Complete Keynesian System", dalam *Current Issues in Monetary Theory and Policy*, AHM Publishing Corp., 1976, hal. 4

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 190

<sup>41</sup> Brian Snowdon, Howard Vane and Peter Wynarczyk, *A Modern Guide to Macroeconomics An Introduction to Competing Schools of Thought*, Edward Elgar Publishing Ltd, Cambridge, 1995, hal. 288

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 193

Persamaan (2.35) menjelaskan bahwa kelebihan tabungan atas investasi ( $S - I$ ) pada sektor swasta (*private sector*) nilainya sama dengan defisit anggaran pemerintah (*government budget deficit*) ditambah dengan surplus neraca perdagangan (*balance of trade*).

Dari rumusan persamaan-persamaan di atas dapat dibangun suatu formulasi model makroekonomi yang merupakan identitas dasar makroekonomi (*basic macroeconomic identity*) yang dirumuskan sebagai berikut<sup>43</sup> :

$$C + I + G + X - M = Y = Y_d - Tr + Tx = C + S - Tr + Tx \dots\dots\dots (2.36)$$

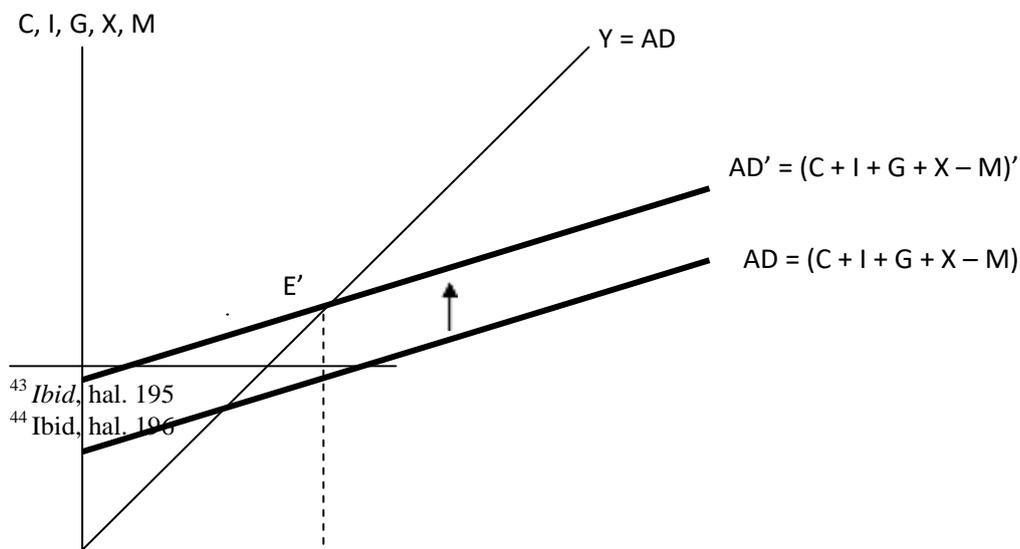
Persamaan di atas menunjukkan bahwa besarnya permintaan output yang nilainya sama dengan besarnya output yang ditawarkan yaitu GDP. Pengeluaran domestik yang merupakan bagian dari permintaan agregat dari dalam negeri ( $C + I + G$ ) disebut juga dengan penyerapan domestik (*domestic absorbtion*) dan diberi simbol A sedangkan  $X - M$  merupakan neraca perdagangan (*balance of trade*). Sehingga formulasi permintaan agregat pada persamaan (2.29) dapat dituliskan juga dengan struktur sebagai berikut<sup>44</sup> :

$$Y = A + X - M \dots\dots\dots (2.37)$$

atau

$$Y - A = X - M \dots\dots\dots (2.38)$$

Dari ekspresi persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa neraca pembayaran nilainya akan sama dengan besarnya pendapatan nasional dikurangi dengan besarnya penyerapan domestik. Jika saldo perdagangan positif, maka pertumbuhan ekonomi akan positif dengan asumsi absorpsi domestik tetap. Perubahan pada komponen absorpsi domestik dan neraca perdagangan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi akan menentukan perubahan arah dan besaran makroekonomi baik yang berorientasi ke dalam (*inward looking*) maupun ke luar (*outward looking*). Gambaran perubahan komponen makroekonomi dan pengaruhnya pada perekonomian dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 2.5.  
 Model Keynesian dan Keseimbangan Makroekonomi  
 (Dornbusch, Fischer dan Startz, 1998 : 196)

Analisis mengenai perubahan pada pasar modal terhadap penentuan keseimbangan nilai tukar pada perekonomian terbuka telah banyak dikaji oleh beberapa ahli. Pada perekonomian di mana jumlah uang beredar ditentukan oleh pemerintah, maka permintaan uang dirumuskan dalam suatu fungsi likuiditas preferensi sebagai berikut :<sup>45</sup>

$$\frac{M^d}{P} = L(r, y) = \frac{M^s}{P}, \dots\dots\dots(2.39)$$

dimana :

$M^d$  = Permintaan uang

$M^s$  = Jumlah uang beredar

$P$  = Deflator harga domestik

$r$  = Tingkat bunga nominal domestik

$y$  = Pendapatan riil domestik

---

<sup>45</sup> Pentti JK Kouri, 1975, *Monetary Policy, The Balance of Payments and The Exchange Rate* dalam David Bigman and Teizo Taya, 1984, *Floating Exchange Rates and The State of World Trade and Payments*, Ballinger Publishing Company, hal. 130

## **BAB V**

### **PENGANGGURAN (*UNEMPLOYMENT*)**

#### **5.1. Definisi Pengangguran**

Pengangguran (unemployment) adalah suatu kondisi dimana orang yang masuk dalam angkatan kerja sedang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga diartikan dengan kondisi dimana penduduk yang tidak bekerja tetap sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha untuk mendapatkan pendapatan. Pengangguran juga dapat didefinisikan dengan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau bisa juga diartikan dengan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima untuk bekerja atau sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui SAKERNAS (Survey Angkatan Kerja Nasional) mendefinisikan pengangguran sebagai berikut :

1. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja
2. Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang baru
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sering disebut penganggur putus asa (discouregeed unemployment)
4. Mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Pengangguran dibagi menurut dua aspek yaitu lama waktu bekerjanya dan penyebabnya terjadinya pengangguran. Pengangguran menurut lama waktu bekerjanya dikenal ada beberapa macam yaitu :

1. Pengangguran terbuka (open unemployment) yaitu jumlah angkatan kerja yang benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan. Jenis pengangguran ini disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, jenis

pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan juga mungkin faktor kemalasan sehingga seseorang tidak mendapatkan pekerjaan.

2. Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja secara penuh. Jenis pengangguran ini bisa disebabkan oleh ketrampilan rendah karena pendidikan yang rendah, kurang pengalaman dan karena unsur keterpaksaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya.
3. Setengah menganggur (*underemployment*) yaitu jenis pengangguran dimana orang tidak bekerja secara penuh sesuai potensi dan kompetensinya. Jenis pengangguran ini dibagi lagi menjadi setengah pengangguran kentara (*visible underemployment*) yaitu orang yang bekerja kurang dari waktu normal (kurang dari 35 jam/minggu). Dan setengah pengangguran tak kentara (*invisible underemployment*) yaitu jenis pengangguran dimana produktivitasnya rendah sehingga pendapatannya juga rendah. Fenomena setengah pengangguran ini banyak terjadi di sektor pertanian dimana petani banyak melakukan aktivitas namun sesungguhnya produktivitasnya rendah sehingga pendapatan petani juga rendah.

Sedangkan pengangguran dilihat dari faktor penyebabnya dapat digolongkan menjadi :

1. Pengangguran friksional (*frictional unemployment*) yaitu pengangguran yang terjadi secara temporer karena adanya *mismatch* antara pencari kerja dengan dunia usaha yang disebabkan karena informasi tidak sempurna, faktor jarak, dan proses rekrutment yang banyak memakan waktu dan persyaratan
2. Pengangguran struktural (*structural unemployment*) yaitu pengangguran yang timbul karena adanya perubahan struktur perekonomian misalnya dari negara agraris menuju negara industri sehingga menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor sosial dan budaya di masyarakat.

3. Pengangguran musiman (cyclical unemployment) yaitu pengangguran yang timbul karena perubahan dan siklus waktu. Fenomena ini misalnya terjadi pada beberapa jenis industri rakyat seperti produsen baju takwa yang meningkat menjelang bulan puasa dan lebaran namun kemudian sepi sehingga terpaksa merumahkan sebagian pekerjanya.
4. Pengangguran teknologi (technological unemployment) yaitu pengangguran yang disebabkan karena penggunaan teknologi baru dalam proses produksi sehingga banyak tenaga kerja yang terpaksa kehilangan pekerjaannya.
5. Pengangguran konjungtur (conjunctur unemployment) yaitu pengangguran yang disebabkan perubahan siklus ekonomi karena perubahan prioritas dan kebijakan ekonomi dari pemerintah yang berkuasa seperti yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru.

Secara umum pengangguran disebabkan karena kapasitas sumber daya manusia yang relatif kecil dibandingkan dengan tuntutan dunia ekonomi dan usaha. Penyebab timbulnya pengangguran bisa karena faktor ekonomi karena terjadinya krisis ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi, depresiasi mata uang dan permintaan barang yang menurun. Pengangguran juga banyak disebabkan karena rendahnya motivasi dan ketidakmampuan manusianya dalam mengoptimalkan potensi dirinya.

## **5.2. Pengangguran dan Perekonomian**

Penjelasan mengenai pengangguran dalam perekonomian dapat diungkapkan melalui persamaan sebagai berikut :

$$L = E + U$$

Dimana :

L = Jumlah penduduk total

E = Jumlah penduduk yang bekerja

U = Jumlah penduduk yang menganggur

## **BAB VII**

### **KONSUMSI**

#### **7.1. Pengertian Konsumsi**

Konsumsi merupakan aktivitas ekonomi yang paling naluriah pada setiap individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran oleh rumah tangga untuk memperoleh barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi merupakan komponen terbesar dalam komposisi pendapatan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kendaraan, kesehatan, dsb. Secara umum jenis barang yang dikonsumsi mencakup arti barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Termasuk dalam kategori barang tahan lama (*durable goods*) yaitu rumah, kendaraan, sepatu, perhiasan, perabot rumah tangga, dsb. Sedangkan barang yang tidak tahan lama (*non durable goods*) yaitu makanan, minuman, pakaian, dsb. Disamping barang yang dikonsumsi individu dan masyarakat juga mengkonsumsi jasa seperti tukang cukur, jasa salon kecantikan, fitness centre, kesehatan, bengkel kendaraan, dsb. Ada kecenderungan kebutuhan jasa semakin meningkat pada masyarakat modern seiring dengan meningkatnya aktivitas dan interaksi ekonomi antar individu dan kelompok.

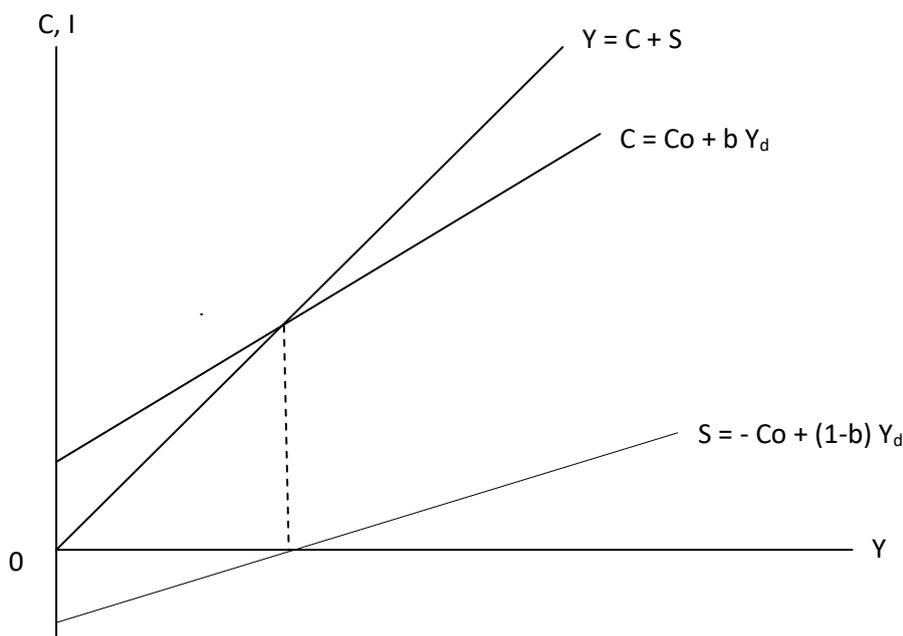
Pola konsumsi antara satu dengan lainnya berbeda baik jenis, intensitas dan komposisinya. Alokasi pengeluaran untuk konsumsi makanan saja berbeda antara satu orang dengan lainnya baik menyangkut jenis barang, banyaknya dan variasinya. Demikian juga untuk jenis barang lainnya misalnya ada orang yang sangat merasa penting untuk mengalokasikan pengeluaran konsumsi untuk rekreasi dan hobi yang digelutinya. Sementara lainnya ada yang merasa senang manakala bisa mengalokasikan pengeluaran konsumsi untuk pendidikan, peningkatan kompetensi dan soft skills karena menyangkut profesi dan harapan di masa yang akan datang. Alokasi di bidang kesehatan juga kecenderungan terus bertambah seiring dengan semakin merebaknya berbagai macam jenis penyakit bersifat endemik dan kebutuhan untuk asuransi kesehatan keluarga. Namun secara umum dapat diketahui bahwa ada pola konsumsi yang berbeda antara masyarakat yang berpendapatan rendah, menengah dan tinggi. Ada kecenderungan bahwa pengeluaran konsumsi pada masyarakat dengan pendapatan rendah hampir bisa dipastikan akan menghabiskan sebagian besar dari pendapatan yang dimilikinya. Sedangkan bagi keluarga dan masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas hanya perlu mengalokasikan sebagian dari pendapatannya terutama untuk

konsumsi yang bersifat pokok seperti makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kendaraan sehingga masih bisa mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk di tabung (*saving*). Demikian juga alokasi pendapatan untuk kebutuhan barang mewah cenderung meningkat pada masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas tidak demikian untuk masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah karena pendapatan mereka telah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih esensial lainnya.

## 7.2. Pengeluaran Konsumsi dan Tabungan

Dari sisi rumah tangga konsumen pendapatan yang diterima dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi ( $C$ ) dan sisanya di tabung (*saving*). Jadi tabungan adalah bagian dari pendapatan setelah pajak yang tidak dikonsumsi. Pendapatan yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) yaitu pendapatan setelah dikurangi dengan pajak di tambah besarnya subsidi. Semakin besar pendapatan disposable maka akan semakin besar alokasi untuk konsumsi. Sedangkan besarnya tabungan ditentukan oleh besarnya pendapatan setelah dikurangi besarnya pengeluaran konsumsi. Jadi pendapatan merupakan variabel utama yang menentukan besarnya konsumsi dan tabungan.

Fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dengan tingkat konsumsi. Sifat hubungan itu adalah positif artinya semakin besar pendapatan semakin besar pengeluaran konsumsi dan sebaliknya. Hubungan fungsional antara pendapatan dengan konsumsi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes berdasarkan pengamatan empiris di lapangan. Jika pendapatan besarnya sama dengan konsumsi maka dikatakan titik impas (*break even point*) dimana besarnya tabungan sama dengan nol. Hubungan antara pendapatan, konsumsi dan tabungan dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar di atas menjelaskan bahwa bentuk kurva konsumsi berlereng positif artinya semakin besar pendapatan semakin tinggi pengeluaran konsumsi dan sebaliknya. Demikian juga kurva tabungan (*saving*) berlereng positif artinya semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi besarnya tabungan dengan asumsi pengeluaran konsumsi tetap. Jadi semakin tinggi pengeluaran konsumsi akan mendorong besarnya tabungan semakin kecil dengan asumsi pendapatan tetap. Jadi seseorang dikatakan baru bisa menabung manakala besarnya pendapatan lebih besar dari pada konsumsi ( $Y > C$ ) dan sebaliknya seseorang tidak akan bisa menabung manakala besarnya pendapatan lebih kecil dari pada pengeluaran konsumsi ( $Y < C$ ). Untuk menopang pengeluaran konsumsi minimal (*otonomous consumption*) bagi mereka yang pendapatan lebih kecil dari pengeluaran konsumsi, maka harus ditutup dengan berhutang (*dissaving*).

### **7.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi**

Pengeluaran konsumsi merupakan aktifitas manusiawi yang dilakukan oleh setiap individu dan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup. Secara teoritis ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi yaitu :

1. Besarnya pendapatan nasional
2. Distribusi pendapatan nasional di tengah masyarakat
3. Kekayaan masyarakat dalam bentuk alat tukar perdagangan
4. Barang-barang konsumsi tahan lama yang dimiliki masyarakat
5. Kebijakan perusahaan dalam bidang keuangan dan pemasaran
6. Ekspektasi masyarakat terhadap perubahan kondisi perekonomian

Besarnya pendapatan nasional sudah dijelaskan dalam berbagai literatur ekonomi bahwa fungsi dipengaruhi secara positif oleh besarnya pendapatan nasional. Artinya bahwa semakin tinggi pendapatan nasional akan semakin tinggi besarnya pengeluaran konsumsi dan sebaliknya. Besarnya pengaruh fungsional antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi ditentukan oleh besarnya marginal propensity to consume (MPC).

Pengeluaran konsumsi juga dipengaruhi oleh distribusi pendapatan di antara masyarakat. Kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat akan menentukan bagaimana pola konsumsinya yang ditunjukkan dengan besarnya MPC. Pada masyarakat menengah ke bawah ada kecenderungan MPC cukup besar mendekati 100 % artinya setiap ada pertambahan pendapatan akan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih sangat minim. Sebaliknya pada masyarakat menengah ke atas relatif nilai MPC cukup rendah artinya setiap ada pertambahan pendapatan maka hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi karena sebagian besar kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi.

Pola konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh alat-alat pertukaran yang dimiliki masyarakat. Semakin banyak alat likuid yang dimiliki akan semakin memudahkan melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Demikian juga manakala cadangan devisa yang dimiliki suatu negara cukup banyak maka akan memudahkan melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain.

Kebijakan finansial dan pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan akan menentukan pola konsumsi masyarakatnya. Melalui aktifitas promosi dan advertensi yang dilakukan akan mempengaruhi bagaimana ketertarikan masyarakat untuk membeli suatu produk yang sebelumnya tidak tertarik untuk membelinya. Model-model pemasaran dan promosi gencar dilakukan oleh perusahaan baik melalui penjualan langsung (*direct selling*) maupun multi level marketing (MLM) ditempuh untuk dapat mendekati dan meyakinkan konsumen agar tertarik membeli produk yang ditawarkan.

Ekspektasi masyarakat akan perubahan kondisi dimasa yang akan datang juga akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Ekspektasi perubahan harga barang dimasa depan ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan kemungkinan-kemungkinan yang pernah terjadi pada masa itu. Sering kali masyarakat mengambil sikap berbeda berdasarkan pengalaman sebelumnya misalnya pada kasus rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang kemudian ternyata keputusan itu dianulir kembali dengan berbagai pertimbangan dan alasan.

#### **7.4. Marginal Propensity to Consume (MPC)**

Aspek penting dalam menjelaskan pengeluaran konsumsi masyarakat adalah mengenai kecenderungan marginal untuk berkonsumsi atau *Marginal Propensity to Consume* (MPC) yang didefinisikan dengan besarnya jumlah tambahan pengeluaran konsumsi pada setiap pertambahan pendapatan konsumen per satu satuan. Dalam ilmu ekonomi makro modern kajian tentang konsumsi merupakan topik utama karena menjadi bagian utama dalam komponen pembentuk pendapatan nasional. Untuk menjelaskan pengaruh perubahan pendapatan dengan perubahan pengeluaran dikenal konsep kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi (*marginal propensity to consume = MPC*). Pada gambar di atas MPC disimbulkan dengan „b“ yang menunjukkan lereng (*slope*) dari kurva konsumsi. Istilah marginal menunjuk pada konsep tentang perubahan yaitu pengaruh perubahan pendapatan terhadap perubahan konsumsi. Besarnya „*kecenderungan untuk mengkonsumsi*“ menggambarkan tingkat konsumsi yang diinginkan seorang konsumen dari setiap pertambahan pendapatan per satu satuan. Secara umum besarnya MPC antara 0,5 – 1 artinya bahwa manakala adanya kenaikan pendapatan, maka sebagian besar (50 % lebih) akan dialokasikan untuk menambah konsumsi.

Faktor yang paling menentukan konsumsi adalah pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) yaitu pendapatan setelah dikenakan pajak dan ditambah dengan subsidi, disamping itu ada faktor lain yang yaitu besarnya kekayaan, tingkat bunga, faktor sosial, lingkungan, dsb. Pendapatan nasional dialokasikan dalam dua bentuk penggunaan yaitu untuk pengeluaran konsumsi (C) dan sisanya ditabung (S) yang dapat diformulasikan dalam suatu identitas sebagai berikut :

$$Y = C + S$$

Dan jika terjadi perubahan pendapatan, maka akan menyebabkan perubahan pada aspek pengeluaran konsumsi dan besarnya tabungan. Dari identitas tersebut dapat direformulasikan sebagai berikut :

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta S$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

$$1 = MPC + MPS$$

$$MPC = 1 - MPS$$

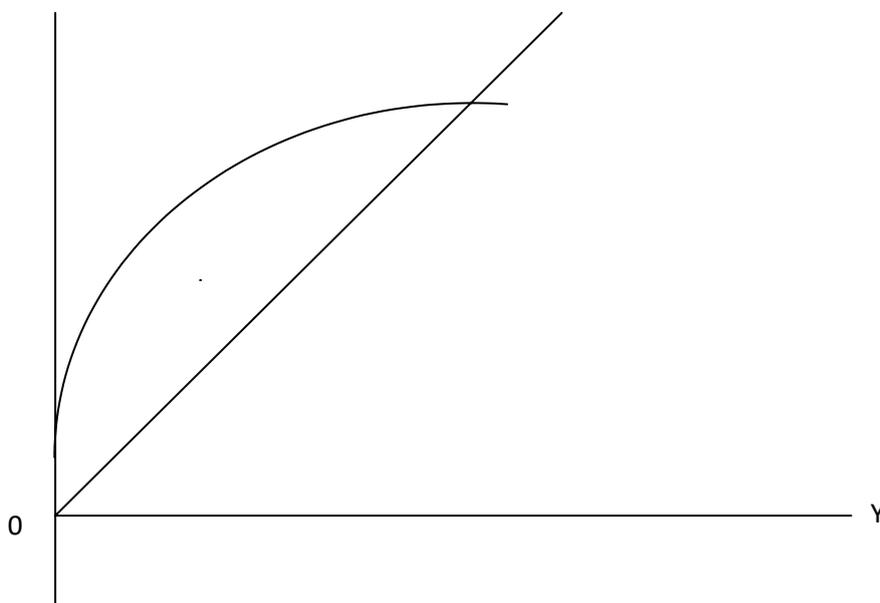
$$MPS = 1 - MPC$$

Marginal propensity to save (MPS) atau kecenderungan marginal untuk menabung adalah pertambahan jumlah tabungan dari setiap pertambahan jumlah pendapatan per satu satuan. MPS merupakan komponen pelengkap dari MPC berdasarkan penjelasan identitas di atas, artinya bahwa jika MPS diketahui maka kita dapat menentukan besarnya MPC dan sebaliknya. Jika  $MPC = 0,82$ , maka  $MPS = 1 - 0,82 = 0,18$  dan jika diketahui  $MPS = 0,35$ , maka dapat ditentukan besarnya  $MPC = 1 - 0,35 = 0,65$ . Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa  $MPC$  besarnya  $0,5 < MPC < 1$ , artinya bahwa setiap pertambahan pendapatan lazimnya sebagian besar digunakan untuk meningkatkan alokasi untuk konsumsi dan hanya sebagian kecil yang ditabung. Besarnya MPC juga ditentukan oleh taraf pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada golongan masyarakat miskin besarnya MPC hampir sama dengan 1 artinya setiap ada pertambahan pendapatan digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Sebaliknya pada orang kaya besarnya MPC akan mendekati 0,5 artinya ada alokasi pendapatan yang berimbang antara untuk pengeluaran konsumsi maupun untuk ditabung untuk keperluan di masa yang akan datang. Pada kelompok masyarakat ini dapat mengalokasikan dana tabungan untuk kepentingan rekreasi, pendidikan, kesehatan, kendaraan, dsb.

## 7.5. Fungsi Konsumsi menurut John Maynard Keynes

John Maynard Keynes tidak sendirian dalam merumuskan teori konsumsi, karena sebelumnya dan sesudahnya telah banyak ahli ekonomi yang berkontribusi dalam merumuskan teori konsumsi. Namun memang tidak dipungkiri bahwa teori konsumsi dari John Maynard Keynes telah banyak menginspirasi para pemikir ekonomi lainnya. Keynes dalam bukunya yang monumental *General Theory of Unemployment, Interest and Money* antara lain mengemukakan peran pengeluaran konsumsi yang signifikan dalam mempengaruhi perekonomian secara makro. Bahkan boleh dikatakan pengeluaran konsumsi merupakan komponen utama pembentuk pendapatan nasional. Hal ini berbeda dengan pandangan menurut kelompok klasik yang menyatakan bahwa perekonomian ditentukan dari sisi penawaran (supply side) dalam jangka panjang.

Ada beberapa pandangan pokok dari Keynes mengenai konsumsi bahwa analisis konsumsi dengan memasukkan variabel riil yaitu tingkat harga tetap. Jadi analisis konsumsi menjelaskan antara pendapatan nasional riil dengan pengeluaran konsumsi riil bukan dalam variabel nominal. Kemudian hal lain yang juga dijelaskan adalah variabel pendapatan yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi adalah pendapatan nasional yang terjadi (current income) bukan pendapatan nasional yang akan terjadi atau yang diprediksi di masa yang akan datang. Fungsi konsumsi Keynesian juga mengisaratkan bahwa bentuk kurva konsumsinya adalah melengkung bukan garis lurus atau bersifat linier artinya bahwa peningkatan nilai pendapatan nasional akan menyebabkan nilai APC (average propensity to consume) akan semakin menurun dan nilai  $MPC < APC$ . Karakteristik lain dari kurva konsumsi Keynes adalah memotong sumbu vertikal sebesar  $C_0$  (konsumsi otonom) bukan pada titik pangkal. Kurva berikut menjelaskan bagaimana bentuk kurva konsumsi menurut Keynes :



Konsepsi fungsi konsumsi Keynes menimbulkan polemik di tengah para ahli ekonomi karena dalam jangka panjang akan menimbulkan ancaman stagflasi. (Soediyono, 1985). Hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$\frac{Y}{Y} = \frac{C}{Y} + \frac{I}{Y} + \frac{G}{Y}$$

$$1 = APC + \frac{I}{Y} + \frac{G}{Y}$$

Formulasi di atas mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang menimbulkan ancaman stagflasi. Peningkatan  $Y$  akan diikuti dengan penurunan APC dan dengan tidak bisa mengharapkan kenaikan nilai  $\frac{I}{Y}$  secara terus menerus, maka dengan mengambil pemikiran

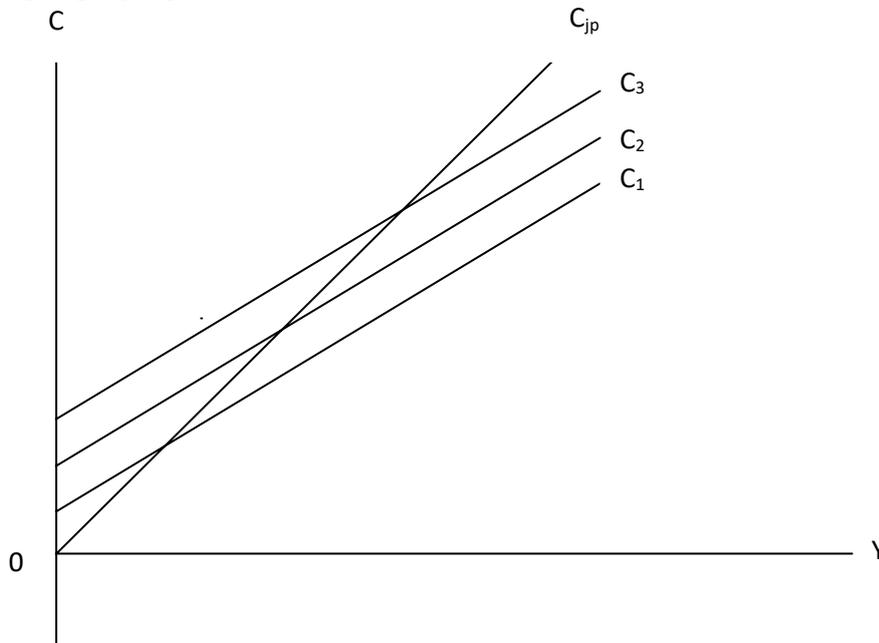
kaum klasik bahwa peranan intervensi pemerintah seminimal mungkin yaitu nilai  $\frac{G}{Y}$  akan

semakin menurun karena  $Y$  terus meningkat sedangkan  $G$  nilainya tetap. Untuk itu Keynes menyarankan perlunya adanya peningkatan campur tangan pemerintah yaitu peningkatan nilai  $G$  untuk menghindari kemungkinan ancaman stagflasi dalam jangka panjang untuk mengimbangi penurunan nilai APC.

### 7.6. Fungsi Konsumsi menurut Simon Kuznet

Pandangan Kuznet tentang fungsi konsumsi merupakan respon terhadap pesimisme Keynes terhadap perekonomian dalam jangka panjang yang menghadapi ancaman stagflasi. Pemikiran Kuznet didasarkan atas hasil riset pada perekonomian Amerika Serikat pada tahun 1948 untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. (Soediyono, 1985). Ada beberapa hal menarik dari hasil penelitian tersebut yaitu perlu dibedakan antara fungsi konsumsi jangka panjang dan jangka pendek. Fungsi konsumsi jangka pendek mempunyai karakteristik yang berbeda dimana dari waktu ke waktu mengalami pergeseran ke atas artinya nilai  $C_0$  (konsumsi otonom) meningkat dari waktu ke waktu. Hal menarik dari pandangan Kuznet adalah bahwa dalam jangka panjang kurva konsumsi melewati titik pangkal (origin point), sehingga dengan demikian nilai APC dan MPC tidak mengalami perubahan manakala terjadi peningkatan pendapatan nasional. Dalam

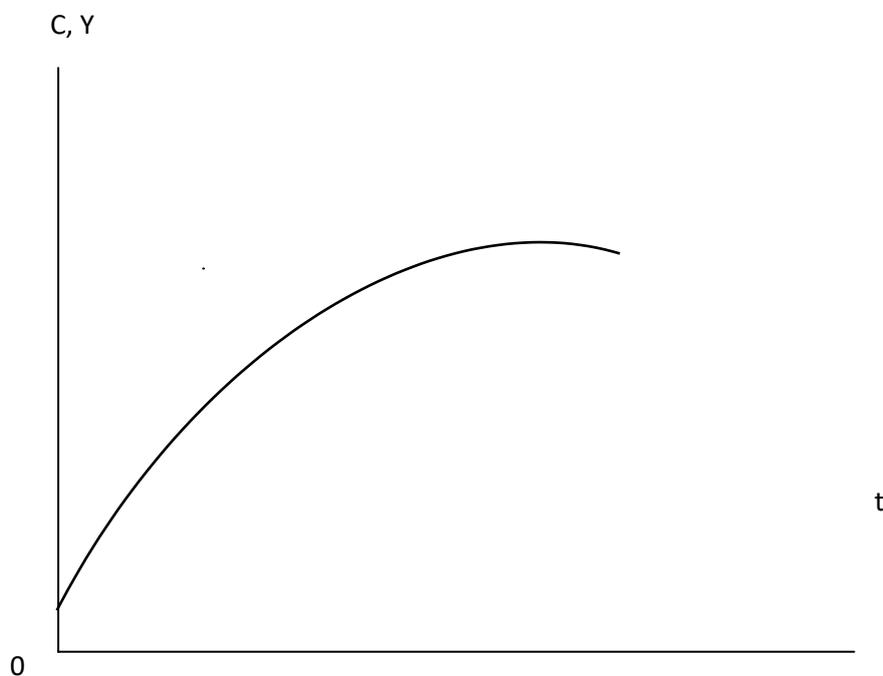
kurva konsumsi jangka panjang di simbolkan dengan  $C_{JP}$  yang berlereng positif dan memotong titik pangkal. Sedangkan dalam jangka pendek ada perubahan nilai APC dan MPC manakala ada peningkatan pendapatan nasional yang ditandai dengan pergeseran ke atas kurva konsumsi jangka pendek karena adanya perubahan nilai  $C_0$  (konsumsi otonom). Gambar kurva berikut mengungkapkan perbedaan antara kurva konsumsi jangka pendek dan jangka panjang :



Kurva konsumsi jangka pendek yang disimbolkan dengan  $C_1, C_2, C_3$ , menunjukkan perubahan konsumsi pada periode ke-1 sampai ke-3 artinya bahwa kenaikan pendapatan nasional akan menyebabkan pergeseran ke atas kurva konsumsi jangka pendek dan nilai APC yaitu  $\frac{C}{Y}$  menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tingkat pendapatan nasional sama dengan 0 nilai konsumsi adalah positif karena berpotongan dengan sumbu vertikal. Hal ini membawa implikasi analisis perekonomian bahwa dalam kondisi perekonomian mengalami masa kemakmuran (*booming*) nilai  $APC < APC$  rata-rata, sebaliknya dalam situasi kemunduran (*depression*) nilai  $APC > APC$  rata-rata. Jadi pandangan Kuznets relatif lebih lengkap dibandingkan dengan pandangan Keynes dalam menjelaskan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi masyarakat dan sekaligus dapat menjelaskan kekhawatiran para ahli ekonomi tentang kemungkinan terjadinya stagflasi dalam jangka panjang sebagaimana dirumuskan Keynes.

### 7.7. Fungsi Konsumsi menurut Hipotesa Siklus Hidup (*Life Cycles Hypotesis*)

Konsep pemikiran mengenai konsumsi menurut hipotesis siklus hidup dirumuskan oleh tiga ahli ekonomi yaitu A. Ando, R. Brumberg dan F. Modigliani yang menjelaskan mengenai kaitan antara siklus kehidupan seseorang dari lahir sampai meninggal dengan pola konsumsinya. Pada saat lahir sampai masa remaja dapat dikatakan masa yang belum produktif karena belum mampu memenuhi sendiri kebutuhannya demikian juga masa tua dikatakan masa yang tidak produktif karena telah habis usia kerja dan memasuki usia pensiun. Sedangkan usia 20 – 50 dikatakan usia produktif karena mampu berkontribusi dalam kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan bagi pemenuhan konsumsinya. Keterkaitan antara pola pendapatan dengan pola konsumsi dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut :



Kurva di atas menjelaskan bahwa sumbu horisontal merupakan waktu ( $t$ ) yaitu umur seseorang sedangkan sumbu vertikal merupakan <sup>be3sama</sup> pendapatan ( $Y$ ) dan pengeluaran konsumsi ( $C$ ). Seiring dengan pertambahan usia maka semakin tinggi tingkat produktifitasnya sehingga akan mengalami peningkatan pendapatan dan pada saatnya akan memasuki masa tidak produktif yaitu masa pensiun. Demikian juga pola konsumsinya bahwa semakin tambah usia maka semakin meningkat pengeluaran konsumsinya sampai menjelang ajal tiba. Pada saat lahir seseorang sudah dihadapkan pada berbagai bentuk pengeluaran konsumsi meskipun belum mempunyai pendapatan dimana pada gambar di atas dijelaskan

dari mulai 0 sampai umur  $t_1$  besarnya pengeluaran konsumsi lebih besar daripada pendapatannya.

Demikian juga pada masa anak dimana pada saat usia dini kebutuhan konsumsi masih lebih tinggi daripada pendapatannya karena belum mempunyai sumber pendapatan sendiri sehingga masih harus dibantu orang lain yaitu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Baru mulai umur  $t_1$  sampai  $t_3$  besarnya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran konsumsi dan mencapai puncaknya pada umur  $t_2$  dimana pendapatan yang diperoleh adalah paling tinggi yaitu pada masa puncak karir pekerjaan seseorang.

Memasuki usia produktif mulai dapat memenuhi kebutuhan sendiri dimana besarnya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran konsumsi sehingga dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Mulai umur  $t_3$  mulai memasuki masa pensiun ditandai dengan pendapatan yang mulai menurun yang sebenarnya sudah mulai sejak umur  $t_2$  dimana produktifitas kerja seseorang sudah mulai berkurang. Pada masa memasuki pensiun pengeluaran konsumsi lebih tinggi daripada pendapatannya sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi diambilkan dari sebagian tabungan yang disiapkan pada masa produktif. Dalam analisisnya diasumsikan bahwa konsumen bersikap rasional artinya dia akan berusaha memaksimalkan kepuasan dari pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekarang dan yang akan datang. Dia akan melakukan perhitungan antara besarnya pendapatan yang diterima dengan besarnya pengeluaran konsumsi dengan memperlakukan nilai sekarang (*present value*) dari pendapatan yang diterima sekarang dan yang akan datang sebagai *constraint* untuk memaksimalkan kepuasan dari konsumsinya.

Sumber pendapatan yang diterima dari pendapatan tenaga kerja dan pendapatan dari kekayaan (*property*). Seiring dengan perjalanan waktu nilai kekayaan bersih masyarakat akan mengalami kenaikan yang ditandai dengan pergeseran ke atas dari kurva konsumsi jangka pendek. Dalam jangka pendek kenaikan pendapatan nasional akan menyebabkan nilai APC semakin menurun ditandai dengan pergeseran ke atas kurva konsumsi jangka pendek. Sedangkan konsumsi jangka panjang ditandai nilai APC dan MPC konstan dengan demikian kurva konsumsi jangka panjang memotong titik pangkal dan berlereng positif. Jadi sebenarnya konsep hipotesis siklus hidup dari Ando-Brumberg-Modigliani sejalan dengan rumusan teori yang dikemukakan oleh Kuznets bahwa ada kenaikan konsumsi jangka pendek seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan nasional.

### **7.8. Fungsi Konsumsi dengan Hipotesa Pendapatan Permanen**

Teori konsumsi dengan hipotesa pendapatan permanen (*permanent income hypothesis*) dikemukakan oleh Milton Friedman dengan asumsi bahwa konsumen bersikap rasional

dengan berusaha memaksimalkan kepuasan secara merata selama kurun waktu hidupnya. Dalam rumusnya dikemukakan bahwa besarnya konsumsi permanen dipengaruhi secara positif dan proporsional oleh besarnya pendapatan. Secara matematis fungsi konsumsi permanen dirumuskan sebagai berikut (Soediyono, 1985) :

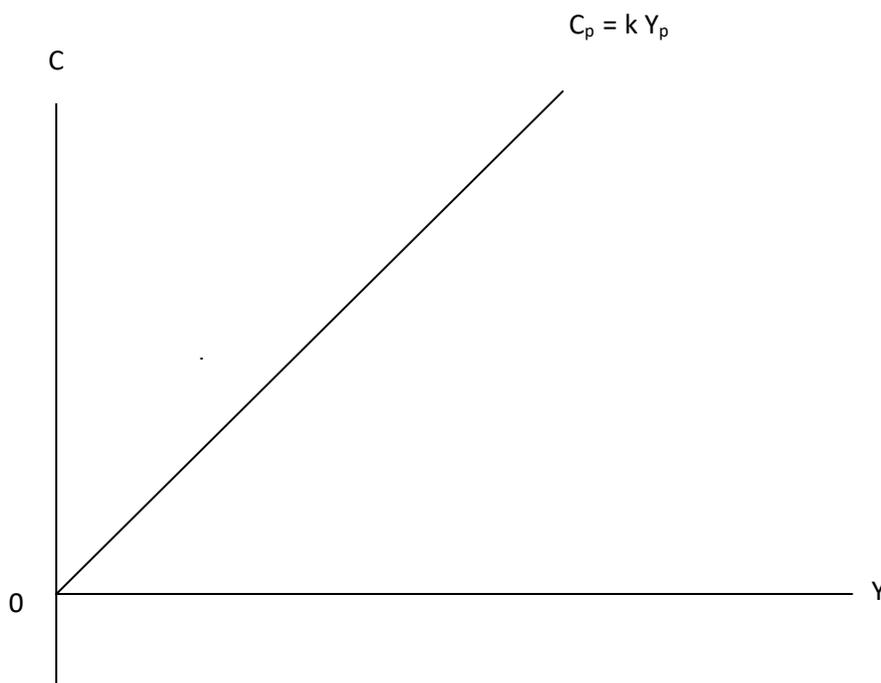
$$C_P = k Y_P$$

Dimana :

$C_p$  = Konsumsi permanen

$k$  = koefisien yang menunjukkan bagian dari pendapatan permanen yang dialokasikan untuk konsumsi, nilainya  $0 < k < 1$

$k$  nilainya stabil dan menjelaskan mengenai perilaku konsumsi seseorang yang besarnya dipengaruhi oleh selera konsumen, tingkat bunga dan rasio antara kekayaan manusiawi dan non manusiawi. (Soediyono, 1985). Berikut gambar kurva konsumsi hipotesa pendapatan permanen menurut Simon Kuznets :



Gambar di atas menjelaskan bahwa kurva konsumsi memotong pada titik pangkal dan berlereng positif artinya nilai  $APC = MPC$  bersifat konstan, semakin tinggi pendapatan semakin tinggi besarnya konsumsi. Menurut Friedman jenis pendapatan disamping ada pendapatan permanen yang mempengaruhi besarnya konsumsi permanen, juga ada pendapatan transitory pendapatan sementara yang menentukan besarnya konsumsi sementara. Jadi total pendapatan merupakan penjumlahan antara pendapatan permanen dan pendatan sementara. Dan konsumsi total merupakan penjumlahan antara konsumsi permanen dan konsumsi sementara. (Soediyono, 1985).

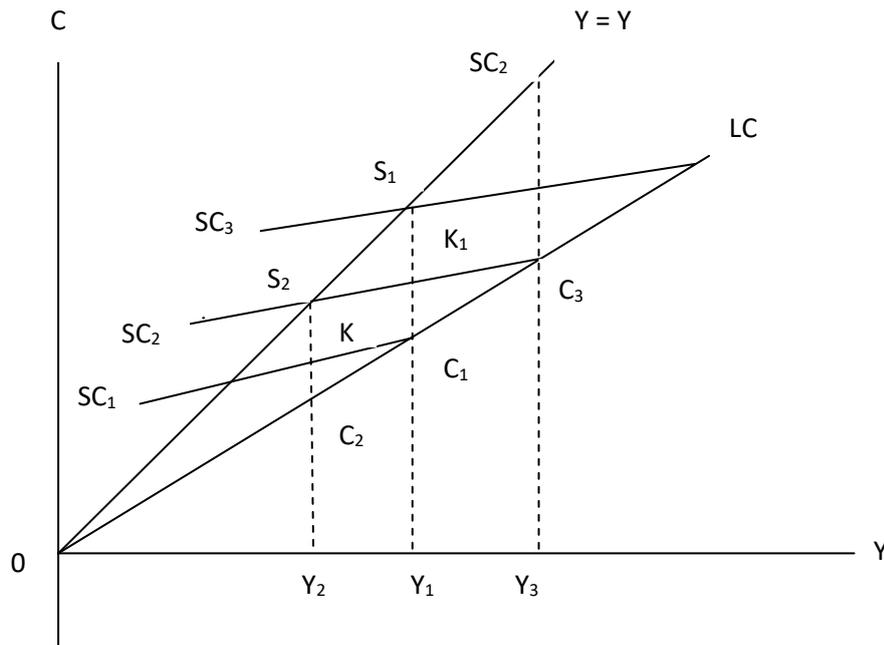
$$C = C_p + C_{tr}$$

$$Y = Y_p + Y_{tr}$$

Pola konsumsi permanen dan pendapatan permanen mengikut pola sebagaimana mestinya yaitu berkorelasi positif artinya kalau pendapatan permanen naik maka konsumsi permanen juga meningkat. Namun tidak demikian halnya dengan konsumsi sementara dan pendapatan sementara, kadangkala mengikuti pola yang normal namun bisa juga bersifat tidak normal. Jadi bisa bersifat positif hubungannya maupun berkorelasi negatif. Misalnya seseorang yang mendadak menjadi orang kaya baru (OKB) dari hadiah undian tabungan di suatu bank dimana dia menyimpan uangnya, maka akan bersifat positif hubungannya. Namun sebaliknya jika seseorang terkena musibah yang mendadak misalnya rumahnya terbakar, kecelakaan yang memerlukan biaya pengobatan yang mahal, dsb. Maka besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membangun kembali rumah atau menyembuhkan penyakitnya, merupakan contoh riil dari pengeluaran konsumsi sementara yang berkorelasi negatif. Namun dijelaskan menurut Friedman bahwa tidak ada hubungan yang fungsional antara pendapatan permanen dengan konsumsi permanen dan pendapatan tetap dengan konsumsi tetap.

### **7.9. Fungsi Konsumsi dengan Hipotesa Pendapatan Relatif**

Konsepsi tentang fungsi konsumsi dengan hipotesa pendapatan relatif dirumuskan oleh James Duesenberry yang menjelaskan bahwa pola konsumsi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Misalnya dalam suatu keluarga yang terbiasa dengan menu makanan yang empat sehat lima sempurna, manakala pendapatannya berkurang maka mereka akan mengurangi pengeluaran konsumsinya dengan tetap berusaha mempertahankan kualitas makanan yang empat sehat lima sempurna. Misalnya yang sebelumnya makan dengan daging sapi diganti dengan telur atau tempe untuk memenuhi nutrisi protein. Demikian juga untuk kebutuhan sayur dan buah-buahan yang sebelumnya dibeli di super market terkenal untuk menjamin kualitas bahan kemudian diganti dengan mencari bahan makanan yang sama di pasar tradisional yang harganya relatif lebih murah. Gambar berikut menjelaskan teori tentang konsumsi dengan hipotesa pendapatan relatif dari James Duesenberry :



Kurva di atas menjelaskan bahwa terdapat dua macam konsumsi yaitu konsumsi jangka pendek (SC) dan konsumsi jangka panjang (LC). Pada tingkat pendapatan nasional sebesar  $Y_1$  pengeluaran konsumsi sebesar  $Y_1 C_1$  dan tabungan sebesar  $C_1 S_1$ . Pada saat pendapatan turun sebesar  $Y_2$  pengeluaran konsumsi menurun tapi penurunannya sebesar  $Y_2 K$  yaitu mengikuti pola pengeluaran konsumsi jangka pendek  $SC_1$  bukan  $Y_2 C_2$ . Manakala terjadi peningkatan pendapatan dari  $Y_2$  ke  $Y_1$ , maka konsumsi juga akan meningkat dari  $K$  ke  $C_1$  kemudian jika terjadi peningkatan pendapatan dari  $Y_1$  ke  $Y_3$  akan diikuti dengan peningkatan konsumsi dari  $Y_1 C_1$  ke  $Y_3 C_3$  dan jika terjadi penurunan pendapatan dari  $Y_3$  ke  $Y_1$  akan menyebabkan penurunan konsumsi sebesar  $Y_1 K_1$  bukan  $Y_1 C_1$  seterusnya. Konsumen akan bersikap rasional manakala terjadi penurunan pendapatan yaitu dengan mengurangi jumlah tabungan dan menggunakan dana tabungan untuk mempertahankan kualitas konsumsi tertinggi yang pernah dicapainya. Jika diamati bahwa pada saat pendapatan meningkat pola konsumsinya meningkat mengikuti konsumsi jangka panjang (LC) yang naik dengan peningkatan yang tajam, namun pada saat pendapatan menurun akan diikuti dengan penurunan konsumsi mengikuti pola konsumsi jangka pendek (SC).

## BAB XI

### ANGKA PENGGANDA (*MULTIPLIER*)

#### 11.1. Pengertian Angka Pengganda (*Multiplier*)

Angka pengganda (*multiplier*) adalah suatu angka yang menunjukkan pengaruh perubahan terhadap perekonomian secara keseluruhan manakala ada perubahan dari salah satu variabel pembentuknya. Variabel pembentuk pendapatan nasional yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak dan subsidi, sehingga kemudian dikenal macam-macam angka pengganda (*multiplier*) sebagai berikut :

1. Angka pengganda konsumsi (*consumption multiplier*)
2. Angka pengganda investasi (*investment multiplier*)
3. Angka pengganda pengeluaran pemerintah (*government expenditure multiplier*)
4. Angka pengganda pajak (*tax multiplier*)
5. Angka pengganda pembayaran subsidi (*transfer payment multiplier*)
6. Angka pengganda anggaran berimbang (*balance budget multiplier*)

Angka pengganda (*multiplier*) investasi sebesar 5 misalnya memberi makna bahwa manakala ada penambahan investasi dalam suatu perekonomian sebesar Rp. 1 milyar, maka akan memberikan dampak berkelipatan pada perekonomian secara makro sebesar Rp. 5 milyar. Pengaruh pengeluaran investasi pada perekonomian secara keseluruhan bisa diibaratkan dalam suatu permainan bilyar misalnya. Seorang pemain bilyar hanya mendorong satu buah bilyar secara terukur, namun kemudian seiring dengan pergerakan bola bilyar akan dapat menimbulkan benturan dengan dua atau lebih bola bilyar lainnya tergantung ketepatan dan kecermatan si pemain bilyar tersebut. Demikian juga makna angka pengganda (*multiplier*) lainnya bahwa perubahan dari salah satu variabel pembentuk pendapatan nasional, maka akan menimbulkan perubahan

pada perekonomian secara keseluruhan. Besarnya angka pengganda (*multiplier*) tergantung dari faktor-faktor yang membentuk perekonomian secara makro sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

### **Angka Pengganda Investasi (*Investment Multiplier*)**

Angka pengganda investasi (*investment multiplier*) menjelaskan bagaimana besarnya pengaruh perubahan investasi terhadap pendapatan nasional. Mekanisme pengaruh investasi terhadap perekonomian makro bisa dijelaskan secara sederhana sebagai berikut, misalnya ada seorang investor (PMA/PMDN) berinvestasi dengan mendirikan industri baja di kabupaten Bantul, DIY senilai Rp. 100 milyar. Dari investasi pada industri baja akan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung misalnya proses pembangunan gedung dan infrastruktur pabrik seperti jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, saluran drainase, jaringan AC, jaringan pembuangan limbah, dsb, semuanya membutuhkan tenaga ahli. Sehingga dengan adanya pembangunan industri baja akan membuka lapangan kerja bagi tenaga ahli (insinyur) di bidang konstruksi, sipil, elektro, arsitek, dsb. Demikian juga pembangunan industri tersebut akan memberikan dampak tidak langsung bagi mereka yang bersentuhan dengan kegiatan industri tersebut, misalnya petani sayur untuk mensuplai kebutuhan makanan dan buah-buahan, tenaga parkir, pedagang makanan dan minuman, sopir angkot, kuli bangunan, sewa rumah, pedagang pulsa, dsb. Mereka akan ikut menikmati dampak yang ditimbulkan dari investasi pada sektor industri baja tersebut.

Penentuan angka pengganda (*multiplier*) dirumuskan melalui penentuan keseimbangan perekonomian yaitu pengeluaran (*expenditure*) sama dengan pendapatan (*income*) atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = E$$

Dimana :

Y = Pendapatan nasional

E = Total pengeluaran

### *Perekonomian 2 Sektor (Perekonomian Sederhana)*

Pada perekonomian sederhana atau perekonomian 2 sektor dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I$$

Rumusan di atas mengandung makna bahwa total pendapatan nasional (Y) dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan pengeluaran investasi perusahaan (I).

$$Y = C + I$$

$$C = C_0 + b Y$$

$$I = I_0$$

$$Y = C_0 + b Y + I_0$$

$$Y - b Y = C_0 + I_0$$

$$(1-b) Y = C_0 + I_0$$

$$Y = \frac{1}{(1-b)} x(C_0 + I_0)$$

Jika terdapat perubahan pada investasi ( $\Delta I$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{1}{(1-b)} x(C_0 + I_0 + \Delta I_0)$$

$$\Delta Y = \frac{1}{(1-b)} x(C_0 + I_0 + \Delta I_0) - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I}{(1-b)} + \frac{1}{1-b} (C_0 + I_0) - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I}{(1-b)} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I}{(1-b)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{(1-b)}$$

$$k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{(1-b)}$$

Jadi multiplier investasi ( $k_I$ ) adalah  $\frac{1}{(1-b)}$  dimana  $b = MPC =$  marginal propensity to consume.

### *Perekonomian 3 Sektor (Perekonomian dengan Kebijakan Fiskal)*

Penurunan angka pengganda investasi (*investment multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_x = T_{x_o}$$

$$T_r = T_{r_o}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b (Y - T_{x_o} + T_{r_o}) + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$Y - b.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$(1-b).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o}{1-b}$$

Jika terdapat perubahan pada investasi ( $\Delta I$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + \Delta I_o}{1-b}$$

$$\Delta Y = \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + \Delta Io}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta Io}{1 - b} + \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + \Delta Io}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta Io}{1 - b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I_o}{(1 - b)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I_o} = \frac{1}{(1 - b)}$$

$$k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I_o} = \frac{1}{(1 - b)}$$

Penurunan angka pengganda (multiplier) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat proporsional (*proporsional tax*), dapat dirumuskan dengan langkah yang sama sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = Co + b Y_d$$

$$I = Io$$

$$G = Go$$

$$Tx = Tx_o + t.Y$$

$$Tr = Tr_o$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = Co + b Y_d + Io + Go$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$Y = Co + b [Y - (Tx_o + t.Y) + Tr_o] + Io + Go$$

$$Y = Co + b(Y - Tx_o - t.Y + Tr_o) + Io + Go$$

$$Y = Co + b.Y - b.Tx_o - b.t.Y + b.Tr_o + Io + Go$$

$$Y - b.Y + b.t.Y = C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o$$

$$(1-b+b.t).Y = C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o$$

$$Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o}{1 - b + b.t}$$

Jika terdapat perubahan pada investasi ( $\Delta I$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + \Delta I_o}{1 - b + b.t}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + \Delta I_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I_o}{1 - b + b.t} + \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + \Delta I_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I_o}{1 - b + b.t} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I_o}{(1 - b + b.t)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I_o} = \frac{1}{(1 - b + b.t)}$$

$$k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I_o} = \frac{1}{(1 - b + b.t)}$$

#### *Perekonomian 4 Sektor (Perekonomian Terbuka)*

Penurunan angka pengganda investasi (investment multiplier) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$Tx = Tx_o$$

$$Tr = Tr_o$$

$$Y_d = Y - T_x + Tr$$

$$M = M_o$$

$$X = X_o$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y_d = Y - T_x + Tr$$

$$Y = C_o + b (Y - T_{x_o} + Tr_o) + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y - b.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$(1-b).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_x + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1 - b}$$

Jika terdapat perubahan pada investasi ( $\Delta I$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta I_o}{1 - b}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta I_o}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I_o}{1 - b} + \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta I_o}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I_o}{1 - b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I_o}{(1 - b)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I_o} = \frac{1}{(1 - b)}$$

$$k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I_o} = \frac{1}{(1 - b)}$$

Penurunan angka pengganda investasi (investment multiplier) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat variabel dan pajak bersifat proporsional (*proportional tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_x = T_{x_o} + t.Y$$

$$T_r = T_{r_o}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$M = M_o + m.Y$$

$$X = X_o$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b [Y - (T_{x_o} + t.Y) + T_{r_o}] + I_o + G_o + [X_o - (M_o + m.Y)]$$

$$Y = C_o + b.(Y - T_{x_o} - t.Y + T_{r_o}) + I_o + G_o + (X_o - M_o - m.Y)$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} - b.t.Y + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o - m.Y)$$

$$Y - b.Y + b.t.Y + m.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + X_o - M_o$$

$$(1 - b + b.t + m).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1 - b + b.t + m}$$

Jika terdapat perubahan pada investasi ( $\Delta I$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta I_o}{1 - b + b.t + m}$$

$$\Delta Y = \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + (Xo - Mo) + \Delta Io}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta Io}{1 - b + b.t + m} + \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + (Xo - Mo) + \Delta Io}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta Io}{1 - b + b.t + m} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I_o}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I_o} = \frac{1}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I_o} = \frac{1}{(1 - b + b.t + m)}$$

### **Angka Pengganda Konsumsi (*Consumption Multiplier*)**

Angka pengganda konsumsi (*consumption multiplier*) menunjukkan pengaruh perubahan pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ) yang disebabkan karena adanya perubahan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga ( $\Delta C$ ). Besarnya angka pengganda konsumsi (*consumption multiplier*) mencerminkan efek yang ditimbulkan dari pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian secara makro.

Angka pengganda konsumsi (*consumption multiplier*) sebesar 6 misalnya menunjukkan bahwa jika ada perubahan pengeluaran konsumsi sebesar Rp. 1 milyar akan berdampak pada perubahan pendapatan nasional secara makro sebesar Rp. 6 milyar. Hal ini bisa dipahami bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga akan memberikan dampak berantai pada sektor-sektor ekonomi yang terkait baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh riil misalnya jika sebuah rumah tangga membeli sehelai baju di pasar Tanah Abang Jakarta sebesar Rp. 100 ribu, maka akan memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan dan keuntungan pedagang di pasar Tanah Abang. Keuntungan pedagang mendorong peningkatan omset penjualan dan produksi baju sehingga industri benang, industri kain dan garmen juga meningkatkan produksinya. Tidak hanya sektor industri benang dan kain saja yang terkena

dampak langsung dari peningkatan permintaan baju, tetapi juga mereka yang bersentuhan dengan sektor-sektor tersebut juga akan mendapatkan manfaatnya seperti tukang parkir, sopir angkot, pedagang makanan dan minuman, kuli angkut, buruh pabrik, manajer perusahaan, dsb. Kondisi ini akan menyebabkan peningkatan produksi dan pendapatan secara keseluruhan sehingga pendapatan nasional akan meningkat.

### *Perekonomian 2 Sektor (Perekonomian Sederhana)*

Penentuan angka pengganda konsumsi pada perekonomian 2 sektor (perekonomian sederhana) dirumuskan berdasarkan pada aspek perubahan pada fungsi konsumsinya dimana perubahan bisa dari besarnya konsumsi otonom ( $C_0$ ) atau dari perubahan pola konsumsi yang ditandai dengan perubahan pada MPC dalam fungsi konsumsi. Jika perubahan pada besarnya konsumsi otonom, maka penentuan angka pengganda konsumsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{1}{(1-b)} x (C_0 + I_0 + \Delta C_0)$$

$$\Delta Y = \frac{1}{(1-b)} x (C_0 + I_0 + \Delta C_0) - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C}{(1-b)} + \frac{1}{1-b} (C_0 + I_0) - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C}{(1-b)} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C}{(1-b)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta C} = \frac{1}{(1-b)}$$

$$k_c = \frac{\Delta Y}{\Delta C} = \frac{1}{(1-b)}$$

### *Perekonomian 3 Sektor (Perekonomian dengan Kebijakan Fiskal)*

Penurunan angka pengganda konsumsi (*consumption multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$I = I_0$$

$$G = G_0$$

$$T_x = T_{x_0}$$

$$T_r = T_{r_0}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_0 + b Y_d + I_0 + G_0$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_0 + b (Y - T_{x_0} + T_{r_0}) + I_0 + G_0$$

$$Y = C_0 + b.Y - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0$$

$$Y - b.Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0$$

$$(1-b).Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0$$

$$Y = \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.T_r + I_0 + G_0}{1-b}$$

Jika terdapat perubahan pada konsumsi ( $\Delta C$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.T_r + I_0 + G_0 + \Delta C_0}{1-b}$$

$$\Delta Y = \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.T_r + I_0 + G_0 + \Delta C_0}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_0}{1-b} + \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.T_r + I_0 + G_0}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_0}{1-b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_0}{(1-b)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta C_o} = \frac{1}{(1-b)}$$

$$k_c = \frac{\Delta Y}{\Delta C_o} = \frac{1}{(1-b)}$$

Penurunan angka pengganda (*multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat proporsional (*proporsional tax*), dapat dirumuskan dengan langkah yang sama sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_x = T_{x_o} + t.Y$$

$$T_r = T_{r_o}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b [Y - (T_{x_o} + t.Y) + T_{r_o}] + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b(Y - T_{x_o} - t.Y + T_{r_o}) + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} - b.t.Y + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$Y - b.Y + b.t.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$(1-b+b.t).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o}{1-b+b.t}$$

Jika terdapat perubahan pada konsumsi ( $\Delta C$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + \Delta C_o}{1 - b + b.t}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + \Delta C_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_o}{1 - b + b.t} + \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_o}{1 - b + b.t} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_o}{(1 - b + b.t)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta C_o} = \frac{1}{(1 - b + b.t)}$$

$$k_c = \frac{\Delta Y}{\Delta C_o} = \frac{1}{(1 - b + b.t)}$$

#### *Perekonomian 4 Sektor (Perekonomian Terbuka)*

Penurunan angka pengganda konsumsi (*consumption multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$Tx = Tx_o$$

$$Tr = Tr_o$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$M = M_o$$

$$X = X_o$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b (Y - T_{x_o} + T_{r_o}) + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y - b.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$(1-b).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_x + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1-b}$$

Jika terdapat perubahan pada konsumsi ( $\Delta C$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta C_o}{1-b}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta C_o}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_o}{1-b} + \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_o}{1-b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_o}{(1-b)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta C_o} = \frac{1}{(1-b)}$$

$$k_c = \frac{\Delta Y}{\Delta C_o} = \frac{1}{(1-b)}$$

Penurunan angka pengganda konsumsi (*consumption multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat variabel dan pajak bersifat proporsional (*proportional tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_x = T_{x_o} + t.Y$$

$$T_r = T_{r_o}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$M = M_o + m.Y$$

$$X = X_o$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b [Y - (T_{x_o} + t.Y) + T_{r_o}] + I_o + G_o + [X_o - (M_o + m.Y)]$$

$$Y = C_o + b.(Y - T_{x_o} - t.Y + T_{r_o}) + I_o + G_o + (X_o - M_o - m.Y)$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} - b.t.Y + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o - m.Y)$$

$$Y - b.Y + b.t.Y + m.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + X_o - M_o$$

$$(1 - b + b.t + m).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1 - b + b.t + m}$$

Jika terdapat perubahan pada konsumsi ( $\Delta C$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta C_o}{1 - b + b.t + m}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta C_o}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_o}{1 - b + b.t + m} + \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_o}{1 - b + b.t + m} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C_0}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta C_0} = \frac{1}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$k_t = \frac{\Delta Y}{\Delta C_0} = \frac{1}{(1 - b + b.t + m)}$$

### **Angka Pengganda Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure Multiplier*)**

Kontribusi pemerintah dalam perekonomian cukup besar melalui kebijakan ekonomi yang dilakukan baik kebijakan di bidang anggaran (kebijakan fiskal) atau kebijakan moneter. Peranan pemerintah dalam perekonomian melalui anggaran dilakukan melalui pemberian alokasi dana pada sektor-sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pekerjaan umum, dsb.

Besarnya pengaruh perubahan anggaran belanja pemerintah terhadap perekonomian secara makro dapat dilihat dari besarnya angka pengganda pengeluaran pemerintah (*government expenditure multiplier*). Bekerjanya angka pengganda pengeluaran pemerintah (*government expenditure multiplier*) pada perekonomian dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut, jika pemerintah melalui penerimaan pajak kemudian dialokasikan untuk membiayai pembangunan proyek jalan lintas Sumatera senilai Rp. 3 trilyun.

Dampak dari pembangunan proyek tersebut dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Dampak langsung yang dirasakan yaitu bagi mereka yang langsung terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian proyek jalan lintas Sumatera tsb seperti konsultan teknik, insinyur teknik sipil, industri semen, industri baja, industri alat-alat berat, industri makanan dan minuman, pengguna jalan, dsb. Demikian juga mereka yang terkena dampak tidak langsung juga akan mendapat imbas

dari proyek besar tersebut seperti pengusaha catering, sopir angkot, tukang ojek, pedagang makanan, penjual sayur, pedagang kaki lima, kuli angkut, dsb.

### *Perekonomian 3 Sektor (Perekonomian dengan Kebijakan Fiskal)*

Penurunan angka pengganda pengeluaran pemerintah (*government expenditure multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$I = I_0$$

$$G = G_0$$

$$T_x = T_{x_0}$$

$$T_r = T_{r_0}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_0 + b Y_d + I_0 + G_0$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_0 + b (Y - T_{x_0} + T_{r_0}) + I_0 + G_0$$

$$Y = C_0 + b.Y - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0$$

$$Y - b.Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0$$

$$(1-b).Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0$$

$$Y = \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0}{1-b}$$

Jika terdapat perubahan pada pengeluaran pemerintah ( $\Delta G$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_0 - b.Tx_0 + b.Tr + I_0 + G_0 + \Delta G_0}{1 - b}$$

$$\Delta Y = \frac{C_0 - b.Tx_0 + b.Tr + I_0 + G_0 + \Delta G_0}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_0}{1 - b} + \frac{C_0 - b.Tx_0 + b.Tr + I_0 + G_0}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_0}{1 - b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_0}{1 - b}$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_0}{(1 - b)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G_0} = \frac{1}{(1 - b)}$$

$$k_c = \frac{\Delta Y}{\Delta G_0} = \frac{1}{(1 - b)}$$

Penurunan angka pengganda (*multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat proporsional (*proporsional tax*), dapat dirumuskan dengan langkah yang sama sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$I = I_0$$

$$G = G_0$$

$$Tx = Tx_0 + t.Y$$

$$Tr = Tr_0$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_0 + b Y_d + I_0 + G_0$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b [Y - (T_{x_o} + t.Y) + T_{r_o}] + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b(Y - T_{x_o} - t.Y + T_{r_o}) + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} - b.t.Y + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$Y - b.Y + b.t.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$(1-b+b.t).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_r + I_o + G_o}{1 - b + b.t}$$

Jika terdapat perubahan pada pengeluaran pemerintah ( $\Delta G$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_r + I_o + G_o + \Delta G_o}{1 - b + b.t}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_r + I_o + G_o + \Delta G_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o}{1 - b + b.t} + \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_r + I_o + G_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o}{1 - b + b.t} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o}{(1 - b + b.t)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G_o} = \frac{1}{(1 - b + b.t)}$$

$$k_c = \frac{\Delta Y}{\Delta G_o} = \frac{1}{(1 - b + b.t)}$$

#### *Perekonomian 4 Sektor (Perekonomian Terbuka)*

Penurunan angka pengganda pengeluaran pemerintah (*government expenditure multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_x = T_{x_o}$$

$$T_r = T_{r_o}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$M = M_o$$

$$X = X_o$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b (Y - T_{x_o} + T_{r_o}) + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y - b.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$(1-b).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_x + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1-b}$$

Jika terdapat perubahan pada pengeluaran pemerintah ( $\Delta G$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_x + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta G_o}{1-b}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_x + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) + \Delta G_o}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o}{1-b} + \frac{C_o - b.T_x + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o}{1-b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o}{1-b}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G_o} = \frac{1}{(1-b)}$$

$$k_c = \frac{\Delta Y}{\Delta G_o} = \frac{1}{(1-b)}$$

Penurunan angka pengganda pengeluaran pemerintah (*government expenditure multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat variabel dan pajak bersifat proporsional (*proportional tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_x = T_{x_o} + t.Y$$

$$T_r = T_{r_o}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$M = M_o + m.Y$$

$$X = X_o$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b [Y - (T_{x_o} + t.Y) + T_{r_o}] + I_o + G_o + [X_o - (M_o + m.Y)]$$

$$Y = C_o + b.(Y - T_{x_o} - t.Y + T_{r_o}) + I_o + G_o + (X_o - M_o - m.Y)$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} - b.t.Y + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o - m.Y)$$

$$Y - b.Y + b.t.Y + m.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + X_o - M_o$$

$$(1 - b + b.t + m).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + (Xo - Mo)}{1 - b + b.t + m}$$

Jika terdapat perubahan pada pengeluaran pemerintah ( $\Delta G$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + (Xo - Mo) + \Delta Go}{1 - b + b.t + m}$$

$$\Delta Y = \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + (Xo - Mo) + \Delta Go}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta Go}{1 - b + b.t + m} + \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + (Xo - Mo)}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta Go}{1 - b + b.t + m} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta Go}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Go} = \frac{1}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$k_t = \frac{\Delta Y}{\Delta Go} = \frac{1}{(1 - b + b.t + m)}$$

### **Angka Pengganda Pajak (*Tax Multiplier*)**

Pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian modern, karena menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. Implikasi pajak pada perekonomian berjalan melalui pengaruhnya pada pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) bagi masyarakat. Karena pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) adalah pendapatan nasional dikurangi dengan pajak dan ditambah dengan pembayaran subsidi (*transfer payments*). Kenaikan pajak menyebabkan semakin berkurangnya pendapatan yang siap dibelanjakan masyarakat dan akhirnya akan mengurangi kemampuan mereka dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sedangkan konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama pembentuk

pendapatan nasional sehingga pendapatan nasional akan menurun pula. Dan sebaliknya penurunan pajak akan menyebabkan kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) sehingga akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Jadi perubahan pada pajak akan berpengaruh pada perubahan pada pendapatan nasional dengan sifat perubahan yang berkebalikan.

Angka pengganda pajak (*tax multiplier*) merupakan angka yang mengukur pengaruh perubahan pajak ( $\Delta T_x$ ) terhadap pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ). Karena sifat perubahan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional bersifat berkebalikan, maka angka pengganda pajak tandanya adalah negatif. Dan analisis angka pengganda pajak diterapkan pada perekonomian 3 sektor atau perekonomian 4 sektor, karena harus melibatkan peran pemerintah. Untuk perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana analisis multiplier pajak tidak relevan.

#### *Perekonomian 3 Sektor (Perekonomian dengan Kebijakan Fiskal)*

Penurunan angka pengganda pajak (*tax multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_x = T_{x_o}$$

$$T_r = T_{r_o}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$Y = Co + b(Y - Tx_o + Tr_o) + Io + Go$$

$$Y = Co + b.Y - b.Tx_o + b.Tr_o + Io + Go$$

$$Y - b.Y = Co - b.Tx_o + b.Tr_o + Io + Go$$

$$(1-b).Y = Co - b.Tx_o + b.Tr_o + Io + Go$$

$$Y = \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go}{1-b}$$

Jika terdapat perubahan pada pajak ( $\Delta Tx$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go - b.\Delta Tx_o}{1-b}$$

$$\Delta Y = \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go - b.\Delta Tx_o}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta Tx_o}{1-b} + \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta Tx_o}{1-b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta Tx_o}{1-b}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Tx_o} = \frac{-b}{(1-b)}$$

$$k_{Tx} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tx_o} = \frac{-b}{(1-b)}$$

Penurunan angka pengganda (*multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat proporsional (*proporsional tax*), dapat dirumuskan dengan langkah yang sama sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = Co + b Y_d$$

$$I = Io$$

$$G = Go$$

$$T_x = T_{x_0} + t.Y$$

$$Tr = Tr_0$$

$$Y_d = Y - T_x + Tr$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_0 + b Y_d + I_0 + G_0$$

$$Y_d = Y - T_x + Tr$$

$$Y = C_0 + b [Y - (T_{x_0} + t.Y) + Tr_0] + I_0 + G_0$$

$$Y = C_0 + b(Y - T_{x_0} - t.Y + Tr_0) + I_0 + G_0$$

$$Y = C_0 + b.Y - b.T_{x_0} - b.t.Y + b.Tr_0 + I_0 + G_0$$

$$Y - b.Y + b.t.Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.Tr_0 + I_0 + G_0$$

$$(1-b+b.t).Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.Tr_0 + I_0 + G_0$$

$$Y = \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.Tr_0 + I_0 + G_0}{1 - b + b.t}$$

Jika terdapat perubahan pada pajak ( $\Delta T_x$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.Tr_0 + I_0 + G_0 - b.\Delta T_{x_0}}{1 - b + b.t}$$

$$\Delta Y = \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.Tr_0 + I_0 + G_0 - b.\Delta T_{x_0}}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta T_{x_0}}{1 - b + b.t} + \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.Tr_0 + I_0 + G_0}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta T_{x_0}}{1 - b + b.t} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta T_{x_0}}{(1 - b + b.t)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta T_{x_0}} = \frac{-b}{(1 - b + b.t)}$$

$$k_{T_x} = \frac{\Delta Y}{\Delta T_{x_0}} = \frac{-b}{(1 - b + b.t)}$$

#### *Perekonomian 4 Sektor (Perekonomian Terbuka)*

Penurunan angka pengganda pajak (*tax multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$I = I_0$$

$$G = G_0$$

$$T_x = T_{x_0}$$

$$T_r = T_{r_0}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$M = M_0$$

$$X = X_0$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_0 + b Y_d + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_0 + b (Y - T_{x_0} + T_{r_0}) + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y = C_0 + b.Y - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y - b.Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$(1-b).Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y = \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)}{1 - b}$$

Jika terdapat perubahan pada pajak ( $\Delta T_x$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0) - b.\Delta T_{x_0}}{1 - b}$$

$$\Delta Y = \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + (Xo - Mo) - b.\Delta Tx_o}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta Tx_o}{1 - b} + \frac{Co - b.Tx_o + b.Tr + Io + Go + (Xo - Mo)}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta Tx_o}{1 - b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta Tx_o}{1 - b}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Tx_o} = \frac{-b}{(1 - b)}$$

$$k_{Tx} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tx_o} = \frac{-b}{(1 - b)}$$

Penurunan angka pengganda pajak (*tax multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat variabel dan pajak bersifat proporsional (*proportional tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = Co + b Y_d$$

$$I = Io$$

$$G = Go$$

$$Tx = Tx_o + t.Y$$

$$Tr = Tr_o$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$M = Mo + m.Y$$

$$X = Xo$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = Co + b Y_d + Io + Go + (Xo - Mo)$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$Y = Co + b [Y - (Tx_o + t.Y) + Tr_o] + Io + Go + [Xo - (Mo + m.Y)]$$

$$Y = Co + b.(Y - Tx_o - t.Y + Tr_o) + Io + Go + (Xo - Mo - m.Y)$$

$$Y = C_o + b.Y - b.Tx_o - b.t.Y + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o - m.Y)$$

$$Y - b.Y + b.t.Y + m.Y = C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o + X_o - M_o$$

$$(1 - b + b.t + m).Y = C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1 - b + b.t + m}$$

Jika terdapat perubahan pada pajak ( $\Delta Tx$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o) - b.\Delta Tx_o}{1 - b + b.t + m}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o) - b.\Delta Tx_o}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta Tx_o}{1 - b + b.t + m} + \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta Tx_o}{1 - b + b.t + m} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{-b.\Delta Tx_o}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Tx_o} = \frac{-b}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$k_{Tx} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tx_o} = \frac{-b}{(1 - b + b.t + m)}$$

### **Angka Pengganda Pembayaran Transfer (*Transfer Payment Multiplier*)**

Pembayaran transfer (*transfer payments*) atau istilah populernya adalah subsidi merupakan kewajiban pemerintah dalam melakukan kewajiban sosial dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Subsidi diberikan kepada anggota masyarakat yang berhak menerimanya seperti subsidi BBM, beasiswa pendidikan dari keluarga pra sejahtera, subsidi RASKIN (beras bagi orang miskin), subsidi daerah bencana alam, subsidi anggaran bagi daerah otonom, dsb.

Implikasi dari pembayaran subsidi akan menambah pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) karena pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) adalah pendapatan nasional setelah dikurangi dengan pajak dan ditambah dengan pembayaran transfer atau subsidi. Jika pemerintah meningkatkan subsidi maka akan meningkatkan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dan akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Dan sebaliknya jika pemerintah mengurangi subsidi, maka akan mengurangi pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dan akan mengurangi pengeluaran konsumsi yang akhirnya juga akan mengurangi pendapatan nasional. Jadi perubahan pada subsidi akan berpengaruh pada perubahan pada pendapatan nasional dengan sifat perubahan yang searah.

Angka pengganda pembayaran transfer (*transfer payment multiplier*) merupakan angka yang mengukur pengaruh perubahan pembayaran transfer ( $\Delta Tr$ ) terhadap pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ). Karena sifat perubahan pembayaran transfer (subsidi) terhadap perubahan pendapatan nasional bersifat searah, maka angka pengganda pembayaran transfer (*transfer payment multiplier*) tandanya adalah positif. Sama dengan angka pengganda pajak (*tax multiplier*) bahwa analisis angka pengganda pembayaran transfer (*transfer payment multiplier*) diterapkan pada perekonomian 3 sektor atau perekonomian 4 sektor, karena harus melibatkan peran pemerintah. Untuk perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana analisis angka pengganda pembayaran transfer (*transfer payment multiplier*) tidak relevan.

#### *Perekonomian 3 Sektor (Perekonomian dengan Kebijakan Fiskal)*

Penurunan angka pengganda pembayaran transfer (*transfer payment multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_x = T_{x_o}$$

$$T_r = T_{r_o}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b (Y - T_{x_o} + T_{r_o}) + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$Y - b.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$(1-b).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_r + I_o + G_o}{1 - b}$$

Jika terdapat perubahan pada pajak ( $\Delta T_x$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_r + I_o + G_o + b.\Delta T_{r_o}}{1 - b}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_r + I_o + G_o + b.\Delta T_{r_o}}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta T_{r_o}}{1 - b} + \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.T_r + I_o + G_o}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta T_{r_o}}{1 - b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta T_{x_o}}{1 - b}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta T_{r_o}} = \frac{b}{(1 - b)}$$

$$k_{Tr} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tr_o} = \frac{b}{(1-b)}$$

Penurunan angka pengganda (*multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat proporsional (*proporsional tax*), dapat dirumuskan dengan langkah yang sama sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$Tx = Tx_o + t.Y$$

$$Tr = Tr_o$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$Y = C_o + b [Y - (Tx_o + t.Y) + Tr_o] + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b(Y - Tx_o - t.Y + Tr_o) + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b.Y - b.Tx_o - b.t.Y + b.Tr_o + I_o + G_o$$

$$Y - b.Y + b.t.Y = C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o$$

$$(1-b+b.t).Y = C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o$$

$$Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr_o + I_o + G_o}{1 - b + b.t}$$

Jika terdapat perubahan pada subsidi ( $\Delta Tr$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + b.\Delta Tr_o}{1 - b + b.t}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + b.\Delta Tr_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta Tr_o}{1 - b + b.t} + \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta Tr_o}{1 - b + b.t} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta Tr_o}{(1 - b + b.t)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Tr_o} = \frac{b}{(1 - b + b.t)}$$

$$k_{Tr} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tr_o} = \frac{b}{(1 - b + b.t)}$$

#### *Perekonomian 4 Sektor (Perekonomian Terbuka)*

Penurunan angka pengganda pembayaran transfer (*transfer payment multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$Tx = Tx_o$$

$$Tr = Tr_o$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$M = M_o$$

$$X = X_o$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$Y = C_o + b(Y - T_{X_o} + Tr_o) + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{X_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y - b.Y = C_o - b.T_{X_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$(1-b).Y = C_o - b.T_{X_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_{X_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1-b}$$

Jika terdapat perubahan pada subsidi ( $\Delta Tr$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{X_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o) + b.\Delta Tr_o}{1-b}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_{X_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o) + b.\Delta Tr_o}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta Tr_o}{1-b} + \frac{C_o - b.T_{X_o} + b.Tr_o + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta Tr_o}{1-b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta Tr_o}{1-b}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Tr_o} = \frac{b}{1-b}$$

$$k_{Tr} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tr_o} = \frac{b}{1-b}$$

Penurunan angka pengganda pembayaran transfer (*transfer payment multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat variabel dan pajak bersifat proporsional (*proportional tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_X = T_{X_o} + t.Y$$

$$Tr = Tr_0$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$M = M_0 + m.Y$$

$$X = X_0$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_0 + b Y_d + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$Y = C_0 + b [Y - (Tx_0 + t.Y) + Tr_0] + I_0 + G_0 + [X_0 - (M_0 + m.Y)]$$

$$Y = C_0 + b.(Y - Tx_0 - t.Y + Tr_0) + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0 - m.Y)$$

$$Y = C_0 + b.Y - b.Tx_0 - b.t.Y + b.Tr_0 + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0 - m.Y)$$

$$Y - b.Y + b.t.Y + m.Y = C_0 - b.Tx_0 + b.Tr_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0$$

$$(1 - b + b.t + m).Y = C_0 - b.Tx_0 + b.Tr_0 + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y = \frac{C_0 - b.Tx_0 + b.Tr_0 + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)}{1 - b + b.t + m}$$

Jika terdapat perubahan pada subsidi ( $\Delta Tr$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_0 - b.Tx_0 + b.Tr + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0) + b.\Delta Tr_0}{1 - b + b.t + m}$$

$$\Delta Y = \frac{C_0 - b.Tx_0 + b.Tr + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0) + b.\Delta Tr_0}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta Tr_0}{1 - b + b.t + m} + \frac{C_0 - b.Tx_0 + b.Tr + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta Tr_0}{1 - b + b.t + m} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{b.\Delta Tr_0}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Tr_0} = \frac{b}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$k_{Tr} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tr_o} = \frac{b}{(1 - b + b.t + m)}$$

### **Angka Pengganda Anggaran Belanja Seimbang (*Balanced Budget Multiplier*)**

Anggaran belanja seimbang maknanya adalah peningkatan jumlah belanja pemerintah (*government expenditure*) dibiayai melalui peningkatan jumlah pungutan pajak dengan jumlah yang sama. Konsep kebijakan fiskal dengan pola anggaran belanja seimbang ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan ekonomi dengan mengandalkan pada pembiayaan pembangunan dalam negeri yaitu pajak. Ada beberapa alternatif pembiayaan pembangunan selain pajak antara lain melalui hutang luar, penerbitan SUN (surat hutang negara) atau obligasi, privatisasi BUMN, dsb. Namun pajak masih merupakan sumber pembiayaan pembangunan utama untuk menopang pembangunan ekonomi yang mencerminkan kemandirian pembangunan.

Konsep angka pengganda anggaran belanja seimbang (*balanced budget multiplier*) artinya besarnya perubahan belanja pemerintah yang dibiayai oleh penerimaan pajak dalam jumlah perubahan yang sama yang berdampak pada perubahan pendapatan nasional. Secara teoritis kebijakan peningkatan belanja pemerintah (*government expenditure*) berdampak ekspansif artinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan peningkatan pajak berdampak kontraktif artinya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi karena pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) masyarakat semakin berkurang.

Karena perubahan belanja negara diimbangi dengan perubahan pajak dalam jumlah yang sama, maka angka pengganda anggaran belanja seimbang (*balanced budget multiplier*) nilainya sama dengan 1 (satu). Secara logika karena perubahan belanja negara diimbangi dengan perubahan pajak dalam jumlah yang sama seharusnya pertumbuhan ekonomi sama dengan nol (0) artinya tidak ada perubahan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun dalam

kenyataan tidak demikian bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis angka pengganda anggaran belanja seimbang (*balanced budget multiplier*) nilainya sama dengan 1 (satu) artinya kalau pemerintah meningkatkan jumlah belanja negara yang kemudian diimbangi dengan peningkatan jumlah pajak dalam jumlah yang sama, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah yang sama.

Analisis angka pengganda anggaran belanja seimbang (*balanced budget multiplier*) dapat diaplikasikan pada perekonomian 3 sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal dan juga pada perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Hal ini mengisyaratkan masuknya peran pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakan di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

#### *Perekonomian 3 Sektor (Perekonomian dengan Kebijakan Fiskal)*

Penurunan angka pengganda anggaran belanja seimbang (*balanced budget multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$I = I_0$$

$$G = G_0$$

$$T_x = T_{x_0}$$

$$T_r = T_{r_0}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_0 + b Y_d + I_0 + G_0$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b(Y - T_{x_o} + Tr_o) + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o$$

$$Y - b.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o$$

$$(1-b).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o}{1-b}$$

Jika terdapat perubahan pada belanja negara ( $\Delta G$ ) dan pajak ( $\Delta T_x$ ) dengan jumlah yang sama ( $(\Delta G = \Delta T_x)$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o - b.\Delta T_{x_o} + \Delta G_o}{1-b}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o - b.\Delta T_{x_o} + \Delta G_o}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o - b.\Delta T_{x_o}}{1-b} + \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr_o + I_o + G_o}{1-b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{(1-b).\Delta T_{x_o}}{1-b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{(1-b).\Delta T_{x_o}}{1-b}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G = \Delta T_{x_o}} = \frac{1-b}{1-b} = 1$$

$$k_B = \frac{\Delta Y}{\Delta G = \Delta T_{x_o}} = \frac{1-b}{1-b} = 1$$

Penurunan angka pengganda (*multiplier*) pada perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor dimana pajak bersifat proporsional (*proporsional tax*), dapat dirumuskan dengan langkah yang sama sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$T_x = T_{x_0} + t.Y$$

$$T_r = T_{r_0}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b [Y - (T_{x_0} + t.Y) + T_{r_0}] + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b(Y - T_{x_0} - t.Y + T_{r_0}) + I_o + G_o$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_0} - b.t.Y + b.T_{r_0} + I_o + G_o$$

$$Y - b.Y + b.t.Y = C_o - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_o + G_o$$

$$(1-b+b.t).Y = C_o - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_o + G_o$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_{x_0} + b.T_r + I_o + G_o}{1 - b + b.t}$$

Jika terdapat perubahan pada belanja negara dan pajak dengan jumlah yang sama ( $\Delta G = \Delta T_x$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_0} + b.T_r + I_o + G_o - b.\Delta T_{x_0} + \Delta G_o}{1 - b + b.t}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_0} + b.T_r + I_o + G_o - b.\Delta T_{x_0} + \Delta G_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o - b.\Delta T_{r_0}}{1 - b + b.t} + \frac{C_o - b.T_{x_0} + b.T_r + I_o + G_o}{1 - b + b.t} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{(1-b).\Delta T_{x_0}}{1 - b + b.t} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{(1-b).\Delta T_{x_0}}{(1 - b + b.t)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G_o - \Delta T_{x_0}} = \frac{1-b}{(1 - b + b.t)}$$

$$k_B = \frac{\Delta Y}{\Delta G_0 = \Delta T_{X_0}} = \frac{1-b}{(1-b+b.t)}$$

#### *Perekonomian 4 Sektor (Perekonomian Terbuka)*

Penurunan angka pengganda anggaran belanja seimbang (*balanced budget multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat konstan dan pajak bersifat tetap (*lump sum tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$I = I_0$$

$$G = G_0$$

$$T_x = T_{x_0}$$

$$T_r = T_{r_0}$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$M = M_0$$

$$X = X_0$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_0 + b Y_d + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_0 + b (Y - T_{x_0} + T_{r_0}) + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y = C_0 + b.Y - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y - b.Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$(1-b).Y = C_0 - b.T_{x_0} + b.T_{r_0} + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)$$

$$Y = \frac{C_0 - b.T_x + b.Tr + I_0 + G_0 + (X_0 - M_0)}{1-b}$$

Jika terdapat perubahan pada belanja negara dan pajak dengan jumlah yang sama ( $\Delta G = \Delta Tx$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) - b.\Delta Tx_o + \Delta G_o}{1 - b}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) - b.\Delta Tx_o + \Delta G_o}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o - b.\Delta Tx_o}{1 - b} + \frac{C_o - b.Tx_o + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1 - b} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o - b.\Delta Tx_o}{1 - b} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o - b.\Delta Tx_o}{1 - b}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G_o = \Delta Tx_o} = \frac{1 - b}{(1 - b)} = 1$$

$$k_B = \frac{\Delta Y}{\Delta G_o = \Delta Tx_o} = \frac{1 - b}{(1 - b)} = 1$$

Penurunan angka pengganda anggaran belanja seimbang (*balanced budget multiplier*) pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor dimana impor bersifat variabel dan pajak bersifat proporsional (*proportional tax*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_o + b Y_d$$

$$I = I_o$$

$$G = G_o$$

$$Tx = Tx_o + t.Y$$

$$Tr = Tr_o$$

$$Y_d = Y - Tx + Tr$$

$$M = M_o + m.Y$$

$$X = X_o$$

Perekonomian mencapai keseimbangan, manakala dirumuskan kesamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = C_o + b Y_d + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y = C_o + b [Y - (T_{x_o} + t.Y) + T_{r_o}] + I_o + G_o + [X_o - (M_o + m.Y)]$$

$$Y = C_o + b.(Y - T_{x_o} - t.Y + T_{r_o}) + I_o + G_o + (X_o - M_o - m.Y)$$

$$Y = C_o + b.Y - b.T_{x_o} - b.t.Y + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o - m.Y)$$

$$Y - b.Y + b.t.Y + m.Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + X_o - M_o$$

$$(1 - b + b.t + m).Y = C_o - b.T_{x_o} + b.T_{r_o} + I_o + G_o + (X_o - M_o)$$

$$Y = \frac{C_o - b.T_x + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1 - b + b.t + m}$$

Jika terdapat perubahan pada belanja negara dan pajak dengan jumlah yang sama ( $\Delta G = \Delta T_x$ ), maka akan menimbulkan perubahan pada pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ), sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y + \Delta Y = \frac{C_o - b.T_x + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) - b.\Delta T_{x_o} + \Delta G_o}{1 - b + b.t + m}$$

$$\Delta Y = \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o) - b.\Delta T_{x_o} + \Delta G_o}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o - b.\Delta T_{x_o}}{1 - b + b.t + m} + \frac{C_o - b.T_{x_o} + b.Tr + I_o + G_o + (X_o - M_o)}{1 - b + b.t + m} - Y$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G_o - b.\Delta T_{x_o}}{1 - b + b.t + m} + Y - Y$$

$$\Delta Y = \frac{(1 - b).\Delta T_{x_o}}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G_o = \Delta T_{x_o}} = \frac{1 - b}{(1 - b + b.t + m)}$$

$$k_B = \frac{\Delta Y}{\Delta G_o = \Delta T_{x_o}} = \frac{1 - b}{(1 - b + b.t + m)}$$

## **BAB XII**

### **KONSUMSI**

#### **12.1. Teori Konsumsi Keynes**

Pembahasan mengenai teori konsumsi tidak bisa dilepaskan dari pembahasan teori konsumsi Keynes. Dalam kajiannya Keynes menyatakan bahwa besarnya konsumsi masyarakat ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan dan masyarakat menghadapi besarnya konsumsi otonom yaitu konsumsi minimal yang harus dipenuhi. Ada beberapa catatan penting dari ide Keynes tentang pengeluaran konsumsi yaitu  $MPC < APC$  dan nilai  $APC$  orang kaya  $<$   $APC$  orang miskin. Dua pandangan Keynes inilah yang kemudian mengundang diskusi di kalangan para ahli ekonomi termasuk Simon Kuznets yang melakukan riset tentang pola konsumsi masyarakat dengan menggunakan data runtut waktu (time series) dan menghasilkan kesimpulan yang agak berbeda. Dengan menggunakan data dari tahun 1869 – 1929 ditemukan fakta bahwa nilai  $APC = MPC$  dan temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data cross section yang menunjukkan gejala  $APC > MPC$ .

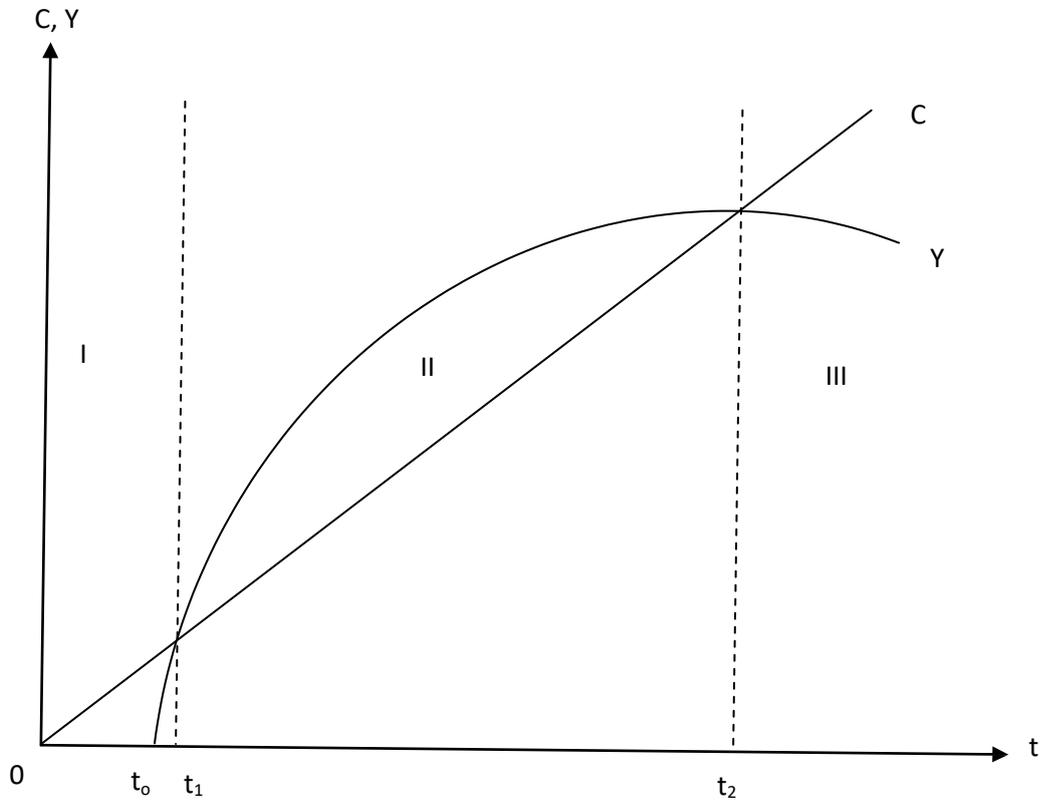
Gagasan Keynes tentang konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan mengundang perhatian para ahli ekonomi lainnya untuk melakukan kajian lebih lanjut. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa konsumsi masyarakat tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya baik ekonomi maupun non ekonomi.

#### **12.2. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup (*Life Cycle Hypothesis*)**

Teori konsumsi ini dirumuskan oleh tiga ahli ekonomi yaitu Ando, Brumber, dan Modigliani yang melanjutkan pemikiran ekonomi yang telah diletakkan oleh Keynes dengan memperhatikan pola siklus masyarakat selama hidupnya. Pola dan karakter konsumsi seseorang disamping ditentukan oleh besarnya pendapatannya sebagaimana dikemukakan oleh Keynes, juga dipengaruhi oleh bagaimana perjalanan siklus hidupnya.

Dalam teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup (life cycle hypothesis) ini diungkapkan bahwa dalam perjalanan hidup seseorang dapat dibagi menjadi tiga segmen kehidupan yaitu segmen kehidupan seseorang dari mulai lahir yaitu umur 0 tahun sampai mencapai usia produktif. Segmen kedua dari mulai mencapai usia produktif sampai mencapai usia pensiun dimana pada segmen ini seseorang akan pada usia tertentu mencapai puncak produktifitasnya. Kemudian pada segmen ketiga terjadi pasca usia pensiun sampai tutup usia.

Hipotesis siklus hidup ini dialami setiap individu dan sejak awal sudah dapat diprediksi, sehingga akan menentukan bagaimana pola konsumsi seseorang. Gambaran tentang bagaimana teori konsumsi hipotesis siklus hidup dapat dirumuskan sebagai berikut :



Gambar kurva di atas menjelaskan mengenai perkembangan siklus hidup seseorang ditinjau dari aspek perkembangan pendapatan dan konsumsinya. Sumbu vertikal menunjukkan besarnya pendapatan (Y) dan konsumsi (C), sedangkan sumbu horisontal menunjukkan variabel waktu (t).

## **BAB XIII**

### **UANG DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM**

#### **13.1. Peran Uang dalam Perekonomian**

Peran uang sangat vital dalam suatu perekonomian yaitu sebagai media untuk memperlancar arus produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa. Semakin kompleks permasalahan ekonomi maka semakin tinggi peran uang dalam memperlancar aktifitas ekonomi. Peran uang bisa dianalogkan dengan „darah“ dalam „tubuh manusia“ yang berfungsi untuk memperlancar proses metabolisme dalam tubuh manusia dimana „tubuh manusia“ merupakan analog dari suatu perekonomian. Uang sebagai „darah“ dalam „tubuh manusia“ bertugas mensuplai zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh manusia dan juga membuang sisa-sisa kotoran berupa racun dari hasil proses metabolisme dalam bentuk urin, faeces, dan CO<sub>2</sub>. Proses kimiawi yang dilakukan oleh „darah“ inilah yang bisa menyebabkan „tubuh manusia“ sehat atau justru mengalami sakit. Kalau „darah“ tadi berfungsi dengan tepat baik menyangkut jumlah, ukuran, dan tekanannya, maka tubuh akan sehat. Dan sebaliknya jika ada gangguan dalam fungsi „darah“ tadi, maka dapat diprediksi akan terjadi gangguan dalam tubuh manusia.

Demikian juga halnya dengan aktifitas dalam suatu perekonomian yang sangat ditentukan oleh fungsi dan stabilitas uang dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Gangguan ekonomi yang berupa inflasi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dsb salah satu faktor pemicunya karena ada gangguan dalam fungsi dan peran uang dalam perekonomian. Peran uang dalam perekonomian kemudian dikaitkan dengan sistem moneter dan kebijakan moneter dalam mengendalikan stabilitas nilai mata uang agar dapat mendorong aktifitas ekonomi secara baik.

Secara umum keberadaan uang sebenarnya merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena tuntutan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Pada masa pra sejarah dimana kehidupan masyarakat relatif masih sangat sederhana dan sangat bergantung kepada ketersediaan alam, maka kegiatan transaksi jarang terjadi. Pada masa itu corak kehidupan ekonomi masyarakat hanya bersifat konsumtif semata karena jumlah manusia masih sedikit dan alam menyediakan semua kebutuhan manusia pada saat itu. Manusia hidup bergantung kepada kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Dan seandainya manusia melakukan aktifitas produksi sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kemampuan konsumsi tergantung pada kemampuan produksi dan sebaliknya seseorang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Inilah corak kehidupan masyarakat subsisten yang dicirikan dengan adanya aktifitas ekonomi memproduksi dan mengkonsumsi pada satu kelompok orang.

Perkembangan kehidupan manusia ditandai dengan jumlah manusia yang terus bertambah dan kebutuhan juga terus meningkat, maka kebutuhan hidup seseorang tidak selalu dapat dipenuhi oleh kondisi alam sekitarnya. Manusia mulai berpikir perlunya melakukan perdagangan secara langsung dengan menukarkan barang yang dimilikinya dengan orang lain. Kegiatan inilah yang disebut dengan barter. Namun seiring dengan perjalanan waktu bahwa kebutuhan manusia terus meningkat baik jumlah, nilai dan intensitasnya, maka kegiatan *barter* tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat. Mengapa barter kemudian ditinggalkan sebagai salah satu solusi mengatasi perekonomian ? Karena aktivitas barter baru dapat berjalan jika memenuhi ketentuan *double coincidence of wants* dengan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Masing-masing pihak yaitu pihak I dan II sama-sama saling memerlukan barang tersebut.
2. Transaksi barter berlangsung pada waktu yang tepat dan sama

---

<sup>46</sup>Roger A Arnold, *ibid*, hal. 295

3. Transaksi barter terlaksana pada tempat tertentu
4. Transaksi barter dalam nilai yang sesuai.

Jika ada salah satu saja dari empat komponen di atas tidak terpenuhi, maka barter tidak dapat berjalan. Di sinilah orang mulai berpikir tentang perlunya suatu „alat pertukaran“ untuk mengatasi kelemahan dari sistem barter tadi. Akhirnya orang berinisiatif mencari „alat pertukaran“ pada jenis barang-barang tertentu seperti kerang, kayu, batu, dan tulang yang dianggap berharga dan mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi di atas.

Ada banyak manfaat dan keuntungan yang dirasakan dari ditemukannya „uang“ dalam kegiatan ekonomi yaitu :

1. *Uang dapat mengungkapkan nilai suatu barang*, sehingga seseorang dapat dengan mudah membandingkan nilai suatu barang dengan barang lainnya. Kemudahan ini juga sangat membantu dalam merumuskan pengambilan keputusan baik sebagai produsen barang, konsumen maupun distributor. Seorang konsumen akan membeli suatu barang setelah melihat dan membandingkan suatu barang dengan barang lainnya. Demikian juga seorang produsen akan dapat menentukan biaya produksi dan harga jual barang yang dihasilkannya.
2. *Uang memungkinkan penundaan pembayaran* karena nilainya bisa diukur dan dibandingkan sehingga pembayaran gaji seorang karyawan dilakukan secara bulanan dan pembayaran kredit perumahan dilakukan secara cicilan tiap bulan dengan jumlah yang sudah ditentukan.
3. *Uang yang diterima secara umum dapat ditunda pemakaiannya* sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya kapan saja dan dimana saja.
4. Uang dapat berupa sertifikat atau tanda bukti yang menunjukkan kepemilikan suatu kekayaan riil (*real asset*) seperti emas, perak, mutiara, dan permata.

5. Bentuk uang dapat berupa uang logam, uang kertas, tabungan dan deposito, *bills*, *bonds* dan *common stocks* yang dapat dipecah-pecah tanpa kehilangan nilai nominalnya.

### **13.2. Perkembangan Pemikiran tentang Uang**

Pandangan tentang uang mengalami perkembangan cukup signifikan dari masa ke masa. Kelompok atau mazhab yang berpandangan cukup berpengaruh dalam perkembangan ekonomi moneter adalah pandangan kaum moneteris. Kaum moneteris sebenarnya melanjutkan dalam beberapa hal pemikiran ekonomi moneter yang sudah diletakkan oleh kaum klasik yang dimotori para ahli ekonomi seperti John Stuart Mill, David Ricardo, Jean Bodin, David Hume dan puncaknya adalah pandangan Irving Fisher tentang teori kuantitas uang (the quantity theory of money).

Inti pandangan kaum moneteris tentang uang adalah adanya hubungan yang fungsional antara jumlah uang dengan perkembangan harga barang dan jasa. Pandangan ekonomi ini menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perubahan harga (inflasi) adalah jumlah uang beredar. Jadi menurut pandangan moneteris untuk mengatasi masalah inflasi, maka harus dikendalikan sumber utamanya yaitu dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar di masyarakat di kurangi maka tingkat harga akan turun dan sebaliknya.

Namun pandangan kaum moneteris tentang uang sebenarnya lebih luas, mereka menyatakan bahwa jumlah uang beredar tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat harga tetapi berpengaruh juga terhadap kesempatan kerja dan output riil. Pandangan ini sejalan dengan asumsi dasar kaum klasik bahwa dalam jangka panjang perekonomian mencapai full employment, sehingga penambahan jumlah uang beredar akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan harga. Dalam keadaan perekonomian mengalami resesi penambahan jumlah uang beredar akan mendorong output riil dan kesempatan kerja. Dan jika sudah mencapai full employment penambahan

jumlah uang beredar akan mendorong pertumbuhan di sektor riil yang disertai dengan kenaikan tingkat harga (inflasi).

Pandangan tentang uang menurut kaum moneteris bahwa permintaan uang masyarakat didasarkan kepentingan untuk transaksi yang besarnya merupakan sejumlah tertentu dari pendapatan mereka. Kaitan antara permintaan uang dengan penawaran uang (jumlah uang beredar) dapat dijelaskan bahwa penambahan jumlah uang beredar akan meningkatkan output riil dan peningkatan output riil akan meningkatkan permintaan uang. Pertumbuhan ekonomi akan berhenti manakala tercapai keseimbangan antara permintaan uang ( $M_d$ ) dengan penawaran uang ( $JUB$ ). Jadi pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi sebagai akibat dari kenaikan  $JUB$  sampai semua uang yang beredar terserap permintaan uang untuk kepentingan transaksi ekonomi. Jadi penambahan  $JUB$  secara langsung akan mempengaruhi output riil dan pada akhirnya akan menentukan permintaan uang.

Keynesians mempunyai pandangan berbeda dengan kaum moneteris tentang pengaruh uang terhadap perekonomian. Kaum Keynesians berpandangan bahwa  $JUB$  mempengaruhi output tetapi secara tidak langsung dan tidak pasti. Hal ini terjadi karena kebijakan otoritas moneter tidak selalu direspon oleh masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan masyarakat mempunyai ekspektasi tersendiri tentang kebutuhan uang untuk menunjang transaksinya. Perilaku masyarakat dalam permintaan uang mempengaruhi bagaimana uang mampu menggerakkan potensi ekonomi. Pandangan Keynesians menyatakan bahwa permintaan uang disamping untuk kebutuhan transaksi juga digunakan untuk kepentingan spekulasi dan berjaga. Dua motif terakhir itulah yang berbeda dengan pandangan moneteris tentang motif permintaan uang.

Mazhab Austria mempunyai pandangan tersendiri tentang uang. Mereka berpandangan bahwa munculnya permasalahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, krisis ekonomi global, dsb disebabkan karena diterapkannya

uang kertas dengan jaminan kepercayaan (fiat money). Pemakaian uang kertas tanpa ada jaminan barang yang bernilai memberikan kesempatan yang besar kepada otoritas moneter untuk mencetak uang dengan semena-mena dan akibatnya menimbulkan inflasi. Jadi dalam pandangan Mazhab Austria untuk mencegah terulangnya krisis moneter dan krisis ekonomi maka perekonomian harus kembali kepada sistem moneter yang 100 % di jamin oleh emas (gold reserve standard). Penerapan sistem gold reserve standard 100 % akan mengendalikan otoritas moneter untuk tidak semena-mena mencetak uang.

Mazhab Austria juga menyoroti bahwa mekanisme fractional reserve lending yang diterapkan diperbankan dimana sistem perbankan dapat menggelontorkan kredit dari sejumlah uang simpanan yang masuk. Sistem fractional reserve lending ini juga menjadi sumber terjadinya inflai karena pada dasarnya sama dengan fiat money dimana perbankan dapat „menambah jumlah uang“ di masyarakat dari jumlah uang simpanan yang masuk dalam bank. Jadi pandangan kaum Austria untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan krisis moneter yaitu diterapkan sistem reserve perbankan 100 % dan diterapkannya gold reserve standard 100 %. Dengan demikian ekspansi moneter besar-besaran -sebagai sumber dari terjadinya inflasi-dari perbankan dan otoritas moneter dapat dicegah semaksimal mungkin.

### **13.3. Uang dalam Islam**

Ada pandangan yang berbeda tentang fungsi dan peranan uang antara pandangan ekonomi modern dengan ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam uang adalah uang bukan kapital artinya uang adalah sekedar alat transaksi saja dan semata-mata hanya untuk membantu memperlancar transaksi ekonomi saja. Hal ini membawa implikasi bahwa uang harus benar-benar digunakan untuk kepentingan memperlancar kegiatan ekonomi dan tidak boleh digunakan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Uang harus digunakan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi riil misalnya mendorong industri UMKM, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, pembangunan infrastruktur,

pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, dsb. Manakala uang semata-mata digunakan sebagai alat tukar untuk menggerakkan sektor riil, maka kegiatan ekonomi akan berjalan secara optimal dan pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berbeda halnya Dalam pandangan ekonomi konvensional dimana uang sering kali diartikan secara rancu apakah sebagai alat transaksi atau sebagai kapital. Secara umum uang digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan transaksi di sektor riil namun juga seringkali digunakan sebagai komoditas yang diperdagangkan sebagaimana nampak pada transaksi valuta asing untuk kepentingan spekulasi, atau transaksi pasar modal di pasar sekunder dengan motif untuk mendapatkan keuntungan (*capital gain*). Jadi dalam hal ini uang sudah mengalami pergeseran fungsi dan peran yaitu dari sekedar sebagai alat untuk transaksi menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Implikasi yang ditimbulkan adalah penambahan jumlah uang beredar dan peningkatan perputaran uang tidak selalu diikuti dengan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Hal ini timbul karena ada sebagian uang di masyarakat tidak digunakan untuk transaksi di sektor riil tetapi ada yang digunakan untuk kegiatan non riil yaitu spekulasi. Semakin banyak jumlah uang yang digunakan untuk kegiatan spekulasi dampaknya akan semakin sedikit jumlah uang yang digunakan untuk kegiatan ekonomi di sektor riil. Dalam realitasnya bahwa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan spekulasi akan membawa pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sektor riil.

Di sinilah pandangan Islam tentang uang, sehingga dapat dipahami mengapa Islam mengharamkan praktek „riba“ karena dampak yang ditimbulkan dari „riba“ dapat menghancurkan sendi-sendi ekonomi yang menyengsarakan banyak orang sebagaimana kita lihat sekarang ini. „Riba“ dimana salah satu bentuknya adalah menggunakan uang untuk kegiatan spekulasi akan berdampak terganggunya kegiatan di sektor riil yang pada akhirnya akan mengakibatkan kesengsaraan banyak orang.

Pandangan lain tentang uang dalam Islam bahwa uang merupakan flow concept artinya perputaran uang akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian dari kelompok ahli ekonomi modern Keynesian dan Cambridge School yang berpandangan bahwa uang sama dengan kapital dan bersifat stock concept. Pandangan ini membawa implikasi bahwa uang merupakan salah satu bentuk kekayaan dan merupakan salah satu motif masyarakat memegang uang yaitu untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang. Penyimpanan dan penimbunan uang ini merupakan eksek dari pandangan uang merupakan kapital yang akan berakibat pada kemungkinan hilangnya uang dari peredaran karena ditimbun oleh sekelompok anggota masyarakat.

Uang yang mengandung makna stock concept terinspirasi dari pandangan moneter Alfred Marshal dan Pigou yang dirumuskan dalam suatu fungsi sebagai berikut :

$$M = k P.T$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar

P = Tingkat harga

T = Jumlah barang yang diperdagangkan

k = Proporsi jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat

Persamaan ini mengungkapkan bahwa permintaan uang masyarakat ditunjukkan oleh besarnya „k” yang menjelaskan sejumlah tertentu uang dari pendapatan masyarakat yang dipegang. Konsep inilah yang dikatakan uang dalam makna stock concept yang memandang bahwa uang sebagai salah satu bentuk kekayaan yang akan disimpan disamping bentuk kekayaan lainnya seperti perhiasan, tanah, kendaraan, rumah, dsb. Pandangan ekonomi seperti inilah yang kemudian menjadikan uang sebagai komoditi sama halnya dengan komoditi ekonomi lainnya yang dapat diperjualbelikan.

Pandangan Islam bahwa uang mengandung makna flow concept selaras dengan pandangan kaum klasik moneteris yang dipelopori oleh Milton Friedman. Uang dalam makna flow concept dapat diturunkan dari formula yang dikemukakan oleh Irving Fisher sebagai berikut :

$$M.V = P.T$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar

V = Kecepatan perputaran uang

P = Tingkat harga barang

T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Formulasi moneter di atas mengungkapkan bahwa sisi sebelah kiri yang mencerminkan aktifitas di sektor moneter sama nilainya dengan sisi sebelah kanan yang mencerminkan aktifitas di sektor riil. Formulasi tersebut juga mengungkapkan bahwa uang mengandung makna flow concept artinya jumlah uang beredar dan kecepatan perputaran uang akan langsung mempengaruhi dinamika ekonomi di sektor riil. Konsep ekonomi moneter seperti inilah yang ideal dimana peran dan fungsi uang sebagai alat transaksi akan benar-benar dapat menggerakkan potensi ekonomi sektor riil yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Uang dalam pandang Islam merupakan barang publik artinya menjadi milik seluruh masyarakat. Sedangkan kapital (modal) merupakan barang pribadi (private goods) artinya merupakan hak milik individu yang memiliki modal tersebut. Konsekuensi uang sebagai public goods yaitu harus benar-benar memberi manfaat kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh ada orang yang memonopoli kepemilikan uang.

Pandangan uang dalam Islam mengalami perkembangan dan variasi yang cukup besar antara satu ahli ekonomi dengan ahli ekonomi lainnya. Ada beberapa ahli ekonomi Islam ternama yang telah mengemukakan pandangan ekonominya tentang uang dan peranannya dalam perekonomian antara lain Al-

Ghazali, Ibn Khaldun, Mas'udul Alam Choudhury, dan Muhammad Umer Chapra. Pengertian uang dalam Islam memiliki makna yang beragam tergantung bahan pembuatnya dan kebutuhan dalam kegiatan transaksi ekonomi. Ada istilah nuqud yang artinya uang untuk menunjukkan harga suatu barang. Dinar menunjukkan uang yang terbuat dari emas sedangkan dirham merupakan uang yang terbuat dari perak. Juga ada istilah wariq dan „ain untuk menunjukkan dirham perak dan dinar emas sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi ekonomi pada masa Nabi dan Shahabat. Imam Al-Ghazali dan Ibn Khaldun secara umum menyatakan definisi uang adalah alat yang digunakan masyarakat sebagai alat untuk media bertransaksi, mengukur harga dan media penyimpan nilai.

### *1. Uang sebagai Media Transaksi*

Uang sebagai media transaksi yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang. Berbeda dengan media transaksi lainnya seperti bilyet, cek, kartu kredit, kartu debit, dsb. Penjual atau pembeli berhak menolak alat transaksi tersebut dalam proses pembayaran transaksinya, namun tidak demikian halnya untuk uang. Semua orang harus bersedia menerima uang sebagai alat untuk media transaksi perdagangan yang sah. Untuk dapat menjadi media yang sah untuk transaksi maka ditandai dengan adanya logo atau simbol yang disahkan oleh negara melalui peraturan pemerintah atau undang-undang.

### *2. Uang sebagai Media Penyimpan Nilai*

Al-Ghazali mengisyaratkan perlu media untuk mengukur nilai suatu barang dan bisa membandingkan nilai satu barang dengan barang lainnya. Dengan uang, maka dapat dibandingkan nilai antara sehelai baju dengan sepasang sepatu, antara satu mangkok bakso dengan satu gelas es jeruk, dsb. Dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa uang ibarat „hakim“ yang dapat menentukan dan membandingkan nilai diantara berbagai jenis barang dan jasa. Uang sebagai media penyimpan nilai juga ditegaskan oleh Ibn Khaldun dimana uang yang

terbuat dari emas dan perak tetap bernilai kapanpun dan dimanapun digunakan karena uang mengandung nilai yang dapat diterima semua orang.

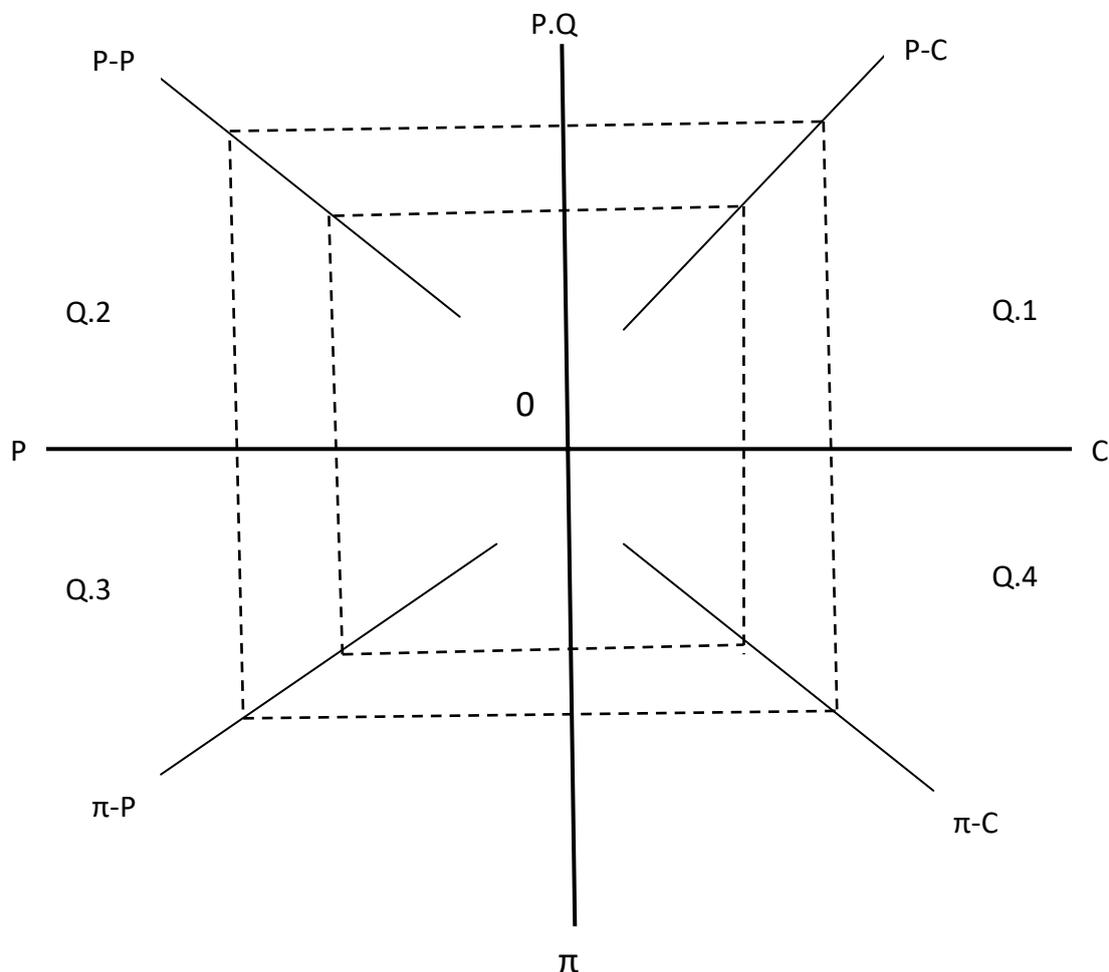
### *3. Uang sebagai Ukuran Harga*

Untuk membandingkan nilai satu barang dengan barang yang lain memerlukan standar yang stabil nilainya yaitu dinar dan dirham. Karena secara intrinsit dinar yang terbuat dari emas dan dirham dari perak mampu menjadi standar penilaian harga atas suatu barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan dinar dan dirham untuk menjadi standar atas semua nilai barang yang ada karena stabilitas nilai dari dinar dan dirham itu sendiri.

### **13.4. Kebijakan Moneter Islam menurut Masu'udul Alam Choudhury**

Pandangan uang dan kebijakan moneter menurut Masu'udul Alam Choudhury berpijak pada prinsip dasar uang sebagai alat transaksi dan tidak dimasukkannya instrumen bunga (interest) dalam analisis moneternya. Pandangan uang menurut Masu'udul Alam Choudhury dikemukakan melalui konsep ekonomi moneter yaitu endogenous money yang memberi tekanan tentang pentingnya menjaga stabilitas nilai uang baik secara internal maupun eksternal yaitu keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Pandangan Masu'udul Alam Choudhury tentang endogenous money ini sebenarnya ada keselarasan dengan analisis IS-LM dimana perekonomian akan mencapai kondisi ideal manakala tercapai keseimbangan antara pasar barang (IS) dan pasar uang (LM). Namun sesungguhnya ada prinsip dasar yang berbeda antara analisis IS-LM dengan endogenous money. Kurva IS adalah suatu kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi tingkat bunga dan pendapatan nasional dimana tercapai keseimbangan pada pasar barang. Sedangkan kurva LM adalah suatu kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi tingkat bunga dan pendapatan nasional dimana tercapai keseimbangan pada pasar uang. Keseimbangan pasar barang tercapai manakala dipenuhinya keseimbangan dalam formulasi  $Y = C + I + G + (X - M)$  dimana masuknya

peranan uang dalam pasar barang melalui investasi dimana dalam teori investasi konvensional besarnya merupakan fungsi dari tingkat bunga (interest). Sedangkan keseimbangan pasar uang tercapai manakala terpenuhinya keseimbangan antara permintaan uang (money demand =  $M_d$ ) dengan penawaran uang (Money supply =  $M_S$ ) dimana permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga karena adanya motif spekulasi. Berbeda halnya dengan gagasan endogenous money dari Masu'udul Alam Choudhury yang tidak memasukkan unsur bunga (interest) dalam analisisnya. Berikut gambar kurva yang menjelaskan tentang gagasan endogenous money tersebut :



Sumber : Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 99, dengan modifikasi

Gambar di atas terdiri dari empat kuadran dan masing-masing kuadran menjelaskan tentang kondisi pada sektor riil, sektor moneter dan hubungan antara sektor riil dan sektor moneter. Pada kuadran satu (Q.1) menjelaskan kaitan antara currency value of spending (C) yang menunjukkan jumlah uang untuk dibelanjakan dengan real value spending (P.Q) yang menunjukkan nilai pengeluaran riil dari masyarakat. Jadi pada kuadran pertama ini menjelaskan keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil.

Pada kuadran dua (Q.2) menjelaskan hubungan antara real value spending (P.Q) dengan rate of profit (P). Pada kuadran dua ini mengandung informasi yang menarik dimana besarnya real value spending (P.Q) berkorelasi positif dengan rate of profit (P) artinya jika tingkat keuntungan (rate of profit) naik maka real value spending juga meningkat. Pandangan ini membawa implikasi bahwa jumlah uang yang diminta untuk kegiatan transaksi ditentukan oleh bagaimana kondisi di sektor riil yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat keuntungan. Semakin besar tingkat keuntungan (rate of profit) maka akan semakin besar produksi yang dihasilkan dunia usaha dan semakin besar permintaan uang untuk transaksi. Hal ini berbeda dengan pandangan ekonomi moneter konvensional yang menjelaskan hubungan berkebalikan antara tingkat bunga (interest) dan real value spending artinya jika tingkat bunga (interest) naik maka real value spending akan menurun dan sebaliknya. Dalam kondisi perekonomian lesu masyarakat justru lebih memilih memasukkan uangnya di bank yang memberikan imbalan bunga yang tinggi. Kebijakan meningkatkan suku bunga justru akan mengurangi laju investasi dan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi.

Kuadran tiga (Q.3) menjelaskan hubungan antara besarnya tingkat keuntungan (rate of profit =  $\pi$ ) dengan tingkat harga (P). Pada diagram tiga ini dijelaskan kurva  $\pi$ -P berlereng positif artinya kenaikan tingkat harga akan menyebabkan produsen memperoleh tingkat keuntungan (rate of profit) yang

semakin meningkat dan implikasinya mereka akan meningkatkan jumlah output.

Pada kuadran empat (Q.4) menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang dibelanjakan (currency value of spending = C) dengan tingkat harga (P). Dalam teorinya ini Choudhury menjelaskan bahwa pergerakan tingkat harga (inflasi) semata-mata karena adanya perkembangan di sektor riil yang ditunjukkan oleh besarnya currency value of spending (C). Jadi perubahan kurva  $\pi$ -C semata-mata karena adanya perubahan dan gejala di sektor riil bukan di sektor riil. Sementara perubahan harga (P) disebabkan adanya perubahan pada real value of spending (P.Q) sementara besarnya tingkat keuntungan (rate of profit) selaras dengan perkembangan real value of spending (P.Q). Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan tingkat harga disebabkan karena adanya perubahan tingkat keuntungan (rate of profit).

Pandangan uang dan kebijakan moneter menurut Choudhury secara sederhana dapat dirumuskan bahwa uang dan kebijakan moneter dalam Islam harus bertumpu pada dinamika di sektor riil (underlying transactions) bukan di sektor moneter. Hal ini berpandangan bahwa esensinya uang dan instrumen moneter hanyalah „instrumen ekonomi“ untuk menggerakkan sektor riil dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat terwujud dari perkembangan pada sektor riil bukan pada sektor moneter.

## **BAB VII**

### **KEBIJAKSANAAN FISKAL**

#### **8.1. Tujuan Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diidealkan yaitu kesejahteraan ekonomi, keadilan, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum ada beberapa fungsi dan tujuan kebijakan fiskal yaitu pertama, fungsi distribusi yang dimaksud adalah dapat terdistribusikannya pendapatan nasional secara adil dan proporsional untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Fungsi distribusi ini juga dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai pendapatan nasional hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat saja. Kedua, fungsi alokasi yang dimaksud adalah bagaimana sumber daya ekonomi dapat dialokasikan secara baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti pangan, sandang, perumahan, infrastruktur jalan, jembatan, keamanan, keadilan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dsb. Tanpa campur tangan pemerintah sulit rasanya terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani di antara masyarakat. Ketiga, fungsi stabilisasi yaitu terselenggaranya kegiatan ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar mata uang dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Fungsi dan tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah bagaimana perekonomian dapat terselenggara dengan baik, stabil dan seimbang sehingga dapat mendorong pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan fiskal juga merupakan instrumen ekonomi untuk dapat meredam dampak dari gejolak ekonomi eksternal terhadap perekonomian seperti kenaikan harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar mata uang, kenaikan tingkat bunga internasional serta melemahnya perekonomian negara mitra. Kebijakan fiskal juga menjadi alat ekonomi untuk mengatasi permasalahan ekonomi domestik seperti bencana alam, gagal panen karena kekeringan, dan percepatan ekonomi wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur. Kebijakan fiskal juga menjadi instrumen ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi nasional. Komponen utama untuk peningkatan kapasitas produksi nasional adalah pembentukan investasi (capital formation) dalam jumlah yang signifikan. Kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pembangunan perusahaan negara (BUMN), penyediaan alat-alat produksi, penyediaan bahan baku dan tenaga ahli. Jadi kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui penentuan pos-pos dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBN untuk mencapai perekonomian yang diharapkan yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### **8.2. Komponen dalam Kebijakan Fiskal**

Kebijaksanaan fiskal dalam realitasnya dituangkan dalam rumusan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terdiri dari komponen pendapatan dan komponen pengeluaran. Komponen pendapatan terdiri dari unsur pajak dan non pajak misalnya penerimaan royalti, keuntungan dari BUMN, hasil penjualan aset negara (privatisasi), dsb. Unsur penerimaan dari pajak merupakan unsur utama dalam penerimaan negara karena menyangkut obyek pajak yang jumlahnya tidak sedikit.

Komponen pengeluaran negara menyangkut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Unsur pengeluaran rutin dalam APBN misalnya membiayai gaji pegawai negeri, subsidi untuk masyarakat miskin, subsidi daerah otonom, subsidi daerah bencana, tunjangan dinas, pembelian peralatan kantor, pembelian peralatan laboratorium, dsb. Tujuan dari pengeluaran rutin pemerintah adalah meningkatkan kualitas layanan publik (*public services*) sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governances*). Sedangkan komponen pengeluaran pembangunan meliputi pengeluaran yang fungsinya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional misalnya pembangunan gedung sekolah dan perguruan tinggi, pembangunan pangkalan militer, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, jaringan telekomunikasi, dsb. Ditinjau dari karakteristiknya dapat diketahui bahwa pengeluaran rutin bersifat jangka pendek untuk meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan pemerintahan secara rutin. Sedangkan pengeluaran pembangunan bersifat jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Komponen utama kebijaksanaan fiskal adalah pajak (tax) karena pajak dapat menjadi instrumen dalam mengendalikan perekonomian disamping sebagai sumber utama penerimaan negara. Ada beberapa macam pajak yaitu pajak pendapatan, pajak barang mewah, pajak kekayaan, pajak penjualan, Pembayaran pajak oleh subyek pajak merupakan kewajiban yang kompensasinya diterima secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan sarana publik seperti keamanan, jalan, pendidikan, kesehatan, dsb.

### **8.3. Pemerintah, Pasar dan Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal dikaitkan dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur perekonomian agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peran pemerintah dalam perekonomian dikaitkan dengan kegagalan pasar dalam menyelesaikan masalah ekonomi baik menyangkut alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi serta fungsi stabilisasi perekonomian. Jadi intervensi pemerintah dalam perekonomian karena pasar dalam beberapa kasus gagal dalam menyelesaikan masalah ekonomi sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dsb. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan masalah public goods dan externality menimbulkan eksek dalam perekonomian seperti terbengkalainya fungsi dan layanan publik seperti kualitas bangunan sekolah dasar (SD) yang buruk, sanitasi yang tidak terawat, kesejahteraan pegawai negeri sipil yang rendah, kualitas jalan raya yang rusak, lampu penerang jalan yang tidak terawat, sampah yang berserakan, kualitas persenjataan dan alatista yang tertinggal, layanan kesehatan di Puskesmas yang rendah, dsb.

Kondisi tersebut merupakan dampak dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum (*public goods*) yang baik.

Dalam perekonomian melalui bekerjanya mekanisme pasar seharusnya alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi dapat dilakukan dengan baik sehingga permasalahan ekonomi di atas tidak terjadi. Mekanisme pasar melalui bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran akan menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menentukan keseimbangan pada berbagai jenis barang dan jasa secara efisien sehingga dapat ditentukan harga dan kuantitas keseimbangan barang dan jasa. Namun dalam permasalahan public goods dan externality mekanisme pasar tidak selalu bisa menyelesaikan masalah ekonomi tersebut yang disebabkan karena Kebijakan fiskal atau sering diungkapkan dengan kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang anggaran (APBN) untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal diformulasikan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada pos-pos pendapatan dan pengeluaran dalam anggaran pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Sifat kebijakan fiskal ada dua macam yaitu kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal kontraktif untuk mengatasi perekonomian yang *over heating* ditandai dengan inflasi yang tinggi. Pengendalian perekonomian melalui penentuan besarnya pos-pos pendapatan misalnya kebijakan fiskal kontraktif melalui peningkatan tarif pajak untuk mengerem laju pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan. Implikasinya adalah dengan peningkatan pajak akan menyebabkan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) akan berkurang sehingga mengurangi pengeluaran konsumsi dan akhirnya mengurangi agregat demand. Kebijakan fiskal kontraktif juga bisa dilakukan melalui pengendalian dari sisi penerimaan misalnya pemotongan gaji dan tunjangan bagi PNS, pemotongan anggaran kementerian dan pengurangan subsidi bagi masyarakat miskin.

Pada sisi lain kebijakan ekspansif melalui pengendalian dari sisi penerimaan misalnya pengurangan pajak yang menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) sehingga akan meningkatkan pengeluaran konsumsi dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal melalui sisi pengeluaran (*expenditure*) dilakukan melalui peningkatan anggaran belanja pemerintah untuk peningkatan gaji PNS, peningkatan anggaran kementerian dan lembaga, peningkatan subsidi bagi masyarakat miskin.

Umer Chapra dalam buku *Islam dan Tantangan Ekonomi* menegaskan tentang bagaimana peran negara dalam mengatur perekonomian melalui beberapa elemen tindakan (Chapra, hal. 216) yaitu :

1. Mekanisme filter yang secara sosial disepakati
2. Sistem motivasi yang mendorong individu untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya dan masyarakatnya
3. Restrukturisasi perekonomian yang secara keseluruhan dengan tujuan mewujudkan maqashid meskipun menghadapi kelangkaan sumber-sumber daya
4. Peran pemerintah yang kuat dan positif

Mekanisme filter dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi merupakan kombinasi antara mekanisme pasar dan sistem perencanaan yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dalam pandangan Chapra bahwa Islam memiliki sistem nilai yang dapat mengendalikan persoalan ekonomi yaitu melalui kekuatan moral yang dapat mengendalikan keinginan individu dalam perilaku konsumsinya. Prinsip hidup kesederhanaan dan merasa cukup menjadi benteng moral untuk menghindari perilaku hedonis yang dapat mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin serta pengurusan sumber daya ekonomi yang sifatnya terbatas. Filter moral juga menegaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam sebagai fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia yang tidak mentolerir apapun bentuk perilaku yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Filter moral akan menghindari dari perilaku boros dan penggunaan sumber daya ekonomi. Filter moral akan menghindari timbulnya perilaku korup yang berakibat pada timbulnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Filter moral juga menghindarkan diri dari penggunaan sumber daya ekonomi secara boros dan tidak tepat sasaran.

Motivasi yang benar dari individu akan menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individu dan sosial. Sistem kapitalisme mengandalkan kekuatan pasar melalui motif mencari keuntungan individu secara maksimal yang berpotensi merugikan kepentingan sosial. Namun motif individu dalam sistem pasar memang dapat memaksimalkan potensi individu karena akan mendapatkan imbalan yang selaras dengan kontribusinya. Sistem sosialisme menolak paham individualisme dalam pengaturan ekonomi karena akan mengorbankan kepentingan sosial dan harus diganti dengan sistem perencanaan yang menjamin pemenuhan kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Namun sistem perencanaan mengabaikan motif individu yang berakibat pada kemandekan ekonomi dan menimbulkan kemiskinan masal. Inti persoalannya adalah pada pandangan sekuler dalam memahami kehidupan dunia ini yang menimbulkan kerakusan, ketamakan dan rendahnya solidaritas sosial. Untuk itu perlu rekonstruksi dalam pandangan dunia ini yang berimplikasi pada perilaku ekonomi individu dan masyarakat. Dalam pandangan bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah SWT untuk manusia dan manusia berkewajiban untuk mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan hidup bersama yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Pandangan hidup inilah yang akan menetralkan sikap, pandangan, perilaku hedonis yang cenderung mengabaikan aspek moral. Islam mengakui hak individu untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan kontribusinya dalam perekonomian. Namun Islam juga memperhatikan kepentingan sosial dengan aturan tentang pengelolaan hak milik umum untuk kepentingan masyarakat. Islam melarang praktek monopoli oleh swasta yang berpotensi merugikan individu. Islam juga mencela sikap kikir, tamak, rakus yang berakibat rusaknya sendi-sendi sosial masyarakat.

Pengaturan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peranan negara sebagai regulator perekonomian. Peran negara untuk menegaskan tentang pentingnya moral ekonomi ditegakkan dalam praktek ekonomi di tengah masyarakat. Peran ini terutama dihadirkan dalam perlindungan kepentingan masyarakat untuk pengelolaan kekayaan negara seperti hutan, sumber energi, sumber air dan kekayaan laut. Peran negara juga penting untuk menyelenggarakan sektor publik yang ditinggalkan individu seperti pertahanan dan

keamanan, sistem moneter, penyediaan infrastruktur jalan, pelabuhan, jembatan, bandara dan penyelenggaraan administrasi publik. Peran negara dihadirkan untuk mewujudkan hak fundamental masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Peran negara juga dihadirkan untuk mengatasi penyakit sosial seperti kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornoaksi, pornografi, prostitusi dan konflik sosial.

Pentingnya peranan negara dalam menyelenggarakan kehidupan ekonomi dan sosial, maka harus diwujudkan sistem dan mekanisme seleksi personil aparatur negara dari pimpinan tertinggi sampai eselon paling rendah. Sistem meritokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip moral keadilan dan profesionalitas akan melahirkan sistem ketatanegaraan yang kuat dan berwibawa. Pemerintahan yang kuat, profesional dan amanah akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang rasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

#### **8.4. Persoalan Kemiskinan dan Peran Negara**

Kemiskinan adalah masalah kronis dalam perekonomian yang menjadi musuh bagi semua negara di dunia terutama di negara-negara berkembang. Kemiskinan merupakan eksese negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan yang di satu sisi memberikan banyak manfaat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, produksi barang dan jasa bertambah, kesempatan kerja dan pendapatan meningkat. Namun pada sisi lain eksese dari proses pembangunan juga menyisakan persoalan kemiskinan yang menimpa sebagian anggota masyarakat yang tidak mampu mengambil peran dalam proses pembangunan.

Integrasi ekonomi dan globalisasi memberikan ruang dalam percepatan pembangunan bagi negara-negara di dunia. Namun proses pembangunan lebih banyak pendmemberikan porsi keuntungan pada negara-negara besar, sedangkan sebagian negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin tidak menguntungkan. Globalisasi dalam banyak hal menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin lebar antara negara maju dan negara berkembang. Banyak agenda aksi yang telah dirumuskan negara-negara di dunia untuk mengatasi masalah pembangunan termasuk masalah kemiskinan. KTT negara-negara di dunia yang diadakan di New York pada tahun 2000 telah merumuskan Deklarasi Milenium (*The Millenium Declaration*) yang berisi kesepakatan untuk mencapai target-target pembangunan *milenium* (*The Millenium Development Goals*) termasuk diantaranya upaya mengatasi kemiskinan. *The Millenium Development Goals (MDGs)* adalah bentuk keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin masifnya masalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi yang menimpa sebagian negara-negara berkembang di balik melimpahnya kekayaan negara-negara maju.

Pengertian kemiskinan dikaitkan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ada dua pengertian pokok kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonominya yang dikaitkan dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Orang atau masyarakat yang ada di garis kemiskinan

atau di bawah garis kemiskinan dikatakan sebagai orang atau masyarakat yang miskin dan sebaliknya orang dan masyarakat yang ada di atas garis kemiskinan di katakan orang yang tidak miskin. Kemiskinan relatif dikatakan sebagai kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran orang lain. Jadi orang atau masyarakat dikatakan miskin jika pendapatan atau pengeluarannya lebih rendah dari rata-rata pendapatan atau pengeluaran orang atau masyarakat lainnya.

Orang miskin disebabkan oleh rendahnya kompetensi dan kapasitas yang dimilikinya sehingga ada dua kelompok orang miskin yaitu orang miskin yang mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang miskin yang tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang miskin kelompok yang pertama disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pekerjaannya. Kondisi disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan aspek kesehatan sehingga tidak mempunyai akses dan daya saing dalam memasuki dunia kerja. Mereka mengandalkan sektor-sektor informal yang hanya memberikan imbalan yang kecil dan tidak menentu.. Sedangkan orang miskin yang tidak mampu bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri disebabkan oleh faktor-faktor difabilitas fisik dan psikis sehingga hidupnya menggantungkan pada bantuan belas kasihan orang lain.

Ada beberapa indikator dalam menentukan kemiskinan menurut para ahli dan lembaga pembangunan internasional. Menurut Prof Sayogyo batas garis kemiskinan ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Ukuran kemiskinan di daerah pedesaan setara dengan 20 kg beras per kapita per bulan, artinya bahwa orang di daerah pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan beras sebanyak itu maka dia termasuk dalam kategori orang miskin. Sedangkan ukuran kemiskinan di daerah perkotaan setara dengan jumlah 30 kg beras per orang per bulan. Orang yang tinggal di perkotaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan beras setara dengan 30 kg beras per orang per bulan, maka dia masuk dalam kategori orang miskin.

Ukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berdasarkan pemenuhan kebutuhan kalori per orang per hari. Orang dimasukkan dalam kategori orang miskin manakala tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori sebesar 2.100 kalori per orang per hari. BPS kemudian menambahkan kriteria garis kemiskinan berdasarkan konsumsi beras yaitu sebesar 320 kg beras per kapita per tahun bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan 480 kg beras per kapita per tahun bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Ukuran garis kemiskinan versi BPS juga ditentukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan. Orang atau masyarakat dikatakan miskin tergantung pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 52 macam dan komoditas non pangan sebanyak 26 macam bagi mereka yang tinggal di pedesaan dan 27 macam bagi mereka yang tinggal di perkotaan.

Sam F. Poli menyatakan ukuran kemiskinan setara dengan pemenuhan kebutuhan beras sebanyak 27 kg per kapita per bulan bagi yang tinggal di pedesaan dan 40 kg beras per kapita per bulan bagi yang tinggal di perkotaan. Kriteria Sam F. Poli sama dengan Prof.

Sayogyo dalam hal penentuan jenis komoditasnya yaitu beras, namun berbeda dalam ukurannya. Standar minimal pemenuhan kebutuhan beras menurut Sam F. Poli lebih tinggi dibandingkan menurut Prof. Sayogyo baik bagi mereka yang tinggal di pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan.

Bank Dunia (World Bank) menetapkan kemiskinan berdasarkan rata-rata pendapatan nasional suatu negara. Orang yang pendapatan lebih rendah dari sepertiga dari rata-rata pendapatan nasional, maka termasuk dalam kategori orang miskin. Jadi misalnya pendapatan rata-rata Indonesia sebesar 1.200 dollar AS per tahun, maka mereka yang pendapatannya kurang dari 400 dollar AS masuk dalam kategori orang miskin. Secara umum Bank Dunia menetapkan garis batas kemiskinan pendapatan atau pengeluaran sebesar 1 dollar AS bagi mereka yang tinggal di pedesaan dan 2 dollar AS bagi mereka yang tinggal di perkotaan.

Kemiskinan juga bisa muncul karena faktor alam misalnya mereka yang tinggal di daerah gurun pasir yang tandus berpotensi mengalami kemiskinan karena kondisi alamnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor bencana alam baik karena faktor alam maupun ulah manusia seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, pencemaran air laut, longsor, wabah penyakit menular, dsb juga berpotensi menghasilkan kemiskinan. Individu dan masyarakat akan kehilangan banyak waktu, tenaga dan dana untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka terjebak dalam kubangan kemiskinan.

Kemiskinan juga merebak karena konflik politik dan peperangan yang berkepanjangan. Konflik kepentingan mendorong masyarakat berada dalam situasi yang saling menghilangkan satu sama lain sehingga tidak ada kesempatan untuk membangun dan memperbaiki nasib. Energi hidup dan kesempatan dihabiskan untuk menghabisi lawan politiknya sehingga tidak ada kesempatan untuk mengkonsolidasi diri untuk memanfaatkan potensi diri dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kasus peperangan di belahan negara-negara dunia ke tiga seperti di Afrika, Asia Selatan, dan Indochina menyisakan banyak kasus kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi.

Kemiskinan juga timbul karena kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan amanah (good governance). Kasus-kasus korupsi dan manipulasi dana pembangunan menyebabkan rendahnya kualitas pembangunan sehingga menimbulkan kemiskinan di tengah masyarakat. Dana pembangunan yang dikumpulkan dari pajak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, pasar, bandara, subsidi sosial daerah bencana, jaminan sosial kesehatan, tunjangan dan gaji pegawai negeri, belanja barang modal, dsb. Jika dana pembangunan digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan pendapatan. Namun apabila dana pembangunan banyak „disunat“ akan mengurangi kualitas pembangunan misalnya jalan jadi mudah rusak, jembatan cepat rusak, bangunan mudah ambrol, jatah subsidi bagi masyarakat dikurangi, kualitas layanan sosial kesehatan tidak optimal, kualitas layanan pendidikan berkurang, akibatnya menimbulkan kemiskinan rakyat.

#### **8.4 Kebijakan mengatasi Kemiskinan**

Faktor pemicu kemiskinan bisa timbul karena faktor alam maupun faktor manusianya (human error). Namun sebagian besar timbulnya kemiskinan lebih karena faktor manusianya yaitu lemahnya motivasi, kreatifitas, etos kerja masyarakat serta mentalitas korup dari para pemegang jabatan publik. Sehingga untuk mengatasi kemiskinan faktor sentral yang harus dibenahi adalah faktor manusianya dengan menumbuhkan jiwa mandiri, etos kerja, semangat bekerja, rasa malu menjadi beban orang lain dan rasa tanggung jawab dalam mengemban amanah jabatan yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Kebijakan untuk mengatasi kemiskinan harus fokus pada pembinaan kualitas sumber daya manusianya serta diikuti dengan langkah-langkah pembinaan dan reformasi birokrasi untuk menekan praktek korupsi serta manipulasi dana pembangunan. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan langkah dan kebijakan simultan baik dari aspek individual, kultural maupun struktural. Dari aspek individual perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani dengan membangun semangat bekerja, etos kerja, kreatifitas, rasa malu menjadi beban orang lain. Secara kultural dengan memupuk budaya kerja dan semangat berkreasi di tengah masyarakat. Menghilangkan budaya santai, ingin cepat kaya tanpa bekerja, budaya santai, berfoya-foya, dsb. Membangun kultur dan budaya kerja dan budaya membaca di kalangan generasi muda sehingga akan memupuk semangat berkreasi.

Kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah melalui mekanisme kebijakan fiskal dan moneter dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka meningkat kesejahteraannya. Kebijakan fiskal yang dilakukan melalui intensitas kebijakan perpajakan sehingga pendapatan pajak dapat meningkat seiring dengan perkembangan dunia usaha sebagai obyek pajak. Upaya peningkatan pendapatan pajak diimbangi dengan kebijakan pembinaan aparatur pajak untuk menghindari praktek manipulasi pajak. Peningkatan pendapatan pemerintah disamping melalui pajak juga diperoleh dari luar pajak seperti pendapatan royalti hasil tambang, pendapatan devidan BUMN serta hibah dari negara donatur luar negeri. Peran penting pemerintah dalam mengatur perekonomian secara makro juga merupakan bagian dari tindakan untuk mengatasi kemiskinan. Berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi disebabkan adanya distorsi ekonomi yang berakibat meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Perlunya kebijakan ekonomi pemerintah karena beberapa alasan berikut ini :

1. Mencegah praktek monopoli oleh perusahaan besar yang berpotensi merugikan masyarakat luas
2. Penyediaan barang publik yang penting bagi masyarakat yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta karena biaya marginal lebih rendah dari pada keuntungan marginalnya
3. Informasi pasar yang tidak sempurna sehingga berpotensi hanya menguntungkan sebagian kecil pelaku ekonomi namun merugikan masyarakat luas
4. Untuk menstabilkan perekonomian misalnya pada saat ekonomi mengalami kelesuan diperlukan injeksi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif untuk menggerakkan perekonomian sehingga dapat mengatasi kemiskinan.

Dalam kondisi banyak terjadi kemiskinan dan pengangguran, maka kebijakan fiskal yang diterapkan adalah kebijakan fiskal ekspansif atau kebijakan defisit anggaran dimana pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada pendapatannya misalnya pemerintah meningkatkan jumlah anggaran untuk pemberian subsidi bagi masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur, peningkatan tunjangan dan gaji pegawai negeri. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif atau kebijakan defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga konsumsi juga meningkat sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa diatasi. Kebijakan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan juga bisa dilakukan misalnya dengan meningkatkan anggaran pada setiap kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan misalnya anggaran untuk UMKM, bantuan modal bagi petani dan nelayan, pembangunan pasar tradisional, pemberian bea siswa pendidikan bagi keluarga tidak mampu, pemberian santuan bagi masyarakat terpencil, dsb.

### **8.5. Kebijakan Fiskal Islam dalam Pengentasan Kemiskinan**

Masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengatasinya baik individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang muslim wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak boleh menggantungkan kepada orang lain dengan meminta-minta. Sikap hidup penuh optimisme, kreatif, semangat, etos kerja, profesional dan produktif menjadi terminologi seorang muslim dalam bekerja di segala lini kehidupan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah yang ditekankan dalam Islam. Dengan bekerja disamping mendapatkan pendapatan juga menjadi bagian untuk mengharapkan ampunan atas segala dosanya dan mendapatkan pahala yang berlipat. Jadi bekerja untuk menghidupi diri dan keluarga mengandung keutamaan yang berdimensi duniawi dan ukhrowi. Sehingga dengan semangat bekerja sebagai bagian dari kesempurnaan agama akan menjadi solusi fundamental dalam mengatasi.

Kemiskinan juga menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga. Ada tanggung jawab kolektif dalam suatu keluarga manakala ada bagian dari anggota keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Seorang anak berhak mendapat penghidupan dan pengayoman yang layak dari kedua orang tuanya. Demikian juga sebaliknya anak berkewajiban membantu dan menyantuni orang tuanya yang sudah tua, sehingga ada mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya kemiskinan dalam suatu keluarga. Lingkup tanggung jawab dalam keluarga dapat melebar secara vertikal dari mulai kakek sampai ke cucu. Demikian juga dapat melebar ke samping yaitu saudara kandung, sepupu, dst sehingga ada perlindungan yang otomatis terhadap kehidupan dalam suatu keluarga. Namun prinsip umum dalam Islam bahwa „tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah“ artinya jangan mempunyai cita-cita untuk selalu mendapat bantuan dan jadi tanggungan saudara lainnya namun harus punya cita-cita bagaimana dapat membantu saudara lainnya. Sehingga menjadi tanggung jawab dalam setiap keluarga bagaimana membina dan menyiapkan semua anggota keluarganya agar menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, berketrampilan, punya semangat dan cita-cita yang tinggi agar hidupnya menjadi manusia yang utama di dunia dan akhirat.

Pengentasan kemiskinan juga menjadi tanggung jawab dalam masyarakat dimana masyarakat harus memberi kesempatan, dukungan moral dan spiritual, dan fasilitas bagi

tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan remaja dan pemuda. Memberi kesempatan dan dukungan positif bagi munculnya ide-ide kreatif dan positif dari kalangan generasi muda apapun bentuknya. Dan sebaliknya harus mengingatkan, menegur, memberi sanksi sosial pada setiap kegiatan, aksi, perilaku negatif dan menyimpang yang menimbulkan kerusakan dan keresahan di tengah masyarakat seperti narkoba, pergaulan bebas, vandalisme, perkelahian pelajar, dsb. Fasilitas untuk menyalurkan energi dan minat bakat dapat disediakan misalnya di kampung, di masjid, taman kota, dalam bentuk sanggar belajar, kelompok pecinta alam, kelompok bina usaha, dsb.

Peran dan tanggung jawab negara dalam pengentasan kemiskinan dilakukan melalui beberapa kebijakan yaitu :

1. Kepatuhan kepada aturan Islam baik dalam skala individu maupun sosial untuk mewujudkan sistem sosial yang berkeadilan
2. Menjaga sistem dan mekanisme pasar agar berjalan secara sehat dan fair sehingga penentuan tingkat keseimbangan harga dan jumlah barang berjalan dengan baik.
3. Melakukan intervensi dalam alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan untuk mencegah timbulnya distorsi ekonomi dan inefisiensi ekonomi sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
4. Mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kebijakan yang memberi insentif untuk terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan
5. Mengoptimalkan peran baitul maal dalam menggali dan memanfaatkan dana ZIS (zakat infak dan shadaqah) sebagai instrumen stabilisasi perekonomian

Kebijakan fiskal Islami merupakan bagian dari tanggung jawab moral negara (khilafah) dalam menegakkan risalah Islam, sehingga format sumber penerimaan dan belanja juga berdasarkan pada Al-Qur'an dan Assunnah. Format anggaran pendapatan dan belanja negara pada kebijakan fiskal Islami sebagai berikut :

<i><b>Penerimaan</b></i>	<i><b>Belanja</b></i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kharaj</li> <li>2. Zakat</li> <li>3. Khoms</li> <li>4. Jizyah</li> <li>5. Penerimaan lain-lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dakwah Islam</li> <li>2. Pendidikan dan kebudayaan</li> <li>3. Pengembangan ilmu pengetahuan</li> <li>4. Pembangunan infrastruktur</li> <li>5. Pembangunan bidang hankamnas</li> <li>6. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial</li> </ol>

Sumber : Adiwarmar Karim, 2012, *Ekonomi Makro Islami*, PT RajaGrafindo Persada

Penerimaan negara tidak hanya bertumpu pada zakat saja tetapi juga diperoleh dari penerimaan dana kharaj, khoms, jizyah dan penerimaan lainnya yang dibenarkan Islam. Zakat merupakan instrumen yang sentral dalam mewujudkan tatanan perekonomian yang berkeadilan. Zakat diambilkan dari anggota masyarakat yang memiliki kelebihan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam kemudian disalurkan melalui mekanisme dan aturan yang ada oleh baitul maal.

## **Penerimaan Negara**

### *A. Kharaj*

Kharaj merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari pajak atas tanah. Pajak atas tanah (kharaj) menegaskan bahwa sumber daya alam yang berupa tanah sesungguhnya adalah ciptaan Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia, maka menjadi kewajiban bagi pemilik tanah untuk berbagi dengan mereka yang tidak memiliki tanah melalui pembayaran kharaj atau pajak atas tanah. Kharaj atau pajak atas tanah ini hampir sama dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Indonesia, namun ada perbedaan sifat dan perlakuannya. Berbeda dengan PBB yang sifat dan besarnya ditentukan berdasarkan lokasi tanah (zoning), maka kharaj ditentukan berdasarkan nilai produktifitas yang dihasilkan dari tanah tersebut dalam menghasilkan tanaman. Sehingga besarnya kharaj ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas lahan yaitu kesuburan tanah, nilai ekonomi tanaman yang dihasilkan dan sifat irigasi yang dapat dilakukan. Jadi di sini Islam memandang bahwa tanah harus dikembalikan ke fungsi asasinya yaitu sebagai faktor produksi utama dalam menghasilkan produksi pertanian.

### *B. Zakat*

Zakat merupakan salah satu komponen penting penerimaan negara untuk menopang pengeluaran negara. Berbeda dengan sumber penerimaan negara lainnya, zakat ada aturan yang jelas dan rinci baik pengambilan dan penggunaannya. Ada beberapa macam zakat yang harus dilaksanakan baik bagi individu seorang muslim maupun pemerintah sebagai pengelola dana zakat yaitu :

1. Zakat fitrah
2. Zakat harta (zakat maal)
3. Zakat peternakan
4. Zakat hasil bumi
5. Zakat pendapatan/zakat profesi

#### 1. Zakat fitrah

Zakat fitrah dilaksanakan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan baik untuk diri maupun keluarganya pada malam lebaran sampai saat akan ditunaikannya sholat „iedul fitri. Besarnya zakat fitrah sebesar kurang lebih 2,5 kg beras/jiwa. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim pada bulan romadhon sebagai pelengkap dari ibadah puasa romadhon. Tujuannya adalah sebagai wujud ketundukan kepada perintah Allah SWT dan sekaligus membangun solidaritas sosial pada saat hari raya idul fitri.

Zakat harta (zakat maal) merupakan kewajiban yang melekat pada setiap muslim yang memiliki harta dan telah mencapai nishob (batas minimal) dan telah berjalan satu tahun (haul). Harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Nishob zakat emas sebesar 85 gram = 20 dinar dan dikenai zakat sebesar 2,5 % -nya. Sedangkan nishob zakat perak sebesar 595 gram = 200 dirham dan dikenai zakat sebesar 2,5 %.

Zakat peternakan dikenakan kepada pemilik hewan ternak yang telah mencapai nishobnya dan telah mencapai satu tahun. (haul). Batas minimal kena zakat untuk kambing sebanyak 40 ekor, sapi 30 ekor dan unta 5 ekor. Berikut daftar nisob-nisob zakat hewan :

Nisob Kambing :

<i>Dari</i>	<i>Sampai</i>	<i>Jumlah Zakat</i>
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing

Sumber : Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Lengkap*, 2012, Ghani Pressindo, hal. 604

Kemudian pada setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor dan seterusnya. Pada 399 ekor kambing zakatnya 3 ekor. Pada 400 – 499 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing.

Nisob Sapi :

<i>Dari</i>	<i>Sampai</i>	<i>Kadar Zakat</i>
30	39	Tabi <sup>ah</sup> atau tabi <sup>ah</sup> yaitu anak sapi jantan atau betina berusia satu tahun
40	59	Musinnah, yaitu sapi betina berusia 2 tahun
60	69	2 Ekor tabi <sup>ah</sup> atau tabi <sup>ah</sup>

Sumber : Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Lengkap*, 2012, Ghani Pressindo, hal. 605

Kemudian setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor tabi<sup>ah</sup> atau tabi<sup>ah</sup>. Dan pada setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor musinnah. Pada 50 ekor sapi zakatnya 1 ekor musinnah. Pada 70 ekor zakatnya 1 ekor tabi<sup>ah</sup> atau tabi<sup>ah</sup> dan 1 ekor musinnah. Pada 120 ekor sapi zakatnya 4 ekor tabi<sup>ah</sup> atau 3 ekor musinnah, dan begitu seterusnya ketetapanannya.

Nisob Unta :

<i>Dari</i>	<i>Sampai</i>	<i>Kadar Zakat</i>
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	Bintu makhadh yaitu anak unta betina berusia 1 tahun
36	45	Bintu labbun yaitu unta betina berusia 2 tahun
46	60	Hiqqah yaitu unta betina berusia 3 tahun
61	75	Jazd <sup>ah</sup> yaitu unta betina yang berusia 4 tahun
76	90	2 ekor bintu labbun
91	120	2 ekor hiqqah

Sumber : Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Lengkap*, 2012, Ghani Pressindo, hal. 605

Selanjutnya jika lebih 120, maka setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor bintu labbun. Dan setiap 50 ekor zakatnya 1 ekor hiqqah. Pada 121 ekor unta zakatnya 3 ekor bintu labbun. Pada 130 ekor unta zakatnya 1 ekor hiqqah dan 2 ekor bintu labbun. Dan pada 150 ekor unta zakatnya 3 ekor hiqqah. Pada 160 ekor unta zakatnya 4 ekor bintu labbun. Pada 180 ekor unta zakatnya 2 ekor hiqqah dan 2 ekor bintu labbun. Pada setiap 200 ekor unta zakatnya 4 ekor hiqqah dan 5 ekor bintu labbun. Jika muzakki harus mengeluarkan bintu labbun tapi tidak memilikinya, maka dapat diganti dengan bintu makadh dan membayar jabran (tambahan) yaitu 2 ekor kambing atau uang 20 dirham. Ketentuan tentang jabaran hanya diberlakukan pada zakat unta saja. (Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Lengkap*).

## 2. Zakat hasil bumi

Zakat hasil bumi dikenakan kepada semua jenis barang yang diperoleh dari pengolahan bumi misalnya buah-buahan, sayuran, tanaman, biji-bijian, barang tambang, dsb. Ketentuan hasil bumi yang kena zakat yaitu yang merupakan milik sendiri dan telah mencapai nishobnya. Kadar nishobnya adalah 5 wasaq yang setara dengan 612 kg gandum. Besarnya zakat tergantung perlakuan yang diberikan pada tanaman tersebut. Jika tanaman konsuitu tumbuh dengan disiram tanpa biaya, maka zakatnya 1/10. Namun jika tanamannya tumbuh yang disiram dengan biaya, maka zakatnya 1/20. Waktu pembayaran zakat yaitu pada saat panen dimana biji-bijian atau buah-buahan sudah cukup tua dan baik untuk dipanen.

## 3. Zakat pendapatan/zakat profesi

Zakat pendapatan atau juga diistilahkan dengan zakat profesi merupakan pemahaman agama yang kontemporer mensikapi perkembangan dunia ekonomi dan bisnis yang semakin maju dan modern. Muncul berbagai macam profesi yang menghasilkan pendapatan cukup besar seperti akuntan, dokter spesialis, pengacara, kontraktor, konsultan, dsb. Besarnya nishob zakat penghasilan/penghasilan setara 85 gram emas 24 karat dan dibayarkan zakatnya sebesar 2,5 % nya karena penghasilan dari hasil usaha dimasukkan dalam pengertian zakat perdagangan.

### C. Khoms

Khoms adalah pengutan yang dikenakan pada harta rampasan perang, harta temuan dan barang tambang. Jadi misalnya ada seseorang yang sedang menggali tanah kemudian menemukan benda antik yang bernilai, maka harus diambil pengutan (khoms) sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Besarnya khoms sebesar 20 % dari nilai barang setelah dikurangi dengan biaya operasional dan dikenakan hanya sekali saja.

### D. Jizyah

Jizyah adalah pungutan yang dikenakan kepada orang-orang non muslim yang hidup di negara muslim sebagai ganti dari jaminan sosial keamanan (social security). Dengan membayar jizyah, maka mereka berhak mendapat perlindungan dan jaminan keamanan, fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dsb.

### E. Pendapatan lainnya

Negara juga dapat memperoleh pendapatan di luar yang sudah dijelaskan di atas misalnya kaffarah, harta dari orang meninggal yang tidak mempunyai ahli waris, Pendapatan lainnya juga dimungkinkan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan masyarakat luas manakala negara dalam keadaan darurat misalnya banyak bencana alam, menghadapi perang, musibah penyakit, dsb. Untuk itu negara dapat mengambil dana dari masyarakat dengan melalui mekanisme dan sosialisasi yang diatur melalui undang-undang.

## **Pengeluaran Negara**

Pengeluaran negara dilakukan untuk menopang fungsi, tugas dan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, jaminan sosial, pelayanan publik, infrastruktur, keselamatan, pertahanan, dsb. Secara umum ada dua macam pengeluaran negara yaitu pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder. Pengeluaran primer menyangkut kebutuhan pokok (basic needs) yang harus dipenuhi bagi setiap penduduk seperti pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pengeluaran sekunder menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat misalnya perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas layanan publik, perbaikan sarana dan prasarana rekreasi, dsb.

Muhammad Umer Chapra menjelaskan prinsip-prinsip umum pengeluaran negara yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat banyak (mayoritas) daripada minoritas untuk menjaga keadilan
3. Menghilangkan kesulitan hidup, penderitaan, kesusahan, rasa takut, khawatir harus diprioritaskan dari pada penyediaan kenyamanan dan rasa bahagia
4. Orang yang mendapat manfaat harus menanggung biaya
5. Untuk kepentingan yang lebih luas dapat mengorbankan kepentingan yang lebih kecil
6. Kewajiban untuk memenuhi sesuatu manakala sesuatu tersebut merupakan komponen untuk mencapai sesuatu lain yang lebih penting

Pemikiran dari Chapra sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi publik sekarang ini dimana keputusan ekonomi dihadapkan pada berbagai macam kepentingan, sehingga harus mempertimbangkan prioritas dalam pengambilan keputusan. Contoh kasus riil misalnya dalam proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, bandara, terminal, pasar, dsb, dimana kebutuhan yang terus berkembang sehingga dirasakan perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur tersebut. Namun proyek pelebaran jalan, perluasan bandara, pembangunan pasar seringkali harus dilakukan dengan mengorbankan tanah masyarakat. Di sinilah perlunya dialog untuk mencari titik temu antara kepentingan individu dan sosial agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

## **Analisis Ekonomi dari Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal baik yang bersifat ekspansif maupun kontraktif akan menimbulkan pengaruh pada perekonomian baik pada perilaku produsen maupun konsumen.

## **BAB VIII**

### **ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL**

#### **8.1. Analisis Pendapatan Nasional pada Perekonomian Dua Sektor**

Perekonomian dua sektor artinya dalam perekonomian diasumsikan hanya memasukkan dua pelaku ekonomi yaitu

Pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor terjadi manakala ada keseimbangan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang mengandung makna bahwa semua barang yang dihasilkan dapat terserap oleh pasar. Kondisi ini terjadi yaitu manakala semua pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen dari sumberdaya ekonomi yang dimiliki dapat dibelanjakan untuk membeli semua produk yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jika pendapatan yang diterima rumah tangga konsumen diberi simbol  $Y$  (income) kemudian pengeluaran rumah tangga diberi simbol  $E$  (expenditure), maka diperoleh suatu diperoleh formula keseimbangan perekonomian sebagai berikut :

$$Y = E$$

Dari sisi pendapatan digunakan untuk kebutuhan konsumsi ( $C$ ) dan sisanya ditabung (saving) sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = C + S$$

Pengeluaran (expenditure) pada perekonomian dua sektor terdiri dari pengeluaran rumah tangga konsumen untuk konsumsi ( $C$ ) dan pengeluaran rumah tangga produsen untuk investasi ( $I$ ), sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$E = C + I$$

Untuk mendapatkan keseimbangan pada perekonomian dua sektor, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = E$$

$$C + S = C + I$$

$$S = I, \text{ atau}$$

$$Y = C + I$$

Dari formulasi tersebut dapat dipahami bahwa perekonomian dalam keadaan keseimbangan manakala besarnya tabungan (saving) sama dengan investasi. Logika ini yang kemudian bisa diterapkan dalam manajemen keuangan perbankan bahwa perbankan akan beroperasi dengan sehat manakala dapat menarik dana tabungan dari masyarakat dan kemudian dana tabungan tersebut dapat tersalurkan dalam bentuk investasi di sektor riil. Namun seandainya perbankan hanya dapat menarik dana tabungan masyarakat namun tidak

mampu menyalurkan dalam bentuk investasi di sektor riil, maka justru akan menimbulkan beban biaya yang dapat merugikan perbankan itu sendiri. Jadi kemampuan dalam menyalurkan dana investasi pada sektor riil tergantung besarnya dana tabungan yang masuk dimana besarnya tabungan tergantung besarnya pendapatan yang nilainya harus lebih besar daripada besarnya pengeluaran konsumsi.

$$Y = C + S$$

$$S = Y - C$$

Besarnya tabungan ditentukan oleh besarnya pendapatan dan besarnya konsumsi. Masyarakat baru dapat menabung manakala besarnya pendapatan di atas besarnya konsumsi. Tabungan dianalogkan dengan kebocoran (*leakage*) karena ada dana yang tidak masuk dalam perputaran ekonomi, sedangkan investasi dianalogkan dengan suntikan (*injection*) karena ada dana yang masuk dalam perputaran ekonomi. Jadi perekonomian akan dalam keadaan keseimbangan manakala besarnya kebocoran (*leakage*) sama dengan suntikan (*injection*).

### **8.1. Fungsi Konsumsi**

Konsumsi merupakan komponen penting dalam perekonomian makro dan merupakan aktifitas pengeluaran ekonomi oleh rumah tangga konsumen. Pendapatan rumah tangga dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi (C) dan kalau ada sisa kemudian ditabung (S). Besarnya pengeluaran konsumsi (C) dipengaruhi oleh besarnya pendapatan (Y) semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pengeluaran konsumsi. Ada hubungan timbal balik antara pendapat nasional (Y) dengan pengeluaran konsumsi (C) yaitu pendapatan nasional mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan sebaliknya pengeluaran konsumsi juga mempengaruhi pendapatan nasional sesuai dengan persamaan  $Y = C + I$ . Besarnya alokasi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi ditentukan oleh besarnya marginal propensity to consume (MPC) yang nilainya  $0,5 < MPC < 1$  artinya secara umum sebagian besar pendapatan nasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Fungsi konsumsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$C = C_0 + b Y$$

Dimana :

C = Pengeluaran konsumsi

C<sub>0</sub> = Konsumsi otonom

b = MPC (marginal propensity to consume)

Y = Pendapatan nasional

Konsumsi otonom (C<sub>0</sub>) adalah besarnya konsumsi minimal yang harus dipenuhi rumah tangga konsumen pada saat tidak ada pendapatan nasionalnya. Marginal propensity to

consume (MPC) menunjukkan besarnya kecenderungan tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Besarnya MPC diperoleh dari turunan pertama (differensial) dari fungsi konsumsi terhadap pendapatan nasional yaitu nilai  $b = MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$ . Jika diketahui

misalnya  $MPC = 0,75$  artinya 75 % dari besarnya pendapatan dialokasikan untuk konsumsi.

Dalam suatu perekonomian misalnya diketahui data sebagai berikut :

$$C_0 = 80$$

$$MPC = 0,75$$

Maka dapat dirumuskan fungsi konsumsinya sebagai berikut :

$$C = 80 + 0,75 Y$$

Makna dari fungsi konsumsi tersebut adalah besarnya konsumsi otonom sebesar 80 artinya konsumsi minimal yang harus dipenuhi sebesar 80. Dan besarnya pertambahan konsumsi setiap pertambahan pendapatan per satu satuan sebesar 0,75. Besarnya titik impas (break event point) terjadi manakala besarnya pendapatan nasional sama dengan besarnya konsumsi ( $Y = C$ ) dan dapat ditentukan besarnya yaitu :

$$Y = C$$

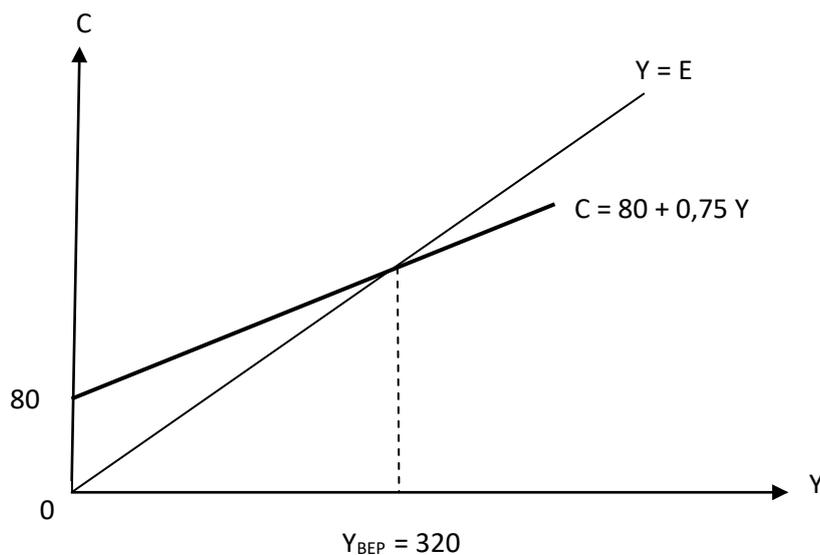
$$Y = 80 + 0,75 Y$$

$$Y - 0,75 Y = 80$$

$$0,25 Y = 80$$

$$Y = 320$$

Dari perhitungan di atas dapat diturunkan fungsi konsumsi sebagai berikut :



Besarnya titik impas terjadi pada saat pendapatan nasional sebesar 320 artinya masyarakat baru bisa menabung manakala pendapatannya di atas 320 dan sebaliknya jika

pendapatannya kurang dari 320 artinya masyarakat harus berhutang (dissaving) untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya karena  $C > Y$ .

Untuk lebih memahami materi tentang fungsi konsumsi misalnya ada suatu contoh kasus sebagai berikut : Pada saat pendapatan nasional sebesar 40 besarnya konsumsi sebesar 25 dan pada saat pendapatannya naik menjadi 60 pengeluaran konsumsi naik menjadi 40. Pertanyaannya bagaimana menentukan fungsi konsumsi dan menggambarkan kurva konsumsinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih ditentukan besarnya nilai MPC sebagai berikut :

$$b = MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{C_2 - C_1}{Y_2 - Y_1} = \frac{40 - 35}{60 - 53} = \frac{5}{7} = 0,71$$

Besarnya konsumsi otonom ( $C_0$ ) dapat ditentukan memasukkan salah satu pasangan pendapatan dan konsumsi ke dalam fungsi konsumsi sebagai berikut :

$$C = C_0 + 0,75 Y$$

$$35 = C_0 + 0,75 (40)$$

$$C_0 = 35 - 30$$

$$C_0 = 5$$

Dari hasil perhitungan tersebut kemudian dapat dirumuskan fungsi konsumsi dan kurva konsumsinya sebagai berikut :

$$C = 5 + 0,71 Y$$

Kemudian dapat dirumuskan fungsi tabungan (saving) sebagai berikut :

$$Y = C + S$$

$$S = Y - C$$

$$S = Y - (5 + 0,71 Y)$$

$$S = Y - 5 - 0,71 Y$$

$$S = - 5 + Y - 0,71 Y$$

$$S = - 5 + (1 - 0,71) Y$$

$$S = - 5 + 0,29 Y$$

Rumusan di atas menjelaskan bahwa alokasi pendapatan (income) digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (C) dan sisanya di tabung (S). Semakin besar jumlah pendapatan untuk konsumsi, maka akan semakin kecil dana yang dapat ditabung. Dan sebaliknya jika ingin meningkatkan jumlah tabungan, maka besarnya konsumsi harus dikurangi dengan asumsi besarnya pendapatan tetap (*ceteris paribus*). Angka 0,71 menunjukkan besarnya MPC (*marginal propensity to consume*) sedangkan 0,29 yaitu besarnya perubahan pengeluaran konsumsi manakala terjadi perubahan pendapatan.

Sedangkan 0,29 menunjukkan besarnya MPS (*marginal propensity to save*) yaitu besarnya perubahan jumlah tabungan manakala terjadi perubahan tingkat pendapatan.

### Penentuan Titik Impas (*break event point*)

Titik impas (*break event point*) adalah suatu kondisi perekonomian dimana besarnya pendapatan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga tidak ada sisa dana yang dapat ditabung. Untuk menentukan titik impas (*break event point*) ada cara yaitu :

*Cara 1 :*

Besarnya titik impas (*break event point*) terjadi manakala  $Y = C$ , maka dapat ditentukan sebagai berikut :

$$Y = C$$

$$Y = 5 + 0,71 Y$$

$$Y - 0,71 Y = 5$$

$$0,29 Y = 5$$

$$Y = 17,24$$

*Cara 2 :*

Titik impas (BEP) terjadi manakala besarnya tabungan (*saving*) sama dengan 0, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

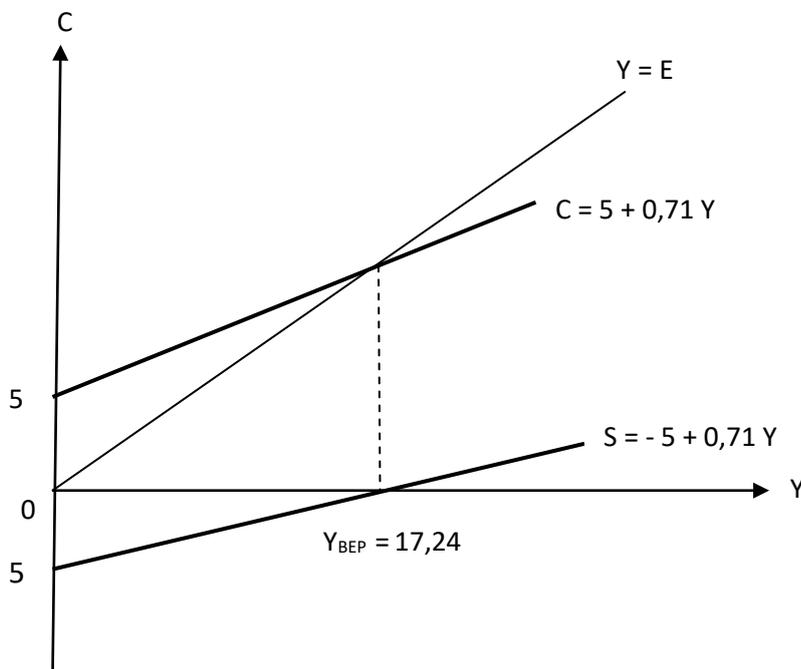
$$S = 0$$

$$- 5 + 0,29 Y = 0$$

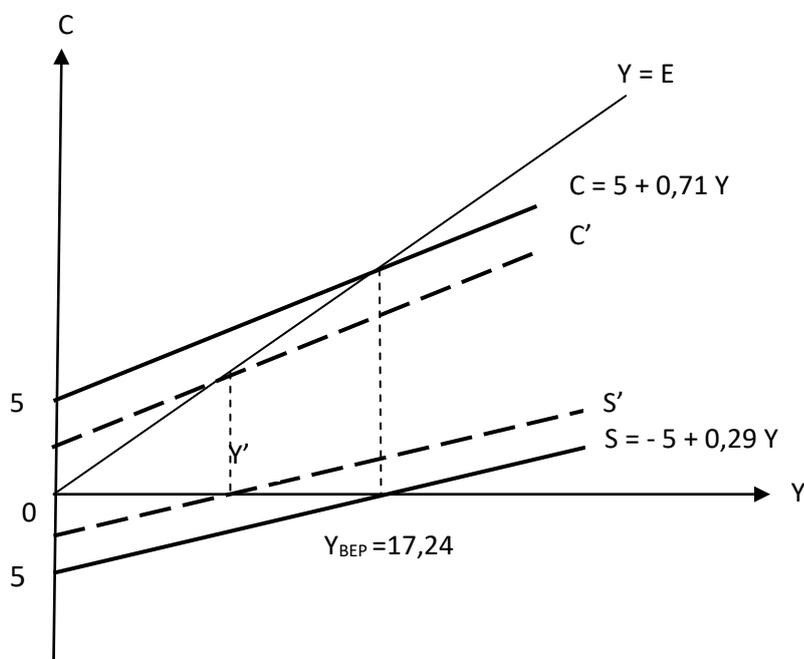
$$0,29 Y = 5$$

$$Y = 17,24$$

Perhitungan di atas dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut :



Jadi slogan bahwa „*hemat pangkal kaya*” artinya dengan menabung akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus diartikan secara hati-hati. Karena semakin banyak tabungan justru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun. Inilah yang disebut dengan *paradoks hemat (sift paradox)*. Kenaikan jumlah tabungan akan menyebabkan semakin besar jumlah kebocoran dana sehingga dana yang beredar di masyarakat semakin sedikit mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat. Kenaikan jumlah tabungan akan mengakibatkan alokasi untuk konsumsi semakin berkurang sehingga kegiatan produksi dan investasi juga akan menurun menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan melambat. Gambaran tentang perekonomian sederhana atau perekonomian 2 (dua) sektor manakala ada kenaikan tabungan dan implikasinya pada perekonomian makro dapat dilihat pada gambar kurva berikut ini :



Gambar kurva di atas menjelaskan jika tabungan naik ditandai dengan pergeseran ke atas kurva tabungan (S) dan sekaligus juga pergeseran kurva konsumsi (C) ke bawah, sehingga akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi menurun yaitu pergeseran ke kiri

### **Hubungan MPC, MPS, APS dan APC**

Secara teoritis diketahui bahwa fungsi konsumsi akan dapat menurunkan fungsi tabungan dan sebaliknya, sehingga dapat dipahami bahwa ada keterkaitan antara besarnya MPC dengan MPS. Nilai MPS (*marginal propensity to save*) menunjukkan besarnya perubahan tabungan manakala ada perubahan tingkat pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

Sedangkan MPC (*marginal propensity to consume*) menunjukkan besarnya perubahan konsumsi manakala ada perubahan tingkat pendapatan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

Penjelasan mengenai keterkaitan MPC dengan MPS dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + S$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

$$1 = MPC + MPS$$

$$MPC = 1 - MPS$$

$$MPS = 1 - MPC$$

Jadi misalnya fungsi konsumsi dengan  $MPC = 0,81$ , maka dapat ditentukan besarnya  $MPS = 1 - 0,81 = 0,19$ . Demikian juga misalnya diketahui nilai  $MPS = 0,25$ , maka dapat ditentukan besarnya  $MPC = 1 - 0,25 = 0,75$ . Secara umum biasanya nilai  $MPC > MPS$  artinya bahwa manakala terjadi perubahan tingkat pendapatan, maka sebagian besar dialokasikan untuk meningkatkan konsumsi. Kondisi ini terjadi secara umum terutama pada masyarakat menengah ke bawah yang kebutuhan hidupnya relatif masih terbatas. Jika mereka memperoleh tambahan pendapatan, maka yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsinya.

Disamping MPC dan MPS ada konsep lain dalam ekonomi makro yaitu APC (*average propensity to consume*) yang menunjukkan besarnya hasrat berkonsumsi rata-rata rumah tangga yang diformulasikan sebagai berikut :

$$APC = \frac{C}{Y}$$

Sedangkan APS (*average propensity to save*) menunjukkan hasrat menabung rata-rata rumah tangga yang diformulasikan sebagai berikut :

$$APS = \frac{S}{Y}$$

Sama halnya keterkaitan antara MPC dengan MPS, maka demikian juga ada keterkaitan antara nilai APC dan APS melalui penjelasan teoritis sebagai berikut :

$$Y = C + S$$

$$\frac{Y}{Y} = \frac{C}{Y} + \frac{S}{Y}$$

$$1 = APC + APS$$

$$APC = 1 - APS$$

$$APS = 1 - APC$$

Sehingga manakala sudah diketahui nilai APC, maka dapat dicari nilai APS demikian juga sebaliknya. Misalnya diketahui nilai  $APC = 0,65$ , maka nilai  $APS = 1 - 0,65 = 0,35$ . Besarnya nilai APC dan APS dapat diturunkan dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sebagai berikut :

$$C = C_o + b Y$$

$$APC = \frac{C}{Y} = \frac{C_o + bY}{Y} = \frac{C_o}{Y} + b$$

$$S = -C_o + (1 - b)Y$$

$$APS = \frac{S}{Y} = \frac{-C_o + (1-b)Y}{Y} = \frac{-C_o}{Y} + (1 - b)$$

Dari rumusan APC dan APS di atas dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara nilai APC dan APS orang yang mampu dan tidak mampu. Karena orang yang mampu pendapatannya (Y) lebih tinggi daripada orang yang kurang mampu, maka nilai APC dan APS orang mampu lebih kecil dari pada orang yang tidak mampu.

### **Pendapatan Nasional Keseimbangan pada Perekonomian 2 Sektor**

Perekonomian 2 sektor juga disebut dengan perekonomian sederhana karena hanya memasukkan dua pelaku ekonomi saja yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan. Aktifitas ekonomi rumah tangga konsumen adalah berkonsumsi (C) sedangkan aktifitas ekonomi rumah tangga perusahaan adalah berinvestasi (I) untuk berproduksi, sehingga persamaan pendapatan nasionalnya dari sisi pengeluaran (expenditure) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$E = C + I$$

Sementara pada sisi lain dari sisi pendapatan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (C) dan sisanya di tabung (S), sehingga dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut :

$$Y = C + S$$

Dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh rumusan :

$$Y = E$$

$$C + I = C + S$$

$$I = S$$

Sehingga untuk menentukan pendapatan nasional keseimbangan (*equilibrium national income*) dapat diperoleh dengan menggunakan rumus  $Y = C + I$  atau  $S = I$  dimana dalam perekonomian sederhana diasumsikan investasi bersifat otonom.

Misalnya diketahui kondisi suatu perekonomian sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi otonom (Co)} = \text{Rp. 12 trilyun}$$

$$\text{Marginal propensity to consume (MPC)} = 0,75$$

$$\text{Pengeluaran investasi (I)} = \text{Rp. 5 trilyun}$$

Maka dapat ditentukan pendapatan nasional keseimbangan sebagai berikut :

*Cara I :*

$$Y = C + I$$

$$Y = 12 + 0,75 Y + 5$$

$$Y = 17 + 0,75 Y$$

$$Y - 0,75 Y = 17$$

$$0,25 Y = 17$$

$$Y = 68$$

*Cara II :*

$$S = I$$

$$S = Y - C$$

$$S = Y - (12 + 0,75Y)$$

$$S = Y - 12 - 0,75 Y$$

$$S = - 12 + Y - 0,75 Y$$

$$S = - 12 + (1 - 0,75 ) Y$$

$$S = - 12 + 0,25 Y$$

$$S = I$$

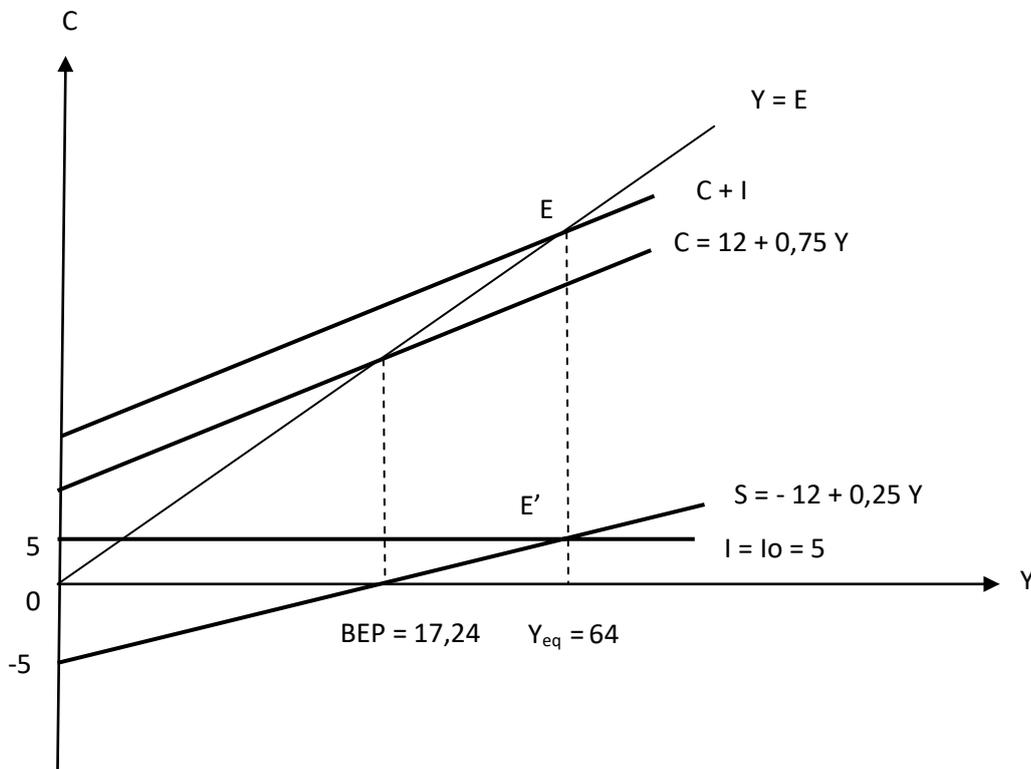
$$- 12 + 0,25 Y = 5$$

$$0,25 Y = 17$$

$$Y = 68$$

Dari perhitungan dengan menggunakan dua cara tersebut menghasilkan nilai yang sama yaitu pendapatan nasional keseimbangan sebesar 68. Nilai pendapatan nasional keseimbangan dapat mengalami perubahan manakala ada perubahan yang mempengaruhi komponen pembentuknya yaitu konsumsi (C) atau investasi (I). Perubahan komponen konsumsi (C) bisa berubah karena perubahan besarnya pendapatan nasional (Y) atau perubahan perilaku dan kondisi konsumen yang ditandai dengan perubahan nilai MPC dan

konsumsi otonom ( $C_0$ ). Sedangkan perubahan nilai investasi ( $I$ ) diasumsikan semata-mata karena keputusan perusahaan saja yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Gambaran tentang penentuan pendapatan nasional keseimbangan dapat dilihat pada kurva berikut ini :



Dari gambar kurva di atas diketahui bahwa pendapatan nasional sebesar 64 terjadi pada saat  $Y = C + I$  dan sekaligus juga terjadi pada saat  $S = I$ . Misalnya karena kondisi perekonomian dan iklim usaha membaik investasi meningkat menjadi 7, maka pendapatan nasional keseimbangan yang baru dapat ditentukan sebagai berikut :

*Cara I :*

$$Y = C + I$$

$$Y = 12 + 0,75 Y + 7$$

$$Y = 19 + 0,75 Y$$

$$Y - 0,75 Y = 19$$

$$0,25 Y = 19$$

$$Y = 76$$

*Cara II :*

$$S = I$$

$$S = Y - C$$

$$S = Y - (12 + 0,75Y)$$

$$S = Y - 12 - 0,75 Y$$

$$S = - 12 + Y - 0,75 Y$$

$$S = - 12 + (1 - 0,75 ) Y$$

$$S = - 12 + 0,25 Y$$

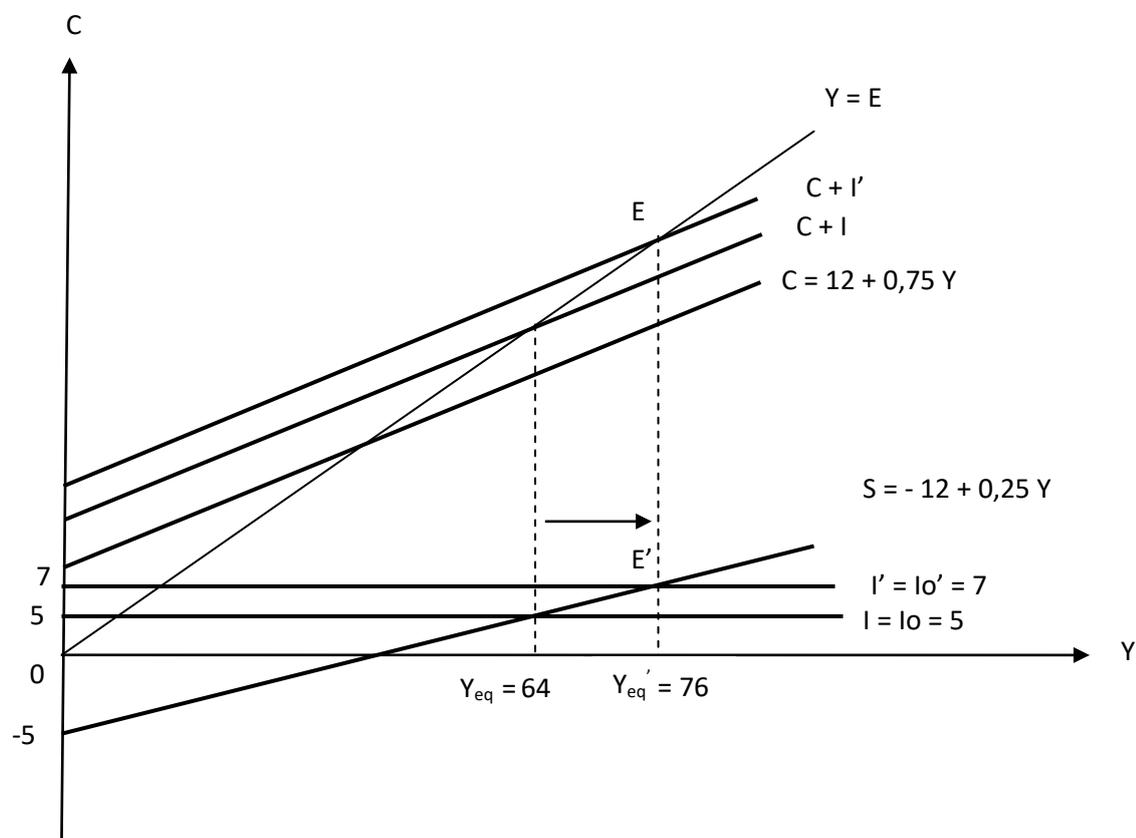
$$S = I$$

$$- 12 + 0,25 Y = 7$$

$$0,25 Y = 19$$

$$Y = 76$$

Pendapatan nasional keseimbangan yang baru sebesar 76 dan dapat dilihat pengaruh perubahan investasi pada gambar kurva berikut ini :



Dari data perekonomian di atas, maka dapat ditentukan informasi lainnya yaitu besarnya konsumsi keseimbangan dan tabungan keseimbangan sebagai berikut :

*Konsumsi keseimbangan :*

$$C = 12 + 0,75 Y$$

$$C = 12 + 0,75 (76)$$

$$C = 12 + 57$$

$$C = 69$$

*Tabungan keseimbangan :*

$$S = -12 + 0,25 Y$$

$$S = -12 + 0,25 (76)$$

$$S = -12 + 19$$

$$S = 7$$

### **Perekonomian 3 Sektor (Perekonomian dengan Kebijakan fiskal)**

Perekonomian 3 sektor memasukkan tiga pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Peran dan kontribusi pemerintah dalam perekonomian dikonstruksikan dalam kebijakan fiskal yaitu politik anggaran (APBN) yang terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan negara dan belanja pemerintah. Sehingga dikatakan bahwa perekonomian 3 sektor adalah perekonomian dengan kebijakan fiskal karena peran dan kontribusi pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian dilakukan dengan mengendalikan pos-pos baik yang ada pada sisi penerimaan negara maupun dari sisi belanja pemerintah. Komponen utama pada penerimaan negara adalah dari unsur pajak, sehingga analisis kebijakan fiskal akan banyak menyoroti tentang aspek dan implikasi pajak pada perekonomian. Penerimaan negara dari pajak dan non pajak kemudian dialokasikan untuk membiayai program dan proyek pembangunan yang sudah ditetapkan melalui mekanisme politik antara DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat (legislatif) dengan pemerintah sebagai eksekutif.

Dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian, maka formulasi dari persamaan pendapatan nasional pada perekonomian 3 sektor dari sisi pengeluaran (expenditure) adalah :

$$E = C + I + G$$

Dimana :

E = Expenditure (pengeluaran)

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga

I = Pengeluaran investasi perusahaan

G = Pengeluaran pemerintah (government expenditure)

Sedangkan persamaan pendapatan nasional pada perekonomian 3 sektor dari sisi pendapatan (income) adalah :

$$Y = C + S + Tx - Tr$$

Dimana

Y = Pendapatan (income)

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga

S = Jumlah tabungan (saving)

Tx = Penerimaan pajak (tax)

Tr = Jumlah pembayaran transfer (transfer payment)

Implikasi dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian akan menambah komponen dalam analisis perekonomian yaitu dengan memasukkan unsur pajak (tax), pembayaran transfer (transfer payment) dan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Pendapatan nasional keseimbangan tercapai manakala jumlah pendapatan nasional sama dengan jumlah total pengeluaran, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = E$$

$$C + S + Tx - Tr = C + I + G$$

$$S + Tx - Tr = I + G$$

$$S + Tx = I + G + Tr$$

$$S - I = G + Tr - Tx$$

Persamaan di atas mengisyaratkan informasi tentang kesamaan antara *surplus sektor swasta* ( $S - I$ ) dengan *defisit anggaran belanja pemerintah* sebagai prasyarat tercapainya pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian 3 sektor. Persamaan itu juga menjelaskan bahwa seandainya pemerintah gencar melakukan proyek-proyek pembangunan dengan konsekuensi meningkatnya besarnya defisit anggaran belanja pemerintah, maka konsekuensinya harus diimbangi dengan peningkatan besarnya surplus sektor swasta, misalnya dengan mendorong peningkatan jumlah tabungan masyarakat (S) yang hanya mungkin dilakukan dengan meningkatkan pendapatan di atas jumlah pengeluaran konsumsinya ( $Y > C$ ) dan peningkatan jumlah tabungan akan dapat terwujud dengan meningkatkan produktifitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.

Jadi pada perekonomian 3 sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal formulasi pendapatan nasional keseimbangan tidak lagi terpenuhi manakala  $S = I$  tetapi harus memenuhi kesamaan (identity)  $S - I = G + Tr - Tx$  yaitu dengan memasukkan unsur-unsur G, Tx dan Tr. Kondisi ini membawa implikasi pada perubahan analisis perekonomian dimana fungsi konsumsi (C) tidak lagi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional tetapi dipengaruhi oleh pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) yang disimbolkan dengan Yd yang ditentukan oleh komponen sebagai berikut :

$$Yd = Y - Tx + Tr$$

Dimana :

Yd = Pendapatan siap dibelanjakan (disposable income)

$Y$  = Pendapatan nasional

$T_x$  = Pajak (Tax)

$T_r$  = Pembayaran transfer (transfer payment)

Besarnya pendapatan disposable ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional, penerimaan pajak dan pembayaran transfer. Formulasi dari fungsi konsumsi dirumuskan sebagai berikut :

$$C = C_o + b Y_d$$

Dimana :

$C$  = Pengeluaran konsumsi

$C_o$  = Konsumsi otonom

$b$  = MPC (marginal propensity to consume)

$Y_d$  = Pendapatan disposable

### **Pajak dan Implikasinya pada Perekonomian**

Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting karena menjadi tumpuan pendapatan negara bagi pembiayaan pembangunan. Ada dua bentuk pajak yang ditarik pemerintah yaitu pajak yang besarnya tetap (lump sum tax) dan pajak yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional (proportional tax). Dalam realitas contoh dari pajak tetap (lump sum tax) adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) yang jumlahnya tetap dari tahun ke tahun. Sedangkan pajak yang sifatnya proporsional adalah pajak penghasilan (PPH) dan pajak penjualan (PPn) yang besarnya tergantung dari besarnya penghasilan dan nilai penjualan artinya semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Fungsi pajak tetap dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$T_x = T_{x_o}$$

Sedangkan fungsi pajak proporsional diformulasikan sebagai berikut :

$$T_x = t.Y$$

Dimana :

$T_x$  = Pajak (Tax)

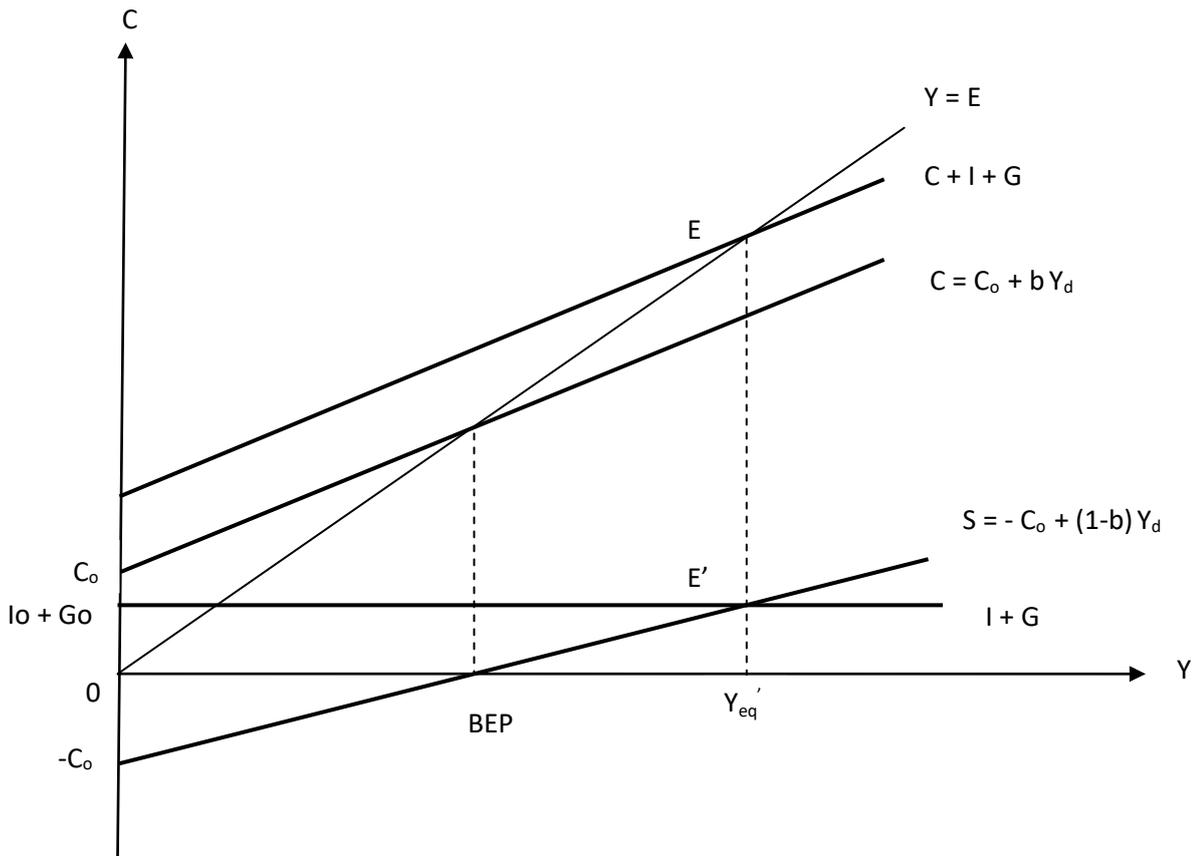
$T_{x_o}$  = Pajak otonom

$t$  = *marginal tax rate (MTR)* = besarnya pertambahan pajak dari setiap pertambahan pendapatan nasional per satu satuan

$Y$  = Pendapatan nasional

Implikasi pajak pada perekonomian dijelaskan melalui pengaruhnya pada pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) artinya jika pajak dinaikkan maka akan menurunkan pendapatan disposable dan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi melalui

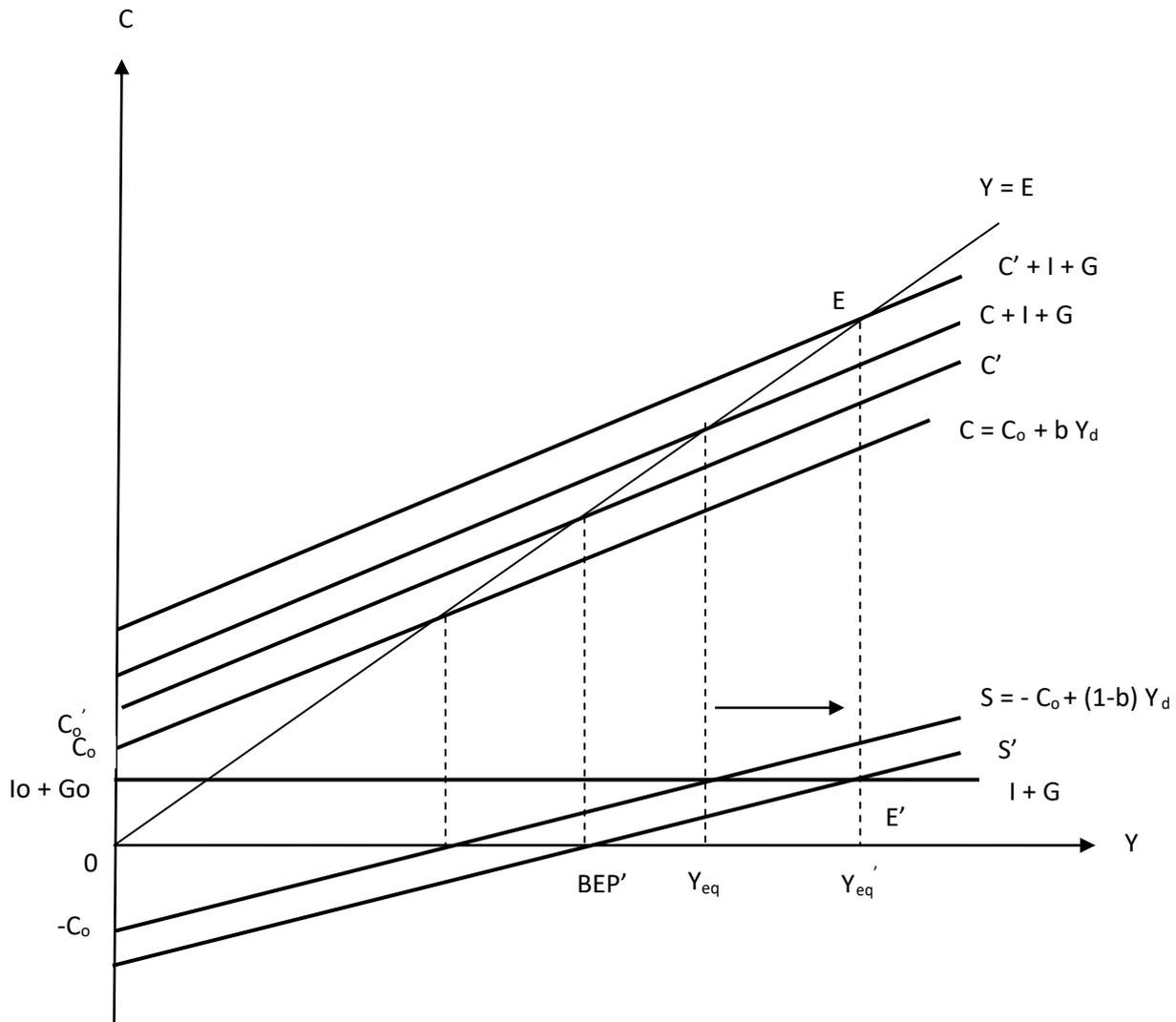
penurunan pengeluaran konsumsi. Sebaliknya jika pajak diturunkan akan menaikkan pendapatan disposable sehingga akan menaikkan pengeluaran konsumsi dan akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga dikatakan kebijakan meningkatkan pajak adalah *kebijakan fiskal kontraktif* karena menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Sedangkan kebijakan menurunkan pajak adalah *kebijakan fiskal ekspansif* karena mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pajak pada perekonomian 3 sektor dijelaskan melalui gambar kurva berikut ini :



Gambar kurva di atas menjelaskan bahwa pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian 3 sektor terjadi manakala besarnya pengeluaran yaitu  $C + I + G$  sama dengan besarnya pendapatan yaitu  $C + Tx + S - Tr$ . Dengan formulasi lain bahwa pendapatan nasional keseimbangan (national income equilibrium) terjadi manakala besarnya surplus sektor swasta yaitu  $(S - I)$  sama dengan besarnya defisit anggaran belanja pemerintah yaitu  $G - Tx + Tr$  artinya besarnya defisit anggaran belanja pemerintah harus ditutup melalui surplus sektor swasta apabila pemerintah tidak ingin misalnya menutup defisit anggaran belanja pemerintah melalui hutang luar negeri.

Kenaikan surplus sektor swasta misalnya kenaikan tabungan, maka harus diimbangi dengan kenaikan defisit anggaran belanja pemerintah agar tetap ada dalam keadaan

keseimbangan. Kondisi ini misalnya ditandai dengan pergeseran ke kanan kurva tabungan (S) akan menyebabkan kenaikan surplus sektor swasta, maka akan diimbangi dengan pergeseran ke kanan dari kurva I + G ke atas agar tetap dalam keadaan keseimbangan sebagaimana dalam gambar kurva berikut :



Contoh kasus misalnya diketahui kondisi perekonomian suatu negara sebagai berikut :

Konsumsi otonom ( $C_0$ )	= Rp. 15 trilyun
Marginal propensity to consume (MPC)	= 0,8
Pengeluaran investasi swasta	= Rp. 9 trilyun
Pengeluaran pemerintah (G)	= Rp. 6 trilyun
Pendapatan pajak (Tx)	= Rp. 3 trilyun
Pembayaran transfer (Tr)	= Rp. 2 trilyun

*Pertanyaan :*

1. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan

2. Tentukan tabungan nasional keseimbangan
3. Tentukan konsumsi keseimbangan
4. Gambarkan dan dijelaskan

*Jawab :*

1. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan dapat diselesaikan dengan menerapkan rumus

*Cara I :*

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - 3 + 2$$

$$Y_d = Y - 1$$

$$C = 15 + 0,8 (Y - 1)$$

$$C = 15 + 0,8 Y - 0,8$$

$$C = 14,2 + 0,8 Y$$

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 14,2 + 0,8 Y + 9 + 6$$

$$Y = 29,2 + 0,8 Y$$

$$Y - 0,8 Y = 29,2$$

$$0,2 Y = 29,2$$

$$Y = 146$$

Jadi pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{\text{equilibrium}}$ ) sebesar Rp. 146 trilyun rupiah

*Cara II :*

$$S - I = G - T_x + T_r$$

$$S = -C_0 + (1 - b) Y_d$$

$$S = -15 + 0,2 Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - 3 + 2$$

$$Y_d = Y - 1$$

$$S = -15 + 0,2 (Y - 1)$$

$$S = -15 + 0,2 Y - 0,2$$

$$S = -15,2 + 0,2 Y$$

$$S - I = G - T_x + T_r$$

$$-15,2 + 0,2 Y - 9 = 6 - 3 + 2$$

$$0,2 Y = 29,2$$

$$Y = 146$$

Jadi pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{\text{equilibrium}}$ ) sebesar Rp. 146 trilyun rupiah

2. Besarnya konsumsi keseimbangan dapat ditentukan sebagai berikut :

*Cara I :*

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$C = 15 + 0,8 Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - 3 + 2$$

$$Y_d = Y - 1$$

$$Y_d = 146 - 1$$

$$Y_d = 145$$

$$C = 15 + 0,8 (145)$$

$$C = 131$$

Jadi konsumsi keseimbangan sebesar Rp. 131 trilyun.

*Cara II :*

Penentuan besarnya konsumsi keseimbangan juga bisa dengan menggunakan formulasi lain yaitu :

$$C = 14,2 + 0,8 Y$$

$$C = 14,2 + 0,8 (146)$$

$$C = 131$$

Jadi dengan menggunakan formulasi lain juga diperoleh nilai yang sama yaitu besarnya konsumsi keseimbangan sebesar Rp. 131 trilyun

3. Besarnya tabungan keseimbangan ditentukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

*Cara I :*

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$S = -C_0 + (1 - b) Y_d$$

$$S = -15 + (1 - 0,8) Y_d$$

$$S = -15 + 0,2 Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - 3 + 2$$

$$Y_d = Y - 1$$

$$Y_d = 146 - 1$$

$$Y_d = 145$$

$$S = -15 + 0,2 Y_d$$

$$S = -15 + 0,2 (145)$$

$$S = -15 + 29$$

$$S = 14$$

Jadi besarnya tabungan keseimbangan sebesar Rp. 14 trilyun

*Cara II :*

$$S = -C_0 + (1 - b) Y_d$$

$$S = -15 + 0,2 Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - 3 + 2$$

$$Y_d = Y - 1$$

$$S = -15 + 0,2 (Y - 1)$$

$$S = -15 + 0,2 Y - 0,2$$

$$S = -15,2 + 0,2 Y$$

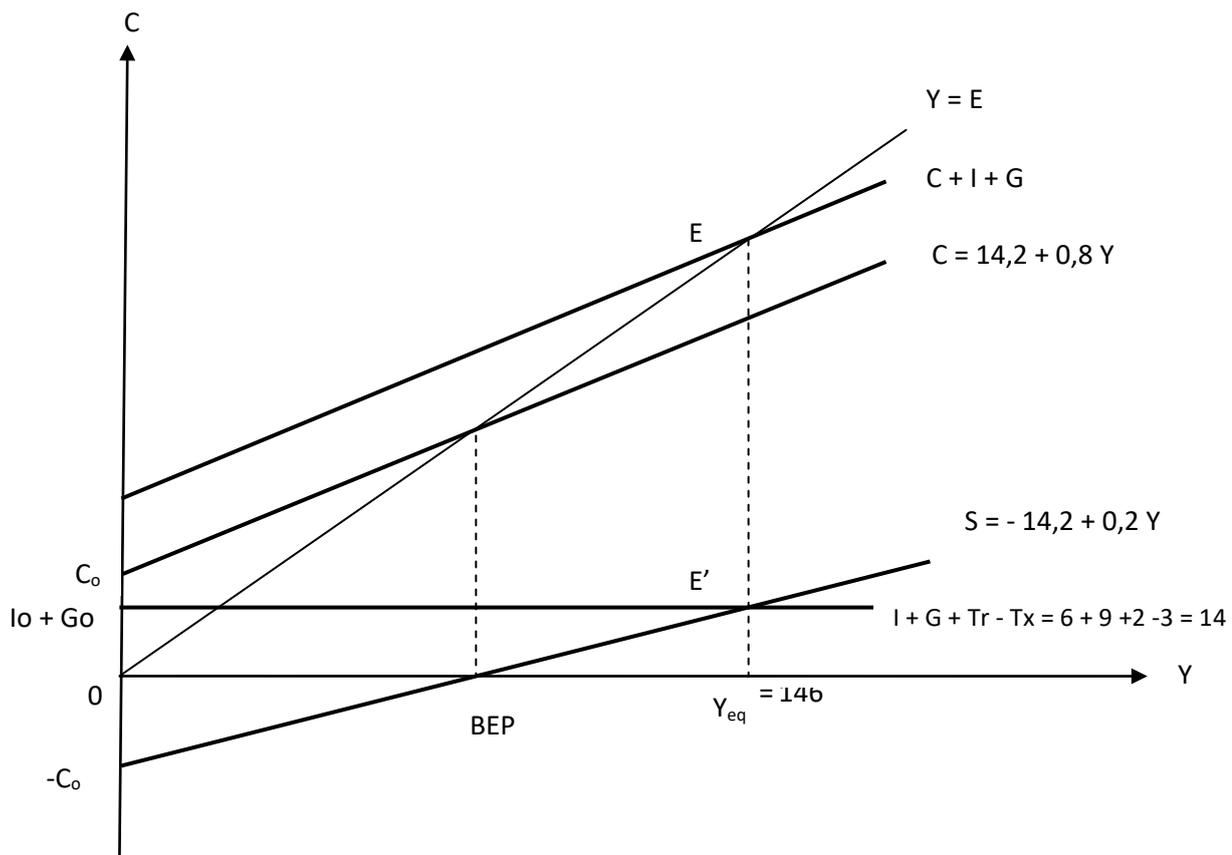
$$S = -15,2 + 0,2 (146)$$

$$S = -15,2 + 29,2$$

$$S = 14$$

Dengan menggunakan cara II diperoleh nilai yang sama yaitu besarnya tabungan keseimbangan sebesar Rp. 14 trilyun.

4. Gambar kurva dari perekonomian tersebut adalah sebagai berikut :



#### **Perekonomian 4 Sektor (Perekonomian Terbuka)**

Aktivitas ekonomi tidak hanya menyangkut lingkup domestik saja tetapi juga berinteraksi dengan pelaku ekonomi dari luar negeri. Banyak konsumen dalam negeri yang menyukai produk-produk dari luar negeri dan sebaliknya banyak produsen luar negeri yang berminat pada produk dari dalam negeri. Produk dalam negeri yang dijual di luar negeri menimbulkan kegiatan ekspor barang dan jasa, sebaliknya produk luar negeri yang dijual di dalam negeri menimbulkan aktivitas impor barang dan jasa.

Ekspor dan impor barang dan jasa merupakan konsekuensi dari kekuatan pasar dalam menghadapi masalah keterbatasan (scarcity). Ketiadaan barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga konsumen dalam negeri mendorong munculnya aktivitas impor dan sebaliknya ketiadaan barang dan jasa di pasar luar negeri mendorong aktivitas ekspor. Formulasi dari kesamaan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana :

X = Ekspor

M = Impor

Secara teoritis ekspor (X) ditentukan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi dunia atau pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang, nilai tukar rupiah (kurs), nilai tukar perdagangan (terms of trade), tingkat bunga, dan harga minyak dunia. Disamping itu ekspor juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi seperti stabilitas politik dunia, kondisi iklim di negara tujuan ekspor, hubungan politik dengan negara mitra dagang, dsb. Namun dalam materi ini diasumsikan bahwa ekspor bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Demikian juga halnya impor (M) secara teoritis dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kurs, tingkat inflasi, dan tingkat bunga. Namun secara empiris impor juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi lainnya seperti stabilitas politik dalam negeri, hubungan dagang, persyaratan produk yang diperdagangkan, dsb. Bagi negara-negara berkembang impor sangat penting untuk mendorong proses pembangunan, karena banyak barang dan jasa yang masih harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunannya. Dalam materi pembahasan ini diasumsikan impor (M) terdiri dari dua macam yaitu impor yang nilainya konstan dan impor yang nilainya ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional. Impor yang nilainya konstan artinya impor yang jumlahnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya disimbolkan dengan

$$M = M_0.$$

Sedangkan impor lainnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional dan disimbolkan dengan :

$$M = m Y$$

Sehingga fungsi impor secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$M = M_0 + m Y$$

Dimana :

M = Jumlah Impor total

M<sub>0</sub> = Jumlah impor

m = Marginal propensity to impor (MPM)

Y = Pendapatan nasional

Untuk menentukan pendapatan nasional keseimbangan, maka harus memenuhi keseimbangan antara sisi pendapatan (income) dan sisi pengeluaran. Dari sisi pendapatan dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dari sisi pendapatan dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$E = C + S + T_x - T_r$$

Sehingga dapat diperoleh rumusan sebagai berikut :

$$Y = E$$

$$C + I + G + (X - M) = C + S + T_x - T_r$$

$$I + G + X - M = S + T_x - T_r$$

$$I + G + X = S + T_x - T_r + M$$

Sebagai ilustrasi untuk menentukan pendapatan nasional keseimbangan misalnya data suatu perekonomian sebagai berikut :

Konsumsi otonom (C<sub>0</sub>) = Rp. 25 Trilyun

Marginal propensity to consume (MPC) = 0,7

Investasi perusahaan (I) = Rp. 12 trilyun

Pengeluaran pemerintah (G) = Rp. 6 trilyun

Ekspor (X) = Rp. 3 trilyun

Impor (M) = 2 + 0,04 Y

Pajak (T<sub>x</sub>) = 4 + 0,15 Y

Subsidi (T<sub>r</sub>) = Rp. 5 trilyun

*Pertanyaan :*

1. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan
2. Tentukan konsumsi keseimbangan

3. Tentukan pajak keseimbangan

Jawab :

1. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan digunakan formulasi persamaan sebagai berikut :

*Cara I :*

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (4 + 0,15 Y) + 5$$

$$Y_d = Y - 4 - 0,15 Y + 5$$

$$Y_d = 1 + 0,85 Y$$

$$C = C_0 + 0,7 Y_d$$

$$C = 25 + 0,7 (1 + 0,85 Y)$$

$$C = 25 + 0,7 + 0,595 Y$$

$$C = 25,7 + 0,595 Y$$

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = 25,7 + 0,595 Y + 12 + 6 + 3 - (2 + 0,04 Y)$$

$$Y = 25,7 + 0,595 Y + 12 + 6 + 3 - 2 - 0,04 Y$$

$$Y = 44,7 + 0,555 Y$$

$$Y - 0,555 Y = 44,7$$

$$0,445 Y = 44,7$$

$$Y = 100,449$$

Jadi pendapatan nasional keseimbangan sebesar Rp. 100.449 trilyun

*Cara II :*

$$I + G + X = S + T_x - T_r + M$$

$$S = Y_d - C$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (4 + 0,15 Y) + 5$$

$$Y_d = Y - 4 - 0,15 Y + 5$$

$$Y_d = 0,85 Y + 1$$

$$S = Y_d - C$$

$$C = 25,7 + 0,595 Y$$

$$S = 0,85 Y + 1 - (25,7 + 0,595 Y)$$

$$S = 0,85 Y + 1 - 25,7 - 0,595 Y$$

$$S = -24,7 + 0,255 Y$$

$$I + G + X = S + T_x - T_r + M$$

$$12 + 6 + 3 = -24,7 + 0,255 Y + 4 + 0,15 Y - 5 + 2 + 0,04 Y$$

$$21 = -23,7 + 0,445 Y$$

$$0,445 Y = 44,7$$

$$Y = 100,449$$

Jadi pendapatan nasional keseimbangan sebesar Rp. 100.449 trilyun

2. Menentukan konsumsi keseimbangan diperoleh melalui langkah sebagai berikut :

*Cara I :*

$$C = C_o + b Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (4 + 0,15 Y) + 5$$

$$Y_d = Y - 4 - 0,15 Y + 5$$

$$Y_d = 1 + 0,85 Y$$

$$C = C_o + 0,7 Y_d$$

$$C = 25 + 0,7 (1 + 0,85 Y)$$

$$C = 25 + 0,7 + 0,595 Y$$

$$C = 25,7 + 0,595 Y$$

$$C = 25,7 + 0,595 (100,449)$$

$$C = 85,467$$

Jadi besarnya konsumsi keseimbangan sebesar Rp. 85,467 trilyun

*Cara II :*

$$C = C_o + b Y_d$$

$$C = 25 + 0,7 Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (4 + 0,15 Y) + 5$$

$$Y_d = Y - 4 - 0,15 Y + 5$$

$$Y_d = 1 + 0,85 Y$$

$$Y_d = 1 + 0,85 (100,449)$$

$$Y_d = 1 + 85,381$$

$$Y_d = 86,381$$

$$C = 25 + 0,7 Y_d$$

$$C = 25 + 0,7 (86,381)$$

$$C = 25 + 60,467$$

$$C = 85,467$$

Jadi besarnya konsumsi keseimbangan sebesar Rp. 85,467 trilyun

3. Menentukan tabungan keseimbangan dapat diperoleh dengan langkah sebagai berikut :

*Cara I :*

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$S = -C_0 + (1-b) Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (4 + 0,15 Y) + 5$$

$$Y_d = Y - 4 - 0,15 Y + 5$$

$$Y_d = 1 + 0,85 Y$$

$$Y_d = 1 + 0,85 (100,449)$$

$$Y_d = 1 + 85,381$$

$$Y_d = 86,381$$

$$S = -25 + 0,3 Y_d$$

$$S = -25 + 0,3 (86,381)$$

$$C = 0,9143$$

Jadi besarnya tabungan keseimbangan sebesar Rp. 0,9144 trilyun

*Cara II :*

$$S = -C_0 + (1 - b) Y_d$$

$$S = -25 + 0,3 Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (4 + 0,15 Y) + 5$$

$$Y_d = Y - 4 - 0,15 Y + 5$$

$$Y_d = 1 + 0,85 Y$$

$$S = -25 + 0,3 (1 + 0,85Y)$$

$$S = -25 + 0,3 + 0,255 Y$$

$$S = -24,7 + 0,255 Y$$

$$S = -24,7 + 0,255 (100,449)$$

$$S = -24,7 + 17,076$$

$$S = 0,9144$$

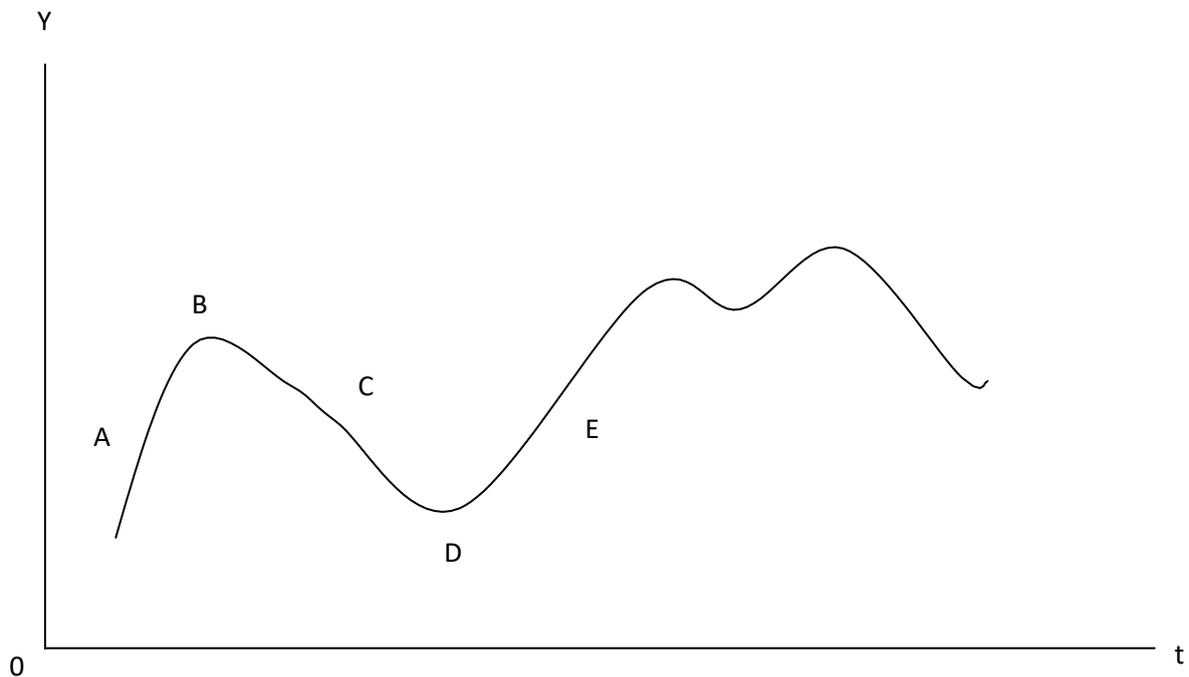
Dengan menggunakan cara II diperoleh nilai yang sama yaitu besarnya tabungan keseimbangan sebesar Rp. 0,9144 trilyun.

## BAB XII

### ANGKA PENGGANDA (*MULTIPLIER*) DAN ANALISIS GAP

#### 12.1. Kesenjangan (*Gap*) Ekonomi dan Siklus Ekonomi

Perekonomian bergerak sebagai akibat dari interaksi kepentingan diantara pelaku-pelaku dalam perekonomian yang masing-masing didorong oleh motif-motif ekonomi tertentu. Sebagai akibat dari interaksi kepentingan di antara pelaku-pelaku ekonomi, maka perekonomian mengalami siklus dan dinamika perkembangan yang adakalanya meningkat dan adakalanya menurun. Siklus ekonomi meningkat manakala kegiatan produksi dan distribusi berjalan mengikuti mekanisme pasar dan dapat memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi secara efisien. Namun sebaliknya siklus ekonomi juga bisa mengalami penurunan jika terjadi distorsi ekonomi dan inefisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya ekonomi yang ada. Gambar kurva berikut menjelaskan fenomena perkembangan siklus ekonomi dari waktu ke waktu :



Gambar di atas mengungkapkan dinamika ekonomi yang seringkali dihadapi suatu perekonomian sebagai resultante antara aspek penawaran agregat (*aggregate supply*) dan permintaan agregat (*aggregate demand*). Penawaran agregat mencerminkan kemampuan dunia usaha dalam memanfaatkan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa yang ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya ekonominya disamping juga dipengaruhi

oleh SDM dalam pengelolaan SDA (managerial skill). Sedangkan permintaan agregat menunjukkan kontribusi ekonomi seluruh pelaku ekonomi baik rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah dan sektor luar negeri dalam perekonomian.

Pada bagian kurva A menunjukkan kondisi dimana perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif (growth) sampai kemudian mencapai pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Kondisi ini terjadi manakala pelaku ekonomi swasta dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal dan ditunjang dengan aspek kelembagaan dan peran birokrasi yang memberikan iklim investasi dan ekonomi yang positif sehingga perekonomian bisa berjalan secara efisien dan produktif.

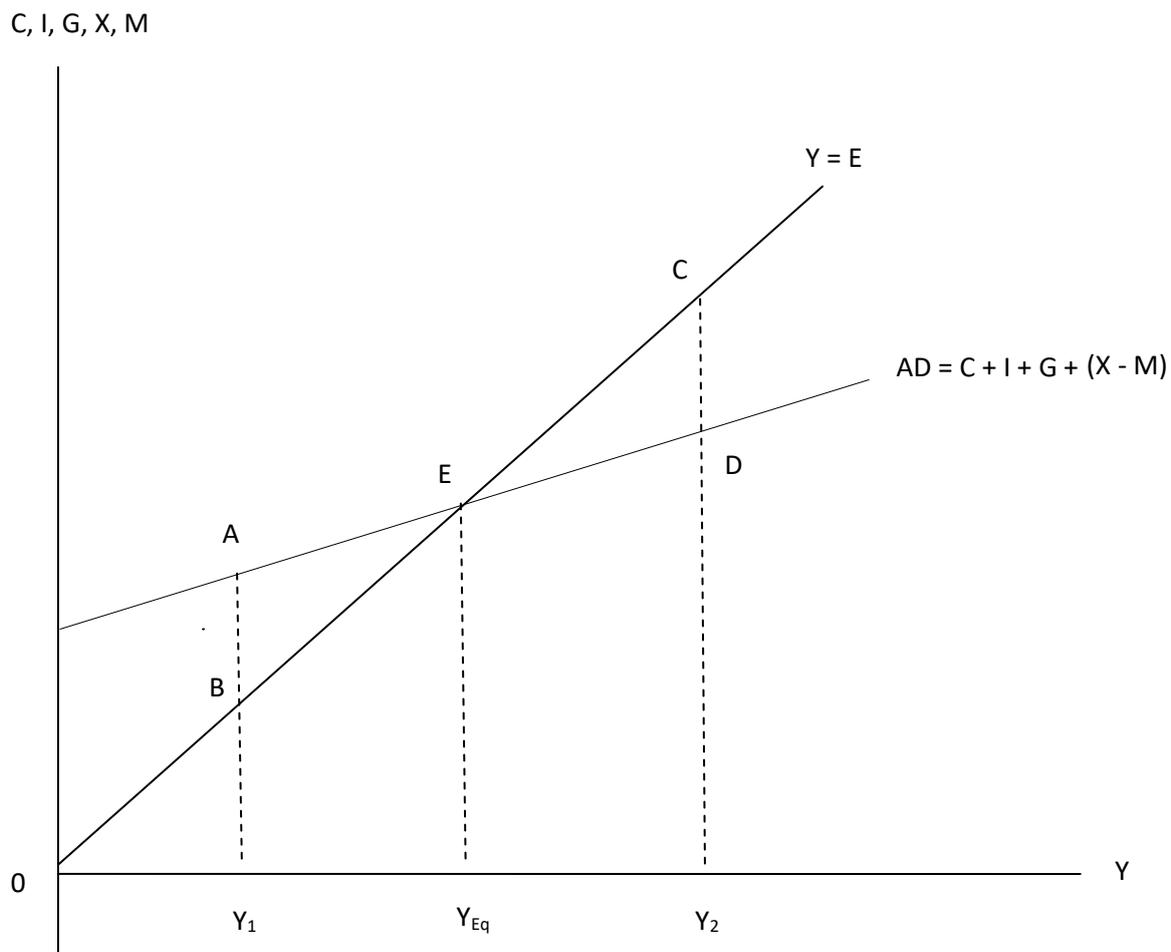
Namun secara perlahan perekonomian mengalami stagnasi dan resesi yaitu pada segmen C yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan pemanfaatan kapasitas ekonomi dan banyak pengangguran. Kondisi resesi ekonomi yang cukup dalam dan berlangsung agak lama disebut dengan depresi (depression) ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif, sektor-sektor ekonomi banyak yang tutup dan pengangguran merajalela. Situasi ekonomi dimana banyak pengangguran (stagnasi) dan diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi disebut dengan stagflasi. Dalam situasi yang sulit ini dibutuhkan kesadaran kolektif dari dunia usaha dan birokrat untuk terus melakukan langkah-langkah efisiensi disamping berusaha mencari peluang-peluang ekonomi baru agar perekonomian kembali bangkit.

## **12.2. Kesenjangan Deflasi dan Kesenjangan Inflasi**

Penawaran barang dan jasa menunjukkan kemampuan suatu perekonomian dalam menggunakan kapasitas produksinya. Jika suatu perekonomian mampu memanfaatkan semua kapasitas ekonomi secara optimal untuk menghasilkan barang dan jasa, maka dikatakan perekonomian tersebut mencapai suatu kesempatan produksi yang penuh (full employment). Jika perekonomian tidak mampu memanfaatkan kapasitas produksinya secara penuh maka dikatakan mengalami under employment.

Pada sisi lain perekonomian mengalami kondisi keseimbangan (equilibrium) jika adanya kesamaan antara sisi permintaan agregat dengan penawaran agregat. Permintaan agregat ditentukan oleh komponen pembentuknya yaitu  $C + I + G + (X - M)$ . Kondisi perekonomian mungkin tidak mengalami keseimbangan yaitu sisi penawaran agregat tidak sama dengan sisi permintaan agregat. Kondisi perekonomian yang ideal yaitu manakala perekonomian mengalami keseimbangan dalam pengerjaan penuh (full employment) meskipun kondisi ini sangat sulit diwujudkan. Kondisi yang seringkali dihadapi perekonomian yaitu ketidakseimbangan ekonomi antara kondisi keseimbangan ekonomi

(*equilibrium*) dengan kondisi pengerjaan penuh kapasitas ekonomi (*full employment income*). Jika kondisi keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) lebih besar dari pada full employment, maka dikatakan perekonomian menghadapi masalah **gap inflasi (inflationary gap)**. Dan sebaliknya jika kondisi keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) lebih kecil dari pada full employment income, maka dikatakan perekonomian mengalami **gap deflasi (deflationary gap)**. Gambaran tentang kondisi perekonomian sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada gambar kurva berikut :



Gambar di atas menjelaskan pendapatan nasional keseimbangan terjadi di titik E (*equilibrium*) dimana aggregate demand sama dengan pemanfaatan kapasitas produksi secara optimal. Jika pendapatan nasional keseimbangan turun menjadi  $Y_1$ , maka terjadi ketidakseimbangan antara permintaan agregate dengan penawaran agregate. Besarnya permintaan agregat sebesar  $Y_1-A$  sedangkan penawaran agregate sebesar  $Y_1-B$ , jadi terjadi kesenjangan inflasi (*inflationary gap*) sebesar  $A-B$  karena permintaan agregate lebih besar daripada penawaran agregate. Keadaan ini menyebabkan timbulnya kelangkaan barang di masyarakat sehingga harga-harga barang akan meningkat (*inflasi*). Kondisi ini akan

mendorong dunia usaha untuk meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang cukup tinggi sehingga pendapatan nasional keseimbangan akan terdorong meningkat menuju titik E dimana  $Y_{Eq} = Y_{FE}$ .

Sebaliknya pada saat pendapatan nasional keseimbangan sebesar  $Y_2$ , maka terjadi ketidakseimbangan antara permintaan agregate dengan penawaran agregate. Besarnya permintaan agregate sebesar  $Y_2 - D$  sedangkan penawaran agregate sebesar  $Y_2 - C$  sehingga menimbulkan permasalahan gap deflasi (deflationary gap) sebesar  $C - D$  yang menyebabkan harga-harga barang mengalami penurunan (deflasi). Kondisi ekonomi mendorong permintaan agregate meningkat sehingga akan tercapai keseimbangan pasar yang baru di titik C dimana kapasitas produksi nasional terpenuhi semua (full employment) sehingga akan tercapai keadaan  $Y_{Eq} = Y_{FE}$ .

### **Multiplier dan Analisis Gap Ekonomi**

Untuk mengatasi permasalahan gap inflasi dan gap deflasi memerlukan kerjasama antara pelaku ekonomi di dunia usaha, masyarakat dan pemerintah untuk memahami permasalahan yang ada dan mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat mengatasi masalah secara baik. Sebagai contoh misalnya perekonomian menghadapi persoalan gap inflasi, maka kontribusi rumah tangga konsumen yaitu dengan mengurangi belanja barang dan mengalihkan anggarannya untuk kepentingan yang esensial dan kemudian uangnya ditabung jika ada kelebihan. Kontribusi dunia usaha dengan terus melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi produksi untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan kualitas yang semakin baik dan jumlah yang mencukupi permintaan pasar. Kontribusi pemerintah dengan merumuskan kebijakan ekonomi dan meningkatkan efisiensi serta kebijakan ekspansif baik dibidang anggaran (kebijakan fiskal) dengan mengalokasikan dana untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang potensial dan sekaligus juga mengurangi beban anggaran yang kurang penting untuk lebih dialokasikan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat luas.

#### *Analisis Gap Ekonomi pada Perekonomian 2 Sektor*

Untuk lebih menjelaskan bagaimana aplikasi ekonomi dalam menyelesaikan permasalahan gap ekonomi tersebut, maka dapat diungkapkan dalam suatu contoh pada perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana sebagai berikut :

Konsumsi otonom	= Rp 7 trilyun
Marginal propensity to consume	= 0,65
Investasi	= Rp. 4 trilyun
Y full employment	= Rp. 10 trilyun

*Pertanyaan :*

1. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) !
2. Kesenjangan ekonomi apa yang terjadi ?
3. Dan berapa besarnya kesenjangan tersebut ?
4. Bagaimana mengatasi kesenjangan tersebut ?
5. Gambarkan dan jelaskan !

*Jawab :*

1. Pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian 2 sektor dapat ditentukan sebagai berikut :

$$Y = C + I$$

$$C = C_0 + b Y$$

$$C = 4 + 0,65 Y$$

$$Y = 4 + 0,65 Y + 4$$

$$Y = 8 + 0,65 Y$$

$$Y - 0,65 Y = 8$$

$$0,35 Y = 4$$

$$Y = 11,428$$

Jadi pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 11,428 trilyun

2. Karena pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 11,428 trilyun > pendapatan full employment sebesar ( $Y_{FE}$ ) sebesar Rp. 10 trilyun, maka perekonomian mengalami masalah gap inflasi (inflationary gap).
3. Besarnya gap inflasi (inflationary gap) dapat ditentukan sebagai berikut :

$$C + I = AD = 8 + 0,65 Y$$

$$C + I = AD = 8 + 0,65 (10)$$

$$C + I = AD = 14,5$$

Jadi besarnya gap inflasi (inflationary gap) sebesar  $14,5 - 10 = 4,5$

4. Mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 4,5 trilyun dengan mengurangi tensi ekonomi melalui alternatif kebijakan mengurangi investasi sebagai berikut :

$$\text{Multiplier investasi} = k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{(1-b)} = \frac{1}{1-0,65} = \frac{1}{0,35} = 2,85$$

$$\Delta Y = 11,428 - 10 = 1,428$$

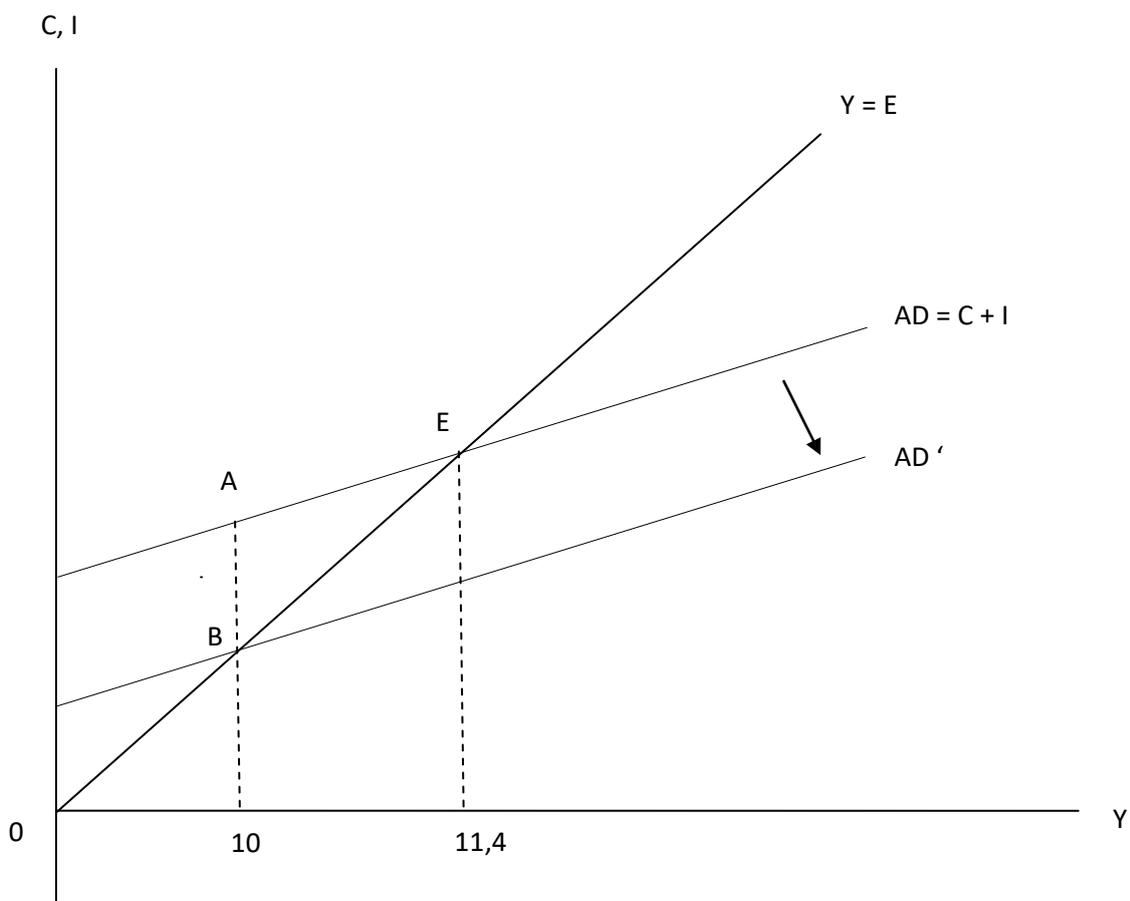
Sehingga besarnya investasi yang harus dikurangi sebesar :

$$k_I = \frac{1,428}{\Delta I} = 2,85$$

$$\Delta I = \frac{1,428}{2,85} = 0,5$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 4,5 triliun dapat dilakukan dengan mengurangi investasi sebesar Rp. 0,5 triliun.

5. Gambar kurva dari permasalahan gap inflasi dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebagai berikut :



#### *Analisis Gap Ekonomi pada Perekonomian 3 Sektor*

Misalnya diketahui kondisi perekonomian 3 Sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal sebagai berikut :

Konsumsi otonom	= Rp 12 triliun
Marginal propensity to consume	= 0,72
Investasi	= Rp. 5 triliun
Belanja pemerintah	= Rp. 3 triliun
Pajak	= 2 + 0,15 Y

Subsidi = Rp. 3,5 trilyun

Y full employment = Rp. 60 trilyun

*Pertanyaan :*

1. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) !
2. Kesenjangan ekonomi apa yang terjadi ? Dan berapa besarnya kesenjangan tersebut ?
3. Bagaimana mengatasi kesenjangan tersebut ?
4. Gambarkan dan jelaskan !

*Jawab :*

1. Pendapatan nasional keseimbangan dapat ditentukan dengan merumuskan formulasi sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$= Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (2 + 0,15 Y) + 3,5$$

$$Y_d = Y - 2 - 0,15 Y + 3,5$$

$$Y_d = 0,85 Y + 1,5$$

$$C = 12 + 0,7 (1,5 + 0,85 Y)$$

$$C = 12 + 1,05 + 0,595 Y$$

$$C = 13,05 + 0,595 Y$$

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 13,05 + 0,595 Y + 5 + 3$$

$$Y = 21,05 + 0,595 Y$$

$$Y - 0,595 Y = 21,05$$

$$0,405 Y = 21,05$$

$$Y = 51,98$$

Jadi besarnya pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 51,98 trilyun

2. Karena pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 51,98 trilyun < pendapatan full employment sebesar ( $Y_{FE}$ ) sebesar Rp. 60 trilyun, maka perekonomian mengalami masalah gap deflasi (deflationary gap).
3. Besarnya gap deflasi (deflationary gap) dapat ditentukan sebagai berikut :

$$C + I + G = AD = 21,05 + 0,595 Y$$

$$C + I + G = AD = 21,05 + 0,595 (60)$$

$$C + I + G = AD = 21,05 + 35,7 = 56,75$$

Jadi besarnya gap deflasi (deflationary gap) sebesar  $60 - 56,75 = \text{Rp. } 3,25$  trilyun

4. Mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dengan menaikkan tensi ekonomi melalui alternatif kebijakan :

- a. Menaikkan investasi
- b. Mengurangi pajak
- c. Menaikkan belanja pemerintah
- d. Menambah subsidi

(a) Mengatasi gap deflasi dengan menaikkan investasi sebagai berikut :

$$\text{Multiplier investasi} = k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{(1-b+b.t)} = \frac{1}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)} = \frac{1}{0,388} = 2,57$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya investasi yang harus ditambah sebesar :

$$k_I = \frac{8,02}{\Delta I} = 2,57$$
$$\Delta I = \frac{8,02}{2,57} = 3,12$$

Jadi untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menaikkan investasi sebesar Rp. 3,12 trilyun.

(b) Mengatasi gap deflasi dengan menurunkan pajak sebagai berikut :

$$\text{Multiplier pajak} = k_{Tx} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tx} = \frac{-b}{(1-b+b.t)} = \frac{-0,72}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)} = \frac{-0,72}{0,388} = -1,85$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya pajak yang harus dikurangi sebesar :

$$k_{Tx} = \frac{8,02}{\Delta Tx} = -1,85$$
$$\Delta Tx = \frac{8,02}{-1,85} = -4,33$$

Jadi untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menurunkan pajak sebesar Rp. 4,33 trilyun.

(c) Mengatasi gap deflasi dengan menaikkan belanja pemerintah sebagai berikut :

Multiplier belanja pemerintah :

$$k_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1-b+b.t)} = \frac{1}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)} = \frac{1}{0,388} = 2,57$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya belanja pemerintah yang harus ditambah sebesar :

$$k_G = \frac{8,02}{\Delta G} = 2,57$$

$$\Delta G = \frac{8,02}{2,57} = 3,12$$

Jadi untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menaikkan belanja pemerintah sebesar Rp. 3,12 trilyun.

(d) Mengatasi gap deflasi dengan menaikkan subsidi sebagai berikut :

$$\text{Multiplier subsidi : } k_{Tr} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tr} = \frac{b}{(1-b+b.t)} = \frac{0,72}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)} = \frac{0,72}{0,388} = 1,85$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

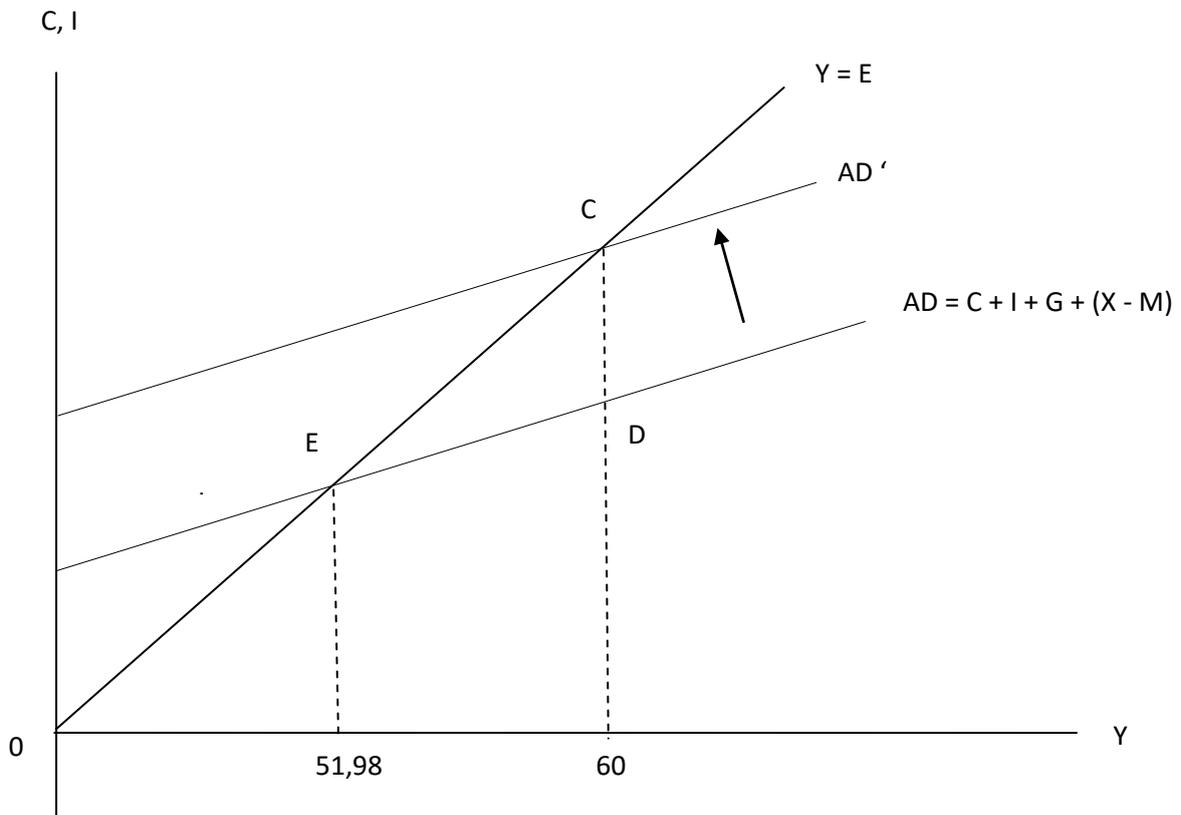
Sehingga besarnya subsidi yang harus ditambah sebesar :

$$k_{Tr} = \frac{8,02}{\Delta Tr} = 1,85$$

$$\Delta Tr = \frac{8,02}{1,85} = 4,33$$

Jadi untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menaikkan subsidi sebesar Rp. 4,33 trilyun.

5. Gambar kurva dari permasalahan gap inflasi dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebagai berikut :



### *Analisis Gap Ekonomi pada Perekonomian 4 Sektor*

Misalnya diketahui kondisi perekonomian 4 Sektor atau perekonomian terbuka sebagai berikut :

Konsumsi otonom	= Rp 12 trilyun
Marginal propensity to consume	= 0,72
Investasi	= Rp. 5 trilyun
Belanja pemerintah	= Rp. 3 trilyun
Pajak	= 2 + 0,15 Y
Subsidi	= Rp. 4 trilyun
Ekspor	= Rp. 6 trilyun
Impor	= 5 + 0,03 Y
Y full employment	= Rp. 50 trilyun

*Pertanyaan :*

1. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) !
2. Kesenjangan ekonomi apa yang terjadi ?
3. Dan berapa besarnya kesenjangan tersebut ?
4. Bagaimana mengatasi kesenjangan tersebut ?
5. Gambarkan dan jelaskan !

*Jawab :*

1. Pendapatan nasional keseimbangan dapat ditentukan dengan merumuskan formulasi sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$= Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (2 + 0,15 Y) + 4$$

$$Y_d = Y - 3 - 0,15 Y + 4$$

$$Y_d = 0,85 Y + 1$$

$$C = 12 + 0,72 (1 + 0,85 Y)$$

$$C = 12 + 0,72 + 0,612 Y$$

$$C = 12,72 + 0,612 Y$$

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = 12,72 + 0,612 Y + 5 + 3 + [6 - (5 + 0,03 Y)]$$

$$Y = 12,72 + 0,612 Y + 8 + (6 - 5 - 0,03 Y)$$

$$Y = 12,72 + 0,612 Y + 8 + 1 - 0,03 Y$$

$$Y = 21,72 + 0,609 Y$$

$$Y - 0,609 Y = 21,72$$

$$0,391 Y = 21,72$$

$$Y = 55,55$$

Jadi pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 55,55 trilyun

2. Karena pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 55,55 trilyun > pendapatan full employment sebesar ( $Y_{FE}$ ) sebesar Rp. 50 trilyun, maka perekonomian mengalami masalah gap inflasi (inflationary gap).

3. Besarnya gap inflasi (inflationary gap) dapat ditentukan sebagai berikut :

$$C + I + G + (X - M) = AD = 21,72 + 0,609 Y$$

$$C + I + G + (X - M) = AD = 21,72 + 0,609 (50)$$

$$C + I + G + (X - M) = AD = 21,72 + 30,45 = 52,17$$

Jadi besarnya gap inflasi (inflationary gap) sebesar  $52,17 - 50 = \text{Rp. } 2,17$  trilyun

4. Mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 2,17 trilyun dengan menurunkan tensi ekonomi melalui alternatif kebijakan :

- a. Menurunkan investasi
- b. Meningkatkan pajak
- c. Menurunkan belanja negara
- d. Mengurangi subsidi

- (a) Mengatasi gap inflasi dengan menurunkan investasi sebagai berikut :

Multiplier investasi =

$$k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{(1 - b + b.t + m)} = \frac{1}{1 - 0,72 + (0,72 \times 0,15) + 0,03} = \frac{1}{0,418} = 2,39$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya investasi yang harus dikurangi sebesar :

$$k_I = \frac{8,02}{\Delta I} = 2,39$$

$$\Delta I = \frac{8,02}{2,39} = 3,35$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menurunkan investasi sebesar Rp. 3,35 trilyun.

- (b) Mengatasi gap inflasi dengan menaikkan pajak sebagai berikut :

Multiplier pajak =

$$k_{Tx} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tx} = \frac{-b}{(1-b+b.t+m)} = \frac{-0,72}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)+0,03} = \frac{-0,72}{0,418} = 1,722$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya investasi yang harus dikurangi sebesar :

$$k_i = \frac{8,02}{\Delta I} = 1,722$$

$$\Delta I = \frac{8,02}{1,722} = 4,65$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menaikkan pajak sebesar Rp. 4,65 trilyun.

(c) Mengatasi gap inflasi dengan menurunkan belanja negara sebagai berikut :

Multiplier belanja negara =

$$k_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1-b+b.t+m)} = \frac{1}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)+0,03} = \frac{1}{0,418} = 2,39$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya belanja negara yang harus dikurangi sebesar :

$$k_G = \frac{8,02}{\Delta G} = 2,39$$

$$\Delta G = \frac{8,02}{2,39} = 3,35$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan mengurangi belanja negara sebesar Rp. 3,35 trilyun.

(d) Mengatasi gap inflasi dengan mengurangi subsidi sebagai berikut :

Multiplier subsidi =

$$k_{Tr} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tr} = \frac{b}{(1-b+b.t+m)} = \frac{0,72}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)+0,03} = \frac{0,721}{0,418} = 1,72$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

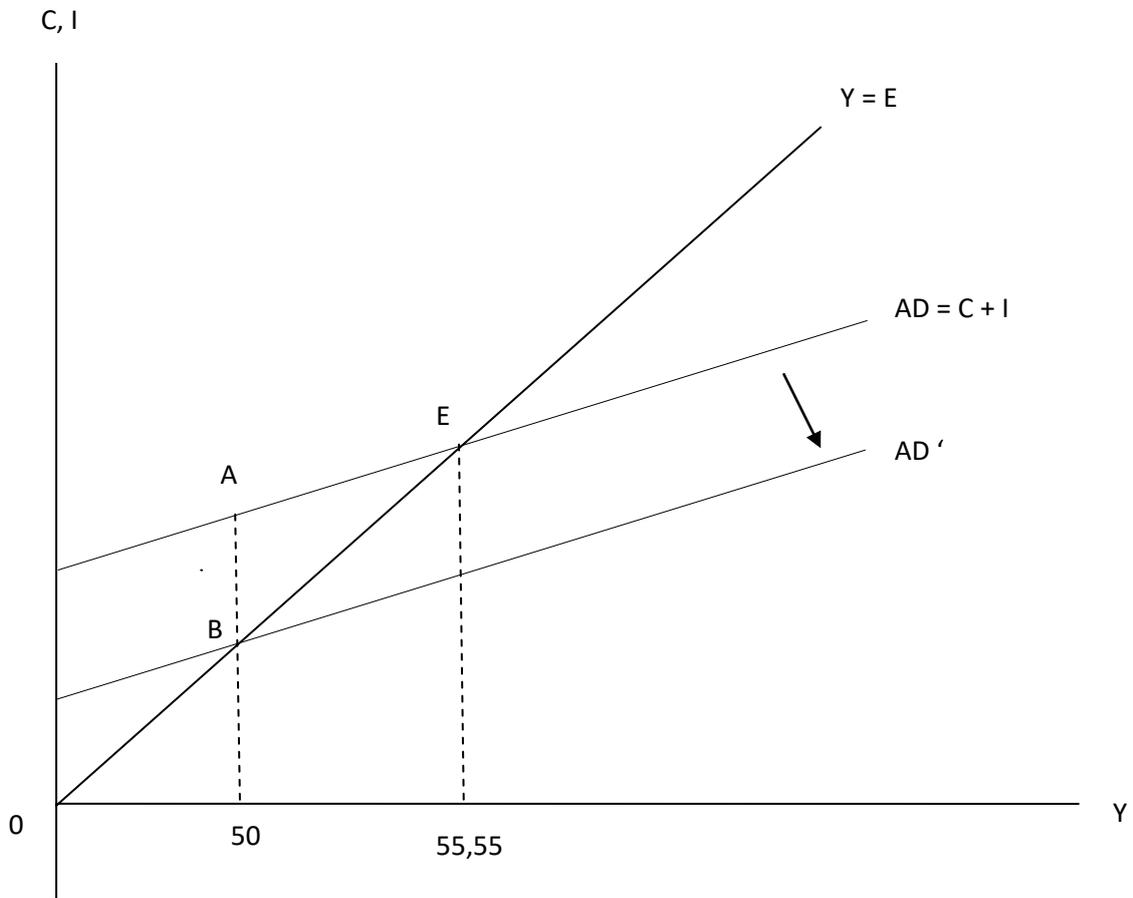
Sehingga besarnya subsidi yang harus dikurangi sebesar :

$$k_{Tr} = \frac{8,02}{\Delta Tr} = 1,72$$

$$\Delta Tr = \frac{8,02}{1,72} = 4,66$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menurunkan subsidi sebesar Rp. 4,66 trilyun.

5. Gambar kurva dari permasalahan gap inflasi dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebagai berikut :

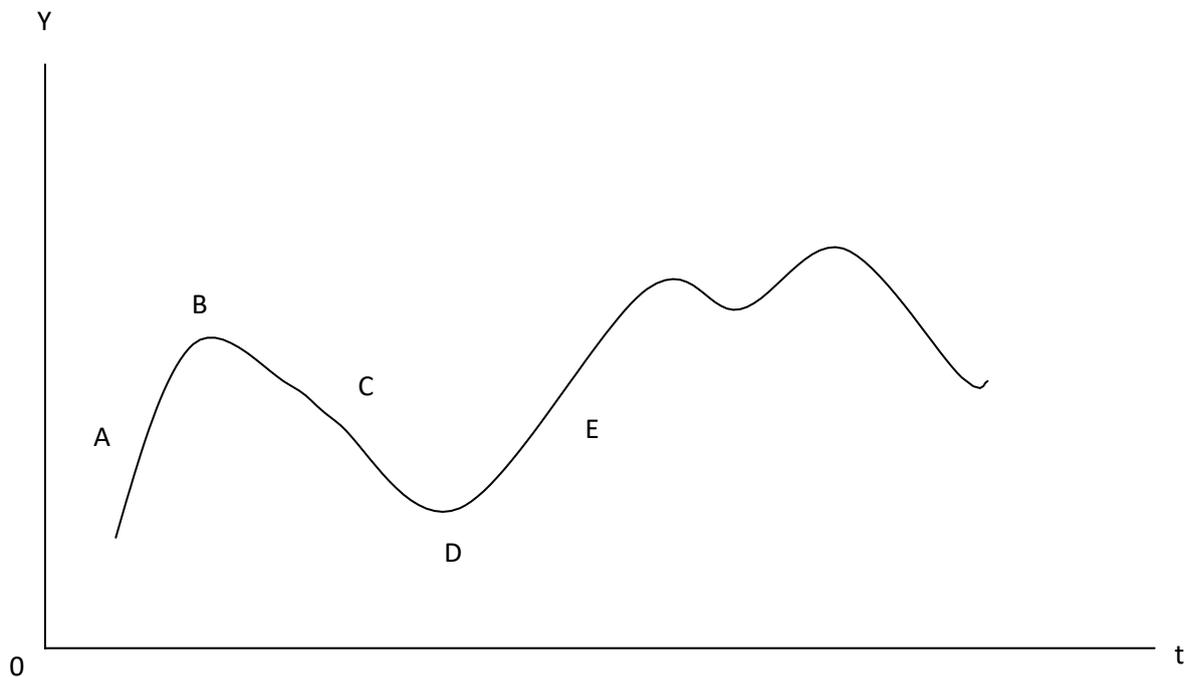


## BAB XII

### ANGKA PENGGANDA (*MULTIPLIER*) DAN ANALISIS GAP

#### 12.1. Kesenjangan (*Gap*) Ekonomi dan Siklus Ekonomi

Perekonomian bergerak sebagai akibat dari interaksi kepentingan diantara pelaku-pelaku dalam perekonomian yang masing-masing didorong oleh motif-motif ekonomi tertentu. Sebagai akibat dari interaksi kepentingan di antara pelaku-pelaku ekonomi, maka perekonomian mengalami siklus dan dinamika perkembangan yang adakalanya meningkat dan adakalanya menurun. Siklus ekonomi meningkat manakala kegiatan produksi dan distribusi berjalan mengikuti mekanisme pasar dan dapat memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi secara efisien. Namun sebaliknya siklus ekonomi juga bisa mengalami penurunan jika terjadi distorsi ekonomi dan inefisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya ekonomi yang ada. Gambar kurva berikut menjelaskan fenomena perkembangan siklus ekonomi dari waktu ke waktu :



Gambar di atas mengungkapkan dinamika ekonomi yang seringkali dihadapi suatu perekonomian sebagai resultante antara aspek penawaran agregat (*aggregate supply*) dan permintaan agregat (*aggregate demand*). Penawaran agregat mencerminkan kemampuan dunia usaha dalam memanfaatkan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa yang ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya ekonominya disamping juga dipengaruhi

oleh SDM dalam pengelolaan SDA (managerial skill). Sedangkan permintaan agregat menunjukkan kontribusi ekonomi seluruh pelaku ekonomi baik rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah dan sektor luar negeri dalam perekonomian.

Pada bagian kurva A menunjukkan kondisi dimana perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif (growth) sampai kemudian mencapai pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Kondisi ini terjadi manakala pelaku ekonomi swasta dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal dan ditunjang dengan aspek kelembagaan dan peran birokrasi yang memberikan iklim investasi dan ekonomi yang positif sehingga perekonomian bisa berjalan secara efisien dan produktif.

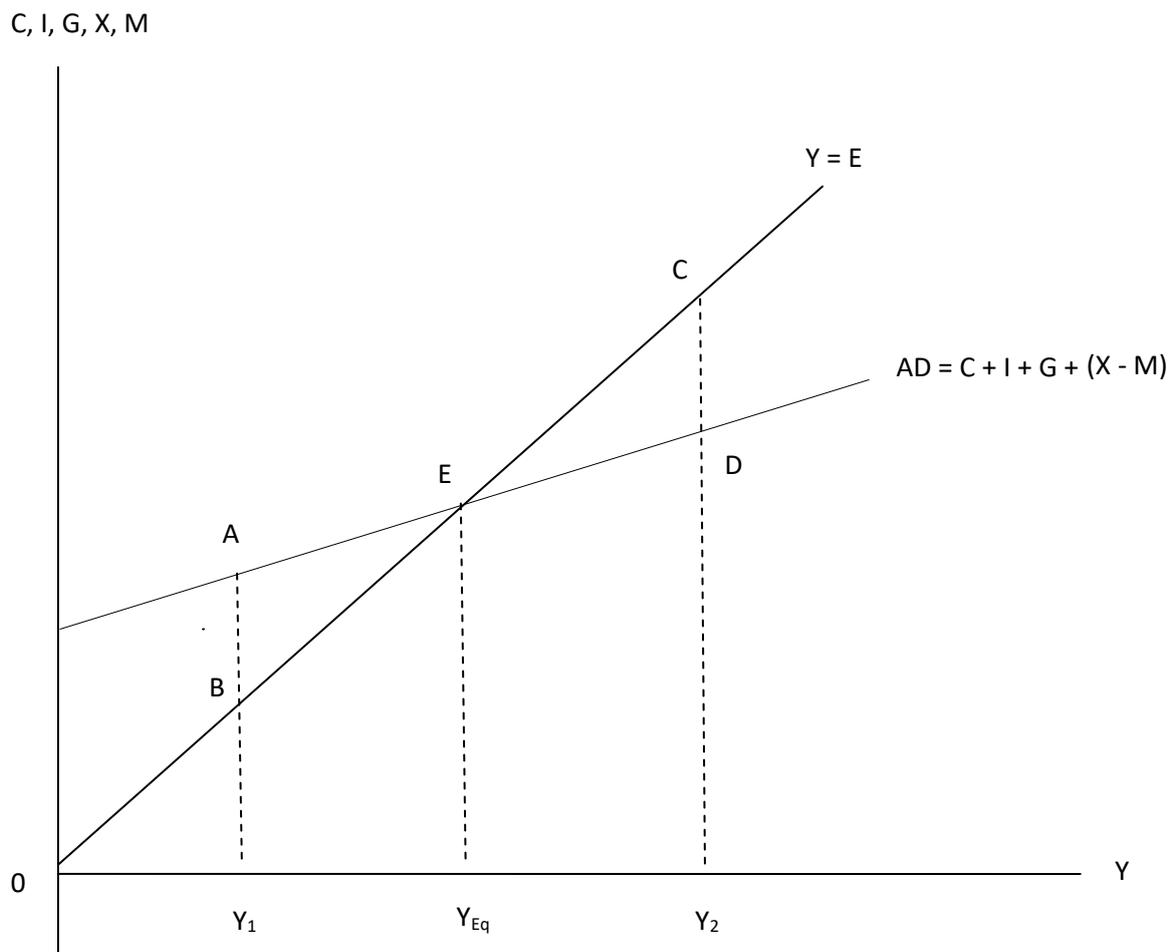
Namun secara perlahan perekonomian mengalami stagnasi dan resesi yaitu pada segmen C yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan pemanfaatan kapasitas ekonomi dan banyak pengangguran. Kondisi resesi ekonomi yang cukup dalam dan berlangsung agak lama disebut dengan depresi (depression) ditandai dengan pertumbuhan ekonomi negatif, sektor-sektor ekonomi banyak yang tutup dan pengangguran merajalela. Situasi ekonomi dimana banyak pengangguran (stagnasi) dan diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi disebut dengan stagflasi. Dalam situasi yang sulit ini dibutuhkan kesadaran kolektif dari dunia usaha dan birokrat untuk terus melakukan langkah-langkah efisiensi disamping berusaha mencari peluang-peluang ekonomi baru agar perekonomian kembali bangkit.

## **12.2. Kesenjangan Deflasi dan Kesenjangan Inflasi**

Penawaran barang dan jasa menunjukkan kemampuan suatu perekonomian dalam menggunakan kapasitas produksinya. Jika suatu perekonomian mampu memanfaatkan semua kapasitas ekonomi secara optimal untuk menghasilkan barang dan jasa, maka dikatakan perekonomian tersebut mencapai suatu kesempatan produksi yang penuh (full employment). Jika perekonomian tidak mampu memanfaatkan kapasitas produksinya secara penuh maka dikatakan mengalami under employment.

Pada sisi lain perekonomian mengalami kondisi keseimbangan (equilibrium) jika adanya kesamaan antara sisi permintaan agregat dengan penawaran agregat. Permintaan aggregate ditentukan oleh komponen pembentuknya yaitu  $C + I + G + (X - M)$ . Kondisi perekonomian mungkin tidak mengalami keseimbangan yaitu sisi penawaran agregat tidak sama dengan sisi permintaan agregat. Kondisi perekonomian yang ideal yaitu manakala perekonomian mengalami keseimbangan dalam pengerjaan penuh (full employment) meskipun kondisi ini sangat sulit diwujudkan. Kondisi yang seringkali dihadapi perekonomian yaitu ketidakseimbangan ekonomi antara kondisi keseimbangan ekonomi

(*equilibrium*) dengan kondisi pengerjaan penuh kapasitas ekonomi (*full employment income*). Jika kondisi keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) lebih besar dari pada full employment, maka dikatakan perekonomian menghadapi masalah **gap inflasi (inflationary gap)**. Dan sebaliknya jika kondisi keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) lebih kecil dari pada full employment income, maka dikatakan perekonomian mengalami **gap deflasi (deflationary gap)**. Gambaran tentang kondisi perekonomian sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada gambar kurva berikut :



Gambar di atas menjelaskan pendapatan nasional keseimbangan terjadi di titik E (*equilibrium*) dimana aggregate demand sama dengan pemanfaatan kapasitas produksi secara optimal. Jika pendapatan nasional keseimbangan turun menjadi  $Y_1$ , maka terjadi ketidakseimbangan antara permintaan aggregate dengan penawaran aggregate. Besarnya permintaan agregat sebesar  $Y_1-A$  sedangkan penawaran aggregate sebesar  $Y_1-B$ , jadi terjadi kesenjangan inflasi (*inflationary gap*) sebesar  $A-B$  karena permintaan agregate lebih besar daripada penawaran aggregate. Keadaan ini menyebabkan timbulnya kelangkaan barang di masyarakat sehingga harga-harga barang akan meningkat (*inflasi*). Kondisi ini akan

mendorong dunia usaha untuk meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang cukup tinggi sehingga pendapatan nasional keseimbangan akan terdorong meningkat menuju titik E dimana  $Y_{Eq} = Y_{FE}$ .

Sebaliknya pada saat pendapatan nasional keseimbangan sebesar  $Y_2$ , maka terjadi ketidakseimbangan antara permintaan agregate dengan penawaran agregate. Besarnya permintaan agregate sebesar  $Y_2 - D$  sedangkan penawaran agregate sebesar  $Y_2 - C$  sehingga menimbulkan permasalahan gap deflasi (deflationary gap) sebesar  $C - D$  yang menyebabkan harga-harga barang mengalami penurunan (deflasi). Kondisi ekonomi mendorong permintaan agregate meningkat sehingga akan tercapai keseimbangan pasar yang baru di titik C dimana kapasitas produksi nasional terpenuhi semua (full employment) sehingga akan tercapai keadaan  $Y_{Eq} = Y_{FE}$ .

### **Multiplier dan Analisis Gap Ekonomi**

Untuk mengatasi permasalahan gap inflasi dan gap deflasi memerlukan kerjasama antara pelaku ekonomi di dunia usaha, masyarakat dan pemerintah untuk memahami permasalahan yang ada dan mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat mengatasi masalah secara baik. Sebagai contoh misalnya perekonomian menghadapi persoalan gap inflasi, maka kontribusi rumah tangga konsumen yaitu dengan mengurangi belanja barang dan mengalihkan anggarannya untuk kepentingan yang esensial dan kemudian uangnya ditabung jika ada kelebihan. Kontribusi dunia usaha dengan terus melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi produksi untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan kualitas yang semakin baik dan jumlah yang mencukupi permintaan pasar. Kontribusi pemerintah dengan merumuskan kebijakan ekonomi dan meningkatkan efisiensi serta kebijakan ekspansif baik dibidang anggaran (kebijakan fiskal) dengan mengalokasikan dana untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang potensial dan sekaligus juga mengurangi beban anggaran yang kurang penting untuk lebih dialokasikan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat luas.

#### *Analisis Gap Ekonomi pada Perekonomian 2 Sektor*

Untuk lebih menjelaskan bagaimana aplikasi ekonomi dalam menyelesaikan permasalahan gap ekonomi tersebut, maka dapat diungkapkan dalam suatu contoh pada perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana sebagai berikut :

Konsumsi otonom	= Rp 7 trilyun
Marginal propensity to consume	= 0,65
Investasi	= Rp. 4 trilyun
Y full employment	= Rp. 10 trilyun

*Pertanyaan :*

6. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) !
7. Kesenjangan ekonomi apa yang terjadi ?
8. Dan berapa besarnya kesenjangan tersebut ?
9. Bagaimana mengatasi kesenjangan tersebut ?
10. Gambarkan dan jelaskan !

*Jawab :*

6. Pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian 2 sektor dapat ditentukan sebagai berikut :

$$Y = C + I$$

$$C = C_0 + b Y$$

$$C = 4 + 0,65 Y$$

$$Y = 4 + 0,65 Y + 4$$

$$Y = 8 + 0,65 Y$$

$$Y - 0,65 Y = 8$$

$$0,35 Y = 4$$

$$Y = 11,428$$

Jadi pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 11,428 trilyun

7. Karena pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 11,428 trilyun > pendapatan full employment sebesar ( $Y_{FE}$ ) sebesar Rp. 10 trilyun, maka perekonomian mengalami masalah gap inflasi (inflationary gap).
8. Besarnya gap inflasi (inflationary gap) dapat ditentukan sebagai berikut :

$$C + I = AD = 8 + 0,65 Y$$

$$C + I = AD = 8 + 0,65 (10)$$

$$C + I = AD = 14,5$$

Jadi besarnya gap inflasi (inflationary gap) sebesar  $14,5 - 10 = 4,5$

9. Mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 4,5 trilyun dengan mengurangi tensi ekonomi melalui alternatif kebijakan mengurangi investasi sebagai berikut :

$$\text{Multiplier investasi} = k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{(1-b)} = \frac{1}{1-0,65} = \frac{1}{0,35} = 2,85$$

$$\Delta Y = 11,428 - 10 = 1,428$$

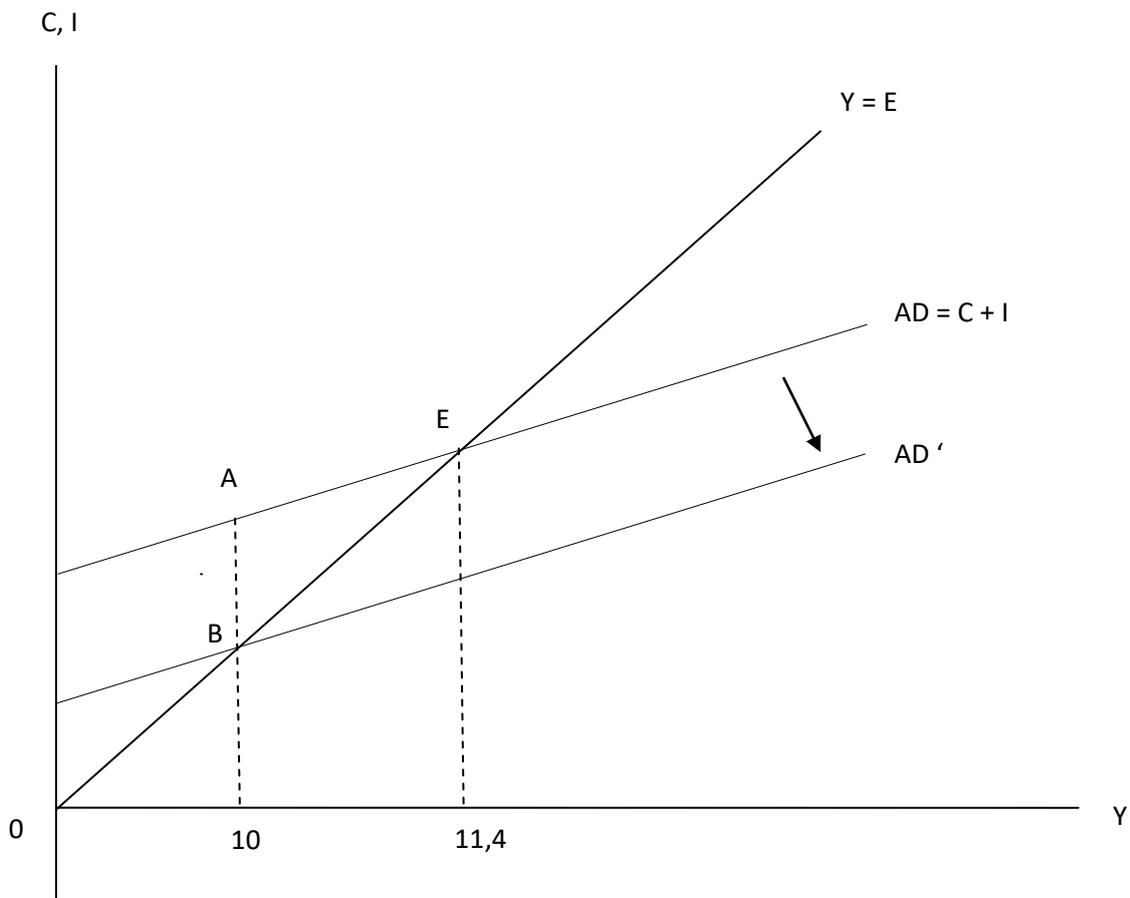
Sehingga besarnya investasi yang harus dikurangi sebesar :

$$k_I = \frac{1,428}{\Delta I} = 2,85$$

$$\Delta I = \frac{1,428}{2,85} = 0,5$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 4,5 triliun dapat dilakukan dengan mengurangi investasi sebesar Rp. 0,5 triliun.

10. Gambar kurva dari permasalahan gap inflasi dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebagai berikut :



#### *Analisis Gap Ekonomi pada Perekonomian 3 Sektor*

Misalnya diketahui kondisi perekonomian 3 Sektor atau perekonomian dengan kebijakan fiskal sebagai berikut :

Konsumsi otonom	= Rp 12 triliun
Marginal propensity to consume	= 0,72
Investasi	= Rp. 5 triliun
Belanja pemerintah	= Rp. 3 triliun
Pajak	= 2 + 0,15 Y

Subsidi = Rp. 3,5 trilyun

Y full employment = Rp. 60 trilyun

*Pertanyaan :*

5. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) !
6. Kesenjangan ekonomi apa yang terjadi ? Dan berapa besarnya kesenjangan tersebut ?
7. Bagaimana mengatasi kesenjangan tersebut ?
8. Gambarkan dan jelaskan !

*Jawab :*

6. Pendapatan nasional keseimbangan dapat ditentukan dengan merumuskan formulasi sebagai berikut :

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$= Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (2 + 0,15 Y) + 3,5$$

$$Y_d = Y - 2 - 0,15 Y + 3,5$$

$$Y_d = 0,85 Y + 1,5$$

$$C = 12 + 0,7 (1,5 + 0,85 Y)$$

$$C = 12 + 1,05 + 0,595 Y$$

$$C = 13,05 + 0,595 Y$$

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 13,05 + 0,595 Y + 5 + 3$$

$$Y = 21,05 + 0,595 Y$$

$$Y - 0,595 Y = 21,05$$

$$0,405 Y = 21,05$$

$$Y = 51,98$$

Jadi besarnya pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 51,98 trilyun

7. Karena pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 51,98 trilyun < pendapatan full employment sebesar ( $Y_{FE}$ ) sebesar Rp. 60 trilyun, maka perekonomian mengalami masalah gap deflasi (deflationary gap).
8. Besarnya gap deflasi (deflationary gap) dapat ditentukan sebagai berikut :

$$C + I + G = AD = 21,05 + 0,595 Y$$

$$C + I + G = AD = 21,05 + 0,595 (60)$$

$$C + I + G = AD = 21,05 + 35,7 = 56,75$$

Jadi besarnya gap deflasi (deflationary gap) sebesar  $60 - 56,75 = \text{Rp. } 3,25$  trilyun

9. Mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 triliun dengan menaikkan tensi ekonomi melalui alternatif kebijakan :

- e. Menaikkan investasi
- f. Mengurangi pajak
- g. Menaikkan belanja pemerintah
- h. Menambah subsidi

(e) Mengatasi gap deflasi dengan menaikkan investasi sebagai berikut :

$$\text{Multiplier investasi} = k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{(1-b+b.t)} = \frac{1}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)} = \frac{1}{0,388} = 2,57$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya investasi yang harus ditambah sebesar :

$$k_I = \frac{8,02}{\Delta I} = 2,57$$
$$\Delta I = \frac{8,02}{2,57} = 3,12$$

Jadi untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 triliun dapat dilakukan dengan menaikkan investasi sebesar Rp. 3,12 triliun.

(f) Mengatasi gap deflasi dengan menurunkan pajak sebagai berikut :

$$\text{Multiplier pajak} = k_{Tx} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tx} = \frac{-b}{(1-b+b.t)} = \frac{-0,72}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)} = \frac{-0,72}{0,388} = -1,85$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya pajak yang harus dikurangi sebesar :

$$k_{Tx} = \frac{8,02}{\Delta Tx} = -1,85$$
$$\Delta Tx = \frac{8,02}{-1,85} = -4,33$$

Jadi untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 triliun dapat dilakukan dengan menurunkan pajak sebesar Rp. 4,33 triliun.

(g) Mengatasi gap deflasi dengan menaikkan belanja pemerintah sebagai berikut :

Multiplier belanja pemerintah :

$$k_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1-b+b.t)} = \frac{1}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)} = \frac{1}{0,388} = 2,57$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya belanja pemerintah yang harus ditambah sebesar :

$$k_G = \frac{8,02}{\Delta G} = 2,57$$

$$\Delta G = \frac{8,02}{2,57} = 3,12$$

Jadi untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menaikkan belanja pemerintah sebesar Rp. 3,12 trilyun.

(h) Mengatasi gap deflasi dengan menaikkan subsidi sebagai berikut :

$$\text{Multiplier subsidi : } k_{Tr} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tr} = \frac{b}{(1-b+b.t)} = \frac{0,72}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)} = \frac{0,72}{0,388} = 1,85$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

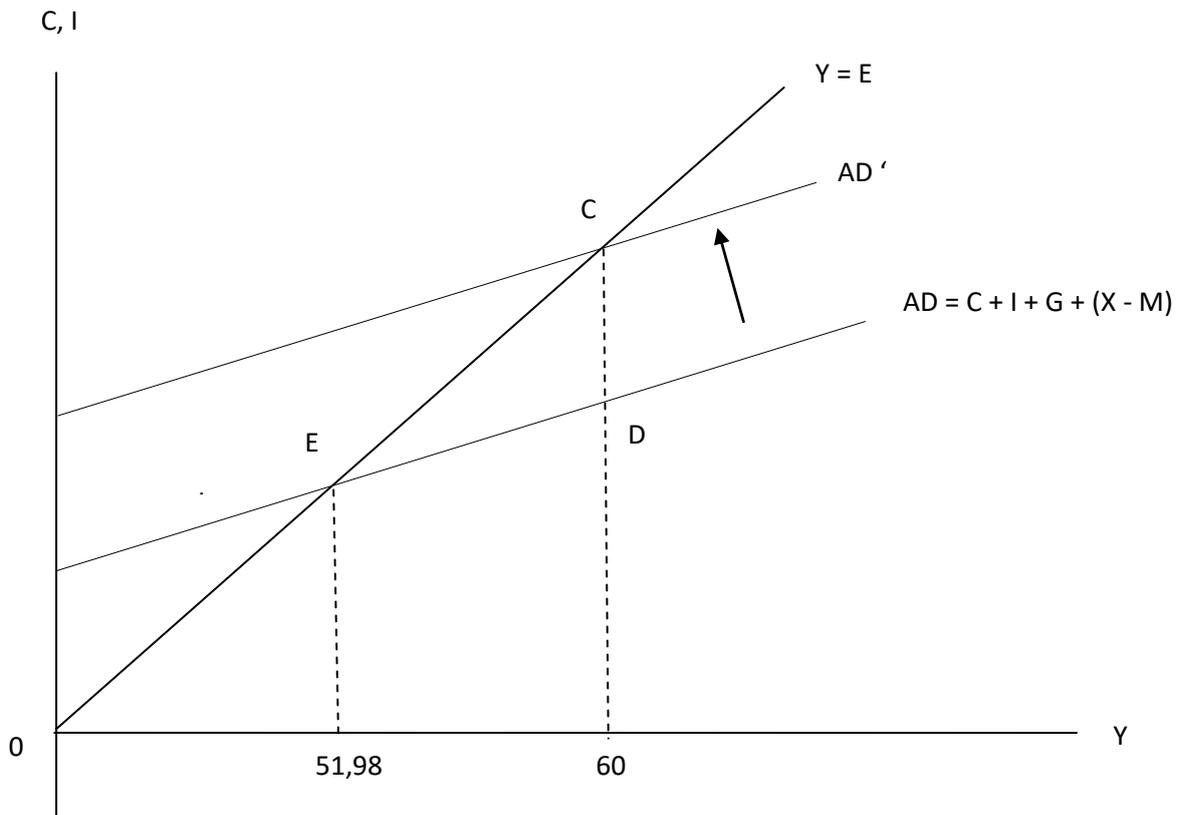
Sehingga besarnya subsidi yang harus ditambah sebesar :

$$k_{Tr} = \frac{8,02}{\Delta Tr} = 1,85$$

$$\Delta Tr = \frac{8,02}{1,85} = 4,33$$

Jadi untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menaikkan subsidi sebesar Rp. 4,33 trilyun.

10. Gambar kurva dari permasalahan gap inflasi dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi gap deflasi (deflationary gap) sebagai berikut :



### *Analisis Gap Ekonomi pada Perekonomian 4 Sektor*

Misalnya diketahui kondisi perekonomian 4 Sektor atau perekonomian terbuka sebagai berikut :

Konsumsi otonom	= Rp 12 trilyun
Marginal propensity to consume	= 0,72
Investasi	= Rp. 5 trilyun
Belanja pemerintah	= Rp. 3 trilyun
Pajak	= 2 + 0,15 Y
Subsidi	= Rp. 4 trilyun
Ekspor	= Rp. 6 trilyun
Impor	= 5 + 0,03 Y
Y full employment	= Rp. 50 trilyun

*Pertanyaan :*

6. Tentukan pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) !
7. Kesenjangan ekonomi apa yang terjadi ?
8. Dan berapa besarnya kesenjangan tersebut ?
9. Bagaimana mengatasi kesenjangan tersebut ?
10. Gambarkan dan jelaskan !

*Jawab :*

7. Pendapatan nasional keseimbangan dapat ditentukan dengan merumuskan formulasi sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$= Y - T_x + T_r$$

$$Y_d = Y - (2 + 0,15 Y) + 4$$

$$Y_d = Y - 3 - 0,15 Y + 4$$

$$Y_d = 0,85 Y + 1$$

$$C = 12 + 0,72 (1 + 0,85 Y)$$

$$C = 12 + 0,72 + 0,612 Y$$

$$C = 12,72 + 0,612 Y$$

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = 12,72 + 0,612 Y + 5 + 3 + [6 - (5 + 0,03 Y)]$$

$$Y = 12,72 + 0,612 Y + 8 + (6 - 5 - 0,03 Y)$$

$$Y = 12,72 + 0,612 Y + 8 + 1 - 0,03 Y$$

$$Y = 21,72 + 0,609 Y$$

$$Y - 0,609 Y = 21,72$$

$$0,391 Y = 21,72$$

$$Y = 55,55$$

Jadi pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 55,55 trilyun

8. Karena pendapatan nasional keseimbangan ( $Y_{Eq}$ ) sebesar Rp. 55,55 trilyun > pendapatan full employment sebesar ( $Y_{FE}$ ) sebesar Rp. 50 trilyun, maka perekonomian mengalami masalah gap inflasi (inflationary gap).

9. Besarnya gap inflasi (inflationary gap) dapat ditentukan sebagai berikut :

$$C + I + G + (X - M) = AD = 21,72 + 0,609 Y$$

$$C + I + G + (X - M) = AD = 21,72 + 0,609 (50)$$

$$C + I + G + (X - M) = AD = 21,72 + 30,45 = 52,17$$

Jadi besarnya gap inflasi (inflationary gap) sebesar  $52,17 - 50 = \text{Rp. } 2,17$  trilyun

10. Mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 2,17 trilyun dengan menurunkan tensi ekonomi melalui alternatif kebijakan :

- e. Menurunkan investasi
- f. Meningkatkan pajak
- g. Menurunkan belanja negara
- h. Mengurangi subsidi

- (e) Mengatasi gap inflasi dengan menurunkan investasi sebagai berikut :

Multiplier investasi =

$$k_I = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{(1 - b + b.t + m)} = \frac{1}{1 - 0,72 + (0,72 \times 0,15) + 0,03} = \frac{1}{0,418} = 2,39$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya investasi yang harus dikurangi sebesar :

$$k_I = \frac{8,02}{\Delta I} = 2,39$$

$$\Delta I = \frac{8,02}{2,39} = 3,35$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menurunkan investasi sebesar Rp. 3,35 trilyun.

- (f) Mengatasi gap inflasi dengan menaikkan pajak sebagai berikut :

Multiplier pajak =

$$k_{Tx} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tx} = \frac{-b}{(1-b+b.t+m)} = \frac{-0,72}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)+0,03} = \frac{-0,72}{0,418} = 1,722$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya investasi yang harus dikurangi sebesar :

$$k_i = \frac{8,02}{\Delta I} = 1,722$$

$$\Delta I = \frac{8,02}{1,722} = 4,65$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menaikkan pajak sebesar Rp. 4,65 trilyun.

(g) Mengatasi gap inflasi dengan menurunkan belanja negara sebagai berikut :

Multiplier belanja negara =

$$k_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{(1-b+b.t+m)} = \frac{1}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)+0,03} = \frac{1}{0,418} = 2,39$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

Sehingga besarnya belanja negara yang harus dikurangi sebesar :

$$k_G = \frac{8,02}{\Delta G} = 2,39$$

$$\Delta G = \frac{8,02}{2,39} = 3,35$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan mengurangi belanja negara sebesar Rp. 3,35 trilyun.

(h) Mengatasi gap inflasi dengan mengurangi subsidi sebagai berikut :

Multiplier subsidi =

$$k_{Tr} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tr} = \frac{b}{(1-b+b.t+m)} = \frac{0,72}{1-0,72+(0,72 \times 0,15)+0,03} = \frac{0,721}{0,418} = 1,72$$

$$\Delta Y = 51,98 - 60 = 8,02$$

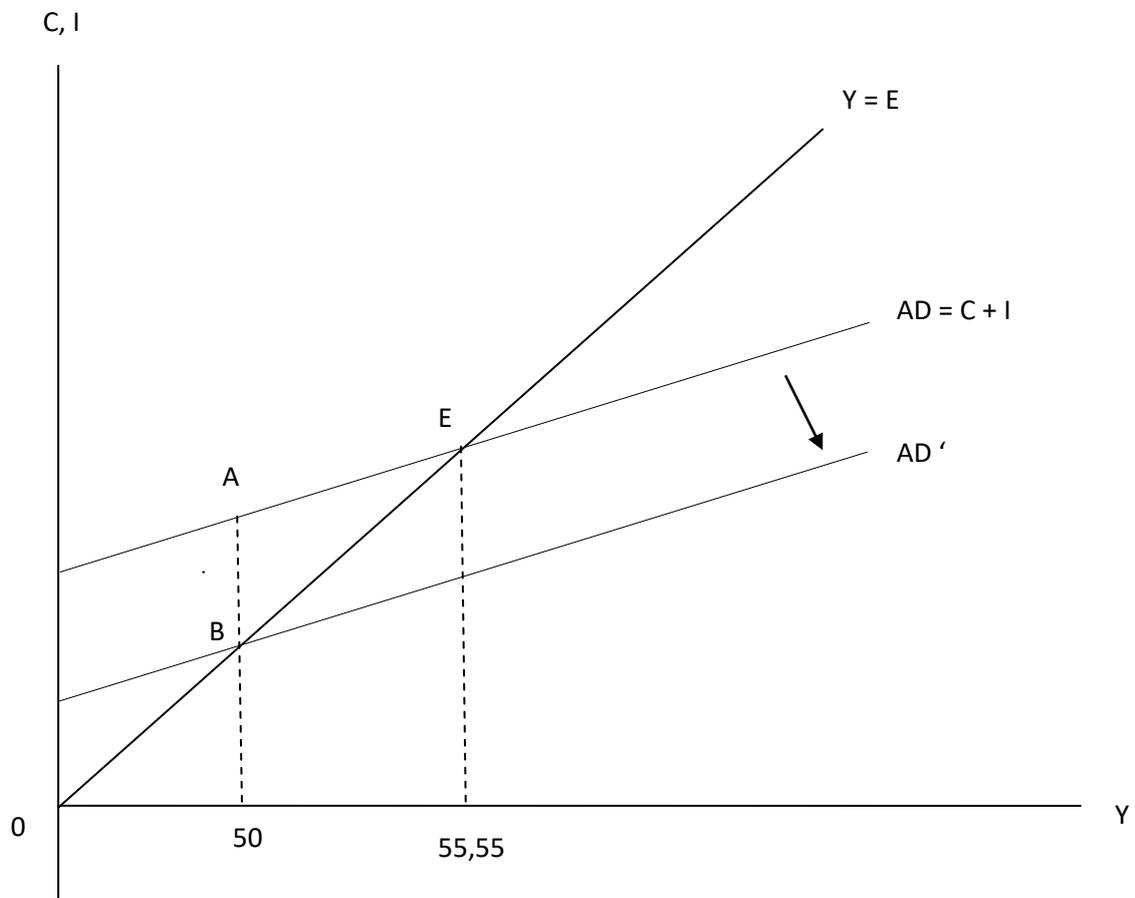
Sehingga besarnya subsidi yang harus dikurangi sebesar :

$$k_{Tr} = \frac{8,02}{\Delta Tr} = 1,72$$

$$\Delta Tr = \frac{8,02}{1,72} = 4,66$$

Jadi untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebesar Rp. 3,25 trilyun dapat dilakukan dengan menurunkan subsidi sebesar Rp. 4,66 trilyun.

11. Gambar kurva dari permasalahan gap inflasi dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi gap inflasi (inflationary gap) sebagai berikut :



## REFERENSI

Abul Hasan M Sadeq, et-al, *Readings in Islamic Economic Thought*, Longman Malaysia, Selangor, 1992

Adiwarman A. Karim, *Islamic Microeconomics*, first edition, Muamalat Institute, Jakarta, 2000

-----, *Ekonomi Makro Islami*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

-----, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

-----, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, IIIT, 2001

Ahmad, Shaikh Mahmud, *Economics of Islam, Lahore: Ashraf Publication, Edisi II, 1968*

Ahmed K, *Economic Development in an Islamic Framework*, in studies in *Islamic Economies*, ed. K Ahmed, Leicester, 1980

Arnold Roger A, *Macroeconomics*, 6<sup>th</sup> edition, Thomson South-Western, 2004

Ausaf Ahmad, et-al, *Lectures on Islamic Economics*, Islamic Development Bank, Jeddah, 1987

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1995

Basyir, Ahmad Asyhar, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 1985

Brian Snowdon, Howard Vane and Peter Wynarczyk, *A Modern Guide to Macroeconomics An Introduction to Competing Schools of Thought*, Edward Elgar Publishing Ltd, Cambridge, 1995

Burton, Burton, 1997, *The Financial System and The Economy*, West Publishing Company, USA

Chamberlin, Edward H, *The Theory of Monopolistic Competition*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1933

Choudhury, Mashudul 'Alam, *Contributions to Islamic Economic Theory*, MacMillan, London, 1986

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003

Diulio, Eugene A, *Theory and Problems of Macroeconomics Theory*, McGraw-Hill, New York, 1974

Dornbusch, Rudiger, et-al, 2004, *Macroeconomics*, 8<sup>th</sup> edition, McGraw-Hill, New York

Guritno Mangkusubroto, et-al, *Teori Ekonomi Makro*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta, 1998

Habib Ahmed, *Money and Exchange Rate in an Islamic Economy*, International Islamic University Malaysia, 2002

Hasanuzzaman, *The Economic Functions of The Early Islamic State*, Karachi, International Publisher, 1981

Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Filosofi Teori dan Implementasi*, LPPI-UMY, Yogyakarta, 2006

-----, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, UPFE, Yogyakarta, 2008

-----, *Ekonomi Moneter, Indeks*, Jakarta, 2009

-----, *Ekonometrika Terapan*, UPFE, Yogyakarta, 2010

Iswardono Sarjonopermono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1991

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, volume 1 No. 2/2000, FE-UMY

Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik atas Persoalan Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

*Keynes, John Maynard, The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York: Harbinger Book , 1964

Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, UK, 1976

Mankiw, Gregory, *Macroeconomics*, 6<sup>th</sup> edition, Worth Publishers, New York, 2007

-----, *Principles of Economics*, Third Edition, South Wester Thomson Learning, Worth Publisher, New York, 2007

Masudul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory*, MacMillan, Hongkong, 1986

Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005

- Muhammad, et-al, *Bank Syariah Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta, 2006
- Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Lengkap*, 2012, Ghani Pressindo
- Moh. Rifai, *Pembina Pribadi Muslim*, CV Wicaksana, Semarang, 1989
- Muhammad Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- , 2001, *Monetary Management in Islamic Economic Study*, Leicester, The Islamic Foundation
- , *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- , *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- , *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- Munawar Iqbal, et-al, *Distributive Justice and Need Fulfilment in An Islamic Economy*, International Institute of Islamic Economics, Islamabad, 1986
- Mannan, MA, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1998
- Nopirin, 2000, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, BPFE, Yogyakarta
- Pentti JK Kouri, 1975, *Monetary Policy, The Balance of Payments and The Exchange Rate* dalam David Bigman and Teizo Taya, 1984, *Floating Exchange Rates and The State of World Trade and Payments*, Ballinger Publishing Company
- Qardhawi, Yusuf, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2002
- Rahman Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Lahore, Islamic Publications, 1975
- Robert J Gordon, 1993, *Macroeconomics*, HarperCollins College Publisher, New York
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah: *Some Aspects of the Islamic Economy*, Delhi, Markazi Maktaba Islami, 1972

Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro Analisis IS-LM dan AD-AS*, PT Liberty, Yogyakarta, 1983

Syafii Antonio. M, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001

-----, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institute dan Bank Indonesia, Jakarta, 1999

Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam Economics and Society*, Kegan Paul International, London, 1994

Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996

Thucker, Irvin, *Economics for Today*, Thomson South-Western, 2003

Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), Malaysia, 1996

-----, *Towards a Just Monetary System*, Leicester, U.K, The Islamic Foundation, 1992

Warren L Smith, "A Graphical Exposition of The Complete Keynesian System", dalam *Current Issues in Monetary Theory and Policy*, AHM Publishing Corp

Yahya Ben Adam, *Taxation in Islam*, Leiden, 1967

*Yusanto, Ismail, Islam Ideologi, Al-Izzah, Bangil, 1998*

Drs. Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2003

Zarqa, Muhammad A, *Social Welfare Function and Consumer Behaviour: An Islamic Formulation of Selected Issues*, in *Studies Economics*,

Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1987

## DAFTAR ISI

	Kata Pengantar Edisi Kedua .....	i
	Daftar Isi.....	ii
Bab I	Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam	1
	1.1. Masalah Ekonomi .....	1
	1.2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam .....	2
	1.3. Asumsi Dasar Ekonomi Islam .....	6
	1.4. Arti dan Hakekat Ekonomi Islam .....	9
	1.5. Paradigma Ekonomi Islam .....	13
	1.6. Model Ekonomi Islam .....	16
	1.7. Kebijakan Makroekonomi Islam .....	17
Bab II	Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro .....	24
	2.1. Definisi Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro .....	24
	2.2. Masalah Ekonomi Makro .....	24
	2.3. Model Ekonomi .....	25
	2.4. Model Ekonomi Islam .....	26
	2.5. Kebijakan Makroekonomi Islam .....	27
Bab III	Indikator Makro Ekonomi	30
	3.1. Indikator Makroekonomi	32
	3.2. Konsep Pendapatan Nasional	35
	3.3. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional	37
	3.4. Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional	38
Bab IV	Peranan Pemerintah dalam Perekonomian	41
	4.1. Siklus Ekonomi	42
	4.2. Indikator Keberhasilan Ekonomi	43
	4.3. Peran Pemerintah	45
	4.4. Konsep-konsep Dasar Makroekonomi	48
	4.5. Peran Pasar dalam Perekonomian	49
	4.6. Peran Pemerintah dalam Perekonomian	51
	4.7. Peran Negara dalam Ekonomi Islam	53
Bab V	Analisis Pendapatan Nasional .....	55
	5.1. Penentuan Pendapatan Nasional .....	56
	5.2. Faktor Produksi dan Fungsi Produksi .....	58
	5.3. Produksi Marginal Input Tenaga Kerja dan Modal.....	58
	5.4. Permintaan Input Tenaga Kerja dan Modal.....	60
	5.5. Distribusi Pendapatan Nasional .....	63
	5.6. Teorema Euler ( <i>Euler's Theorem</i> ) .....	64
	5.7. Perhitungan Pendapatan Nasional.....	65
	5.8. Fungsi Investasi .....	67

	5.9. Pengeluaran Pemerintah .....	69
	5.10. Fungsi Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat ....	70
	5.11. Permintaan dan Penawaran Modal .....	71
	5.12. Keseimbangan Pasar Uang dan Keseimbangan Makroekonomi .....	72
	5.13. <i>Crowding Out</i> dan Efek Kebijakan Fiskal .....	74
	5.14. Analisis Pendapatan Nasional pada Perekonomian Sederhana .....	76
Bab VI	Analisis Permintaan dan Penawaran Agregat.....	77
	6.1. Konsep Permintaan dan Penawaran Agregat .....	79
	6.2. Analisis AD-AS .....	80
	6.3. Penurunan Kurva IS-LM .....	83
	6.4. Keseimbangan IS-LM dan Penurunan AD .....	84
	6.5. Analisis Pendapatan Nasional Pada Perekonomian Dua Sektor .....	85
Bab VII	Analisis Pendapatan Nasional	86
	7.1. Analisis Pendapatan Nasional pada Perekonomian Dua Sektor	87
	7.2. Fungsi Konsumsi	88
	7.3. Penentuan Titik Impas ( <i>Break Event Point</i> )	89
	7.4. Hubungan MPC, MPS, APC dan APS	91
	7.5. Penentuan Pendapatan Nasional Keseimbangan pada Perekonomian 2 Sektor	93 95
	7.6. Perekonomian 3 Sektor (Perekonomian dengan Kebijakan fiskal) .....	96
	7.7. Pajak dan Implikasinya pada Perekonomian	98
	7.8. Perekonomian 4 Sektor (Perekonomian Terbuka)	99
Bab VIII	Angka Pengganda ( <i>Multiplier</i> )	101
	8.1. Pengertian Angka Pengganda ( <i>Multiplier</i> )	103
	8.2. Angka Pengganda Investasi ( <i>Investment Multiplier</i> )	105
	8.3. Angka Pengganda Konsumsi ( <i>Consumption Multiplier</i> )	106
	8.4. Angka Pengganda Pengeluaran Pemerintah ( <i>Government Expenditure Multiplier</i> )	108
	8.5. Angka Pengganda Pajak ( <i>Tax Multiplier</i> )	109
	8.6. Angka Pengganda Pembayaran Transfer ( <i>Transfer Payment Multiplier</i> )	111
	8.7. Angka Pengganda Anggaran Belanja Seimbang ( <i>Balanced Budget Multiplier</i> )	112
Bab IX	Angka Pengganda ( <i>Multiplier</i> ) dan Analisis Gap	114
	9.1. Kesenjangan ( <i>Gap</i> ) Ekonomi dan Siklus Ekonomi	117
	9.2. Kesenjangan Deflasi dan Kesenjangan Inflasi	119
	9.3. <i>Multiplier</i> dan Analisis Gap Ekonomi	121
Bab X	Uang dan Perekonomian .....	123
	10.1. Peran dan Fungsi Uang .....	125
	10.2. Kriteria Uang .....	127
	10.3. Fungsi dan Peranan Uang dalam Perekonomian .....	127
	10.4. Teori Kuantitas Uang .....	130
	10.5. Uang dan Pertumbuhan Ekonomi .....	132

	10.6. <i>Fisher Effect</i> .....	134
	10.7. Uang dan Inflasi .....	136
Bab XI	Kebijakan Moneter Islam	137
	11.1. Peran Uang dalam Perekonomian .....	138
	11.2. Perkembangan Pemikiran tentang Uang .....	140
	11.3. Uang dalam Islam .....	142
	11.4. Kebijakan Moneter Islam menurut Mas'udul Alam Choudhury .....	144 146
	11.5. Sistem Moneter Islami .....	148
	11.6. Mengapa Riba dilarang dalam Islam .....	148
Bab XII	Kebijakan Fiskal Islami	150
	12.1. Tujuan Kebijakan Fiskal .....	151
	12.2. Komponen Kebijakan Fiskal .....	153
	12.3. Pemerintah, Pasar dan Kebijakan Fiskal .....	154
	12.4. Persoalan Kemiskinan dan Peran Negara .....	156
	12.5. Kebijakan Mengatasi Kemiskinan .....	158
	12.6. Kebijakan Fiskal Islam dalam Mengatasi Kemiskinan ..	160
	12.7. Penerimaan Negara .....	162
	12.8. Pengeluaran Negar.....	164
Bab XIII	Pengangguran dan Inflasi	165
	13.1. Definisi Pengangguran .....	167
	13.2. Pengangguran dan Perekonomian .....	169
	13.3. Kebijakan Mengatasi Pengangguran dalam Islam .....	170
	13.4. Inflasi dan Kebijakan Pengendaliannya .....	173
Bab XIV	Konsumsi	175
	14.1. Pengertian Konsumsi .....	176
	14.2. Konsumsi dan Tabungan .....	178
	14.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi .....	1818
		0
	14.4. <i>Marginal Propensity to Consume (MPC)</i>	184
	14.5. Fungsi Konsumsi menurut John Maynard Keynes .....	187
	14.6. Fungsi Konsumsi menurut Simon Kuznet .....	190
	14.7. Fungsi Konsumsi menurut Hipotesa Siklus Hidup ( <i>Life Cycles Hypotesis</i> ) .....	195
	14.8. Fungsi Konsumsi dengan Hipotesa Pendapatan Permanen	197
	14.9. Fungsi Konsumsi dengan Hipotesa Pendapatan Relatif .	200
	14.10. Fungsi Konsumsi Islami	203

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, shahabat dan semua pengikutnya. Setelah melalui diskusi dan usaha yang panjang Alhamdulillah buku referensi dengan judul *Teori Ekonomi Makro Pendekatan Ekonomi Islam* dapat terbit. Buku ini menjadi menarik ketika melihat animo masyarakat semakin meningkat dalam mempelajari ekonomi Islam baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Terbitnya buku referensi *Teori Ekonomi Makro Pendekatan Ekonomi Islam* diharapkan dapat menambah khasanah pustaka tentang ekonomi Islam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman ekonomi Islam di kalangan praktisi dan akademisi ekonomi Islam di tanah air. Penulis sudah berusaha untuk mencoba menuangkan gagasan, ide, pemikiran dan pengalaman dalam suatu tulisan pada buku referensi *Teori Ekonomi Makro Pendekatan Ekonomi Islam* ini namun tetap saja pasti akan ditemukan banyak kekurangan baik dari sisi materi, format dan penyajiannya. Untuk itu penulis membuka diri untuk adanya masukan dan kritik atas materi buku referensi *Teori Ekonomi Makro Pendekatan Ekonomi Islam* ini untuk perbaikan ke depan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT saja kita niatkan karya ini kita persembahkan sebagai bagian ibadah untuk bekal di hari kiamat kelak.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Agustus 2016

Dr. Imamudin Yuliadi

JUDUL BUKU

**TEORI EKONOMI MAKRO**  
**Pendekatan Ekonomi Islam**

## DATA PENULIS

**Imamudin Yuliadi**, Dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY). Penulis meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1990, Gelar Magister Sains (M.Sc) diraih dari program pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2001 dan meraih gelar Doktor dari program pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) tahun 2006 dengan predikat *Cum laude*. Pernah mengikut berbagai kegiatan ilmiah baik sebagai peserta maupun pembicara dalam forum seminar nasional dan internasional. Jabatan struktural yang pernah dilakukan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan FEB UMY, Sekretaris program studi Ilmu Ekonomi FEB-UMY, Wakil Direktur Program Pascasarjana UMY dan Kepala program Studi Ilmu Ekonomi FEB UMY. Penulis juga asesor BAN PT dan reviewer penelitian DP2M Dikti Kemenristek. Penulis sebagai anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY dan Ikatan ahli Ekonomi Islam (IAEI). Bidang konsentrasi penulis teori ekonomi mikro dan makro, ekonomi Islam, Perekonomian Indonesia dan teori moneter. Buku yang sudah diterbitkan oleh penulis adalah :

1. Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan
2. Ekonomi Moneter
3. Ekonometrika Terapan
4. Ekonomi Islam Filosofi Teori dan Implementasi